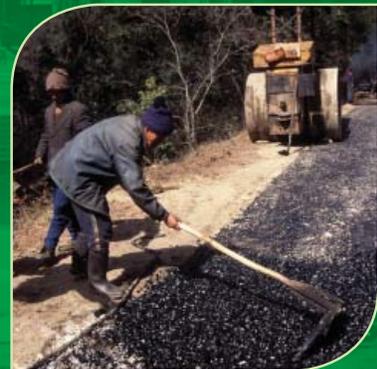


Analisis Keuangan Publik
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012

Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo



BANK DUNIA | THE WORLD BANK



Canadian International
Development Agency

Agence canadienne de
développement international





Laporan ini dicetak menggunakan
kertas daur ulang

KANTOR BANK DUNIA JAKARTA

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II, Lt. 12-13
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta – 12190
Telp. (+6221) 5299 3000
Faks (+6221) 5299 3111

Laporan ini dicetak pada Bulan Januari 2012

Foto pada halaman sampul merupakan Hak Cipta © Bank Dunia, sedangkan foto pada halaman dalam merupakan Hak Cipta © Bastian Zaini untuk halaman Ringkasan Eksekutif dan Bab IV, Hak Cipta © Bank Dunia untuk halaman Bab II, Bab III, Bab V, dan Bab VII, dan foto pada halaman Bab VI merupakan Hak Cipta © Governance and Decentralization Survey 2.

Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012. Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo merupakan kerjasama tim peneliti Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara, dan staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Dewan Eksekutif Bank Dunia, maupun pemerintah yang mereka wakili.

Bank Dunia tidak menjamin keakuratan data yang terdapat dalam laporan ini. Batasan, warna, angka, dan informasi lain yang tercantum pada tiap peta dalam laporan ini tidak mencerminkan penilaian Bank Dunia tentang status hukum suatu wilayah atau merupakan bentuk pengakuan dan penerimaan atas batasan tersebut.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silahkan hubungi Bastian Zaini (bzaini@worldbank.org).

Analisis Keuangan Publik
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012

Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo

Ucapan Terimakasih

Kajian ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo (LEMLIT UNHALU), dan Bank Dunia dengan dukungan dari CIDA dan AusAID. Penyusunan laporan dilaksanakan oleh Tim Peneliti dari LEMLIT-UNHALU dan Tim Bank Dunia. Tim Peneliti dari LEMLIT UNHALU dipimpin oleh Akhmad Firman bersama Muhammad Syarif, Laode Syaefuddin, Nasrullah Dali, Yani Balaka, Manat Rahim, Moh. Amin, Tajuddin, Ulfa Matoka, Armawaddin, Sabri, Alisyah, Aris Badara. Tim dari Bank Dunia dipimpin oleh Ihsan Haerudin bersama Indira Maulani Hapsari, Bastian Zaini, dan Chandra Sugarda. Tim dari Universitas Haluoleo menyiapkan latar belakang laporan, melaksanakan pengumpulan data, melaksanakan survei kapasitas PKD, serta analisis awal, sementara Tim dari Bank Dunia memberikan asistensi teknis serta penulisan tahap akhir.

Penyusunan laporan ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dan komitmen yang kuat dari *Program Management Committee* (PMC) program PEACH di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tim penyusun laporan mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. H. Muhammad Nasir A. Baso, MM (Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua PMC), Bapak Muhammad Faisal, SE, MSi (Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara/Sekretaris Pelaksana PMC program PEACH), dan Bapak La Ode Muh. Ali Said, SE. MSi. (Kasubid Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Kelautan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara) yang telah memberikan dukungan pengarahan maupun teknis koordinasi pada rangkaian kegiatan terkait penyusunan laporan ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dra Hj. Isma Labuku, M.Si. (Kepala Biro Keuangan Sulawesi Tenggara), dan Ibu Hj. Fauziah A. Rachman, SE, M.Si. (Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Daerah Bawahan) atas dukungan data-data fiskal daerah di Sulawesi Tenggara. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Dr. Ir. H. I Gusti R. Sadimantara, M.Agr. (Ketua LEMLIT-UNHALU) serta staf yang telah mendukung lancarnya koordinasi dan kerjasama penelitian. Apresiasi perlu kami sampaikan kepada Wawan Darmawan, Laode Salimin, Halifa, Fitri Lapau, Susriyanti, dan Intan Mekuo yang telah membantu tim peneliti dalam penyusunan database fiskal daerah di Sulawesi Tenggara. Ucapan terimakasih juga patut disampaikan kepada seluruh anggota PMC, unsur SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta stakeholder lainnya yang telah membantu ketersediaan data serta masukan yang berharga pada rangkaian lokakarya penyusunan draft laporan ini

Kegiatan penyusunan laporan ini secara keseluruhan diarahkan oleh Gregorius D.V. Pattinasarany sebagai ekonom senior dan *task team leader* Unit *Regional Development* Bank Dunia. Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada rekan-rekan tim PEACH Bank Dunia lainnya, khusus Andhika Maulana, Dhani Nugroho, Diding Sakri, dan Guntur P. Soetiyono yang telah memberikan masukan yang berharga atas laporan; Jaclin E. Craig, Erryl Davy, dan Sarah Harmoun yang telah membantu dalam pengelolaan dan administrasi kegiatan; Muhammad Fadjar yang telah memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan di Kendari; serta Maulina Cahyaningrum yang telah membantu seluruh proses produksi laporan ini. Tak lupa, penghargaan kami sampaikan kepada Caroline Tupamahu, Luna Vidya, serta staf Yayasan BAKTI lainnya yang telah membantu kelancaran pelaksanaan program PEACH di Sulawesi Tenggara. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Syahrir Cole dari Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelatihan survei PKD untuk tim peneliti dari LEMLIT-UNHALU.

Kata Pengantar

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang berkembang di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan juga turun secara signifikan dalam 10 tahun terakhir dan tingkat pengangguran juga termasuk salah satu yang terendah di Indonesia. Dari sisi sumberdaya pemerintah daerah, belanja per kapita Sulawesi Tenggara juga telah meningkat 9 kali lipat dibanding sebelum desentralisasi, dan merupakan salah satu dari 10 provinsi dengan belanja pemerintah daerah per kapita tertinggi di Indonesia.

Namun Sulawesi Tenggara masih menghadapi sejumlah tantangan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara masih belum beranjak dari posisi ke-25 dalam 5 tahun terakhir. Meskipun PDRB tumbuh pesat, secara riil per kapita masih jauh dibawah angka rata-rata provinsi secara nasional. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara juga masih diatas tingkat kemiskinan nasional. Selain itu, belanja pemerintah daerah per kapita yang tinggi terus meningkat harus diiringi oleh peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang semakin terbuka, pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, perlu berupaya lebih keras dalam memanfaatkan sumber daya anggaran yang dimilikinya. Agenda dan program pembangunan harus lebih dipertajam, dan alokasi anggaran harus lebih dioptimalkan untuk mencapai target-target pembangunan, terutama di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian.

Laporan ini merupakan upaya untuk membantu Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah; meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada data-data indikator pembangunan (*evidence based planning and budgeting*); dan dalam rangka mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun atas hasil kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Haluoleo, dan Bank Dunia yang didukung oleh CIDA dan AusAID. Bappeda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berperan penting dalam memfasilitasi seluruh proses pembuatan laporan ini.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan umumnya bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, pemerintah pusat, serta para *stakeholder* dan pemerhati keuangan dan pembangunan daerah. Akhirnya kami berharap laporan ini dapat berkontribusi pada upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pencapaian hasil-hasil pembangunan yang lebih baik.

H. Nur Alam, SE



Gubernur Sulawesi Tenggara

Stefan G. Koeberle



Kepala Perwakilan Bank Dunia Indonesia

Daftar Isi

Ucapan Terimakasih	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Istilah	xi
Ringkasan Eksekutif	1
Bab 1 Pendahuluan	11
1.1. Sejarah dan Konteks Administratif	12
1.2. Penduduk	14
1.3. Perekonomian	15
1.4. Sosial	20
1.5. Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Sosial	24
Bab 2 Pengelolaan Keuangan Daerah	25
2.1. Pendahuluan	26
2.2. Gambaran Umum Kapasitas PKD	26
2.3. Gambaran PKD Berdasarkan Bidang Strategis	27
2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	33
Bab 3 Pendapatan	37
3.1. Gambaran Umum Pendapatan Pemerintah Daerah	38
3.2. Pendapatan Asli daerah (PAD)	41
3.3. Dana Alokasi Umum (DAU)	43
3.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)	44
3.5. Dana Bagi Hasil (DBH)	46
3.6. Kesimpulan dan Rekomendasi	47
Bab 4 Belanja	49
4.1. Gambaran Umum Belanja Daerah	50
4.2. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi	52
4.3. Belanja Menurut Sektor	54
4.4. Belanja Program	57
4.5. Anggaran Versus Realisasi	59
4.6. Manajemen Belanja dan Pembiayaan	60
4.7. Hubungan Belanja dan Gender	61
4.8. Kesimpulan dan Rekomendasi	63

Bab 5 Analisis Sektor Strategis	65
5.1. Sektor Kesehatan	66
5.2. Sektor Pendidikan	77
5.3. Sektor Infrastruktur	90
5.4. Sektor Pertanian	97
Bab 6 Block Grant Desa	107
6.1. Pendahuluan	108
6.2. Gambaran Umum Belanja Transfer Pemerintah Provinsi	108
6.3. Rencana dan Realisasi Belanja <i>Block Grant</i> ke Desa	109
6.4. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang Program <i>Block Grant</i>	111
6.5. Keterlibatan Masyarakat dalam Program <i>Block Grant</i> .	112
6.6. Manfaat dan Kesesuaian Program <i>Block Grant</i> dengan Kebutuhan Masyarakat	114
6.7. Kesimpulan dan Rekomendasi	115
Bab 7 Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	117
7.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	118
7.2. Isu Kelembagaan Gender	121
7.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	122
Daftar Pustaka	124
Lampiran	125
Lampiran A. Apakah yang Dimaksud Dengan Analisis Belanja Pemerintah Sulawesi Tenggara?	125
Lampiran B. Catatan Metodologi	126
Lampiran C. Rekapitulasi Isu Utama, Rekomendasi, dan Agenda	128
Lampiran D. Budget Master Tabel Semua Angka Dalam Master Tabel Merupakan Angka Riil (2009=100)	138
Lampiran E. Indikator-Indikator Gender	150

Daftar Gambar

Gambar 1.	Sulawesi Tenggara Merupakan Salah Satu Provinsi Berkembang di Indonesia	2
Gambar 1.1.	Sulawesi Tenggara Terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi	12
Gambar 1.2.	Terjadi Pemekaran Wilayah yang Sangat Pesat Setelah Desentralisasi	13
Gambar 1.3.	PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara Masih Rendah Dibanding Provinsi Lama di Pulau Sulawesi	15
Gambar 1.4.	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Cukup Pesat dalam 5 Tahun Terakhir	16
Gambar 1.5.	Sektor Tersier Menjadi Kontributor Tertinggi Perekonomian Sultra dalam 3 Tahun Terakhir	16
Gambar 1.6.	Pertanian Masih Merupakan Kontributor Terbesar Perekonomian Sulawesi Tenggara	17
Gambar 1.7.	Lima Daerah di Sulawesi Tenggara Terkategori Maju dan Cepat Tumbuh	18
Gambar 1.8.	Sulawesi Tenggara Relatif Tidak Bermasalah dalam hal TPT Dibanding Provinsi Lain di Sulawesi	19
Gambar 1.9.	Kota Kendari merupakan Daerah dengan TPT tertinggi dan Didominasi oleh Perempuan	20
Gambar 1.10.	Walaupun Menurun Namun Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Tenggara Relatif Masih tinggi	20
Gambar 1.11.	Terjadi Penurunan Tingkat Kemiskinan di Seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara	21
Gambar 1.12.	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dikepalai Perempuan Justru Meningkat	22
Gambar 1.13.	Pencapaian Angka Kemiskinan dan PDRB VS Target RPJMD 2008-2013	23
Gambar 2.1.	Nilai Kapasitas PKD Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara	26
Gambar 2.2.	Kapasitas PKD Bidang Peraturan Perundangan Daerah	28
Gambar 2.3.	Kapasitas PKD Bidang Perencanaan & Penganggaran	29
Gambar 2.4.	Kapasitas PKD Bidang Pengelolaan Kas	30
Gambar 2.5.	Kapasitas PKD Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	30
Gambar 2.7.	Kapasitas PKD Bidang Pengawasan Intern	31
Gambar 2.8.	Kapasitas PKD Bidang Pengelolaan Hutang, Hibah dan Investasi Publik	32
Gambar 2.9.	Kapasitas PKD Bidang Pengelolaan Aset	32
Gambar 2.10.	Kapasitas PKD Bidang Audit dan Pengawasan Eksternal	33
Gambar 3.1.	Pada Tahun 2010, Pendapatan Pemerintah Daerah Perkapita Sulawesi Tenggara Sudah Diatas Rata-Rata Nasional	38
Gambar 3.2.	Pendapatan Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara Meningkat Secara Konsisten	39
Gambar 3.3.	Sejak tahun 2009, Porsi Dana Perimbangan dari Pusat Mengalami Penurunan	39
Gambar 3.4.	Kapasitas Fiskal Sulawesi Tenggara Cukup Beragam	40
Gambar 3.5.	Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tenggara cukup berfluktuasi selama 2007 – 2011	41
Gambar 3.6.	Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2007-2011	42
Gambar 3.7.	Kapasitas Mobiliasi PAD di Sulawesi Tenggara Sudah Lebih Baik dari Rata-Rata Nasional, Namun Kapasitas Masing-Masing Kabupaten/Kota Masih Bervariasi	43
Gambar 3.8.	PAD Bersih (PAD dikurangi Belanja Ke Daerah Bawahan) Sulawesi Tenggara juga Meningkat	43
Gambar 3.9.	DAU Sulawesi Tenggara Selama 2007-2011 Cukup Fluktuatif	43
Gambar 3.10.	DAU Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara tahun 2009 Cukup Timbang	44
Gambar 3.11.	Hampir seluruh DAK Sulawesi Tenggara Selama 2007-2011 Dialokasikan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota	44
Gambar 3.12.	Pada Tahun 2009, DAK Perkapita Kabupaten/Kota Cukup Timbang	45
Gambar 3.13.	Pada tahun 2009, DAK Sulawesi Tenggara dialokasikan pada Sektor Pendidikan	45
Gambar 3.14.	Dana Bagi Hasil Sulawesi Tenggara Selama 2007-2011 Menunjukkan Penurunan	46
Gambar 3.15.	Produksi Bruto Pertambangan Non-Migas Sulawesi Tenggara Cenderung Meningkat, Sementara Dana Bagi Hasil SDA Sulawesi Tenggara Cenderung Menurun	46
Gambar 4.1.	Belanja Daerah Sulawesi Tenggara Mengalami Peningkatan Selama 2007-2011	50
Gambar 4.2.	Belanja Daerah per Kapita Provinsi di Indonesia Tahun 2010 Cukup Beragam	51
Gambar 4.3.	Belanja Per Kapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara tahun 2009 cukup timbang	51
Gambar 4.4.	Belanja Perkapita Kabupaten Pemekaran dan nonpemekaran tahun 2009	52

Gambar 4.5.	Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara berdasarkan Klasifikasi Ekonomi mengalami Peningkatan	53
Gambar 4.6.	Porsi Belanja Daerah Provinsi didominasi oleh Belanja Lain-Lain sementara Porsi Belanja Daerah Kabupaten/Kota didominasi oleh belanja Pegawai	54
Gambar 4.7.	Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara sebagian besar digunakan untuk sektor Administrasi Umum	55
Gambar 4.8.	Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh Belanja untuk Program Pembangunan	58
Gambar 4.9.	Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/kota Sulawesi Tenggara juga didominasi oleh Belanja untuk Program Pembangunan	59
Gambar 4.10.	Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara, 2007-2010	59
Gambar 4.12.	Sebagian Besar Anggaran Pemerintah Dihabiskan Pada Bulan November dan Desember	60
Gambar 4.11.	Surplus dan Defisit Anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara	60
Gambar 4.13.	Belanja Program Urusan PP&PA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2007 – 2011	61
Gambar 4.14.	Belanja Program Urusan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2007 - 2011	62
Gambar 4.15.	Klasifikasi Belanja Program Urusan PP&PA dan Keluarga Berencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara 2007 – 2011	63
Gambar 5.1.	Ketergantungan Belanja Kesehatan di Sulawesi Tenggara terhadap Dana Dekon/TP Menurun	66
Gambar 5.2.	Pada Tingkat Provinsi, Peningkatan Signifikan Terjadi Pada Komponen Modal, Sementara di Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Terjadi pada Komponen Belanja Gaji Pegawai	67
Gambar 5.3.	Belanja Langsung Sektor Kesehatan Provinsi untuk Belanja Penyediaan Rumah Sakit Tahun 2011	68
Gambar 5.4.	Alokasi Kedua Terbesar Belanja Langsung Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Puskesmas	68
Gambar 5.5.	Kota Bau-Bau Memiliki Proporsi Belanja Kesehatan Tertinggi di Sulawesi Tenggara, 2009	69
Gambar 5.6.	Kota Bau-Bau Memiliki Rasio Dokter Per 100 Ribu Penduduk Tertinggi, Sementara Kabupaten Buton Utara Memiliki Rasio Bidan Per 100 Ribu Penduduk Tertinggi 2010	71
Gambar 5.7.	Cakupan Jaminan Kesehatan Gratis Cukup Tinggi, Namun Pemanfaatan Fasilitas Masih Rendah	71
Gambar 5.8.	Indeks AHH Sulawesi Tenggara Masih Dibawah Indeks Nasional dan Provinsi Lama di Sulawesi	73
Gambar 5.9.	Kinerja Pembangunan Kesehatan Ibu dan Anak Belum Menggembirakan Pada Tahun 2010	73
Gambar 5.10.	Kasus Kematian Ibu Menurun di Semua Kabupaten/Kota kecuali Kolaka Utara dan Kolaka	74
Gambar 5.11.	Angka Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan di Sulawesi Tenggara masih Sangat Rendah, 2010	75
Gambar 5.12.	Kesenjangan Angka Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan antar Daerah Masih Tinggi, 2010	75
Gambar 5.13.	Dibanding tahun 2005, Angka Kesakitan Penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2010 Memburuk	76
Gambar 5.14.	ISPA, Diare dan Malaria Merupakan Tiga Jenis Penyakit yang Umum Diderita Penduduk, 2010	76
Gambar 5.15.	Belanja Pendidikan di Sulawesi Tenggara Meningkatkan	78
Gambar 5.16.	Belanja Pendidikan Masih Sangat Bervariasi Diantara Kabupaten/Kota di Sultra, 2009	79
Gambar 5.17.	Pada Tingkat Provinsi Belanja Modal Sektor Pendidikan Semakin Menurun Tajam	80
Gambar 5.18.	Sebagian Besar Belanja Langsung Pendidikan Kabupaten/Kota untuk Wajib Belajar 9 Tahun	81
Gambar 5.19.	Ketimpangan Ketersediaan Kelas Masih Tinggi antar Kabupaten/Kota, TA 2009/2010	82
Gambar 5.20.	Sulawesi Tenggara Masih Memiliki Persentase Kelas Rusak Berat Yang Cukup Tinggi	83

Gambar 5.21. Rasio Siswa per Guru di Sulawesi Tenggara Sudah Memadai, Tapi Belum Merata, TA 2009/2010	83
Gambar.5.22. Persentase Guru Dengan Kualifikasi S1 atau Lebih pada Tingkat SD Masih Sangat Rendah, 2009	84
Gambar 5.23. Kenaikan Pengeluaran Pendidikan Tertinggi Terjadi Pada Kelompok RT Termiskin di Sultra, 2010	84
Gambar 5.24. Pengeluaran RT Untuk Pendidikan Kota Bau-Bau lebih dari 4 Kali Lipat Dibanding Bombana, 2010	85
Gambar 5.25. Sulawesi Tenggara Relatif Baik dalam hal Angka Rata-rata Lama Sekolah, Namun Masih Buruk dalam Hal Angka Melek Huruf.	85
Gambar 5.26. APS Usia Pendidikan Dasar di Sulawesi Tenggara Tergolong tinggi, 2010	86
Gambar 5.27. APM Sulawesi Tenggara Sudah Lebih Tinggi dari Nasional, Kecuali untuk SMP, 2010	87
Gambar 5.28. Angka Putus Sekolah pada Tingkat SMA masih Tinggi, dan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP ke SMA/SMK Masih Terendah di Sulawesi	88
Gambar 5.29. Belanja Infrastruktur Mengalami Penurunan dalam 2 Tahun terakhir.	90
Gambar 5.30. Lebih dari 75 Persen Belanja Infrastruktur untuk Belanja Modal	91
Gambar 5.31. Jalan Merupakan Prioritas Belanja Infrastruktur di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota	92
Gambar 5.32. Panjang Jalan Provinsi per 100 KM ² Luas Wilayah Masih Dibawah Rata-rata Nasional	93
Gambar 5.33. Jalan Provinsi Belum Mengalami Peningkatan Jalan Beraspal dan Jalan Berkondisi Baik	94
Gambar 5.34. Cakupan Irigasi Teknis Meningkatkan, Namun Luas Area Sawah Tadah Hujan Belum Berkurang	94
Gambar 5.35. Akses Rumah Tangga Terhadap Infrastruktur Dasar Perumahan Masih Diwarnai Kesenjangan	95
Gambar 5.36. Sebagian RT yang Dikepalai Perempuan Tidak Memiliki Akses terhadap Infrastruktur Dasar	95
Gambar 5.37. Peran Belanja Dekonsentrasi/TP Semakin Meningkatkan di Sektor Pertanian	98
Gambar 5.38. Proporsi Belanja Gaji Pegawai Meningkatkan, Sementara Proporsi Belanja Modal Menurun	99
Gambar 5.39. Dalam 5 Tahun terakhir Program Sektor Pertanian Lebih Fokus pada Peningkatan Produksi	99
Gambar 5.40. Produksi Sektor Pertanian Meningkatkan Namun dengan Pertumbuhan yang Melamban	101
Gambar 5.41. Nilai Produksi Bruto dan Produktivitas Pertanian Sulawesi Tenggara Masih Perlu Ditingkatkan	101
Gambar 5.42. Indeks NTP di Sulawesi Tenggara Sudah di Atas 100 Kecuali untuk Tanaman Pangan dan Peternak	102
Gambar 5.43. Perkembangan Produksi Sub-Sektor Perikanan Sangat Tergantung Pada Produksi Rumpun Laut	103
Gambar 5.44. Produktivitas Padi Meningkatkan Namun Masih Dibawah Produktivitas Padi Nasional	104
Gambar 5.45. Sapi Merupakan Komoditi Unggulan di Sub-sektor Peternakan di Sulawesi Tenggara	105
Gambar 6.1. Belanja Transfer Meningkatkan Baik Secara Nominal maupun Proporsional dalam 2 Tahun Terakhir	108
Gambar 6.2. Sampai Tahun 2010, Realisasi Program Block Grant ke Desa Belum Mencapai 50 persen	109
Gambar 6.3. Sebagian Besar Responden Mengetahui Program Block Grant	111
Gambar 6.4. Responden yang Memahami Dengan Benar Program Block Grant Cukup Tinggi	112
Gambar 6.5. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Lebih Baik Dibanding dalam Penyusunan Rencana	112
Gambar 6.7. Sebagian Besar Responden Memastikan Penyusunan Laporan Kegiatan Melibatkan LPM/BPD	113
Gambar 6.6. Sebagian Besar Pelaksanaan Kegiatan Block Grant Tidak Melibatkan Perempuan	113
Gambar 6.8. Sebagian Besar Responden Manjawab Program Bermanfaat, tapi Hanya Sebagian Kecil yang Dapat Memastikan Program Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dalam Arti Luas	114

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Sebagian Besar Penduduk Masih Tinggal di Daerah Induk	14
Tabel 1.2.	Sektor Pertanian Masih Menjadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Penting di Sulawesi Tenggara	18
Tabel 1.3.	Pada Tahun 2010, Terjadi Pergeseran Tenaga Kerja ke Sektor Jasa dan Perdagangan	19
Tabel 1.4.	IPM Sulawesi Tenggara Belum Mengalami Pergeseran dari Posisi ke-25 dalam 5 Tahun Terakhir	22
Tabel 1.5.	Variasi Diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Cukup Signifikan	23
Tabel 2.1.	Nilai Kapasitas PKD antar Pemerintah Daerah Berdasarkan Bidang Strategis PKD	27
Tabel 2.2.	Agenda dan Usulan Program Peningkatan Kapasitas PKD di Sulawesi Tenggara	34
Tabel 3.1.	Sebagian Besar Pendapatan Pemerintah Provinsi Berasal dari DAU	40
Tabel 3.2.	Pemerintah Kabupaten/Kota Mempunyai Tren yang Serupa Dengan Pemerintah Provinsi	40
Tabel 4.1.	Belanja Pemerintah Provinsi Berdasarkan Sektor dan Proporsinya terhadap Total Belanja, 2007 – 2011	56
Tabel 4.2.	Belanja Kabupaten/Kota Berdasarkan Sektor dan Proporsi terhadap Total Belanja, 2007 – 2011	57
Tabel 5.1.	Provinsi Mengalokasikan Lebih Besar dari Belanjanya untuk Kesehatan Dibanding Kabupaten/Kota	67
Tabel 5.2.	Ketersediaan dan Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan di Sultra Semakin Baik, Kecuali Polindes	69
Tabel 5.3.	Kabupaten Konawe Memiliki Rasio Fasilitas Kesehatan Tertinggi di Sulawesi Tenggara Tahun 2010	70
Tabel 5.4.	Jumlah Tenaga Kesehatan Terus Meningkatkan.	70
Tabel 5.5.	Kota Bau-Bau Memiliki Cakupan Jaminan Kesehatan Gratis untuk Kelompok Termiskin Tertinggi	72
Tabel 5.6.	Perkembangan AKI dan AKB Bervariasi antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara	74
Tabel 5.7.	Porsi Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota Sudah Diatas 20 Persen Sejak 2007	79
Tabel 5.8.	Jumlah Sekolah dan Kelas Sudah di Sulawesi Tenggara Sudah Memadai, Namun Masih Kekurangan Laboratorium dan Perpustakaan, Tahun Ajaran 2009/2010	82
Tabel 5.9.	Tingkat Melek Huruf di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Bervariasi, 2009	86
Tabel 5.10.	Kesenjangan APM Antar Kabupaten/Kota Masih Tinggi Terutama Pada Jenjang SMP dan SMA, 2009	87
Tabel 5.11.	Tingkat Melek Huruf Di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dari berbagai Kelompok Umur	88
Tabel 5.12.	Provinsi Mengalokasikan Belanja Infrastruktur Lebih Besar Dibanding Kabupaten/Kota	90
Tabel 5.13.	Pada tahun 2009, Muna Merupakan Kabupaten dengan Belanja Infrastruktur Tertinggi	92
Tabel 5.14.	Pembukaan Bandara Baru Berdampak pada Peningkatan Mobilitas Penduduk yang Signifikan	96
Tabel 5.15.	Pelayaran Khusus dan Luar Negeri Tumbuh Paling Pesat	96
Tabel 5.16.	Belanja Dekonsentrasi/TP untuk Pertanian Meningkatkan Lebih dari 3 Kali Lipat Tahun 2011	98
Tabel 5.17.	Belanja Pertanian Kolaka Tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2009	100
Tabel 5.18.	Tahun 2010, Produksi Kakao Kembali Meningkatkan, namun Belum Berhasil Meningkatkan Ekspor	103
Tabel 5.19.	Sembilan dari 15 indikator Sektor Pertanian dalam RPJMD Sultra belum tercapai pada tahun 2010	105
Tabel 6.1.	Sebagian Besar Belanja Transfer Dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan (Angka Nominal)	109
Tabel 6.4.	Dari 26 Desa Sampel yang Disurvei, Belum Satupun Menerima Dana Rp. 100 Juta per Tahun	110
Tabel 7.1.	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2009.	118

Tabel 7.2.	Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2009.	119
Tabel 7.3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara 2008-2009	120
Tabel D.1.1.	Pendapatan Berdasarkan Sumber (dalam Rupiah)	138
Tabel D.1.2.	Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (dalam Rupiah)	140
Tabel D.1.3.	Belanja Berdasarkan Urusan (dalam Rupiah)	141
Tabel D.2.1.	Belanja Pemerintah Pusat yang Terdeksentrasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara (dalam Rupiah)	144
Tabel D.3.1.	Pendapatan Riil Perkapita Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2009 (dalam Rupiah)	145
Tabel D.3.2.	Belanja Riil Perkapita Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Klasifikasi Ekonomi tahun 2009 (dalam Rupiah)	147
Tabel D.3.3.	Belanja Riil Perkapita Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Urusan tahun 2009 (dalam Rupiah)	148
Tabel E.1.	Angka Kesenjangan Angkatan kerja dengan Tenaga Kerja Perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara 2005-2009.	150
Tabel E.2.	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dikepalai Perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara	150
Tabel E.3.	Angka Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara	150

Daftar Kotak

Kotak 1.1.	Pencapaian Indikator Makro RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013	23
Kotak 5.1.	Pencapaian Target Sektor Pertanian RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013	105
Kotak 6.1.	Metode Survei	114
Kotak 7.1.	Capaian Indikator-indikator MGDs	120
Kotak 7.2.	Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi	121
Kotak 7.3.	Anggaran Responsif Gender	122

Daftar Istilah

AHH	Angka Harapan Hidup
AKABA	Angka Kematian Balita
AKB	Angka Kematian Bayi
AKI	Angka Kematian Ibu
AMH	Angka Melek Huruf
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	Angka Partisipasi Kotor
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASB	Analisa Standar Biaya
Bahteramas	Bangun Kesejahteraan Masyarakat
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawasda	Badan Pengawasan Daerah
BKD	Badan Keuangan Daerah
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
<i>Block Grant</i>	Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Bagi Desa/Kelurahan yang ada diseluruh Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Dana <i>Block Grant</i>
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
Dekon/TP	Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
DPPKAD	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRSP	Democratic Reform Support Program
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> (Diskusi Kelompok Terfokus)
HDI	<i>Human Development Index</i> (Indeks Pembangunan Manusia)
HPS	Harga Perkiraan Sendiri
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IPG	Indeks Pembangunan Gender

IPM	Indeks Pembangunan Manusia atau HDI
Kemendiknas	Kementerian Pendidikan Nasional
KIBLA	Kesehatan Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir
KTI	Kawasan Timur Indonesia
KUA	Kebijakan Umum Anggaran
LEMLIT UNHALU	Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MP3EI	Master Plan Perluasan dan Percepatan Ekonomi di Indonesia
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTP	Nilai Tukar Petani
NTT	Nusa Tenggara Timur
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	Pemerintah Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Perpu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PEA	<i>Public Expenditure Analysis</i>
PEACH	<i>Public Expenditure and Capacity Harmonization</i>
Perkada	Peraturan Kepala Daerah
PFM	<i>Public Financial Management</i> (Pengelolaan Keuangan Publik)
PHBS	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKD	Pengelolaan Keuangan Daerah
Pokja	Kelompok Kerja
Polindes	Pos Persalinan Desa
Posyandu	Pusat Pelayanan Terpadu
PP dan PA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PPK	Pejabat Penatausahaan Keuangan
PU	Pekerjaan Umum
PUG	Pengarusutamaan Gender
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Puskesmas Pembantu
RAD	Rencana Aksi Daerah
Renstra	Rencana Strategis
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
Rombel	Rombongan Belajar
Rp	Rupiah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RS	Rumah Sakit

RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RT	Rumah Tangga
SD/MI	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPD	Surat Penyediaan Dana
SPM	Standar Pelayanan Minimum
STR	<i>Student Teacher Ratio</i> (Rasio Guru terhadap Murid)
Sultra	Sulawesi Tenggara
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS
TA	Tahun Ajaran
TMP	Tidak Memberikan Pendapat
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TW	Tidak Wajar
UMR	Upah Minimum Regional
WB	<i>World Bank</i> (Bank Dunia)
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

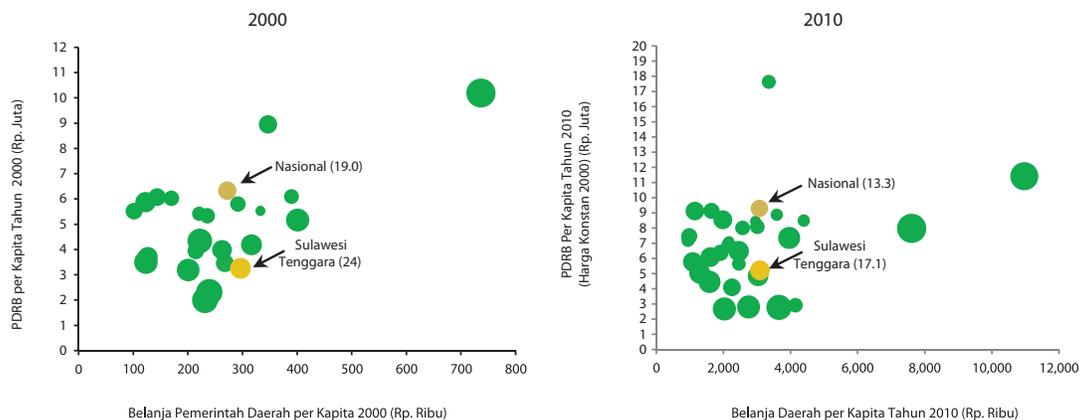


Ringkasan Eksekutif

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Sebagai provinsi kepulauan, Sulawesi Tenggara dikaruniai kekayaan sumberdaya laut yang cukup besar, selain itu Sulawesi Tenggara juga terkenal dengan kekayaan sumberdaya mineral berupa nikel dan aspal. Jumlah penduduk di Sulawesi Tenggara mencapai 2,2 juta jiwa pada tahun 2010 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk diatas angka nasional. Jumlah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara telah berkembang lebih dari 2 kali lipat, dari 4 kabupaten dan 1 kota sebelum desentralisasi menjadi 10 kabupaten dan 2 kota dalam 7 tahun desentralisasi.

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi berkembang dengan sejumlah tantangan. Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk provinsi dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di Indonesia, namun sampai tahun 2010, kontribusi perekonomian Sulawesi Tenggara terhadap perekonomian nasional masih kecil (0,6 persen). Sejak desentralisasi, PDRB per kapita Sulawesi Tenggara secara riil tumbuh 6 persen per tahun, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional (4,7 persen per tahun), namun pertumbuhan tersebut belum mampu menempatkan PDRB per kapita riil Sulawesi Tenggara di atas rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara juga telah berhasil diturunkan sebesar 6,8 basis poin dibanding sebelum desentralisasi (2000), lebih cepat dibanding penurunan tingkat kemiskinan nasional pada periode yang sama (5,6 basis poin), namun tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara tahun 2010 masih diatas tingkat kemiskinan nasional. Belanja pemerintah daerah per kapita juga meningkat lebih dari 9 kali lipat dibanding sebelum desentralisasi, namun pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan.

Gambar 1. Sulawesi Tenggara Merupakan Salah Satu Provinsi Berkembang di Indonesia



Sumber: Diolah dari BPS dan DJPK Kementerian Keuangan, 2011.

Catatan: Besaran lingkaran dan angka dalam kurung menunjukkan tingkat kemiskinan. Untuk memperjelas ilustrasi, Provinsi DKI Jakarta, Riau (tahun 2000), Kepulauan Riau (Tahun 2010), dan Kalimantan Timur tidak dimasukkan ke dalam gambar. Tingkat kemiskinan nasional didasarkan pada angka nasional, sementara angka PDRB per kapita riil dan belanja daerah per kapita nasional didasarkan pada angka rata-rata provinsi.

Tantangan, Kendala, dan Peluang Perekonomian

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 8 persen merupakan tantangan perekonomian Sulawesi Tenggara. Dalam rangka meningkatkan PDRB per kapita serta memperbesar perannya dalam perekonomian nasional, Sulawesi Tenggara perlu mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 8 persen yang sudah dicapai pada tahun 2010. Untuk mencapai target tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, antara lain : (i) hampir sepertiga perekonomian Sulawesi Tenggara bertumpu pada sektor pertanian, namun sektor tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan dalam dua tahun terakhir (2009-2010); dan (ii) meskipun Sulawesi Tenggara terkenal cukup kaya dengan sumber daya mineral, namun sumberdaya tersebut belum berdampak signifikan terhadap perekonomian. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian secara riil masih kurang dari 6 persen dengan pertumbuhan produksi yang masih fluktuatif

dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, Sulawesi Tenggara memiliki peluang yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yakni pesatnya pertumbuhan sektor tersier (terutama perdagangan) yang disertai dengan tingginya penyerapan tenaga kerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara terhitung rendah, namun masih menghadapi tantangan pengangguran di perkotaan. TPT di Sulawesi Tenggara jauh lebih rendah dibanding TPT nasional maupun dibanding rata-rata provinsi di Sulawesi. Namun demikian, TPT di daerah perkotaan masih sangat tinggi. Lebih dari 49 persen penganggur di Sulawesi Tenggara terpusat di Kota Kendari dan Kota Bau-Bau, sementara 51 persen lainnya tersebar di 10 kabupaten. Tingginya pengangguran di perkotaan didorong oleh tingginya migrasi ke perkotaan yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan lapangan kerja.

Tantangan dalam Pembangunan Sosial

Tingkat kemiskinan sudah berhasil diturunkan secara signifikan, namun masih perlu terus diupayakan. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara sudah berhasil diturunkan secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Merujuk pada target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi, pada tahun 2013 tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara harus dapat diturunkan menjadi 10 persen. Dengan pencapaian angka kemiskinan tahun 2011 sebesar 14,6 persen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih perlu mendorong penurunan angka kemiskinan setidaknya sebesar 2,3 basis poin persen per tahun dalam dua tahun ke depan (2012 dan 2013). Dengan keberhasilan penurunan kemiskinan sebesar 2,5 basis poin pada tahun 2011 (dari 17,1 persen (2010) menjadi 14,6 persen (2011)), target penurunan 2,3 persen kemiskinan pada dua tahun ke depan diharapkan bisa tercapai. Prioritas pengurangan kemiskinan perlu diarahkan terutama pada daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar seperti Kolaka, Muna, Buton, dan Konawe.

IPM Sulawesi Tenggara belum beranjak dari peringkat ke-25 secara nasional dalam 5 tahun terakhir. Indikator IPM yang paling bermasalah adalah indikator Angka Melek Huruf dan Angka Usia Harapan Hidup yang masih dibawah rata-rata nasional, sementara indikator Rata-rata Lama Sekolah sudah lebih baik dibanding angka nasional. Indeks Angka Melek Huruf cukup sulit mengalami peningkatan karena kasus buta aksara di Sulawesi Tenggara terjadi pada kelompok penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas). Faktor motivasi dan usia yang sudah memasuki masa non-produktif membuat upaya peningkatan angka melek huruf cukup terkendala. Sementara itu, tantangan dalam peningkatan angka harapan hidup terletak pada masih tingginya angka kesakitan penduduk¹ dan angka kematian bayi.

Kinerja Pengelolaan Keuangan

Secara umum, kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) di Provinsi Sulawesi Tenggara masih memerlukan pembenahan. Survei kapasitas PKD bertujuan untuk memetakan kapasitas PKD seluruh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Instrumen survei berupa *balance scorecard* terdiri dari 145 indikator yang diklasifikasi kedalam 9 bidang strategis PKD. Secara rata-rata, nilai kapasitas PKD kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara baru memenuhi 49 persen dari 145 indikator penilaian. Angka ini masih dibawah nilai provinsi yang sudah mencapai 60 persen. Dari 12 kabupaten/kota, 7 daerah masih dibawa nilai rata-rata kapasitas PKD di Sulawesi Tenggara (49 persen). Kolaka Utara dan Kota Kendari adalah dua daerah yang sudah memiliki nilai diatas rata-rata kabupaten/kota lainnya, serta lebih baik dari nilai kapasitas PKD provinsi. Kelemahan Kapasitas PKD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tersebar di berbagai bidang, namun secara umum bidang akuntansi dan pelaporan merupakan bidang yang paling perlu perbaikan.

¹ Angka kesakitan penduduk adalah rasio jumlah penduduk yang mengalami sakit dibagi jumlah penduduk. Data berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Kinerja Pendapatan Pemerintah Daerah

Porsi DAU sudah menunjukkan kecenderungan menurun, sementara porsi PAD sebaliknya. Meskipun perkembangan DAU per tahun menunjukkan fluktuasi, porsi DAU terhadap pendapatan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota secara umum menurun pada periode 2007-2010. Hal sebaliknya terjadi pada kinerja PAD yang secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2007-2010. Pada tingkat provinsi, peran PAD sudah 46 persen pada tahun 2010, namun pada tingkat kabupaten/kota rata-rata masih dibawah 7 persen. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah kabupaten/kota masih memerlukan banyak pembenahan. Kapasitas mobilisasi PAD antar daerah menunjukkan variasi yang cukup tajam. Sebagai contoh, pada tahun 2010, Wakatobi mampu menghasilkan Rp. 22 juta dari setiap Rp. 1 miliar PDRB, sementara Konawe Selatan dan Buton Utara hanya Rp. 6 juta. Variasi ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal mulai dari karakteristik ekonomi (besaran sektor formal dan informal, karakteristik lapangan usaha pembentuk PDRB di masing-masing daerah, dll), regulasi, kelembagaan, sampai kapasitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan.

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang kaya sumber daya mineral, namun hasil dari sumber daya tersebut belum berkontribusi signifikan terhadap pendapatan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya pendapatan Dana Bagi Hasil non pajak SDA dari tahun ke tahun meskipun aktivitas di sektor pertambangan mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara menerima DBH Non-pajak SDA sebesar Rp. 118 juta dari setiap Rp. 1 miliar produksi pertambangan non-migas tahun sebelumnya, namun pada tahun 2010, setiap Rp. 1 miliar produksi pertambangan non-migas tahun sebelumnya hanya menghasilkan Rp. 13 juta DBH Non-Pajak SDA. Kerangka regulasi serta sistem pendataan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan perlu diperbaiki.

Kinerja Belanja Pemerintah Daerah

Pada tingkat provinsi, porsi belanja transfer (bantuan keuangan, dll) dan belanja modal meningkat dalam 3 tahun terakhir. Peningkatan porsi belanja modal mengindikasikan adanya perubahan struktur yang lebih baik. Tantangannya adalah bagaimana alokasi belanja modal dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pembangunan di sektor-sektor strategis (fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll). Sementara itu, peran belanja transfer pemerintah provinsi juga menunjukkan peningkatan, terutama karena terkait dengan program prioritas seperti pembebasan biaya operasional pendidikan (BOP), beasiswa, pelayanan kesehatan gratis, serta *block grant* ke desa. Tantangan dalam belanja transfer terletak pada peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan, serta monitoring dan evaluasi.

Pada tingkat kabupaten/kota, porsi belanja pegawai secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Kecenderungan ini akan berdampak positif jika peningkatan tersebut diperuntukkan bagi peningkatan belanja gaji pegawai fungsional (guru, dokter, penyuluh, dll.), dan sebaliknya akan menjadi sumber inefisiensi jika peningkatan porsi tersebut didominasi oleh peningkatan jumlah pegawai non-fungsional. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kecenderungan pertumbuhan belanja pegawai dilihat dari pertumbuhan jumlah dan komposisi pegawai.

Belanja Pemerintahan Umum² masih merupakan alokasi terbesar baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sampai tahun 2010, porsi terbesar belanja pemerintah provinsi dialokasikan untuk sektor pemerintahan umum disusul oleh sektor infrastruktur, kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Khusus pada tahun 2011, terjadi sedikit perubahan komposisi belanja pemerintah provinsi dengan meningkatnya belanja kesehatan menjadi hampir 20 persen karena adanya pembangunan RSUD provinsi. Sementara itu pada

2 Belanja sektor pemerintahan umum atau administrasi umum dalam penelitian ini terdiri dari belanja urusan pemerintahan umum, urusan kepegawaian, serta urusan pemberdayaan masyarakat desa. Secara umum, sektor pemerintahan umum meliputi institusi seperti sekretariat daerah, DPRD, Kepala Daerah/wakil kepala daerah, kecamatan, kelurahan (diluar desa) dll.

tingkat kabupaten/kota, porsi terbesar belanja untuk sektor pemerintahan umum disusul oleh pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan pertanian. Porsi belanja sektor pemerintahan umum perlu dirasionalisasi secara bertahap untuk memberi peluang peningkatan porsi yang lebih besar pada sektor strategis (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian).

Baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sekitar 60 persen belanja sudah dialokasikan untuk belanja langsung. Namun demikian, porsi belanja untuk program/kegiatan terkait administrasi perkantoran dan aparatur (rutin) dalam belanja langsung pemerintah provinsi masih cukup tinggi (sekitar 26 persen dari total belanja, atau sekitar 43 persen dari total belanja langsung). Angka ini lebih tinggi dibanding pada tingkat kabupaten kota (19 persen dari total belanja, atau sekitar 32 persen dari total belanja langsung)³. Porsi belanja administrasi dan aparatur dalam belanja langsung secara bertahap perlu dirasionalisasi untuk memberi porsi yang lebih besar pada program/kegiatan pembangunan.

Kinerja dan Tantangan Sektor Strategis

Kesehatan

Belanja kesehatan pemerintah provinsi sudah mendekati 20 persen pada tahun 2011. Pada tingkat provinsi, belanja kesehatan meningkat dari rata-rata dibawah 10 persen (pada periode 2007-2010) menjadi hampir 20 persen tahun 2011. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja modal untuk pembangunan RS provinsi yang baru. Meskipun kebutuhan belanja modal setelah pembangunan rumah sakit menurun, belanja sektor kesehatan provinsi diharapkan tidak sampai kurang dari 10 persen diluar belanja pegawai. Selain karena ke depan belanja kesehatan akan dibebani oleh belanja operasional dari rumah sakit yang baru, porsi belanja kesehatan di atas 10 persen (diluar belanja pegawai) merupakan tuntutan dari Undang-Undang Kesehatan (lihat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 Ayat 2),

Belanja Langsung Kesehatan tingkat kabupaten/kota cenderung menurun dan sebagian besar masih dialokasikan untuk belanja program terkait administrasi/aparatur. Belanja program terkait administrasi dan aparatur tingkat kabupaten/kota secara proporsional cenderung meningkat hingga mencapai 30 persen tahun 2011. Penurunan belanja langsung berdampak buruk pada komposisi program sektor kesehatan karena cenderung berdampak pada berkurangnya program/kegiatan urusan wajib ketimbang mengurangi belanja program/kegiatan terkait administrasi perkantoran/aparatur. Alokasi kedua terbesar dalam belanja langsung kesehatan adalah untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas disusul oleh program upaya kesehatan masyarakat.

Kinerja pelayanan kesehatan di Sulawesi Tenggara secara umum mengalami perbaikan, namun belum berdampak pada perbaikan indikator *Outcomes*. Perkembangan capaian kinerja kesehatan di Sulawesi Tenggara menunjukkan terjadinya *paradox* antara membaiknya *output* sektor kesehatan (berupa fasilitas pelayanan kesehatan) di satu sisi, dan belum terjadinya perbaikan *outcomes* kesehatan (angka kesakitan, AKB⁴, AKABA, kasus kematian ibu) di sisi lain. Keterputusan hubungan ini diperkirakan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat; kesadaran atau kemauan masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan; serta masih minimnya program-program yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak.

3 Belanja program/kegiatan administrasi umum perkantoran dan aparatur (rutin) adalah belanja program dengan kode 1 sampai 14 dalam belanja langsung masing-masing SKPD, atau sering juga disebut belanja SKPD. Belanja ini pada umumnya dianggarkan oleh SKPD untuk belanja ATK perkantoran, pemeliharaan atau pembangunan gedung perkantoran pemerintah, pelatihan dan peningkatan disiplin pegawai, dll.

4 AKB = Angka Kematian Bayi per 1,000 kelahiran hidup, AKABA=Angka Kematian Balita per 10,000 kelahiran hidup)

Meskipun pada skala provinsi berbagai rasio fasilitas maupun tenaga kesehatan per penduduk sudah mengalami perbaikan, namun masih diwarnai kesenjangan yang tinggi antar kabupaten/kota. Dua kabupaten yang baru mekar (Buton Utara dan Konawe Utara) masih belum memiliki RSUD. Meskipun di beberapa daerah sudah terdapat rumah sakit, namun rasio tempat tidur RS per penduduk masih timpang. Rasio ketersediaan Puskesmas, Pustu dan tenaga kesehatan pada skala provinsi sudah cukup baik, namun pada tingkat kabupaten/kota masih menunjukkan kesenjangan. Peran pemerintah provinsi diperlukan dalam mendorong pengurangan ketimpangan rasio fasilitas dan tenaga kesehatan antar kabupaten/kota.

Pendidikan

Setidaknya sejak tahun 2009, diperkirakan sebagian besar belanja pendidikan pemerintah provinsi dialokasikan melalui transfer (bantuan keuangan, hibah, dll). Proporsi belanja pendidikan provinsi meningkat hingga 12 persen tahun 2009, namun kembali menurun hingga 4 persen pada tahun 2011. Penurunan belanja pendidikan dalam dua tahun terakhir diperkirakan karena sebagian besar belanja pendidikan provinsi dialokasikan melalui belanja bantuan kependidikan seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), beasiswa, dll. Program-program tersebut merupakan program prioritas pemerintah provinsi periode 2008-2013. Sampai penelitian ini berakhir, data tahunan mengenai hal tersebut tidak bisa diperoleh, sehingga analisis belanja pendidikan pada penelitian ini hanya didasarkan pada belanja urusan terkait pendidikan (pendidikan, perpustakaan, dan pemuda/olahraga). Angka tersebut lebih kecil dari yang sebenarnya. Publikasi data terkait bantuan pendidikan perlu dilakukan setiap tahun terutama untuk memberikan kesadaran publik tentang komitmen pemerintah provinsi terhadap pendidikan.

Belanja pendidikan di tingkat kabupaten/kota masih bervariasi. Pada tahun 2009, Buton mampu mengalokasikan lebih dari 40 persen belanjanya untuk sektor pendidikan, sementara Konawe Utara masih kurang dari 10 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah sebagai penerima manfaat (*main beneficiaries*) sektor pendidikan, belanja pendidikan Kota Bau-Bau mencapai Rp. 3,7 juta per penduduk usia sekolah, sementara Kabupaten Konawe masih kurang dari Rp. 1 juta per penduduk usia sekolah meskipun alokasi belanjanya sudah lebih dari 20 persen. Gambaran ini terjadi pada tahun 2009, variasi antar kabupaten/kota yang berbeda mungkin terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, kinerja pendidikan di Sulawesi Tenggara cukup baik, namun masih perlu terus dilakukan pembenahan. Indikator rata-rata lama sekolah di Sultra sudah lebih baik dibanding rata-rata nasional. Namun demikian beberapa hal masih perlu diperbaiki misalnya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK masih cukup tinggi; angka melanjutkan sekolah terutama dari tingkat SMP ke SMA/SMK masih rendah; APM terutama pada jenjang SMP dan SMA/SMK masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kinerja pendidikan di Sulawesi Tenggara belum mampu menyumbang pada peningkatan IPM karena masih rendahnya angka melek huruf.

Tantangan pelayanan pendidikan di Sulawesi Tenggara terletak pada pemerataan serta peningkatan kualitas fasilitas maupun guru. Rasio siswa per guru di Sulawesi Tenggara sudah lebih kecil dibanding rasio nasional. Hal yang sama terlihat pada rasio siswa per sekolah dan siswa per kelas yang relatif lebih rendah dibanding nasional. Namun demikian, kesenjangan masih cukup tinggi antar kabupaten/kota. Sebagai contoh, satu kelas SD di Konawe Utara hanya menampung 20 siswa, sementara di Kolaka dan Kendari bisa dua kali lipatnya (40 siswa/rombongan belajar). Padahal SPM menentukan satu rombongan di SD paling banyak terdiri dari 32 siswa. Selain itu satu guru di Konawe melayani 11 siswa, sementara di Buton 20 siswa. Persentase kelas rusak masih cukup tinggi, terutama pada tingkat SD. Dari sisi kualitas, persentase guru yang memiliki ijazah tertinggi S1 atau lebih tinggi masih minim, padahal merujuk pada SPM sektor pendidikan, di setiap SD/MI setidaknya harus tersedia dua orang guru dengan ijazah S1 atau bersertifikat pendidik.

Infrastruktur

Struktur belanja infrastruktur di Sulawesi Tenggara sudah cukup baik, namun total belanja infrastruktur masih fluktuatif. Rata-rata lebih dari 75 persen belanja infrastruktur sudah dialokasikan untuk belanja langsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan sebagian besar dari belanja langsung tersebut dialokasikan untuk belanja modal. Namun demikian, secara total, belanja infrastruktur masih fluktuatif. Meskipun tidak perlu signifikan, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu menyusun skema/proyeksi peningkatan belanja infrastruktur yang lebih konsisten disesuaikan dengan kerangka pengeluaran jangka menengah yang lebih terarah.

Beberapa tantangan infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur dasar, irigasi, serta pembangunan jalan. Perumahan merupakan salah satu aspek dari pembangunan infrastruktur yang terkait dengan kesehatan. Tantangan infrastruktur dasar perumahan di Sulawesi Tenggara adalah masih rendahnya akses terhadap listrik, air bersih, maupun sanitasi yang layak terutama pada rumah tangga termiskin dan miskin. Irigasi merupakan salah satu bidang ke-PU-an yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Seiring dengan peningkatan luas area sawah pada tahun 2010, tantangan pemerintah daerah untuk membangun irigasi teknis semakin tinggi. Dalam mendorong peningkatan produktivitas padi, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan cakupan irigasi teknis terutama pada area sawah tadah hujan yang sampai tahun 2010 masih sekitar 22,4 ribu hektar. Koordinasi antar berbagai tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan irigasi sesuai kewenangannya (primer, sekunder, tersier).

Panjang jalan provinsi per luas wilayah masih dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2009, panjang jalan provinsi masih sekitar 488,8 km.⁵ Jika dibandingkan dengan luas wilayah, panjang jalan provinsi di Sulawesi Tenggara masih sekitar 1,3 km per 100 km². Angka ini masih dibawah rata-rata jalan provinsi secara nasional yang sudah mencapai 2,5 km per 100 km². Sementara itu, rasio panjang jalan nasional dan panjang jalan kabupaten/kota per luas wilayah di Sulawesi Tenggara relatif sudah lebih tinggi dibanding dengan rata-rata nasional. Dalam rangka mendukung MP3EI (Masterplan Perluasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia), jalan merupakan sarana yang sangat penting baik untuk kepentingan peningkatan konektivitas wilayah, terutama dalam mendukung potensi ekonomi unggulan yang tidak hanya menjadi unggulan Sulawesi Tenggara secara nasional, tapi juga potensi ekonomi unggulan Indonesia secara internasional (Kakao dan Nikel).

Pertanian

Belanja pertanian di Sulawesi Tenggara masih dibawah 7 persen baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tahun 2011 Belanja pertanian di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, namun sebagian besar bersumber dari dana dekonsentrasi, sementara belanja pemerintah daerah tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan belanja sektor pertanian yang bersumber dari dekonsentrasi/TP tahun 2011 hanya bersifat sementara dan diperkirakan akan berkurang seiring dengan perubahan prioritas dan program dari pemerintah pusat. Sebagai provinsi yang bermaksud meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dengan bertumpu pada sektor pertanian, alokasi 7 persen masih belum memadai. Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu menyusun skema peningkatan belanja sektor pertanian yang lebih konsisten sehingga total investasi publik di sektor pertanian di Sulawesi Tenggara lebih stabil.

5 Dokumen Sulawesi Tenggara Dalam Angka tahun 2011 mencatat panjang jalan sampai tahun 2009 dengan panjang, jenis permukaan, serta kondisi jalan provinsi yang belum mengalami perubahan. Berdasarkan informasi dari Bappeda Provinsi, pada tahun 2010 telah terjadi penambahan panjang jalan provinsi dari 488,86 km (tahun 2009) menjadi 906,09 km (2010). Penambahan jalan tersebut sebagian berasal dari pengalihan jalan nasional menjadi jalan provinsi.

Sektor pertanian di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan setiap tahunnya namun dengan pertumbuhan yang semakin lamban. Perlambatan pertumbuhan sektor pertanian di Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh penurunan angka pertumbuhan riil di hampir semua sub-sektor (perkebunan, peternakan, tanaman pangan, dan perikanan/kelautan). Revitalisasi perlu dilakukan dengan prioritas pada peningkatan produksi, produktivitas, serta strategi pemasaran produk unggulan pertanian (Kakao, Padi, Sapi, dan Rumput Laut). Keempat komoditi unggulan tersebut merupakan komoditi dengan kontribusi terbesar pada sub-sektor masing-masing (Kakao terhadap perkebunan, padi untuk tanaman pangan, sapi untuk peternakan, dan rumput laut untuk perikanan dan kelautan). Peningkatan produksi pada keempat komoditi tersebut dapat berdampak pada pemulihan pertumbuhan sub-sektor dan pada akhirnya sektor pertanian secara luas.

Block Grant

Block grant ke desa merupakan salah satu dari tiga pilar utama program Bahteramas (Bangun Kesejahteraan Masyarakat). Pada tahun 2008, Gubernur Sulawesi Tenggara mencanangkan program Bahteramas dimana Program *block grant* merupakan salah satu prioritas dalam dalam program tersebut. Untuk merealisasikan program Bahteramas yang terkait dengan *block grant*, pemerintah provinsi telah mengalokasikan sejumlah dana yang sebagian besar berada pada pos belanja transfer, yakni dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Alokasi *block grant* bersifat sama untuk semua desa tanpa memperhitungkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dll.

Respons masyarakat cukup tinggi dan perlu disertai komitmen pemerintah provinsi yang lebih besar Berdasarkan hasil survei, tingkat pengetahuan masyarakat tentang program *block grant* cukup tinggi; tingkat pemahaman masyarakat juga sudah baik; partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari *block grant* sudah mulai terjadi di beberapa desa; serta persepsi masyarakat tentang manfaat *block grant* sudah positif. Kondisi ini merupakan prasyarat penting bagi suksesnya sebuah program. Plafon pemerintah provinsi untuk dana bantuan keuangan pemerintah desa perlu ditingkatkan sehingga penyaluran *block grant* bisa lebih mendekati jumlah yang direncanakan (Rp. 100 juta per desa per tahun). Pembinaan untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan yang akan didanai *block grant* perlu diintensifkan. Pembinaan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan *block grant* dapat berkontribusi bagi lancarnya proses pencairan dana dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pendampingan realisasi *block grant* di tingkat desa perlu dilakukan misalnya melalui penyediaan fasilitator pendamping *block grant* untuk desa/kelurahan

Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Kesenjangan capaian pembangunan yang dinikmati oleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Sulawesi Tenggara masih merupakan persoalan yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan perbandingan indikator-indikator IPM dan IPG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tiga dari empat indikator yang ada (angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan upah buruh) menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) provinsi mengalami penurunan pada tahun 2008-2009. Hal ini berbanding terbalik dengan IDG kabupaten/kota yang justru meningkat, baik dalam indeks keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan kontribusi perempuan dalam pendapatan.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pelembagaan gender di tingkat pengelola pembangunan sehingga komitmen pemerintah tentang kesetaraan gender dapat diwujudkan. Penguatan kapasitas kelembagaan gender melalui POKJA Gender di Sulawesi Tenggara belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah pergeseran jabatan/mutasi yang tidak sejalan dengan penguatan kapasitas pejabat terkait, sehingga hasil pelatihan eksekutif dan teknis belum dapat tercermin dalam perencanaan anggaran daerah secara konsisten di semua urusan. Akibatnya masih banyak anggaran belanja

urusan atau sektor yang belum responsif gender, sehingga kecukupan kebutuhan laki-laki dan perempuan di wilayah ini masih menjadi tantangan.

Selain penguatan kelembagaan, rendahnya ketersediaan database gender (data terpilah menurut jenis kelamin) juga menyumbang pada sulitnya pembuatan anggaran yang responsif gender. Padahal kelengkapan data terpilah ini dapat mendorong lahirnya kebijakan, program, kegiatan dan proyek yang memastikan kebutuhan laki-laki dan perempuan di wilayah ini terpenuhi secara merata dan sesuai dengan kebutuhannya yang berbeda. Untuk ini diperlukan kegiatan khusus di setiap urusan, untuk melakukan pendataan dan pencatatan informasi secara lebih terperinci dan terpilah, serta sistematis.



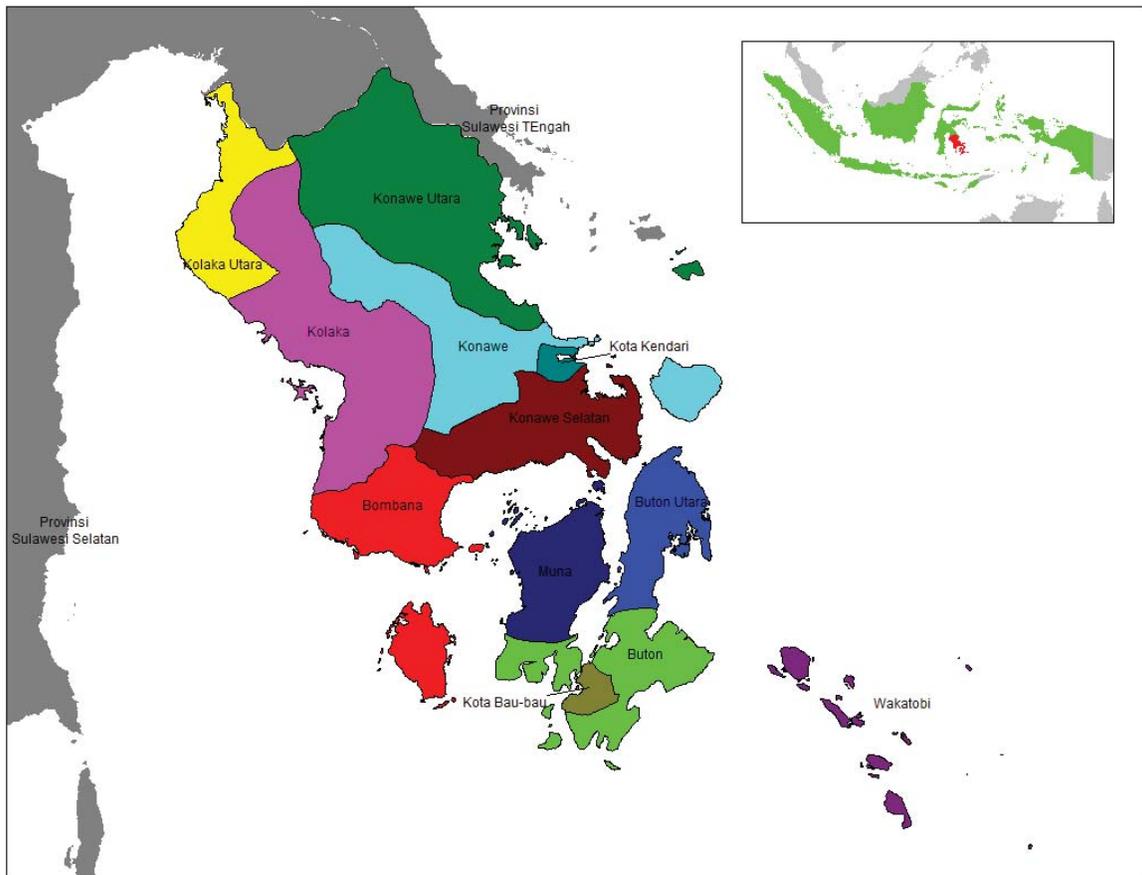
Bab 1

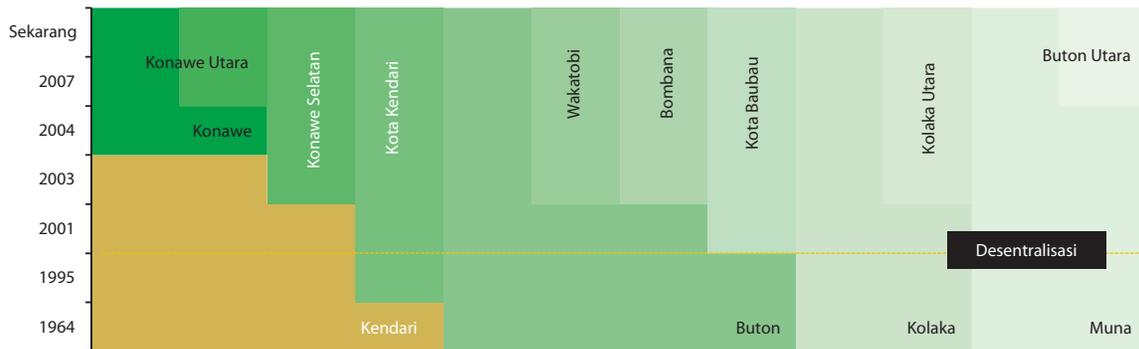
Pendahuluan

1.1. Sejarah dan Konteks Administratif

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan merupakan provinsi kaya sumberdaya alam. Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di utara; dengan Provinsi NTT (Laut Flores) di selatan; dengan Provinsi Maluku (Laut Banda) di Timur; serta dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Teluk Bone) di Barat. Lebih dari 74 persen wilayah Sulawesi Tenggara merupakan perairan (laut) dengan garis pantai sepanjang 1.740 km, dan total luas perairan laut sebesar 110.00 km. Provinsi Sulawesi Tenggara juga merupakan provinsi kaya dengan berbagai jenis flora dan fauna sebagai potensi sumberdaya ekonomi dan pariwisata serta terkenal dengan kekayaan tambang terutama aspal di Kabupaten Buton dan Buton Utara, serta Nikel di Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Bombana.

Gambar 1.1. Sulawesi Tenggara Terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi



Gambar 1.2. Terjadi Pemekaran Wilayah yang Sangat Pesat Setelah Desentralisasi

Sumber : Database PEA Sultra 2011.

Sulawesi Tenggara menjadi provinsi pada tahun 1964 setelah memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara (Sulselra). Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi munculnya tuntutan masyarakat untuk memisahkan diri dari Provinsi Sulsera: (i) sering terhambatnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sulawesi Tenggara sebagai akibat dari sulitnya perhubungan antara Bau-Bau (ibukota Kabupaten Sulawesi Tenggara waktu itu) dan Ujung Pandang (ibukota Provinsi Sulselra); dan (ii) tumbuhnya kesadaran akan besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Sulawesi Tenggara sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk membentuk provinsi tersendiri.

Setelah melalui perjuangan panjang, tuntutan tersebut dipenuhi pada 27 April 1964. Hal ini ditandai dengan adanya serahterima kekuasaan dari Gubernur Provinsi Sulselra saat itu, Kolonel Inf. A.A Rifai, kepada Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Wajong. Meskipun baru resmi menjadi provinsi pada 22 September 1964 melalui Perpu No. 2, 1964 juncto UU No. 13 Tahun 1964, masyarakat tetap menjadikan 27 April 1964 sebagai hari jadi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Setelah penerapan otonomi daerah, jumlah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara bertambah lebih dari dua kali lipat. Dalam rentang 7 tahun pelaksanaan otonomi daerah (2001-2007), terjadi pemekaran wilayah yang cukup pesat di Sulawesi Tenggara, yakni dari semula terdiri dari 5 daerah kabupaten/kota (sebelum desentralisasi) menjadi terdiri dari 12 kabupaten/kota setelah desentralisasi⁶. Sebagai konsekuensi dari pemekaran kabupaten itu, sampai saat ini (2010), Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 201 kecamatan dan 2.087 desa.

Terlalu luasnya wilayah kabupaten yang dimekarkan menjadi alasan umum terjadinya pemekaran. Kajian evaluasi pemekaran daerah yang dilaksanakan oleh DRSP dan Percik tahun 2008 menunjukkan bahwa elit yang berjuang untuk memekarkan daerah umumnya mengemukakan alasan luasnya wilayah sebagai pemicu tuntutan pemekaran kabupaten. Luasnya wilayah yang tidak didukung ketersediaan infrastruktur mengakibatkan rentang kendali yang cukup jauh sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Kondisi ini dipersulit dengan kondisi Sulawesi Tenggara yang sebagian wilayahnya merupakan daerah kepulauan.

6 Perkembangan pembentukan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dapat digambarkan sebagai berikut: (i) Tahun 1964, pada saat terbentuk sebagai provinsi, Sulawesi Tenggara terdiri dari 4 kabupaten, yakni Kendari, Buton, Kolaka, dan Muna; (ii) lebih dari 30 tahun setelah itu, pada tahun 1995, baru terbentuk Kota Kendari yang dimekarkan dari Kabupaten Kendari; (iii) Tahun 2001, terbentuk Kota Bau-Bau yang dimekarkan dari Kabupaten Buton; (iv) Tahun 2003, terjadi pemekaran besar-besaran dengan terbentuknya 4 kabupaten baru sekaligus, yakni Wakatobi dan Bombana yang dimekarkan dari Buton, Kolaka Utara yang dimekarkan dari Kolaka, serta Konawe Selatan yang dimekarkan dari Kabupaten Kendari; (v) Tahun 2004, Kabupaten Kendari secara resmi berganti nama menjadi Kabupaten Konawe; dan (vi) Tahun 2007, terbentuk 2 daerah kabupaten baru, yakni Buton Utara yang dimekarkan dari Kabupaten Muna, serta Konawe Utara yang dimekarkan dari Kabupaten Konawe (dulu Kabupaten Kendari).

1.2. Penduduk

Pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara tergolong tinggi dengan angka beban tanggungan (*dependency ratio*) yang juga tinggi. Jumlah penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2010 sebanyak 2,2 juta jiwa dengan pertumbuhan rata-rata dalam 10 tahun terakhir (2000-2010) sebesar 2,3 persen per tahun, atau hampir 2 kali lipat rata-rata pertumbuhan penduduk nasional (1,5 persen per tahun). Tingginya angka pertumbuhan penduduk salah satunya merupakan akibat dari masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap program KB. Rasio laki-laki perempuan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2010 relatif tidak jauh berbeda dengan nasional, yakni 101. Sementara itu, *dependency ratio* Sulawesi Tenggara masih sangat tinggi, yakni sebesar 63,6 (2010), jauh di atas *dependency ratio* nasional yang hanya sebesar 46,7. Tingginya *dependency ratio* menunjukkan jumlah penduduk usia non-produktif jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia produktif.

Pada tahun 2010, daerah perkotaan dan daerah kaya sumberdaya mineral memiliki angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Beberapa daerah memiliki pertumbuhan penduduk di atas 8 persen seperti Bombana, Buton Utara, Kota Kendari, Kolaka, dan Konawe Selatan, dan Muna. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini diperkirakan dipicu oleh migrasi penduduk baik untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan di perkotaan atau di area-area pertambangan. Sementara itu, di beberapa daerah kepulauan, seperti Wakatobi dan Buton laju pertumbuhan penduduk justru negatif dan cenderung memiliki komposisi penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki (*sex ratio* dibawah 100). Pertumbuhan penduduk yang rendah yang disertai dengan *sex-ratio* dan *dependency ratio* yang tinggi diperkirakan menunjukkan adanya migrasi penduduk dari daerah tersebut terutama penduduk laki-laki berusia produktif.

Tabel 1.1. Sebagian Besar Penduduk Masih Tinggal di Daerah Induk

	Jumlah Penduduk (2010)			Sex Ratio	Distribusi (%)	Kepadatan (Jiwa/ KM ²)	Pertumbuhan Penduduk (%)		Dependency Ratio
	L	P	Total				2009-2010	2000-2010*)	
Buton	124.417	131.295	255.712	95	11,5	96	(10,2)	0,4	85,3
Muna	129.535	138.742	268.277	93	12,0	93	8,0	1,5	75,6
Konawe	123.641	118.341	241.982	104	10,8	36	3,8	1,9	62,8
Kolaka	161.914	153.318	315.232	106	14,1	46	9,7	3,2	58,6
Konawe Selatan	136.201	128.386	264.587	106	11,9	59	8,4	2,6	62,5
Bombana	70.367	68.868	139.235	102	6,2	46	24,9	3,8	61,6
Wakatobi	44.640	48.355	92.995	92	4,2	218	(10,1)	0,3	69,3
Kolaka Utara	62.550	58.790	121.340	106	5,4	36	2,5	3,3	55,2
Buton Utara	27.529	27.207	54.736	101	2,5	27	11,3	1,8	66,0
Konawe Utara	26.980	24.553	51.533	110	2,3	11	10,5	2,7	59,1
Kota Kendari	146.401	143.565	289.966	102	13,0	980	11,2	4,2	47,7
Kota Bau-Bau	67.651	69.340	136.991	98	6,1	448	4,7	2,6	57,9
Sulawesi Tenggara	1.121.826	1.110.760	2.232.586	101	100,0	59	5,4	2,3	63,6
Nasional				101		124	2,7	1,5	46,7

Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Catatan : *) pertumbuhan rata-rata per tahun 2000-2010, data hasil Sensus 2000 dan 2010.

Persebaran Penduduk di Sulawesi Tenggara sangat tidak merata. Secara umum, sebagian besar penduduk masih berpusat di daerah yang sudah lama berdiri seperti Kolaka, Kota Kendari, Muna, Buton, dan Konawe (dulu Kabupaten Kendari). Kabupaten Kolaka memiliki jumlah penduduk terbanyak, sementara jumlah penduduk terkecil terdapat di Konawe Utara. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, daerah

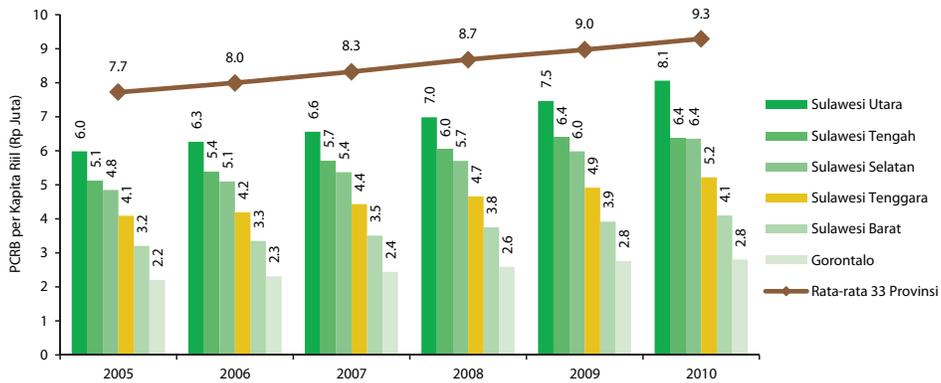
perkotaan cenderung jauh lebih padat dibanding daerah kabupaten. Tingkat kepadatan kota kendari hampir mencapai 1.000 orang per km² persegi dan di Kota Bau-Bau hampir 450 orang per km² persegi, sementara di daerah kabupaten rata-rata dibawah 100 orang per km² persegi. Perkecualian terdapat di Kabupaten Wakatobi dengan kepadatan mencapai 218 per km².

1.3. Perekonomian⁷

Perekonomian Sulawesi Tenggara masih relatif kecil dibanding provinsi lain secara nasional, bahkan dibanding antar provinsi lama di Pulau Sulawesi. Sampai tahun 2010, besaran ekonomi Sulawesi Tenggara berada pada peringkat ke-8 terkecil secara nasional, dan ke-3 terkecil di pulau Sulawesi setelah dua provinsi baru (Gorontalo dan Sulawesi Barat). Perekonomian Sulawesi Tenggara pada tahun 2010 sebesar Rp. 12,2 triliun, atau baru menyumbang 0,6 persen perekonomian nasional.

Sama halnya dengan nilai perekonomian, PDRB per kapita Sulawesi Tenggara tahun 2010 juga masih rendah dibanding rata-rata provinsi secara nasional. PDRB per kapita Sulawesi Tenggara baru sebesar Rp. 5,2 juta pada tahun 2010, atau berada pada urutan ke-9 terendah secara nasional (rata-rata PDRB per kapita provinsi secara nasional sebesar Rp. 9,3 juta per tahun). Dibanding 3 provinsi lain yang sudah lama di Pulau Sulawesi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan), PDRB per kapita Sulawesi Tenggara juga terhitung paling rendah.

Gambar 1.3. PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara Masih Rendah Dibanding Provinsi Lama di Pulau Sulawesi

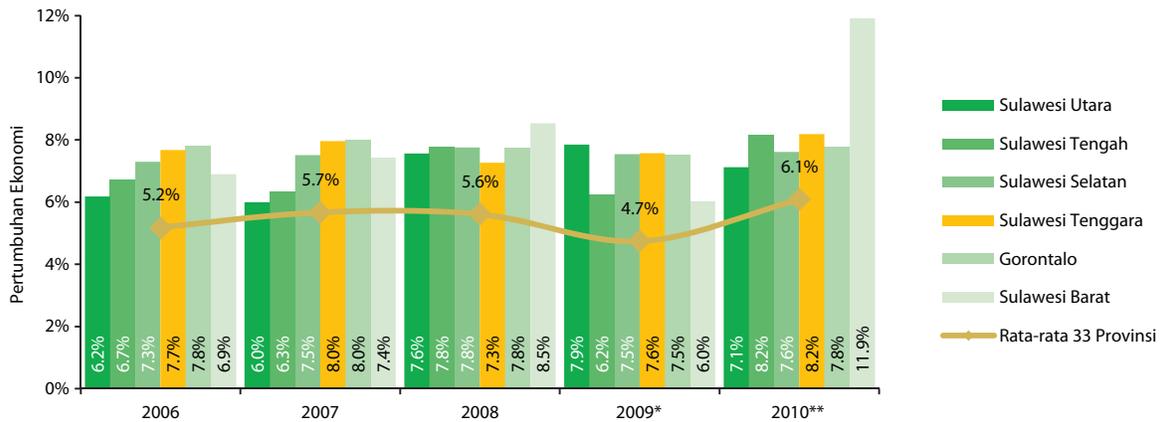


Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Meskipun kecil, perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh cukup pesat dalam 5 tahun terakhir. Pada periode 2006-2010, perekonomian Sulawesi Tenggara rata-rata tumbuh sebesar 7,7 persen per tahun. Angka tersebut sedikit diatas rata-rata provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 7,5 persen per tahun, dan jauh diatas rata-rata provinsi secara nasional sebesar 5,5 persen per tahun. Pada tahun 2006 dan 2007, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara berada pada urutan ke-2 tertinggi secara nasional, namun sedikit mengalami penurunan peringkat pada tahun 2008 sampai 2010, yakni berturut-turut ke-7, ke-3, dan ke-4 tertinggi secara nasional.

⁷ Dari sini dan selanjutnya, data PDRB yang dianalisis pada bagian ini seluruhnya merupakan data PDRB atas dasar harga konstan (2001=100) atau nilai produksi riil (bukan nominal).

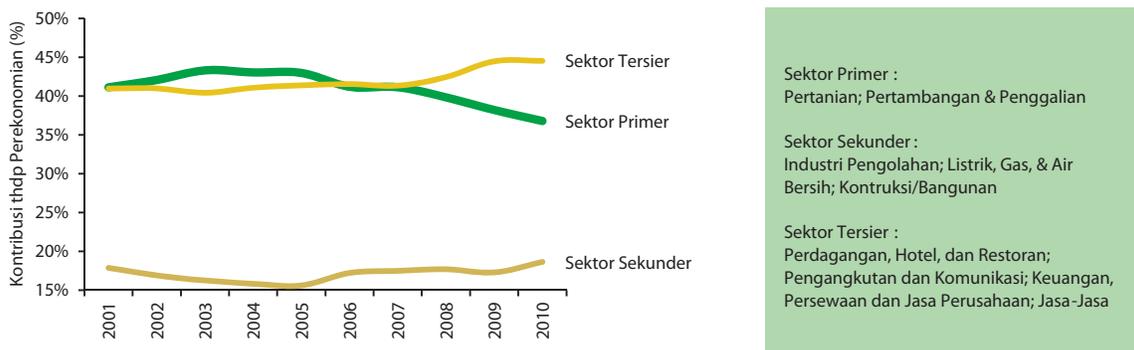
Gambar 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Cukup Pesat dalam 5 Tahun Terakhir



Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Struktur perekonomian Sulawesi Tenggara mengalami pergeseran signifikan ke sektor tersier dalam 3 tahun terakhir. Pergeseran ini terlihat dari semakin menurunnya kontribusi sektor primer di satu sisi, dan semakin meningkatnya kontribusi sektor tersier di sisi lain. Penurunan kontribusi sektor primer dipicu oleh penurunan kontribusi sektor pertanian serta belum stabilnya pertumbuhan sektor pertambangan dari tahun ke tahun, sementara peningkatan sektor tersier didorong oleh peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor transportasi dan komunikasi. Sementara kontribusi sektor sekunder secara umum masih belum beranjak dari posisi dibawah 20 persen. Pada tahun 2010, sektor tersier menyumbang sebesar 45 persen PDRB Sulawesi Tenggara, sementara sektor primer dan sekunder secara berturut-turut sebesar 37 persen, dan 19 persen.

Gambar 1.5. Sektor Tersier Menjadi Kontributor Tertinggi Perekonomian Sultra dalam 3 Tahun Terakhir



Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

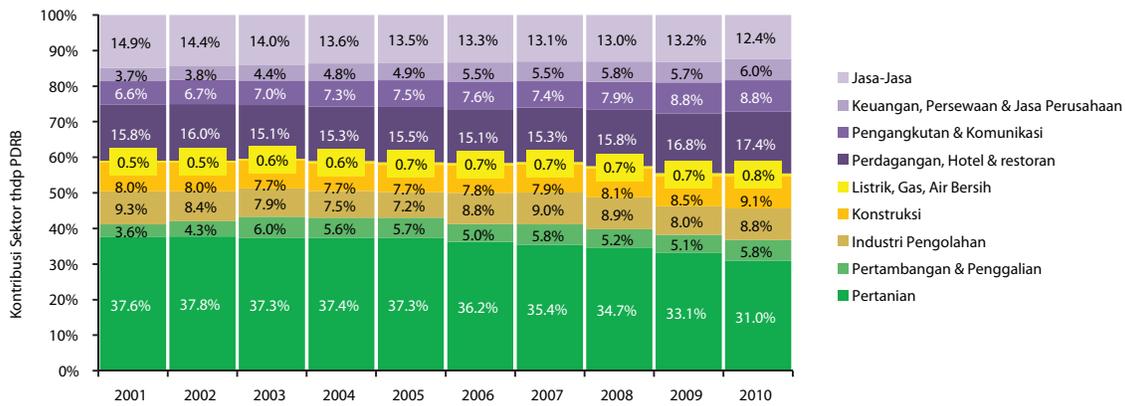
Meskipun mengalami penurunan kontribusi, sektor pertanian masih merupakan kontributor terbesar perekonomian Sulawesi Tenggara disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi sektor pertanian turun dari 37,6 persen tahun 2001 menjadi 31 persen tahun 2010. Meskipun demikian, pertanian masih merupakan kontributor terbesar perekonomian Sulawesi Tenggara disusul oleh perdagangan, hotel, dan restoran, yang mengalami peningkatan kontribusi dari 15,8 persen tahun 2001, menjadi 17,4 persen tahun 2010.

Meskipun Sulawesi Tenggara dikenal sebagai daerah kaya sumberdaya mineral (khususnya aspal dan nikel), namun aktivitas ekonomi di sektor tersebut belum berkontribusi signifikan terhadap

PDRB. Dalam 10 tahun terakhir, kontribusi sektor pertambangan rata-rata baru menyumbang 5,2 persen dari PDRB, atau hampir 6 kali lipat lebih kecil dari sektor pertanian. Masih kecilnya kontribusi sektor tersebut disebabkan selain oleh masih tingginya fluktuasi pertumbuhan produksi pertambangan, juga karena aktivitas di sektor tersebut sebagian masih merupakan aktivitas ekonomi bawah tanah (*underground*)⁸. Selain itu, meningkatnya aktivitas di sektor pertambangan selama ini sebagian besar baru pada tahap eksplorasi (belum eksploitasi)⁹.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sumber pertumbuhan penting Sulawesi Tenggara dalam 5 tahun terakhir. Bersama dengan sektor tersier pada umumnya (kecuali jasa-jasa), sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan dua digit sejak tahun 2008 dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kontribusi kedua terbesar terhadap perekonomian Sultra setelah sektor pertanian dan angka pertumbuhan yang cukup tinggi menjadikan sektor ini sebagai sumber pertumbuhan penting di Sulawesi Tenggara. Lebih dari 97 persen sektor perdagangan, hotel dan restoran disumbang dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, disusul oleh sub-sektor restoran dengan kontribusi sebesar 2 persen, dan sektor perhotelan yang baru menyumbang 0,2 persen.

Gambar 1.6. Pertanian Masih Merupakan Kontributor Terbesar Perekonomian Sulawesi Tenggara



Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan memiliki pertumbuhan tinggi tapi cenderung belum stabil. Pada tahun 2007, sektor pertambangan tumbuh 23,8 persen namun kemudian mengalami kontraksi hingga minus 3,3 persen (2008), dan baru pulih tahun 2010 dengan pertumbuhan 23 persen. Demikian pula industri pengolahan yang tumbuh sebesar 30,6 persen tahun 2006, namun mengalami kontraksi hingga minus 2,8 persen (2009). Pertumbuhan industri pengolahan relatif dipengaruhi pertumbuhan sektor pertambangan karena hampir 60 persen produksi industri pengolahan bersumber dari industri logam dasar besi dan baja.

8 Ekonomi bawah tanah yang juga dikenal ekonomi bayangan meliputi seluruh kegiatan ekonomi yang tidak tercatat, biasanya meliputi kegiatan ekonomi informal yang tidak tercatat, aktivitas ekonomi yang melanggar perundang-undangan atau peraturan yang berlaku, dan juga praktik penghindaran pajak (Kompas 8 Oktober 2011 halaman 17).

9 Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara memperkirakan potensi sumberdaya pertambangan yang belum tergal di Sulawesi Tenggara seluas 27.207 ha, dengan cadangan sebanyak 8,2 miliar WMT, atau dengan nilai Rp. 1.850 triliun yang tersebar di 5 kawasan. Potensi tersebut tersebar di 5 Kawasan Pertambangan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kelima kawasan tersebut adalah : (i) Pusat Kawasan Lasalimu Pulau Buton dan Muna; (ii) Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Selatan; (iii) Kolaka Utara meliputi Kabupaten Kolaka Utara dan kabupaten Konawe bagian utara; (iv) Kolaka meliputi Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan bagian selatan; dan (v) Torobulu meliputi Kabupaten Konawe Selatan, Bombana dan Wawonii.

Tabel 1.2. Sektor Pertanian Masih Menjadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Penting di Sulawesi Tenggara

Sektor	Pertumbuhan Riil (%) (2001=100)							Sumber Pertumbuhan (%)						
	'06	'07	'08	'09	'10	Rata-rata	rank	'06	'07	'08	'09	'10	Rata-rata	rank
Pertanian	4,6	5,6	5,0	2,7	1,3	3,9	9	1,7	2,0	1,8	0,9	0,4	2,6	2
Pertambangan dan Penggalian	-5,7	23,8	-3,3	6,0	23,0	12,4	1	-0,3	1,2	-0,2	0,3	1,2	1,2	7
Industri Pengolahan	30,6	10,4	6,2	-2,8	18,8	8,2	7	2,2	0,9	0,6	-0,2	1,5	2,0	6
Listrik, Gas, Air Bersih	7,6	6,4	7,9	15,6	8,8	9,7	6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	9
Konstruksi	8,8	9,1	11,3	12,7	15,4	12,1	2	0,7	0,7	0,9	1,0	1,3	1,0	3
Perdagangan, Hotel dan restoran	4,7	9,3	10,5	14,6	12,0	11,6	4	0,7	1,4	1,6	2,3	2,0	3,7	1
Pengangkutan dan Komunikasi	9,2	5,8	13,7	19,6	9,0	12,0	3	0,7	0,4	1,0	1,5	0,8	2,8	4
Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	21,5	7,8	11,5	7,3	12,5	9,8	5	1,1	0,4	0,6	0,4	0,7	1,1	8
Jasa-Jasa	6,6	6,0	7,1	8,8	1,4	5,8	8	0,9	0,8	0,9	1,1	0,6	2,3	5
Sulawesi Tenggara	7,7	8,0	7,3	7,6	8,2	7,7		7,7	8,0	7,3	7,6	8,2	7,7	

Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Kolaka mempunyai pertumbuhan dan pendapatan per kapita tertinggi di Sulawesi Tenggara. Kolaka merupakan daerah yang mempunyai produk tambang kualitas ekspor sehingga kontribusinya terhadap perekonomian provinsi cukup signifikan. Selain Kolaka, beberapa daerah yang dapat dikategorikan maju dan tumbuh cepat adalah: (i) Konawe Utara dan Buton Utara sebagai daerah dengan pemanfaatan sumber daya pertambangan yang relatif baik terutama setelah menjadi daerah otonom baru; dan (ii) Kota Kendari dan Kota Bau-Bau sebagai daerah perkotaan yang menjadi pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa dalam rangka peningkatan nilai tambah untuk kebutuhan bagi daerah-daerah lainnya. Kolaka Utara memiliki PDRB per kapita cukup tinggi, namun tingkat pertumbuhannya sangat rendah dipengaruhi oleh produktivitas kakao dan cengkeh yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan produktivitas karena telah berumur tua serta adanya serangan hama.

Gambar 1.7. Lima Daerah di Sulawesi Tenggara Terkategori Maju dan Cepat Tumbuh

		PDRB Per kapita	
		Tinggi	Rendah
Pertumbuhan ekonomi (%)	Tinggi	Daerah Maju dan Tumbuh Cepat Kolaka, Konawe Utara, Buton Utara, Kota Kendari Kota Bau-Bau	Daerah Berkembang Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi
	Rendah	Daerah Maju tapi Tumbuh Lamban Kolaka Utara	Daerah Tertinggal : Buton & Muna

Sumber: Diolah dari BPS, 2011.

Seiring dengan pergeseran struktur ekonomi, peran sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja cenderung menurun seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor tersier. Sektor pertanian masih merupakan penyerap tenaga kerja tertinggi namun dengan pertumbuhan yang negatif dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2010, seluruh sektor mengalami pertumbuhan tenaga kerja

negatif kecuali di sektor industri, jasa dan perdagangan. Sektor jasa dan perdagangan mampu menyerap tenaga kerja baru tertinggi, yakni secara berturut-turut sebesar 27 persen dan 17 persen. Hal ini menandai terjadinya pergeseran tenaga kerja ke sektor perdagangan dan jasa yang saat ini sedang berkembang pesat di Sulawesi Tenggara.

Tabel 1.3. Pada Tahun 2010, Terjadi Pergeseran Tenaga Kerja ke Sektor Jasa dan Perdagangan

Sektor Ekonomi	2007			2008			2009			2010		
	Jiwa	(%)*	(%)**									
Pertanian	512.140	57,3	1,9	538.626	58,4	5,2	502.886	52,9	-6,6	496.054	49,7	-1,4
Industri	54.233	6,1	-8,6	45.616	4,9	-15,9	50.178	5,3	10,0	53.666	5,4	7,0
Bangunan	33.675	3,8	50,8	32.869	3,6	-2,4	38.198	4,0	16,2	37.597	3,8	-1,6
Perdagangan	127.469	14,3	10,9	127.781	13,8	0,2	135.477	14,3	6,0	158.411	15,9	16,9
Angkutan	48.663	5,4	3,7	46.309	5,0	-4,8	50.054	5,3	8,1	45.766	4,6	-8,6
Jasa	102.412	11,5	30,1	115.142	12,5	12,4	138.687	14,6	20,4	175.748	17,6	26,7
Lainnya	16.009	1,8	51,5	16.775	1,8	4,8	35.396	3,7	111,0	30.436	3,1	-14,0
Sulawesi Tenggara	894.601	100,0	7,1	923.118	100,0	3,2	950.876	100,0	3,0	997.678	100,0	4,9

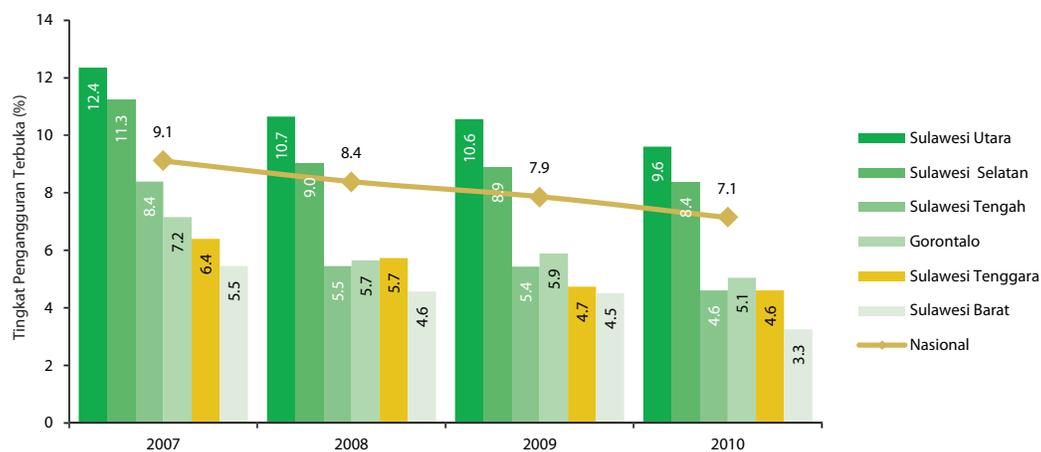
Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Catatan : *) Persentase kontribusi pekerja sektor terhadap total pekerja; **) persentase pertumbuhan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara relatif lebih baik dibanding Provinsi lain di Sulawesi. Dalam 4 tahun terakhir, TPT di Sulawesi Tenggara jauh lebih rendah dibanding rata-rata TPT nasional dan juga dibanding TPT provinsi lain di Sulawesi. Pada tahun 2008, TPT Sulawesi Tenggara sempat lebih tinggi dibanding Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Namun pada tahun 2007 dan dua tahun terakhir, TPT Sulawesi Tenggara hanya sedikit di atas Sulawesi Barat yang merupakan provinsi dengan TPT terendah di Sulawesi.

Daerah Kendari dan Kota Bau-Bau merupakan daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi. Disamping memiliki TPT tertinggi, Kota Kendari juga memiliki kontribusi jumlah penganggur terbesar. Pada tahun 2010, jumlah penganggur di Kota Kendari sebesar 21 ribu disusul oleh Kota Bau-Bau. Sementara itu, daerah dengan TPT terendah adalah Buton Utara dengan jumlah penganggur hanya 793 orang. Tingginya pengangguran di perkotaan, terutama didorong oleh pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.

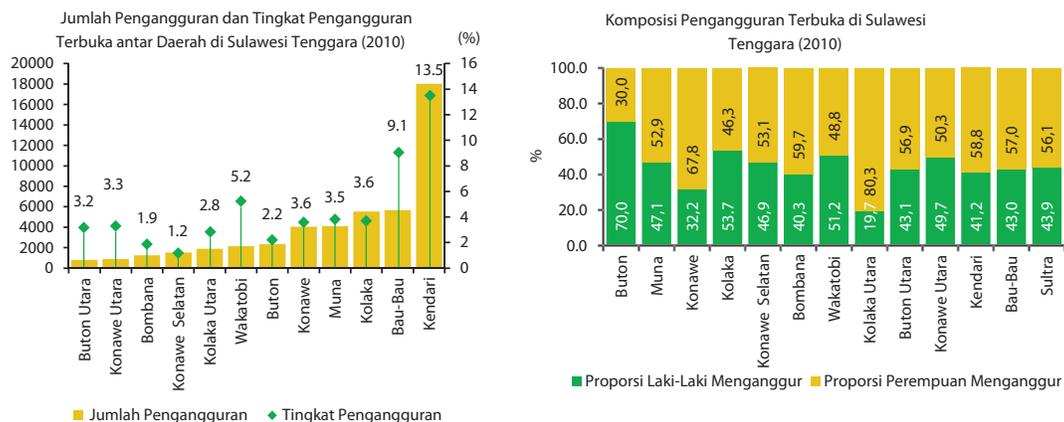
Gambar 1.8. Sulawesi Tenggara Relatif Tidak Bermasalah dalam hal TPT Dibanding Provinsi Lain di Sulawesi



Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh perempuan. Total pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010 adalah 48,2 ribu orang, dan 56,1 persen diantaranya perempuan. Besarnya komposisi pengangguran terbuka perempuan tidak hanya tercermin di tingkat provinsi. Dari 12 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, 7 diantaranya memiliki pengangguran yang didominasi oleh kaum perempuan. Kota Kendari sebagai daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi, juga didominasi oleh kaum perempuan. Banyaknya penganggur perempuan dibandingkan dengan penganggur laki-laki menunjukkan bahwa perempuan masih mempunyai hambatan-hambatan untuk memasuki pekerjaan pada sektor tertentu dibandingkan dengan laki-laki, selain itu mencerminkan masih rendahnya kualitas pendidikan perempuan dibanding dengan laki-laki.

Gambar 1.9. Kota Kendari merupakan Daerah dengan TPT tertinggi dan Didominasi oleh Perempuan

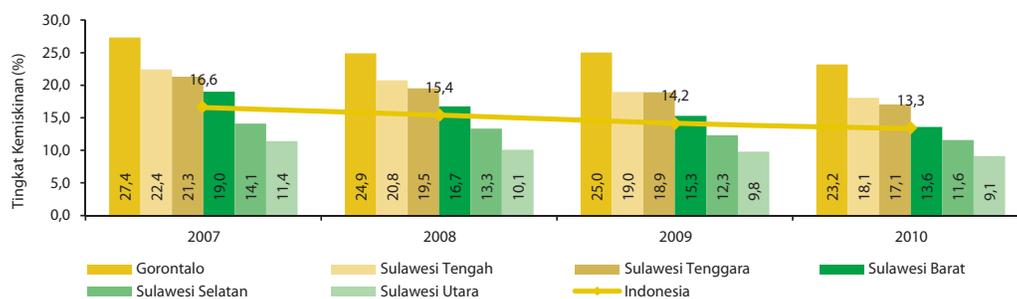


Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

1.4. Sosial

Angka kemiskinan Sulawesi Tenggara Menurun dari sebesar 21,2 persen tahun 2007 menjadi 17,1 persen tahun 2010. Upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan secara nasional maupun yang dilaksanakan oleh program dan kebijakan daerah telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun demikian angka 17,1 persen masih termasuk tinggi dibanding dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 13,3 persen. Jika dilihat perbandingan antar provinsi di Pulau Sulawesi, Sulawesi Tenggara masih berada pada posisi ketiga tertinggi dibawah Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Sementara secara nasional, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara masih pada urutan ke-11 tertinggi.

Gambar 1.10. Walaupun Menurun Namun Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Tenggara Relatif Masih tinggi

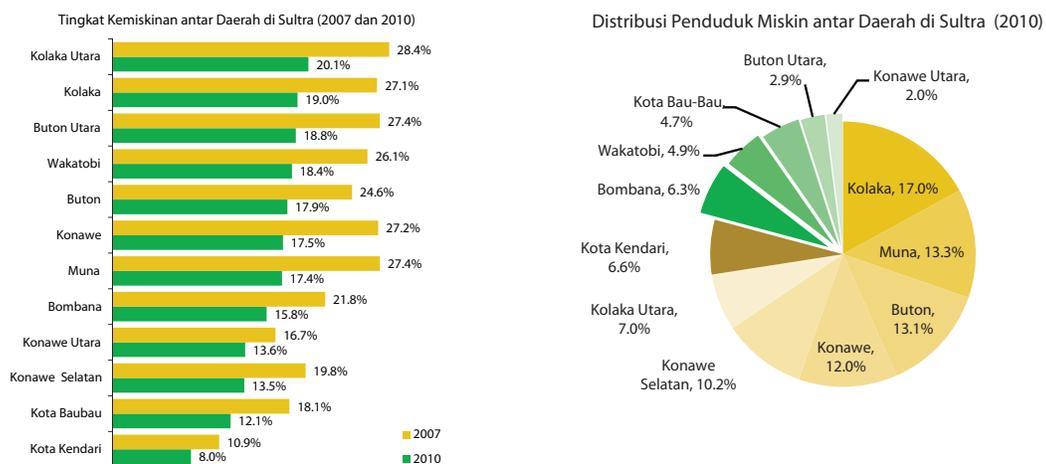


Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Tingkat kemiskinan yang tertinggi terdapat di Kolaka Utara dan yang terendah di Kota Kendari. Kolaka Utara merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi baik pada tahun 2007 maupun tahun 2010 meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan. Sementara Kota Kendari, meskipun tingkat penurunan kemiskinan terhitung terkecil, namun masih merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah. Kolaka Utara memiliki angka kemiskinan tertinggi namun dengan jumlah penduduk miskin terkecil.

Daerah yang mengalami pergeseran signifikan adalah Muna dan Konawe. Muna merupakan kabupaten dengan penurunan tingkat kemiskinan tertinggi sehingga mampu menggeser posisi daerah tersebut dari ke-2 tertinggi tahun 2007 menjadi ke-7 tertinggi, atau ke-5 terendah pada tahun 2010. Meskipun demikian, Muna masih merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Kolaka. Daerah-daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada umumnya merupakan daerah dengan mayoritas penduduk bergerak disektor pertanian dan tinggal di pedesaan yang selama ini mengalami penurunan produktivitas lahan dengan luas lahan yang sudah tidak ekonomis untuk menjadi penopang ekonomi rumah tangga, karena semakin sempit.

Gambar 1.11. Terjadi Penurunan Tingkat Kemiskinan di Seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara



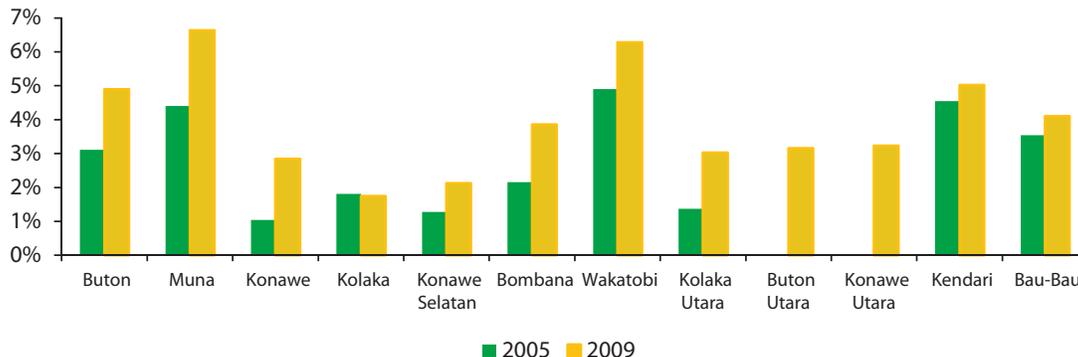
Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Tenggara, tidak sejalan dengan kondisi tingkat kemiskinan rumah tangga yang dikepalai perempuan. Jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan di provinsi Sulawesi Tenggara meningkat satu persen dari 2,8 persen pada tahun 2005 menjadi 3,8 persen pada tahun 2009. Tetapi jumlah rumah tangga miskin (20% pendapatan terendah), mengalami peningkatan lebih besar (1,2%) dari 2,7 persen pada tahun 2005 menjadi 3,9 persen pada tahun 2009 (tabel terlampir). Hal ini menunjukkan belum meratanya program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan di provinsi ini.

Sepuluh dari jumlah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan. Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan paling besar terjadi di Muna (2,2%), diikuti dengan Buton dan Konawe (1,8%), dan Bombana, Konawe Utara¹⁰, serta Kolaka Utara (1,7%). Perubahan persentase jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan bisa terjadi karena perpindahan rumah tangga ke kelompok pendapatan lain, misalnya ke kuintil 2. Hal ini ditemukan antara lain di Kolaka Utara dan Kendari. Meski demikian ke-6 kabupaten di atas tetap membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah, sehingga jumlah perempuan miskin yang ada bisa dikurangi secara signifikan.

¹⁰ Jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan meningkat karena pemekaran.

Gambar 1.12. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dikepalai Perempuan Justru Meningkat



Sumber: Diolah dari Susenas 2009

IPM Sulawesi Tenggara sudah berada sedikit diatas rata-rata KTI, namun masih jauh dibawah rata-rata nasional. Pencapaian IPM Sulawesi Tenggara tahun 2009 sebesar 69,5. Angka ini sedikit diatas rata-rata provinsi di KTI sebesar 69,1. Peringkat IPM Sulawesi Tenggara masih stagnan pada posisi ke-25, atau ke-9 terendah secara nasional. Rendahnya IPM Sulawesi Tenggara terutama disebabkan masih rendahnya indikator harapan hidup.

Tabel 1.4. IPM Sulawesi Tenggara Belum Mengalami Pergeseran dari Posisi ke-25 dalam 5 Tahun Terakhir

Provinsi KTI	2005		2006		2007		2008		2009	
	IPM	Ranking								
Sulawesi Utara	74,2	2	74,4	2	74,7	2	75,2	2	75,7	2
Maluku	69,2	17	69,7	17	70,0	18	70,4	19	71,0	19
Sulawesi Selatan	68,1	23	68,8	23	69,6	21	70,2	21	70,9	20
Sulawesi Tengah	68,5	21	68,9	22	69,3	22	70,1	22	70,7	22
Gorontalo	67,5	25	68,0	24	68,8	24	69,3	24	69,8	24
Sulawesi Tenggara	67,5	24	67,8	25	68,3	25	69,0	25	69,5	25
Maluku Utara	67,0	27	67,5	27	67,8	27	68,2	28	68,6	29
Sulawesi Barat	65,7	29	67,1	29	67,7	28	68,6	27	69,2	27
Papua Barat	64,8	30	66,1	30	67,3	30	68,0	30	68,6	30
NTT	63,6	31	64,8	31	65,4	31	66,2	31	66,6	31
NTB	62,4	32	63,0	32	63,7	32	64,1	32	64,7	32
Papua	62,1	33	62,8	33	63,4	33	64,0	33	64,5	33
Rata-rata KTI	66,7		67,4		68,0		68,6		69,1	
Indonesia (BPS)	69,6		70,1		70,6		71,2		71,8	

Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Berdasarkan data tahun 2009, Bombana merupakan daerah dengan IPM terendah dan Kendari merupakan daerah dengan IPM tertinggi. Rendahnya pencapaian IPM terutama disebabkan masih rendahnya peningkatan angka melek huruf dan angka harapan hidup yang masih dibawah rata-rata nasional. Tahun 2009, Wakatobi, Bombana, dan Muna masih merupakan daerah dengan IPM terendah, sementara yang tertinggi terdapat di Kota Kendari disusul oleh Kota Bau-Bau.

Tabel 1.5. Variasi Diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Cukup Signifikan

Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)			Angka Melek Huruf (%)			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu)			IPM		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Kendari	68,9	69,0	69,0	98,4	98,4	98,4	11,0	11,0	11,1	621,7	628,1	629,3	74,6	75,1	75,3
Bau-Bau	69,5	69,8	70,1	95,2	95,2	95,3	9,6	9,6	9,8	601,8	607,1	608,1	71,6	72,1	72,6
Kolaka	66,4	66,6	66,9	93,1	93,1	93,2	7,7	7,7	7,7	624,5	626,6	629,3	69,8	70,1	70,4
Konawe Selatan	67,2	67,3	67,5	94,1	94,1	94,1	7,6	7,6	7,6	599,0	604,2	607,8	68,4	68,9	69,2
Konawe	66,5	66,7	67,0	94,0	94,6	94,6	8,0	8,0	8,0	595,6	601,4	606,2	68,0	68,7	69,3
Kolaka Utara	65,1	65,3	65,4	93,0	93,0	93,0	7,4	7,4	7,5	608,2	611,6	617,2	67,6	67,9	68,5
Buton	67,6	67,9	68,2	85,7	85,7	85,7	6,1	6,3	6,5	618,0	623,5	627,1	67,1	67,8	68,5
Konawe Utara	66,2	66,5	66,8	93,8	93,8	93,8	7,0	7,0	7,1	592,6	598,3	602,7	66,8	67,4	68,0
Buton Utara	67,3	67,6	68,0	86,5	86,5	86,6	7,6	7,6	7,9	600,8	601,8	602,4	66,9	67,2	67,6
Muna	65,7	65,8	65,9	87,6	87,6	87,8	7,2	7,3	7,4	600,8	606,1	611,3	65,9	66,5	67,0
Wakatobi	67,7	67,8	68,0	88,8	88,8	89,1	6,5	6,5	6,9	584,4	589,4	593,1	65,5	66,0	66,7
Bombana	67,1	67,3	67,5	87,6	88,2	88,9	6,2	6,2	6,6	592,6	598,0	599,8	65,4	66,1	66,6
Sulawesi Tenggara	67,2	67,4	67,6	91,3	91,4	91,5	7,7	7,7	7,9	605	611,7	615,3	68,3	69	69,5

Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Kotak 1.1. Pencapaian Indikator Makro RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013

Pada tahun 2010, Dua dari 4 target indikator makro Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah tercapai. Kedua indikator tersebut adalah : (i) penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sudah mencapai 4,6 persen tahun 2010 sementara target tahun 2013 sebesar 7 persen; dan (ii) tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 8,2 persen tahun 2010 telah melampaui target per tahun sebesar 8 sampai 8,5 persen. Sementara itu, dua target indikator makro yang belum tercapai adalah angka kemiskinan dan pendapatan per kapita riil. Dengan menggunakan garis tren *baseline* angka kemiskinan tahun 2007 dan target 2013 sebesar 10 persen, seharusnya tingkat kemiskinan Sultra tahun 2010 sebesar 15,6 persen, namun pada tahun tersebut tingkat kemiskinan Sultra masih 17,1 persen. Divergensi (gerakan menjauh dari target) pada tahun 2010 berhasil dikoreksi pada tahun 2011 dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan menjadi 14,6 persen, namun masih belum mencapai target tahun tersebut yang seharusnya turun hingga 13,8 persen. Pemerintah provinsi juga menargetkan peningkatan PDRB per kapita riil sebesar Rp. 6,2 juta tahun 2013, sehingga seharusnya PDRB per kapita tahun 2010 sudah mencapai Rp. 5,3 juta, sementara PDRB per kapita tahun 2010 masih sedikit dibawah itu, yakni Rp. 5,2 juta.

Gambar 1.13. Pencapaian Angka Kemiskinan dan PDRB VS Target RPJMD 2008-2013



Sumber : Diolah dari BPS dan RPJMD Pemprov Sultra 2008-2013.

1.5. Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Mempertahankan pertumbuhan diatas 8 persen merupakan tantangan strategis perekonomian Sulawesi Tenggara. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 8 persen yang sudah dicapai pada tahun 2010. Hal ini penting dilakukan untuk dapat mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi yang saat ini masih relatif kecil dibanding rata-rata provinsi secara nasional. Untuk memelihara stabilitas pertumbuhan di atas 8 persen, pemerintah provinsi dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- (i) Mendorong revitalisasi di sektor pertanian yang cenderung mengalami penurunan angka pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pemulihan sektor pertanian dapat dilakukan dengan merevitalisasi produktivitas dan produksi sub-sektor perkebunan sebagai kontributor terbesar sektor pertanian di Sulawesi Tenggara. Penelitian dan pengembangan serta pemasaran di sub-sektor perkebunan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas produksi perkebunan (khususnya Kakao) dan juga berorientasi ekspor.
- (ii) Mengelola secara baik transisi ekonomi dan ketenagakerjaan dari sektor primer ke sektor tersier dengan terus mendorong investasi di sektor infrastruktur. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran; transportasi dan komunikasi; serta jasa merupakan sektor dengan pertumbuhan tinggi disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang juga tinggi yang perlu terus didorong dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
- (iii) Mengelola investasi di sektor pertambangan dengan prioritas pada peningkatkan stabilitas pertumbuhan produksi sektor pertambangan yang cenderung berfluktuasi melalui pengelolaan, perluasan, dan pengendalian ijin usaha yang profesional. Stabilitas pertumbuhan sektor pertambangan dapat berdampak pada stabilnya pertumbuhan industri manufaktur di Sulawesi Tenggara yang sebagian besar inputnya berasal dari pertambangan.

Meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda penting dalam 2 tahun ke depan (2012 dan 2013). Tantangan pembangunan di Sulawesi Tenggara di bidang sosial terletak pada peningkatan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan sehingga dapat mengejar target pengurangan kemiskinan yang sudah ditetapkan. Merujuk pada target penurunan angka kemiskinan tahun 2013 menjadi 10 persen, dan pencapaian angka kemiskinan tahun 2011 sebesar 14,6 persen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mendorong penurunan angka kemiskinan setidaknya sebesar 2,3 persen per tahun dalam dua tahun ke depan (2012 dan 2013). Prioritas pengurangan angka kemiskinan dapat diarahkan pada daerah-daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar seperti di Kolaka, Muna, Buton, dan Konawe.

Dalam rangka meningkatkan IPM, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara perlu mengarahkan prioritas pada peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Indikator IPM yang paling bermasalah di Sulawesi Tenggara adalah indikator angka melek huruf yang masih sangat rendah. Namun demikian, permasalahan angka melek huruf di Sultra terjadi pada kelompok usia 60 tahun ke atas (masih dibawah 60 persen) , sementara pada kelompok usia 15-44 tahun menunjukkan pencapaian yang cukup tinggi (diatas 96 persen). Faktor rendahnya motivasi dari kelompok sasaran serta usia yang sudah akan memasuki non-produktif membuat upaya pemberantasan buta aksara pada kelompok usia lanjut sulit untuk dijadikan prioritas. Untuk itu, peningkatan IPM perlu diarahkan pada dua indikator lain, yakni: (i) peningkatan angka rata-rata lama sekolah di bidang pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, pencegahan angka putus sekolah, serta peningkatan angka melanjutkan sekolah; dan (ii) peningkatan indeks angka harapan hidup melalui upaya peningkatan promosi kesehatan (PHBS – Pola Hidup Bersih dan Sehat) untuk mengurangi angka kesakitan penduduk, serta promosi KIBLA (kesehatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir) untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.



Bab 2

Pengelolaan Keuangan Daerah

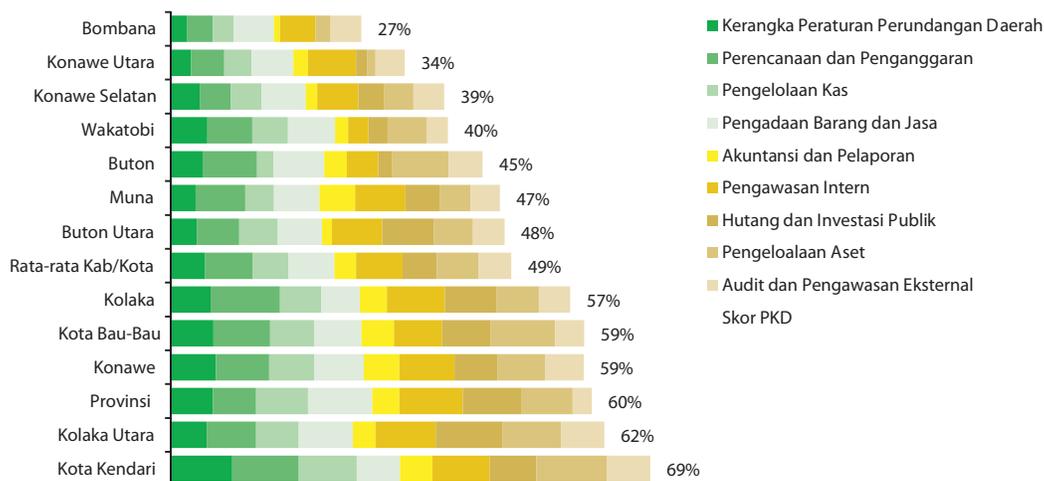
2.1. Pendahuluan

Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) didasarkan pada hasil survei kapasitas PKD. Survei kapasitas PKD bertujuan untuk melakukan pemetaan kapasitas PKD seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi 1 pemerintah provinsi dan 12 pemerintah kabupaten/kota. Survei dilaksanakan bulan Februari sampai Maret 2011. Instrumen survei dikembangkan oleh Bank Dunia dan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku terkait PKD serta berbagai praktek teladan (*best practices*) pengelolaan keuangan publik. Instrumen survei berupa *balance scorecard* terdiri dari 145 indikator penilaian yang diklasifikasi kedalam 9 bidang strategis PKD, yaitu: (a) kerangka peraturan dan perundangan daerah; (b) perencanaan dan penganggaran; (c) pengelolaan kas; (d) pengadaan barang dan jasa; (e) akuntansi dan pelaporan; (f) pengawasan internal; (g) tata kelola hutang, hibah dan investasi publik; (h) pengelolaan aset; dan (i) audit dan pengawasan eksternal. Nilai masing-masing daerah atau bidang PKD dinyatakan dalam persentase, yakni persentase indikator yang terpenuhi terhadap jumlah indikator penilaian.

2.2. Gambaran Umum Kapasitas PKD

Secara umum, kapasitas PKD pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih memerlukan pembenahan. Rata-rata nilai PKD kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara baru mencapai 49 persen. Artinya, pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara secara rata-rata baru memenuhi kurang dari 50 persen indikator PKD yang baik. Angka ini masih dibawah nilai provinsi yang sudah mencapai 60 persen. Dari 12 kabupaten/kota, sebagian besar (7 daerah) masih dibawa nilai rata-rata tersebut dan hanya 5 daerah yang berada di atas nilai rata-rata, yakni: Kota Kendari, Kolaka Utara, kota Bau-Bau, Konawe dan Kolaka. Kolaka Utara dan Kota Kendari bahkan memiliki nilai yang lebih baik dibanding provinsi. Kelemahan kapasitas PKD di tingkat kabupaten/kota tersebar di 6 bidang PKD, dan hanya dua bidang yang relatif memiliki nilai rata-rata cukup baik, yakni bidang perencanaan dan penganggaran serta pengawasan internal.

Gambar 2.1. Nilai Kapasitas PKD Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber: Database PEA Sultra 2011.

Pemerintah Provinsi memiliki nilai lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota pada tujuh bidang strategis PKD. Pemerintah provinsi memiliki nilai yang lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota hanya pada dua bidang strategis, yakni bidang audit eksternal dan perencanaan dan penganggaran. Sementara pada 7 bidang lainnya, nilai provinsi lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi telah berhasil mencapai nilai diatas 80 persen pada bidang pengadaan barang dan jasa serta

pengawasan internal. Dari 9 bidang strategis PKD, bidang akuntansi dan pelaporan merupakan bidang dengan nilai paling rendah untuk tingkat kabupaten/kota, sementara untuk provinsi bidang pengawasan eksternal.

Selain Provinsi, beberapa kabupaten/kota dapat dijadikan sebagai contoh yang baik untuk daerah lainnya pada bidang-bidang tertentu. Beberapa daerah seperti Kota Kendari, Kolaka Utara, Kota Bau-Bau, dan Kolaka serta provinsi memiliki nilai tertinggi pada satu atau lebih bidang strategis PKD. Misalnya, Kota Kendari memperoleh nilai tertinggi pada 4 bidang, yakni kerangka peraturan perundangan daerah, pengelolaan kas, pengelolaan aset; Audit dan pengawasan internal. Kolaka Utara memiliki nilai tertinggi dalam bidang pengelolaan hutang dan investasi publik serta audit dan pengawasan eksternal; Kolaka memiliki nilai tertinggi untuk perencanaan dan penganggaran dan Kota Bau-Bau untuk akuntansi dan pelaporan. Meskipun belum ada yang bisa mencapai nilai 100 persen, daerah dengan nilai tertinggi pada bidang tertentu sudah layak menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Tabel 2.1. Nilai Kapasitas PKD antar Pemerintah Daerah Berdasarkan Bidang Strategis PKD

Pemerintah Daerah	Kode Bidang Strategis PKD (persen)									Nilai
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bombana	21	33	27	52	8	46	0	19	40	27
Konawe Utara	26	43	35	54	19	62	14	11	38	34
Konawe Selatan	37	40	40	57	15	53	33	38	40	39
Wakatobi	47	58	46	61	17	26	25	50	28	40
Buton	41	70	21	66	29	41	17	74	50	45
Muna	32	64	37	59	46	65	44	40	38	47
Buton Utara	34	54	50	57	13	65	67	50	38	48
Kolaka	51	90	53	50	35	75	67	54	44	57
Konawe	55	73	57	61	42	62	63	83	38	59
Kota Bau-Bau	58	69	58	64	46	71	56	61	50	59
Kolaka Utara	46	64	55	70	29	78	86	76	56	62
Kota Kendari	79	86	75	56	42	74	60	91	56	69
Rata-rata Kabupaten/Kota	44	62	46	59	28	60	44	54	43	49
Sulawesi Tenggara	50	56	67	83	35	82	75	67	31	60

Sumber: Database PEA Sultra 2011.

Keterangan Kode Bidang Strategis PKD:

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Kerangka Peraturan Daerah | 4 Pengadaan Barang & Jasa | 7 Hutang & Investasi Publik |
| 2 Perencanaan dan Penganggaran | 5 Akuntansi dan Pelaporan | 8 Pengelolaan Aset |
| 3 Pengelolaan Kas | 6 Pengawasan Intern | 9 Audit & Pengawasan Eksternal |

 : Nilai tertinggi pada masing-masing Bidang

2.3. Gambaran PKD Berdasarkan Bidang Strategis

2.3.1. Kerangka Peraturan Daerah

Otonomi daerah menuntut daerah menyusun kerangka hukum yang memadai untuk melandasi pengelolaan keuangannya. Penilaian atas bidang peraturan perundangan daerah difokuskan pada tiga sasaran yaitu: (a) kerangka peraturan perundangan daerah terkait PKD sesuai dengan mandat peraturan

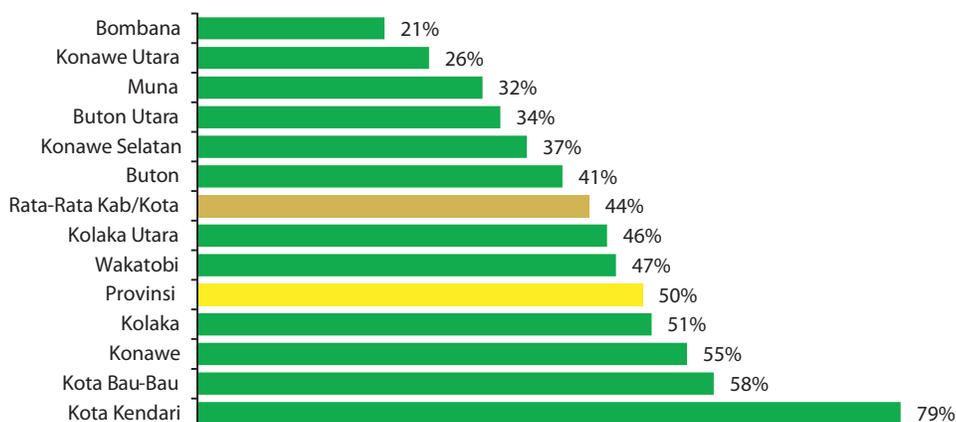
perundangan nasional; (b) organisasi PKD yang efektif; dan (c) adanya kerangka hukum terkait prinsip transparansi dan partisipasi.

Kerangka peraturan perundangan daerah merupakan bidang penilaian yang belum memuaskan.

Nilai rata-rata kapasitas PKD kabupaten/kota dalam bidang ini sebesar 44 persen. Meskipun belum bisa dikatakan baik, nilai provinsi pada bidang ini relatif lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota. Dari 12 kabupaten/kota, Kota Kendari merupakan daerah paling menonjol, sementara 6 daerah masih memiliki nilai dibawah rata-rata. Daerah dengan nilai rendah umumnya disebabkan oleh belum adanya salah satu atau beberapa dari kerangka hukum berikut : Perkada tentang standar belanja; kebijakan akuntansi; Perda tentang Badan Layanan Umum (BLU); peraturan tentang penanaman modal; peraturan tentang pengelolaan aset daerah; dan peraturan terkait transparansi.

Namun terdapat beberapa capaian yang cukup menggembirakan. Misalnya, semua daerah sudah mampu mensahkan Perda tentang APBD secara tepat waktu, mensahkan Perkada mengenai RKPD, dan membuat nota kesepakatan tentang KUA/PPA sebelum Rancangan Perda APBD disusun. Terkait dengan susunan organisasi, 7 dari 12 kabupaten/kota sudah memiliki struktur organisasi terpadu dalam suatu badan yang disebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), yaitu Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Wakatobi, dan Buton Utara.

Gambar 2.2. Kapasitas PKD Bidang Peraturan Perundangan Daerah



Sumber: Database PEA Sultra 2011.

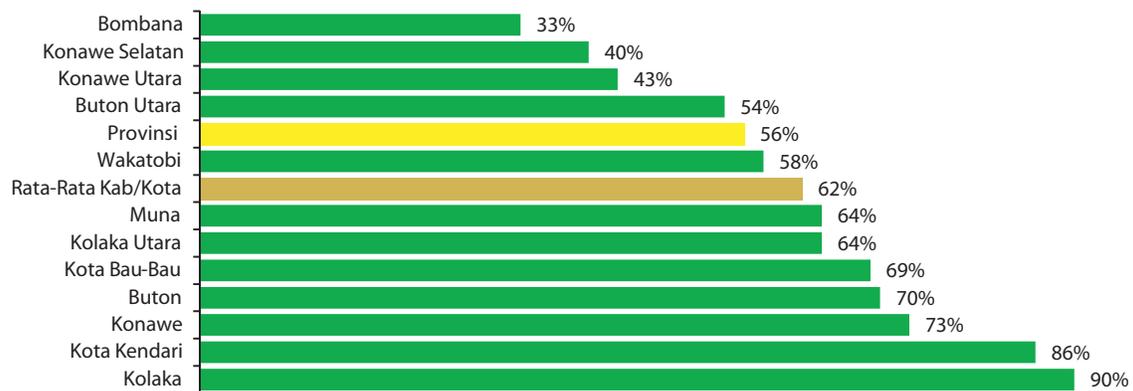
2.3.2. Perencanaan dan Penganggaran

Survei PEA Sultra menggunakan 13 indikator untuk melihat perencanaan dan penganggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara. Survei ini dibagi ke dalam 3 sasaran yaitu: (a) tersusunnya perencanaan dan penganggaran multitaahun, (b) target anggaran yang layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis, serta, (c) sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif.

Kapasitas pemerintah kabupaten/kota di bidang perencanaan dan penganggaran secara umum lebih tinggi dari provinsi, namun masih banyak hal yang harus diperbaiki. Nilai rata-rata 12 kabupaten/kota dalam bidang perencanaan dan penganggaran adalah 62 persen. Angka ini lebih baik dari nilai provinsi yang hanya 56 persen. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki nilai diatas rata-rata juga ada sekitar 7

daerah. Kolaka dan Kota Kendari terhitung paling menonjol dalam bidang ini dengan nilai diatas 80 persen. Tingginya nilai dalam bidang ini antara lain disebabkan oleh hampir semua daerah di Sulawesi Tenggara secara umum sudah mampu membuat dokumen perencanaan dengan mencantumkan indikator terukur seperti pada RPJMD, RENSTRA, RKPD, KUA/PPA, RKA-SKPD, dll, meskipun belum selengkap yang diharapkan. Kelemahan paling merata yang terjadi di daerah di Sulawesi Tenggara adalah belum satupun daerah yang telah menyusun Analisa Standar Biaya (ASB) sebagai dasar dalam penganggaran. Selain itu, aspek transparansi (akses masyarakat terhadap dokumen dan proses perencanaan dan penganggaran) belum banyak dipenuhi. Besarnya perbedaan antara APBD induk dengan APBD perubahan untuk kelompok belanja langsung yang juga masih sangat tinggi menunjukkan kualitas perencanaan yang masih rendah.

Gambar 2.3. Kapasitas PKD Bidang Perencanaan & Penganggaran



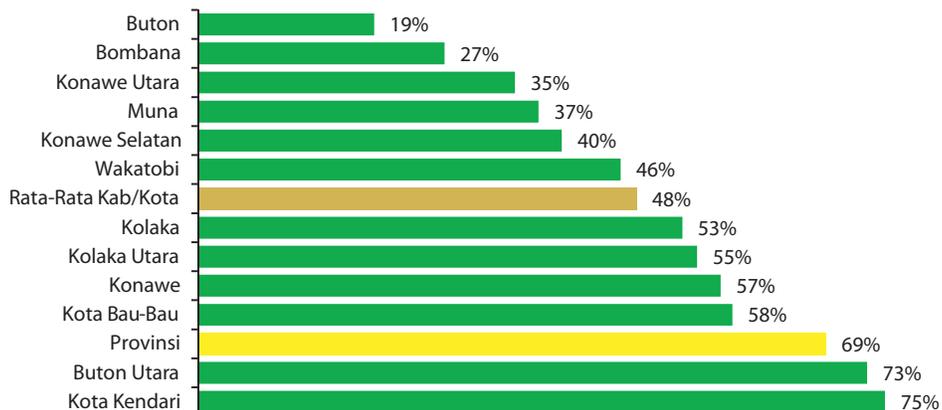
Sumber: Database PEA Sultra 2011.

2.3.3. Pengelolaan Kas

Penilaian bidang pengelolaan kas dimaksudkan untuk mengetahui praktik manajemen kas yang efektif guna memastikan pengelolaan dana yang efisien. Penilaian pengelolaan kas merujuk pada 4 sasaran yaitu: (a) kebijakan, prosedur dan pengendalian yang mengarah pada pengelolaan kas yang efisien, (b) tatakelola penerimaan, pengeluaran serta penanganan surplus kas, (c) sistem penagihan dan pemungutan pendapatan daerah, serta (d) peningkatan dan manajemen pendapatan.

Pada bidang ini, kapasitas rata-rata pemerintah kabupaten/kota masih dibawah 50 persen. Beberapa indikator yang paling banyak tidak dipenuhi pemerintah kabupaten/kota antara lain adalah laporan realisasi anggaran kas yang tidak dibuat setiap bulannya, sistem penagihan dan pemungutan pajak yang belum terintegrasi, tidak adanya Perkada tentang besaran uang persediaan, serta tidak adanya sanksi tegas terhadap penunggak pajak. Sementara itu, beberapa indikator yang paling banyak dipenuhi antara lain adalah Surat Penyediaan Dana (SPD) sudah dibuat berdasarkan anggaran kas; rekonsiliasi bank dengan buku besar sudah dilakukan setiap bulan; dasar penetapan pajak diverifikasi setiap tahun; tersedianya informasi pendukung penagihan untuk setiap pembayar pajak; penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kas daerah sudah dilakukan setiap hari. Kota Kendari, Buton Utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tiga pemerintah daerah yang memiliki nilai baik karena mampu memenuhi lebih dari 65 persen indikator yang ditanyakan.

Gambar 2.4. Kapasitas PKD Bidang Pengelolaan Kas

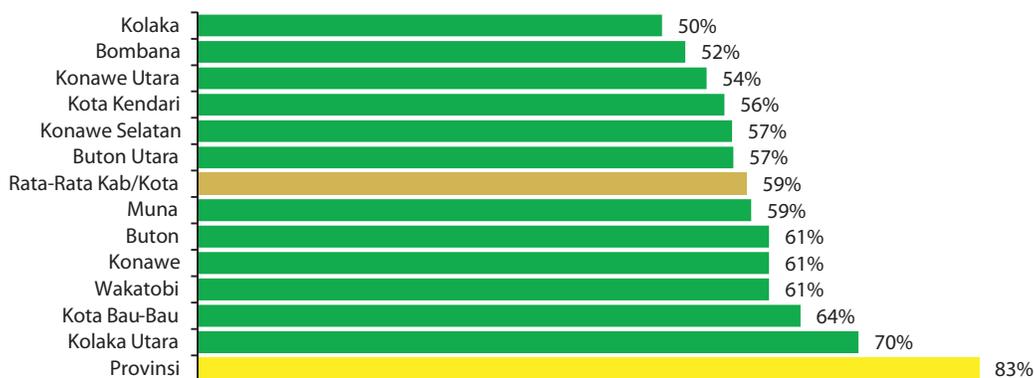


Sumber: Database PEA Sultra 2011.

2.3.4. Pengadaan Barang dan Jasa

Kapasitas pemerintah kabupaten/kota di bidang pengadaan barang dan jasa masih perlu ditingkatkan. Kapasitas rata-rata kabupaten/kota dalam bidang pengadaan barang dan jasa hanya 59 persen. Angka ini jauh dibawah kapasitas provinsi yang sudah mencapai 83 persen. Pada tingkat provinsi, bidang pengadaan barang dan jasa merupakan bidang strategis PKD dengan nilai paling tinggi. Terdapat sekitar tujuh daerah yang masih perlu perhatian khusus dalam bidang ini mengingat indikator yang terpenuhi masih kurang dari 60 persen. Beberapa kelemahan yang umum terjadi adalah belum tersedianya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar; seleksi dokumen prakualifikasi yang kurang ketat; kemampuan staf di bidang pengadaan yang belum memadai; penawaran tender yang belum transparan; serta belum dibuatnya Perkada tentang pengadaan barang dan jasa.

Gambar 2.5. Kapasitas PKD Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

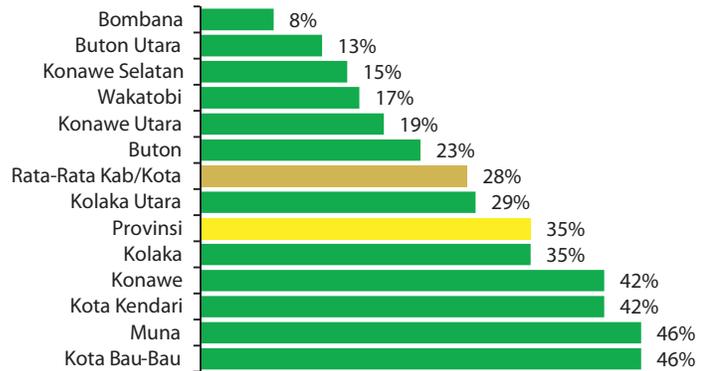


Sumber: Database PEA Sultra 2011.

2.3.5. Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan merupakan bidang dengan nilai rata-rata paling rendah di tingkat kabupaten/kota. Pada bidang ini, nilai rata-rata kabupaten/kota hanya 28 persen sementara provinsi hanya sebesar 35 persen. Aspek yang paling lemah dalam bidang ini umumnya adalah terkait SDM. Misalnya, hasil survei menunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta kepala biro/badan dalam DPPKAD sebagian besar belum berlatar belakang akuntansi. Hal ini diperparah dengan tidak adanya program pelatihan akuntansi yang bersifat periodik pada hampir semua daerah untuk staf keuangan.

Gambar 2.6 Kapasitas PKD Bidang Akuntansi dan Pelaporan

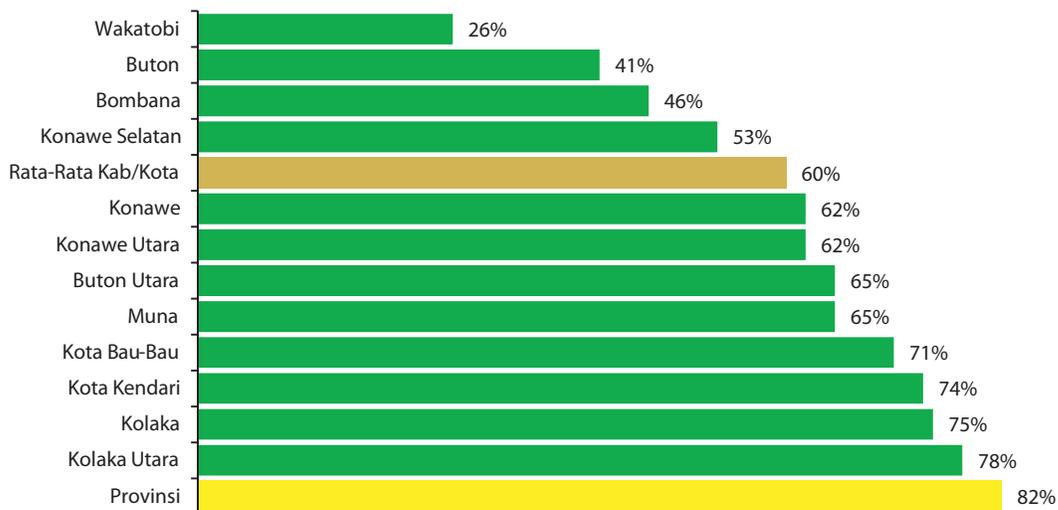


Sumber: Database PEA Sultra 2011.

2.3.6. Pengawasan Internal

Pada bidang ini, baik provinsi maupun rata-rata kabupaten memiliki nilai cukup tinggi, namun terdapat daerah yang memiliki nilai sangat rendah. Bidang ini diukur melalui 16 indikator yang terbagi ke dalam 3 sasaran yaitu: (a) terselenggaranya fungsi pengawasan internal yang efektif dan efisien, (b) terwujudnya standar dan prosedur audit yang baku, serta adanya (c) tindak lanjut terhadap temuan. Kapasitas pemerintah kabupaten/kota di bidang pengawasan internal cukup menggembirakan dengan. Dalam bidang ini Provinsi memiliki nilai paling tinggi diikuti oleh Kolaka Utara, Kolaka, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau dengan nilai di atas 70 persen. Kelemahan dalam bidang ini umumnya terdapat pada ketersediaan sumberdaya auditor yang memadai. Sebagian besar daerah masih belum mampu memenuhi 50 persen staf fungsional auditor dan 50 persen staf yang berlatarbelakang akuntansi. Selain itu, sebagian besar kabupaten/kota juga belum memenuhi ketentuan anggaran sebesar 1 persen dari belanja untuk operasional Bawasda.

Gambar 2.7. Kapasitas PKD Bidang Pengawasan Intern

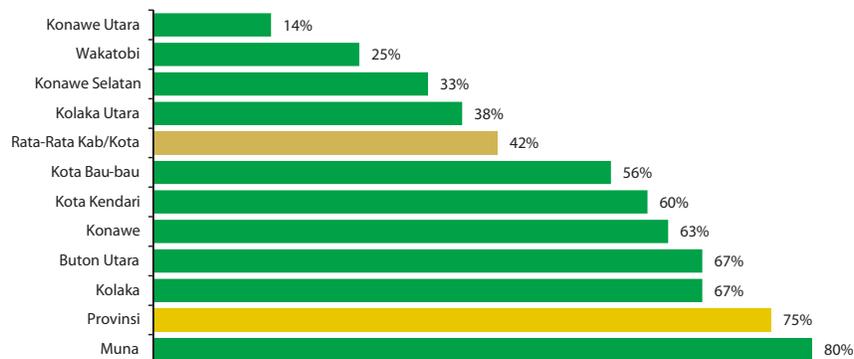


Sumber: Database PEA Sultra 2011.

2.3.7. Pengelolaan Hutang, Hibah dan Investasi Publik

Terdapat kesenjangan kapasitas yang cukup tinggi dibidang pengelolaan hutang, hibah, dan investasi. Hal ini tergambar dari adanya daerah yang berkapasitas jauh di atas rata-rata kabupaten, dan ada pula yang tingkat capaian kapasitasnya jauh di bawah rata-rata. Kelemahan umum pada bidang ini antara lain disebabkan oleh belum adanya kebijakan pengelolaan hutang, hibah dan investasi yang merujuk pada PP No. 54 Tahun 2005. Selain itu, belum adanya peraturan mengenai pencatatan penerimaan dan pelaporan hibah dan pinjaman, serta penanaman modal pada Badan Usaha Milik daerah (BUMD).

Gambar 2.8. Kapasitas PKD Bidang Pengelolaan Hutang, Hibah dan Investasi Publik



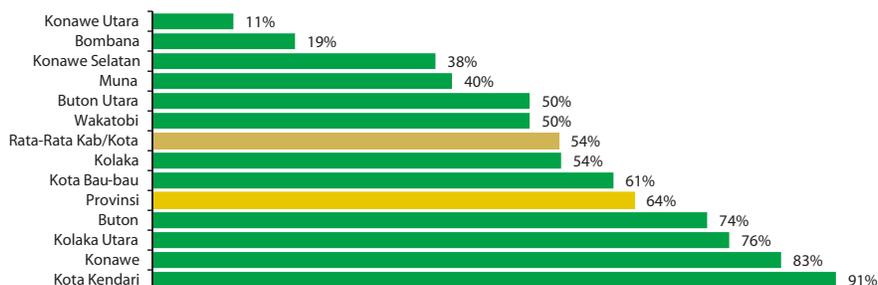
Sumber : Database PEA Sultra 2011.

Catatan : Bombana dan Konawe Utara tidak termasuk daerah yang dinilai pada bidang ini karena sampai survei dilaksanakan belum pernah menerima hibah/hutang dan melakukan investasi daerah.

2.3.8. Pengelolaan Aset Daerah

Kesenjangan kapasitas antar kabupaten/kota dalam bidang pengelolaan aset sangat tinggi. Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pemanfaatan barang, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pengawasan serta peñatausahaan aset daerah. Secara umum, rata-rata kapasitas daerah kabupaten/kota dalam bidang ini adalah 54 persen. Rendahnya nilai rata-rata disebabkan ada beberapa daerah dengan nilai yang sangat rendah (dibawah 20 persen), yakni Konawe Utara dan Bombana, meskipun terdapat 5 kabupaten/kota yang memiliki nilai diatas 60 persen. Semua daerah pada umumnya masih perlu meningkatkan kapasitas pada bidang ini terutama dalam hal pembuatan sistem informasi barang daerah, pembuatan laporan tahunan hasil pemeriksaan barang/aset, penghapusan barang dengan metode dan alasan yang tepat. Selain itu, perlu pula ada penetapan status penggunaan barang melalui surat keputusan Bupati/Walikota/ Gubernur. Ketentuan-ketentuan tersebut perlu diikuti oleh sanksi atas penyalahgunaan aset daerah.

Gambar 2.9. Kapasitas PKD Bidang Pengelolaan Aset



Sumber : Database PEA Sultra 2011.

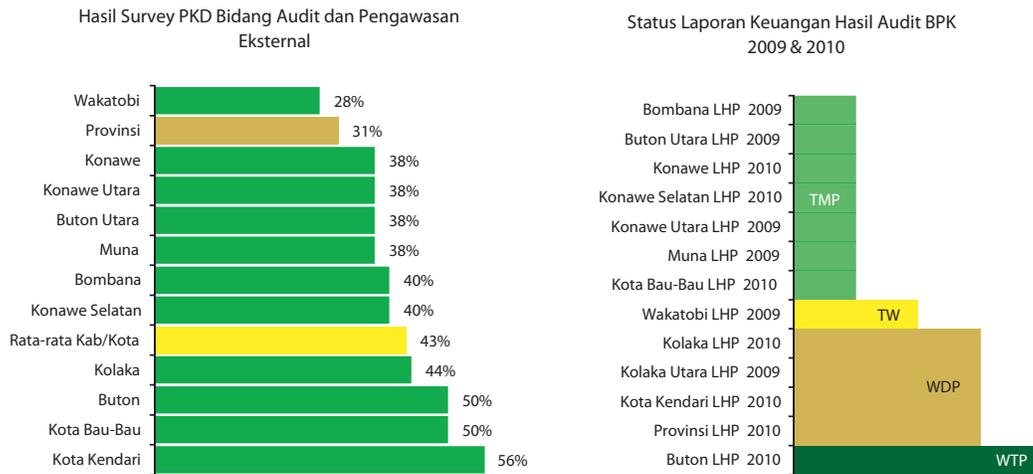
Catatan : Bombana dan Konawe Utara tidak termasuk daerah yang dinilai pada bidang ini karena sampai survei dilaksanakan belum pernah menerima hibah/hutang dan melakukan investasi daerah.

2.3.9. Audit dan Pengawasan Eksternal

Rata-rata kabupaten/kota maupun provinsi memiliki nilai yang rendah dalam bidang ini. Pemerintah Kabupaten Wakatobi memperoleh nilai terendah dalam bidang ini, sementara rata-rata kabupaten/kota juga hanya memenuhi 43 persen indikator yang ditanyakan. Rendahnya nilai pemerintah daerah dalam bidang ini disebabkan karena sebagian besar pemerintah daerah tidak tepat waktu dalam menyerahkan laporan keuangan kepada BPK, tidak pernah memublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat, serta tidak pernah membuka akses kepada masyarakat untuk mengikuti rapat-rapat DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban hasil audit. Selain itu, terkait hasil audit, dari 13 pemerintah daerah (termasuk provinsi), hanya Buton yang berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 5 pemerintah daerah berstatus Wajar Dengan Pengecualian, 1 pemerintah daerah berstatus Tidak Wajar (TW), dan sebagian besar berstatus *disclaimer* (Tidak Memberikan Pendapat/TMP). Meskipun demikian, masih ada indikator-indikator dalam bidang ini yang dapat dinilai baik. Misalnya, temuan-temuan BPK ditindaklanjuti oleh kepala daerah, koordinasi antara DPRD dengan setiap SKPD terhadap APBD umumnya berjalan baik.

Meskipun memperoleh status audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kabupaten Buton belum menjadi yang terbaik dalam bidang ini. Hal ini disebabkan karena masih belum terpenuhinya indikator-indikator yang dapat mendukung efektivitas audit dan pengawasan eksternal dalam arti luas seperti publikasi laporan keuangan, keterbukaan rapat di DPRD, serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan kepada BPK. Selain itu belum ada indikasi adanya peran DPRD dalam proses analisa dan evaluasi yang mendalam terhadap laporan keuangan.

Gambar 2.10. Kapasitas PKD Bidang Audit dan Pengawasan Eksternal



Sumber : Database PEA Sultra 2011 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK 2010.

Catatan : Pada tahun 2010, sebanyak 6 daerah belum memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK semester II 2010, sehingga penilaian terhadap status laporan keuangan diambil dari LHP tahun sebelumnya (2009). WTP= Wajar Tanpa Pengecualian TW = Tidak Wajar WDP= Wajar Dengan Pengecualian TMP=Tidak Memberikan Pendapat.

2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari 9 Bidang strategis, terdapat 5 yang sangat prioritas mendapat perbaikan pada tingkat kabupaten/kota. Kelima bidang tersebut adalah bidang Peraturan dan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Bidang Pengelolaan Kas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah, dan Bidang Audit dan Pengawasan Eksternal. Rekomendasi lebih detil tentang perbaikan di masing-masing bidang terdapat di tabel berikut.

Tabel. 2.2. Agenda dan Usulan Program Peningkatan Kapasitas PKD di Sulawesi Tenggara

Bidang	Rekomendasi	Usulan Program
Kerangka Peraturan Perundangan Daerah	Semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama kabupaten yang relatif baru terbentuk, perlu segera melengkapi peraturan perundangan daerah terkait PKD sesuai dengan mandat peraturan perundangan nasional.	Program Bina Perundangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
	<i>Program diprioritaskan untuk menghasilkan : (i) Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama untuk Konawe Utara, Buton Utara dan Bombana; (ii) Perkada tentang Standar Harga dan Standar Biaya; (iii) Perkada tentang kebijakan Akuntansi, Analisis Standar dan Biaya; dan (iv) Perda tentang Pengelolaan Barang Daerah</i>	
Perencanaan & Penganggaran	Kualitas perencanaan dan penyusunan anggaran perlu ditingkatkan, antara lain melalui : (i) penyusunan rencana pembangunan dan anggaran yang didasarkan pada data dan indikator yang terukur; (ii) meminimalisir perbedaan komponen belanja langsung dalam APBD dan APBD-P dibawah 10 persen ; (iii) penyusunan Analisis Standar Biaya dan Analisis Potensi PAD sebagai dasar penganggaran ; dan (iv) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelatihan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penyusunan Anggaran • Penelitian tentang Potensi PAD bagi semua kabupaten dan kota
Pengelolaan Kas	Beberapa daerah perlu memperbaiki sistem pengelolaan kas melalui : (i) penyusunan Perkada tentang prosedur pembukaan rekening di Bank; (ii) pelatihan Teknis bidang Pengelolaan Kas ; (iii) pembuatan sistem penagihan dan pemungutan pajak yang terintegrasi; (iv) penyusunan laporan realisasi anggaran kas setiap bulan; (v) penyusunan Perkada tentang besaran uang persediaan	Program Pelatihan Pengelolaan Kas Untuk Staf Keuangan Pemda
Pengadaan Barang & Jasa	Beberapa daerah perlu memperbaiki HPS yang didasarkan pada harga yang wajar; dokumen prakualifikasi harus diseleksi dengan baik, kemampuan staf pengadaan ditingkatkan, Daftar jejak rekam rekaman perlu dibuat, dan meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan dari pasal 3 Keppres No. 80/thn 2003	Program Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparat Pemda Kabupaten/Kota
Akuntansi dan Pelaporan	Semua kabupaten/kota serta pemerintah provinsi perlu menambah staf yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan menguasai tehnik dan prosedur pembuatan dan penyampaian laporan keuangan; Perlu adanya manual akuntansi yang memadai untuk kepentingan pembuatan laporan; Perlu pelatihan akuntansi secara regular bagi aparat pengelola keuangan	Proses rekrutment pegawai terkait keuangan perlu mengutamakan calon yang berlatar belakang Akuntansi; Program Pelatihan Akuntansi
Audit dan Pengawasan Intern	Aparat Pemda yang berada pada Unit Kerja Pengawasan perlu ditingkatkan kemampuannya terutama kabupaten yang lemah dari sisi pengawasan internal seperti kabupaten Wakatobi, Buton, Bombana, dan Kabupaten Konawe Selatan	Program Pelatihan Akuntansi bagi Aparat Pemda ; Proses rekrutment pegawai; Mengutamakan calon yang berlatar belakang Sarjana Akuntansi
Hutang, Hibah & Investasi Publik	Sebagian daerah perlu membuat Peraturan daerah/Perda mengenai pengelolaan hutang,hibah dan investasi publik	

Bidang	Rekomendasi	Usulan Program
Pengelolaan Aset	Perlu adanya ketentuan yang mengatur penggunaan barang sehingga yang menyalahgunakan aset dapat dikenai sangsi; bukti kepemilikan aset harus lengkap dan terpelihara; pemeriksaan aset daerah harus dilakukan setiap tahun dan dibuatkan laporan; status penggunaan barang harus dinyatakan melalui SK bupati/walikota; penghapusan barang daerah dilakukan dengan metode dan alasan yang jelas	Pelatihan Pengelolaan Aset
Audit & Pengawasan Eksternal	Perlu pengawasan rutin terhadap manajemen keuangan daerah; Perlu Pemantau independen; LKPD setiap Pemda harus disampaikan ke BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir; LKPD harus dipublikasikan	



Bab 3

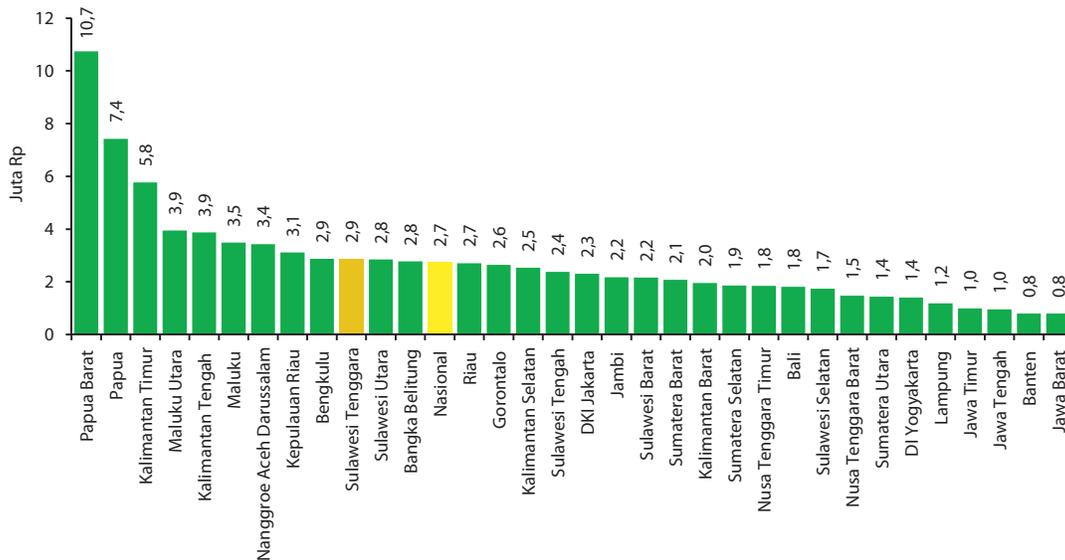
Pendapatan

Provinsi Sulawesi Tenggara membutuhkan sumber keuangan yang cukup besar untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Pada bagian ini akan dilihat seberapa besar sumber daya keuangan yang ada, bagaimana kecenderungannya selama 5 tahun terakhir, serta komponen pendapatan yang mana yang merupakan potensi bagi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan sumber daya keuangannya di masa depan.

3.1. Gambaran Umum Pendapatan Pemerintah Daerah

Pendapatan pemerintah daerah¹¹ perkapita Sulawesi Tenggara relative cukup tinggi dibandingkan provinsi lainnya dan berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2010, pendapatan daerah perkapita Sulawesi Tenggara sebesar Rp 2,9 juta, relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan pemerintah daerah per kapita secara nasional sebesar Rp. 2,7 juta. Provinsi Papua dan Kalimantan Timur secara berturut-turut memiliki pendapatan daerah perkapita tertinggi. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi, Sulawesi Tenggara memiliki pendapatan daerah perkapita tertinggi, diikuti oleh Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat serta Sulawesi Selatan.

Gambar 3.1. Pada Tahun 2010, Pendapatan Pemerintah Daerah Perkapita Sulawesi Tenggara Sudah Diatas Rata-Rata Nasional



Sumber: Diolah oleh Bank Dunia dari, DJPK, Kementerian Keuangan RI.

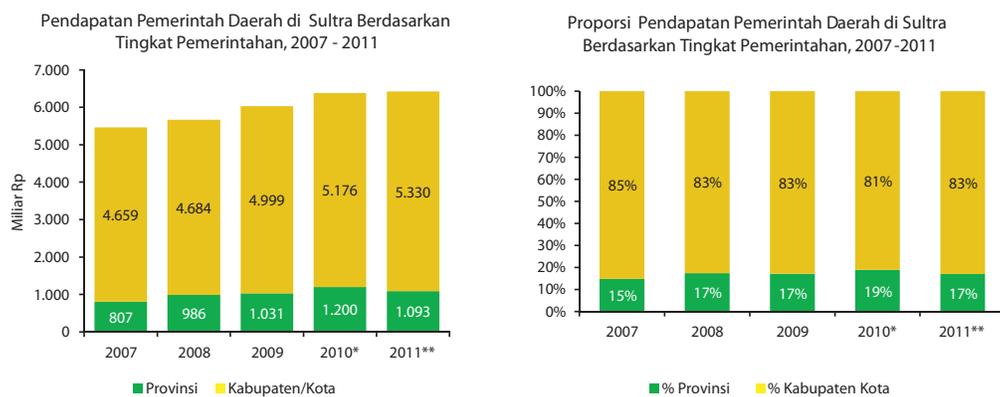
Pendapatan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan yang stabil pada lima tahun terakhir, dan sebagian besar bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten/kota. Secara riil¹² total pendapatan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara meningkat dari Rp. 5,2 miliar (2007) menjadi Rp. 6,4 miliar (2011), atau secara riil tumbuh sekitar 4,4 persen setiap tahunnya. Pendapatan pemerintah provinsi meningkat dari Rp. 803 miliar tahun 2007 menjadi Rp. 1,2 triliun tahun 2010, atau tumbuh sekitar 3,6 persen setiap tahunnya. Berdasarkan data anggaran, diperkirakan pendapatan pemerintah provinsi mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi Rp. 1,1 triliun. Sementara itu, pendapatan pemerintah

11 Pendapatan pemerintah daerah merupakan konsolidasi dari pendapatan pemerintah provinsi dan pendapatan pemerintah kabupaten/kota.

12 Angka riil menunjukkan bahwa data keuangan yang digunakan telah dideflasi menggunakan tahun dasar 2009 (2009=100). Data riil digunakan untuk melihat peningkatan secara riil setelah dikurangi inflasi. Dari sini dan selanjutnya, analisis keuangan menggunakan data riil.

kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan secara konsisten dari Rp. 4,6 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp. 5,3 triliun tahun 2011, atau rata-rata tumbuh secara riil hampir 9 persen setiap tahunnya. Secara umum pada periode 2007-2011, lebih dari 80 persen pendapatan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten/kota.

Gambar 3.2. Pendapatan Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara Meningkatkan Secara Konsisten

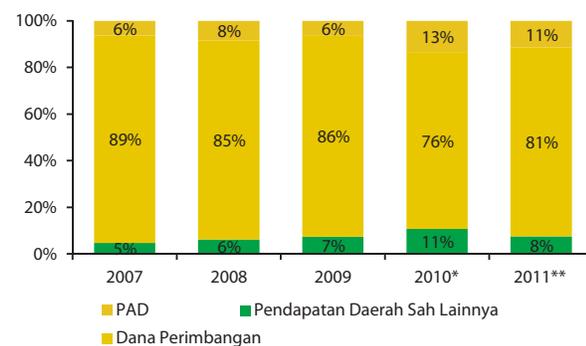


Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

Catatan : Dari sini dan selanjutnya, data fiskal tahun 2007-2009 merupakan data realisasi; data tahun 2010 merupakan data anggaran perubahan *); dan data tahun 2011 merupakan data anggaran murni (APBD) **. Angka menggunakan angka riil (2009=100).

Sebagian besar pendapatan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara bersumber dari dana perimbangan. Selama lima tahun terakhir, porsi transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan mencapai lebih dari 80 persen total pendapatan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara dan sebagian besar tersalurkan dalam bentuk DAU. Porsi pendapatan daerah terbesar kedua adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) diikuti oleh pendapatan daerah sah lainnya. Meskipun masih mendominasi, sampai tahun 2010, porsi dana perimbangan terhadap total pendapatan pemerintah daerah mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya porsi PAD dan pendapatan daerah sah lainnya. Pada tahun 2011, berdasarkan data APBD Murni, porsi DAU diperkirakan kembali meningkat.

Gambar 3.3. Sejak tahun 2009, Porsi Dana Perimbangan dari Pusat Mengalami Penurunan



Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

Komposisi pendapatan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) namun dengan porsi yang menurun. Pada tahun 2007, porsi DAU dalam pendapatan pemerintah provinsi mencapai 68 persen dan menurun menjadi 45 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2011, porsi DAU terhadap pendapatan pemerintah provinsi diperkirakan kembali meningkat. Meskipun perkembangan per tahun cukup berfluktuasi, namun perkembangan PAD dari tahun 2007 terhadap PAD 2010 menunjukkan peningkatan baik secara riil maupun proporsional (dari 20 persen (2007) menjadi 46 persen (2010)). Porsi DAK dalam pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara relatif tetap dengan rata-rata sebesar 3 persen. Porsi Dana Bagi Hasil menurun cukup besar dari 9 persen tahun 2007 menjadi 5 persen pada tahun 2011. Meningkatnya PAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencerminkan adanya potensi Sulawesi Tenggara kedepan untuk lebih mandiri dalam menciptakan pendapatan daerahnya dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pusat.

Tabel 3.1. Sebagian Besar Pendapatan Pemerintah Provinsi Berasal dari DAU

Provinsi	2007		2008		2009		2010*		2011**	
	Miliar Rp	%								
DAU	548,3	67,9	583,4	59,1	589,8	57,2	544,9	45,4	626,3	57,4
DAK	0,0	0,0	30,8	3,1	56,3	5,5	22,0	1,8	30,2	2,8
Bagi Hasil	74,6	9,2	62,7	6,4	58,9	5,7	58,9	4,9	57,6	5,3
PAD	166,7	20,6	305,5	31,0	223,1	21,6	552,3	46,0	376,7	34,5
Lain-lain	17,7	2,2	4,2	0,4	102,5	9,9	22,1	1,8	0,0	0,0
Total	807,2	100	986,5	100	1.030,7	100	1.200,3	100	1.090,8	100

Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

Pemerintah kabupaten/kota juga mempunyai kecenderungan yang sama dengan pemerintah provinsi dimana porsi DAU mengalami penurunan dan porsi PAD mengalami peningkatan. Porsi DAU mendominasi pendapatan pemerintah Kabupaten/kota dengan porsi pada periode 2007-2010 yang cenderung menurun, yakni dari 71 persen (2007) menjadi 66 persen (2010). Pada periode yang sama, porsi PAD juga mengalami peningkatan dari 4 persen menjadi 6 persen. Porsi pendapatan daerah sah lainnya meningkat cukup tinggi dari 5 persen menjadi 13 persen pada periode yang sama. Sebagian besar pendapatan daerah yang sah berasal dari Dana Penyesuaian. Sementara itu porsi DAK dan Dana Bagi Hasil mengalami penurunan. Serupa dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di kedepannya dapat lebih mandiri dalam meningkatkan pendapatan daerahnya melalui PAD.

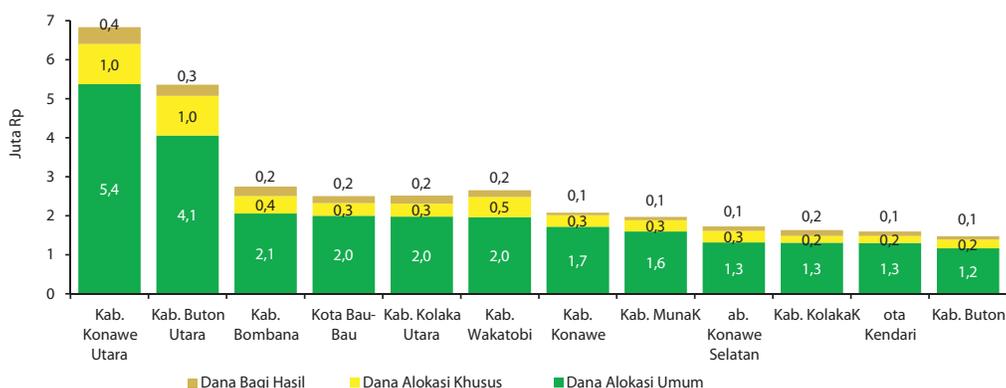
Tabel 3.2 Pemerintah Kabupaten/Kota Mempunyai Tren yang Serupa Dengan Pemerintah Provinsi

Kabupaten/ Kota	2007		2008		2009		2010*		2011**	
	Miliar Rp	%								
DAU	3.305,0	70,9	3.233,1	69,0	3.542,4	70,9	3.434,1	66,4	3.745,0	70,4
DAK	581,2	12,5	635,2	13,6	655,5	13,1	440,7	8,5	479,2	9,0
Bagi Hasil	357,1	7,7	298,2	6,4	289,7	5,8	336,6	6,5	257,2	4,8
PAD	177,2	3,8	173,8	3,7	166,1	3,3	303,5	5,9	356,8	6,7
Lain-lain	238,3	5,1	343,4	7,3	345,7	6,9	660,8	12,8	481,6	9,1
Total	4.658,9	100	4.683,7	100	4.999,3	100	5.175,6	100	5.319,9	100

Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

Kapasitas fiskal kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara sangat beragam dan timpang. Berdasarkan data APBD tahun 2009, Kabupaten Konawe Utara memiliki kapasitas fiskal terbesar mencapai Rp 6,8 juta per kapita, sedang Kabupaten Buton memiliki kapasitas fiskal paling sedikit sebesar Rp 1,5 juta per kapita. Sumber pendapatan kabupaten/kota terbesar bersumber dari transfer dana DAU pemerintah pusat.

Gambar 3.4. Kapasitas Fiskal Sulawesi Tenggara Cukup Beragam



Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

3.2. Pendapatan Asli daerah (PAD)

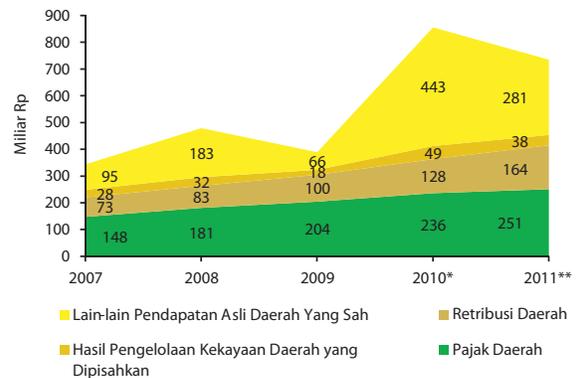
Secara agregat, PAD seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara (prov+kab/kota) cukup berfluktuasi selama 2007 – 2011. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2010 dimana PAD naik dari Rp. 389 miliar (2009) menjadi Rp. 856 miliar (2010) atau tumbuh lebih dari dua kali lipat. Pada tahun tersebut porsi PAD terhadap total pendapatan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara naik dari 6 persen menjadi 13 persen (lihat Gambar 3.5). Tingginya fluktuasi PAD disebabkan karena tingginya fluktuasi perolehan pendapatan dari PAD yang sah dari tahun ke tahun.

Pajak daerah dan retribusi daerah meningkat secara konsisten, namun kontribusinya terhadap total PAD berfluktuasi. Secara riil, pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun, sementara komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD sangat berfluktuasi. Pajak daerah di Sulawesi Tenggara tumbuh 70 persen pada periode 2007-2010, sementara retribusi tumbuh lebih 126 persen. Tingginya fluktuasi pada komponen lain-lain PAD serta Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, mengakibatkan kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap total PAD berfluktuasi. Sebagai contoh, kontribusi pajak daerah terhadap PAD meningkat dari 43 persen (2007) menjadi 53 persen (2009), namun pada tahun 2010 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan menjadi 28 persen meskipun secara riil meningkat. Penurunan kontribusi pajak daerah disebabkan adanya peningkatan signifikan pada lain-lain PAD yang sah sehingga kontribusinya terhadap PAD meningkat dari 17 persen menjadi 52 persen.

Komposisi PAD pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara cenderung berubah-ubah. Secara umum, pajak daerah merupakan komponen terbesar PAD pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara kecuali pada tahun 2010. Sebagian besar pajak ini berasal dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian, khususnya pada tambang-tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Namun, realisasi pajak ini tergolong masih rendah jika dibandingkan potensi sumber daya alam Sulawesi Tenggara, khususnya dari sektor pertambangan karena minimnya fasilitas untuk pengumpulan pajak daerah tersebut¹³.

Sementara itu, sebagian besar PAD pemerintah kabupaten/kota Sulawesi Tenggara berasal dari pendapatan asli daerah sah lainnya diikuti oleh retribusi daerah. Mayoritas sumber pendapatan asli daerah lain pemerintah kabupaten/kota Sulawesi Tenggara berasal dari sumbangan pihak ketiga, khususnya dari perusahaan-perusahaan pertambangan seperti misalnya sumbangan PT. Antam untuk pembangunan RSUD provinsi dan sumbangan yang langsung masuk ke kas daerah¹⁴. Serupa dengan pajak daerah, realisasi penerimaan dari sumbangan ini juga menurun karena turunnya harga nikel serta pengawasan usaha pertambangan oleh pemerintah kabupaten/kota yang tidak efisien.

Gambar 3.5. Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tenggara cukup berfluktuasi selama 2007 – 2011

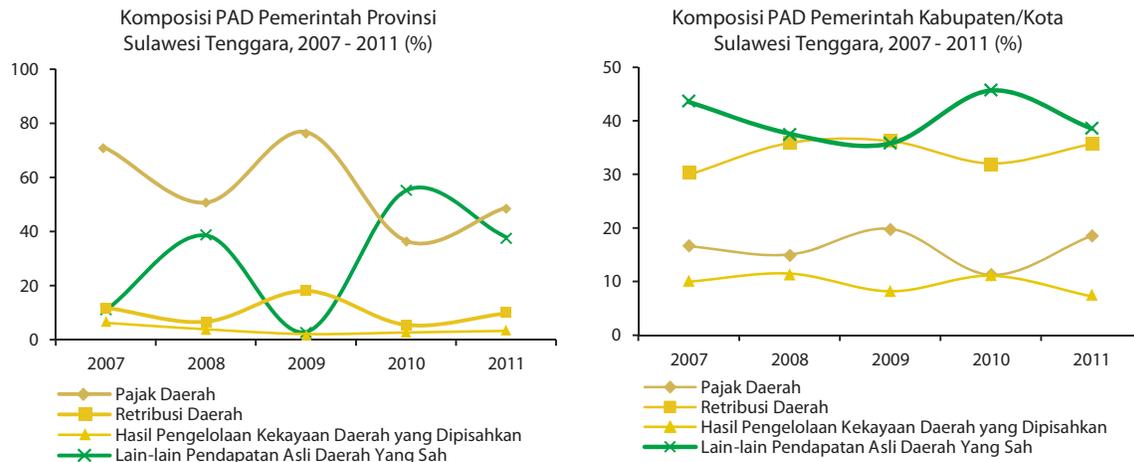


Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

13 Penerimaan Pajak Sultra Rp. 256 miliar, Jurnal Nasional 14 Juli 2011, diakses melalui <http://nasional.jurnas.com/halaman/15/2011-07-14/176227> pada 17 November 2011.

14 PAD Sultra dari Sektor Pertambangan Capai Rp. 63 M, Berita Kendari 14 Agustus 2011, diakses melalui <http://beritakendari.com/pad-sultra-dari-sektor-pertambangan-capai-rp-63-m.html> pada 17 november 2011

Gambar 3.6. Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2007-2011



Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

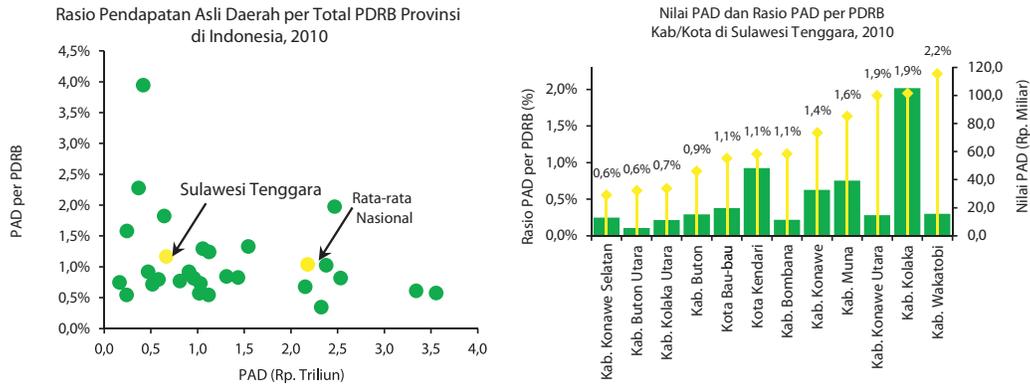
3.2.1. Kapasitas Mobilisasi PAD

Secara rata-rata kapasitas mobilisasi PAD di Sulawesi Tenggara berada diatas rata-rata Nasional. Pada tahun 2010, Rp. 1 miliar PDRB di Sulawesi Tenggara menghasilkan Rp. 120 juta PAD, angka ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata provinsi secara nasional yang menghasilkan Rp. 100 juta PAD per 1 miliar PDRB. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara memiliki kapasitas mobilisasi PAD yang cukup baik. Di banding provinsi lain di Sulawesi, kapasitas mobilisasi PAD Sulawesi Tenggara hanya sedikit dibawah Gorontalo yang mampu mengumpulkan PAD sebesar Rp. 160 juta untuk setiap Rp. 1 miliar PDRB.

Meksipun demikian, di tingkat kabupaten/kota, kapasitas mobilisasi PAD bervariasi. Pada tahun 2010, setiap Rp. 1 miliar PDRB di Kabupaten Wakatobi menghasilkan Rp. 22 juta PAD, sementara di Konawe Selatan dan Buton Utara hanya sebesar Rp. 6 juta untuk setiap Rp. 1 miliar PDRB yang dihasilkan. Meskipun Kabupaten Kolaka secara total memiliki PAD cukup tinggi, namun kapasitas mobilisasi PAD per PDRB-nya masih dibawah Wakatobi. Variasi kapasitas mobilisasi PAD ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ekonomi daerah, sistem pemungutan PAD, sampai kualitas SDM pengelola pendapatan.

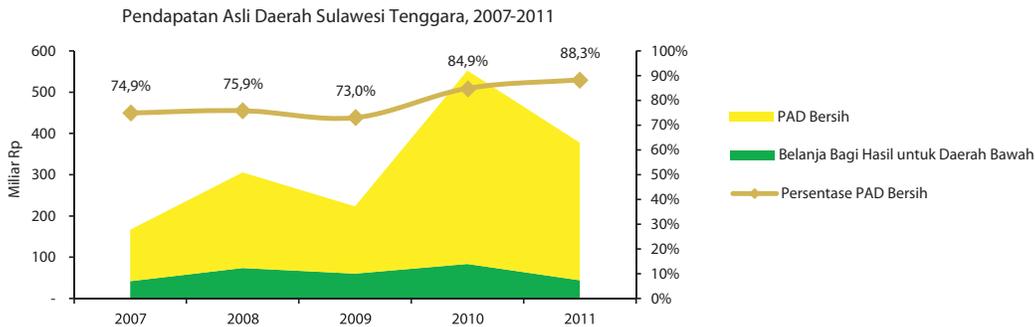
Pendapatan Asli Daerah Bersih Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengalami peningkatan. PAD bersih ini dihitung dengan mengurangi Pendapatan Asli Daerah Provinsi dengan Belanja Bagi Hasilnya ke daerah bawahan. Ini ditujukan untuk menghindari *double counting* dalam penghitungan PAD provinsi dan kabupaten/kota. Selama 5 tahun terakhir Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan, sehingga menyebabkan PAD bersih Sulawesi Tenggara meningkat. Ini memperlihatkan kecenderungan yang baik karena artinya potensi pendapatan daerah Sulawesi Tenggara yang sesungguhnya (diluar belanja bagi hasil) mengalami peningkatan.

Gambar 3.7. Kapasitas Mobiliasi PAD di Sulawesi Tenggara Sudah Lebih Baik dari Rata-Rata Nasional, Namun Kapasitas Masing-Masing Kabupaten/Kota Masih Bervariasi



Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

Gambar 3.8. PAD Bersih (PAD dikurangi Belanja Ke Daerah Bawahan) Sulawesi Tenggara juga Meningkat

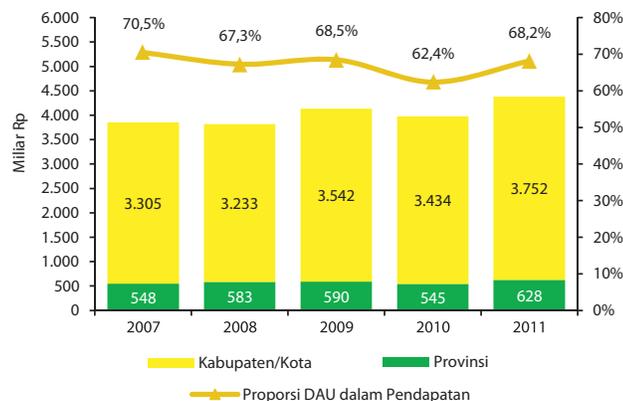


Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

3.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Ketergantungan Sulawesi Tenggara terhadap DAU masih cukup tinggi sejak tahun 2007-2011. Besarnya ketergantungan Sulawesi Tenggara terhadap DAU, terlihat dari proporsi DAU dalam pendapatan sebesar 70 persen pada tahun 2007 dan ketergantungan tersebut masih berlanjut pada tahun 2011 meskipun terdapat penurunan menjadi 69 persen proporsi DAU dalam pendapatan. Namun, mayoritas DAU ini pada pemerintah provinsi relatif menurun lebih besar jika dibandingkan pemerintah kabupaten/kota.

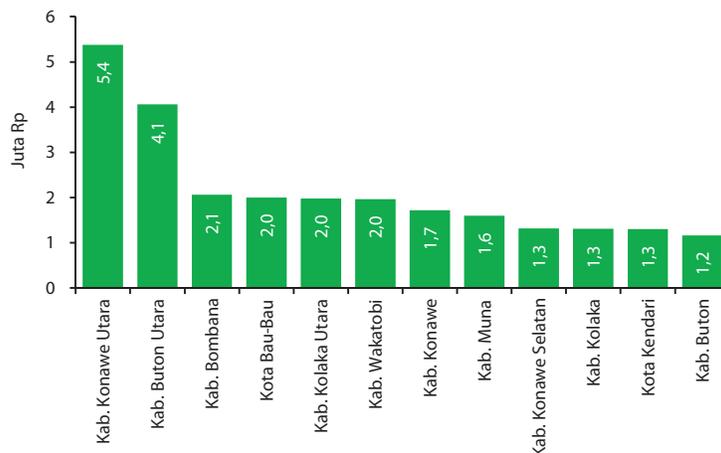
Gambar 3.9. DAU Sulawesi Tenggara Selama 2007-2011 Cukup Fluktuatif



Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

Transfer DAU untuk kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. Kabupaten Konawe Utara merupakan kabupaten dengan rata-rata DAU perkapita tertinggi tahun 2009 yaitu sebesar Rp 5,4juta. Gap antara kabupaten dengan DAU perkapita terendah dan tertinggi cukup besar, dimana DAU perkapita terendah dimiliki oleh Kabupaten Buton sebesar Rp 1,2juta.

Gambar 3.10. DAU Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara tahun 2009 Cukup Timpang

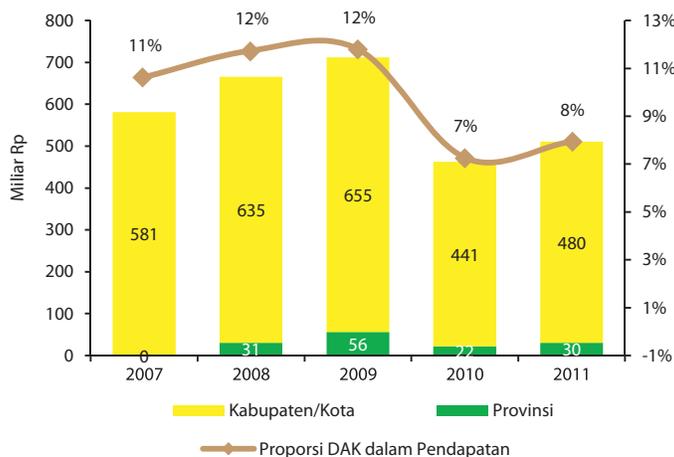


Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

3.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Perkembangan Transfer DAK di Sulawesi Tenggara lebih di fokuskan pada pemerintah kabupaten dan kota. Pada tahun 2011, 94 persen total DAK untuk Sulawesi Tenggara dialokasikan pada kabupaten/kota. Besarnya porsi DAK untuk kabupaten/kota terkait dengan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan melalui program/kegiatan di kabupaten/kota, terutama didaerah pemekaran. Secara keseluruhan transfer DAK di Sulawesi Tenggara masih rendah hanya sebesar 8 persen pada tahun 2011.

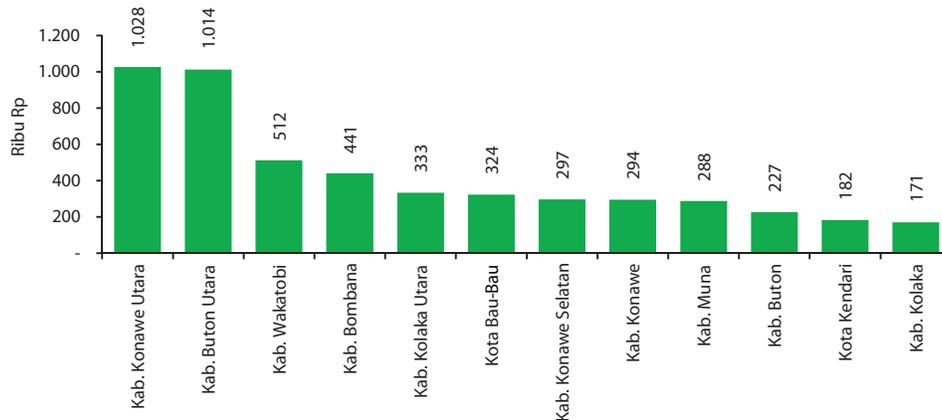
Gambar 3.11. Hampir seluruh DAK Sulawesi Tenggara Selama 2007-2011 Dialokasikan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota



Sumber: Database PEA Sulawesi Tenggara Universitas Haluoleo 2011.

Daerah-daerah pemekaran umumnya memiliki DAK perkapita lebih besar dibanding non-pemekaran. Pada tahun 2009, daerah yang memiliki dana DAK perkapita terbesar yaitu Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Buton Utara, masing masing sebesar Rp. 1juta, sedangkan kabupaten dengan dana DAK perkapita terendah adalah Kabupaten Kolaka sebesar Rp. 170 ribu. Terdapat perbedaan nilai DAK perkapita yang cukup besar diantara kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

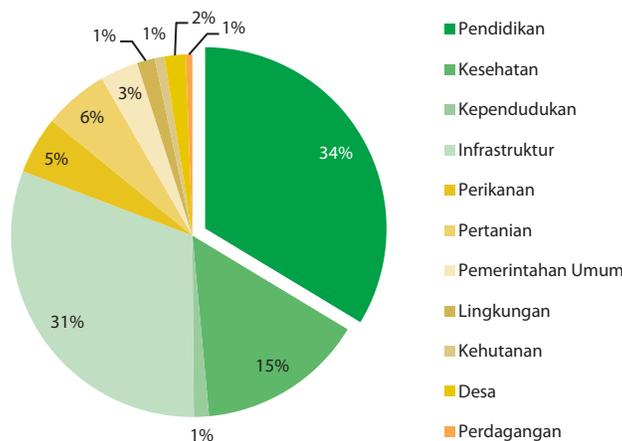
Gambar 3.12. Pada Tahun 2009, DAK Perkapita Kabupaten/Kota Cukup Timpang



Sumber: Database PEA Sulawesi Tenggara Universitas Haluoleo 2011.

Transfer dana DAK di Sulwesi Tenggara di dominasi oleh sektor pendidikan, dan infrastruktur. Pada tahun 2009, transfer dana DAK yang memiliki komposisi terbesar yaitu pada sektor pendidikan sebesar 34 persen dan sektor infrastruktur sebesar 31 persen dari total dana DAK. Seiring dengan program pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat maka semua kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara mendapatkan dana transfer DAK pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya, disamping itu untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat maka program peningkatan infrastruktur jalan dan pengadaan irigasi juga memiliki porsi yang cukup besar yaitu sebesar 31 persen dari total dana DAK.

Gambar 3.13. Pada tahun 2009, DAK Sulawesi Tenggara dialokasikan pada Sektor Pendidikan

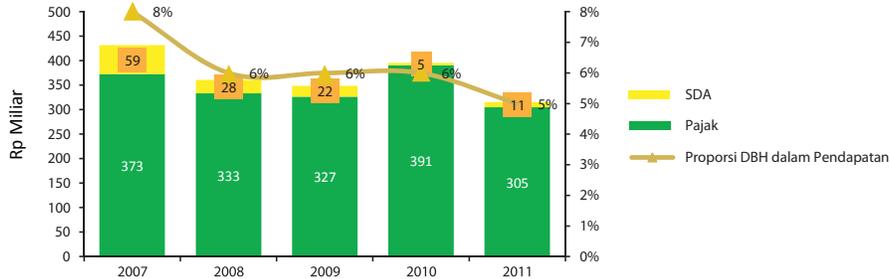


Sumber: Database PEA Sulawesi Tenggara Universitas Haluoleo 2011.

3.5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Jumlah dan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan selama lima tahun terakhir dan sebagian besar berasal dari pajak. Total DBH Sulawesi Tenggara pada tahun 2007 sebesar Rp 431,7 miliar, mengalami penurunan pada tahun 2011 hanya sebesar Rp 315 miliar. Penurunan DBH untuk Sulawesi Tenggara, khususnya Sumber Daya Alam, merupakan salah satu isu utama pada pengelolaan keuangan publik Sulawesi Tenggara. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya lembaga dan fasilitas untuk pengumpulan DBH ini oleh pemerintah, khususnya dari sektor pertambangan.

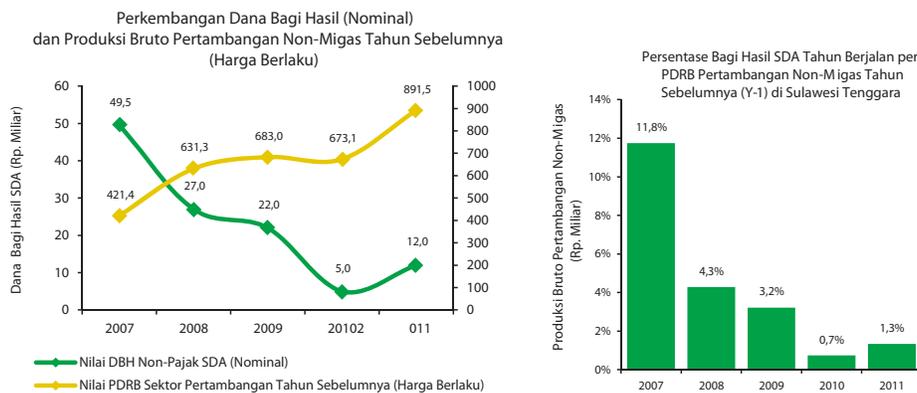
Gambar 3.14. Dana Bagi Hasil Sulawesi Tenggara Selama 2007-2011 Menunjukkan Penurunan



Sumber: Database PEA Sulawesi Tenggara Universitas Haluoleo 2011.

Sampai tahun 2010, persentase DBH SDA terhadap total produksi pertambangan tahun sebelumnya (Y-1) di Sulawesi Tenggara menurun. Pada tahun 2006, total produksi (bruto) pertambangan non-migas (ADHB) di Sulawesi Tenggara adalah Rp. 421,4 miliar. Pada tahun 2007, DBH non-pajak SDA yang diterima oleh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara adalah Rp. 49,5 miliar (nominal), atau 11,8 persen dari total produksi pertambangan tahun sebelumnya. Ini berarti pada tahun 2007, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara menerima Rp. 118 juta dari setiap Rp. 1 miliar produksi pertambangan non-migas tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun berikutnya, proporsi DBH SDA yang diterima pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara terhadap total produksi pertambangan non-migas terus mengalami penurunan. Seiring dengan peningkatan produksi pertambangan tahun 2010, diperkirakan DBH-SDA di Sulawesi Tenggara tahun 2011 meningkat, namun dengan proporsi yang masih jauh dari proporsi tahun 2007. Ada dua kemungkinan penyebabnya: (i) porsi bagi hasil yang dialokasikan untuk daerah oleh pemerintah pusat menurun, atau; (ii) kemampuan pengumpulan pendapatan dari sektor pertambangan menurun yang disebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan pertambangan liar yang tidak terdaftar. Kemungkinan kedua ini memang menjadi salah satu isu yang cukup berkembang di Sulawesi Tenggara.

Gambar 3.15. Produksi Bruto Pertambangan Non-Migas Sulawesi Tenggara Cenderung Meningkat, Sementara Dana Bagi Hasil SDA Sulawesi Tenggara Cenderung Menurun



Sumber: Database PEA Sulawesi Tenggara Universitas Haluoleo 2011.

3.6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Peningkatan PAD melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Ketergantungan pendapatan pemerintah kabupaten/kota terhadap DAU masih cukup tinggi (rata-rata diatas 65 persen), sementara porsi PAD masih sangat kecil (rata-rata dibawah 7 persen). Diperlukan upaya peningkatan kapasitas mobilisasi PAD terutama di daerah-daerah dengan kapasitas mobilisasi PAD (yang diukur dari rasio PAD/PDRB) yang masih rendah, seperti di Konawe Selatan, Buton Utara, Kolaka Utara, dan Buton dengan rasio PAD/PDRB masih dibawah 1 persen. Dalam jangka pendek, peningkatan kapasitas mobilisasi PAD dapat dilakukan melalui: (i) mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan baru dalam kerangka UU 28/2009; (ii) perbaikan regulasi terkait pajak dan retribusi; (iii) perbaikan sistem dan sumberdaya manusia pengelola pajak; serta (iv) penambahan jumlah kantor pajak.

Dalam jangka panjang, peningkatan PAD harus diupayakan dengan mendorong pembangunan ekonomi pada sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber PAD. Tanpa disertai pembangunan ekonomi di sektor-sektor potensial untuk sumber pendapatan, intensifikasi PAD dapat berdampak buruk (menjadi disinsentif) pada perekonomian. Pembangunan ekonomi pada sektor potensial penghasil pendapatan dapat dilakukan misalnya melalui: (i) peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor pariwisata (misalnya di Wakatobi, Bau-bau, dll), (ii) mendorong kemudahan prosedur dan insentif perijinan untuk jasa restoran, perhotelan, reklame, dll; (iii) pembangunan atau peningkatan kualitas pengelolaan jasa usaha pemerintah daerah untuk peningkatan retribusi misalnya pembangunan pasar/pertokoan, tempat rekreasi, pengolahan limbah, terminal, tempat khusus parkir, dll; dan (iv) formalisasi usaha pada lapangan usaha informal seperti penggalan yang banyak bergerak secara informal (*underground economy*).

Pemerintah daerah perlu menciptakan sistem pendataan dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sumber dana bagi hasil dari non-pajak (sumber daya alam) masih sangat kecil dibandingkan dengan dana bagi hasil pajak. Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya alam yang berlimpah terutama dari hasil tambang yang tersebar di beberapa kabupaten, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa DBH dari non pajak masih kecil persentasenya dibandingkan dengan dana transfer lainnya. Selain itu, saat ini banyak perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara yang beroperasi secara liar dan tidak mempunyai izin. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari bagi hasil SDA tersebut: (i) perlunya dilakukan sebuah kajian tentang potensi SDA di Sulawesi Tenggara, agar dapat diketahui seberapa besar potensi sumber daya yang tersedia dan potensinya sebagai sumber pendapatan bagi hasil daerah; (ii) penciptaan sistem/mekanisme pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pertambangan yang meningkat; serta (iii) penertiban oleh aparat penegak hukum atas pertambangan-pertambangan yang beroperasi liar/tanpa ijin.

Alternatif pembiayaan lain seperti pinjaman kepada domestic, maupun kerja sama dalam perbaikan penyediaan jasa public dengan pihak swasta. Hal ini dapat diimplementasikan dengan cara bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tambang (juga sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* perusahaan-perusahaan tersebut) misalnya bekerja sama membangun fasilitas-fasilitas publik di bidang pendidikan maupun kesehatan, ataupun pembangunan infrastruktur (perbaikan jalan) di kawasan tersebut.



Bab 4

Belanja

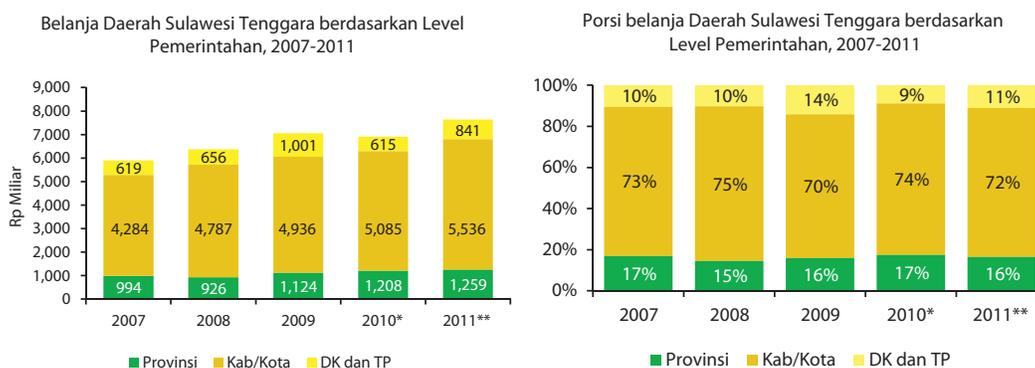
Kualitas pelayanan publik yang baik dan memenuhi standar dipengaruhi oleh usaha pemerintah melalui kualitas belanja daerah Sulawesi Tenggara. Pada bagian ini akan dilihat bagaimana tren belanja daerah Sulawesi Tenggara, yang diikuti dengan komposisi belanja tersebut baik berdasarkan klasifikasi ekonominya maupun berdasarkan sektoral secara umum. Dibagian ini dilihat juga komposisi umum belanja pemerintah lewat program-programnya.

4.1. Gambaran Umum Belanja Daerah

Selama lima tahun terakhir, secara riil belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Total belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara terdiri dari belanja pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon/TP). Secara riil, total belanja pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara berfluktuasi. Setelah meningkat dari Rp 5,9 triliun (2007) menjadi Rp. 7,1 triliun (2009), total belanja pemerintah menurun menjadi Rp. 6,9 triliun (2010) (data APBD-P), dan diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp. 7,6 triliun (2011) (data APBD murni). Jika dilihat secara keseluruhan, pada periode tahun 2007-2011, belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara rata-rata tumbuh 7 persen per tahun.

Sebagian besar belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara bersumber dari belanja pemerintah kabupaten/kota. Dalam 5 tahun terakhir, secara rata-rata, 73 persen belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara merupakan belanja pemerintah kabupaten/kota dengan kecenderungan meningkat, yakni dari Rp. 4,2 triliun (2007) menjadi Rp. 5,5 triliun (2011). Sementara itu, belanja pemerintah provinsi secara rata-rata mengelola 16 persen total belanja pemerintah, dengan kecenderungan juga meningkat dari Rp. 994 miliar menjadi Rp. 1,2 triliun. Belanja pemerintah pusat di Sulawesi Tenggara sangat kecil secara porsi, yaitu sekitar 11 persen dari total belanja pemerintah dengan kecenderungan yang juga meningkat, yakni Rp. 619 miliar (2007) menjadi Rp. 841 miliar (2011).

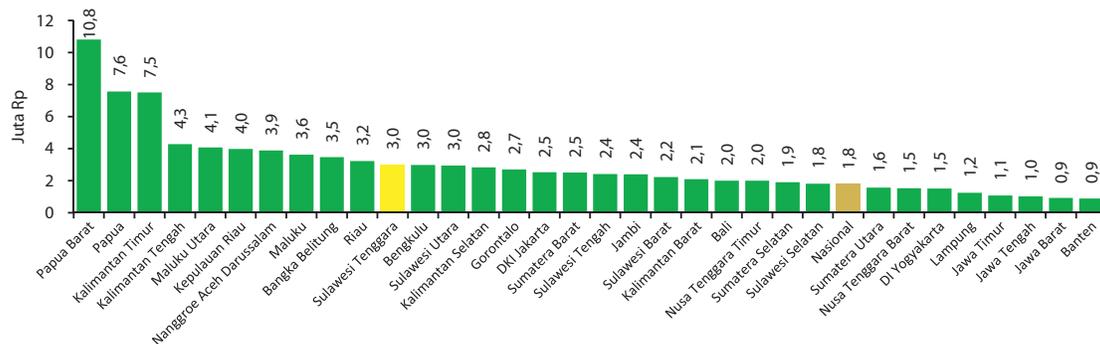
Gambar 4.1. Belanja Daerah Sulawesi Tenggara Mengalami Peningkatan Selama 2007-2011



Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011

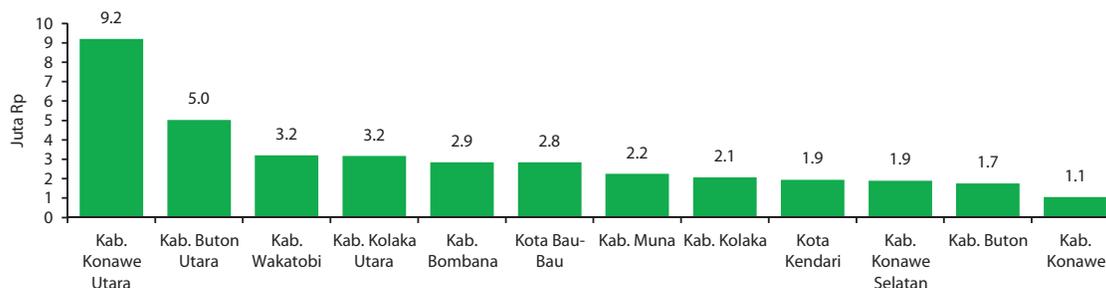
Catatan : Dari sini dan selanjutnya, data fiskal tahun 2007-2009 merupakan data realisasi; data tahun 2010 merupakan data anggaran perubahan *); dan data tahun 2011 merupakan data anggaran murni (APBD **)

Belanja daerah per kapita Sulawesi berada diatas rata-rata belanja daerah perkapita secara nasional. Belanja daerah adalah konsolidasi belanja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sulawesi, belanja daerah perkapita Sulawesi Tenggara merupakan yang tertinggi. Pada tahun 2010, belanja daerah perkapita Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 3 juta, sementara rata-rata nasional hanya sebesar Rp. 1,8 juta. Di kawasan Indonesia timur, Papua Barat merupakan provinsi dengan belanja daerah perkapita tertinggi. Tingginya belanja daerah per kapita di Sulawesi Tenggara menunjukkan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya fiskal lebih besar dibanding provinsi lainnya di Indonesia.

Gambar 4.2. Belanja Daerah per Kapita Provinsi di Indonesia Tahun 2010 Cukup Beragam

Sumber: Diolah oleh Bank Dunia dari APBD 2010 DJPK, Kementerian Keuangan RI.

Belanja daerah perkapita antar kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara cukup timpang. Pada tahun 2010, Kabupaten Konawe Utara mempunyai belanja daerah perkapita tertinggi sebesar Rp. 9,2 juta dan Kabupaten Konawe mempunyai belanja daerah perkapita terendah sebesar Rp. 1,1 juta. Belanja daerah perkapita Kabupaten Konawe Utara ini cukup timpang dengan kabupaten Buton Utara sebagai kabupaten dengan belanja daerah tertinggi kedua di Sulawesi Tenggara. Secara umum, kabupaten/kota hasil pemekaran justru mempunyai belanja daerah perkapita lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota induk. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk di kabupaten/kota tersebut yang masih rendah.

Gambar 4.3. Belanja Per Kapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara tahun 2009 cukup timpang

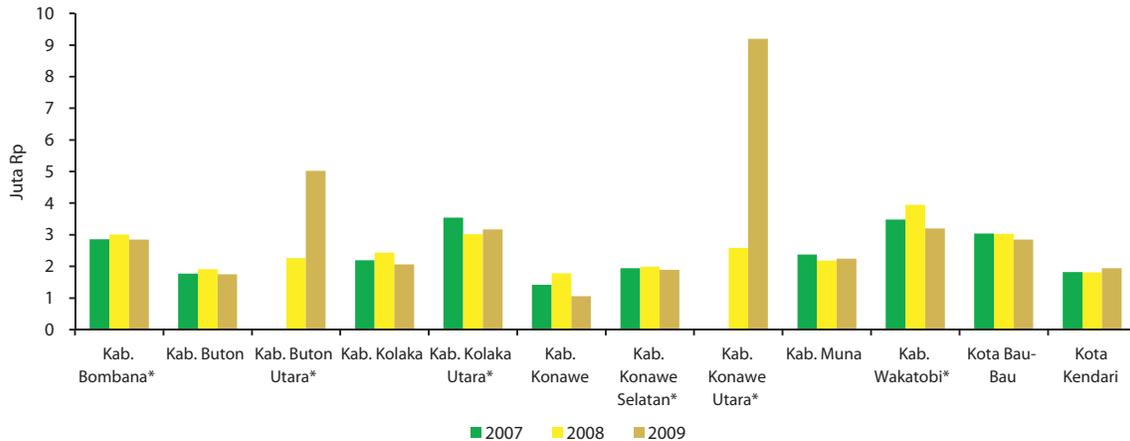
Sumber: Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

4.1.1. Belanja Perkapita Kabupaten Hasil Pemekaran dan Non-pemekaran

Belanja perkapita kabupaten hasil pemekaran secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten non-pemekaran. Beberapa kabupaten/kota hasil pemekaran di Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe Selatan yang mekar pada tahun 2003. Selain itu Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Buton Utara juga merupakan hasil pemekaran tahun 2007. Belanja perkapita tertinggi kabupaten hasil pemekaran mencapai Rp 9,2 juta di kabupaten Konawe Utara tahun 2009, meningkat secara signifikan dibanding tahun 2008 yang hanya sebesar Rp. 2,6 juta. Kabupaten Buton Utara juga mengalami peningkatan belanja daerah perkapita yang drastis dari Rp. 2,3 juta tahun 2008 menjadi Rp. 5 juta tahun 2009. Belanja daerah perkapita terendah terdapat pada Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp. 1,9 juta pada tahun 2009. Penyebab tingginya belanja perkapita di kabupaten hasil pemekaran adalah jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan jumlah dana yang digunakan untuk pembangunan, baik untuk urusan pemerintahan umum, maupun untuk membangun fasilitas infrastruktur yang relatif masih minim.

Sementara itu, belanja daerah perkapita kabupaten/kota induk dan non-pemekaran relatif rendah. Belanja daerah perkapita terendah terdapat pada kabupaten Konawe sebesar Rp.1,7 juta tahun 2008, dan turun menjadi Rp. 1,1 juta tahun 2009. Penyebab rendahnya belanja perkapita di kabupaten non-pemekaran di satu sisi karena berkurangnya sumber daya fiskal yang dimiliki daerah induk sebagai konsekuensi dari pemekaran, sementara di sisi lain, sebagian besar penduduk tinggal di ibukota daerah induk.

Gambar 4.4. Belanja Perkapita Kabupaten Pemekaran dan nonpemekaran tahun 2009



Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

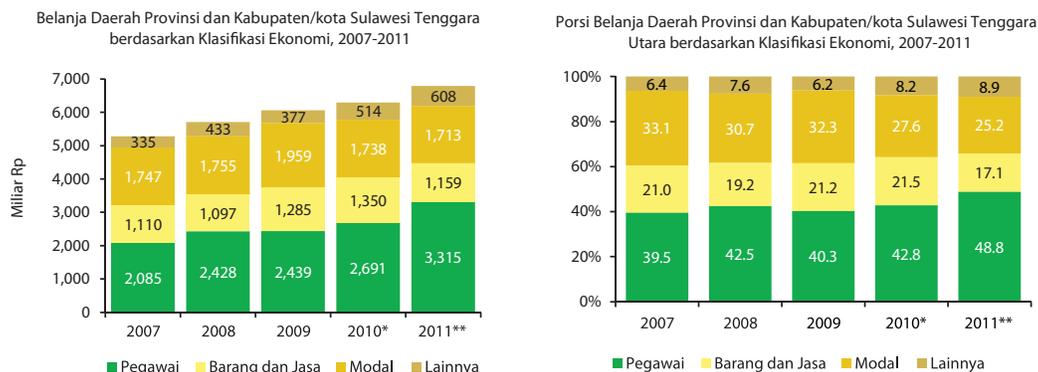
4.2. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

Secara riil, seluruh jenis belanja pemerintah daerah (provinsi+kab/kota) berdasarkan klasifikasi ekonomi mengalami peningkatan, kecuali belanja modal. Setelah mengalami peningkatan hingga Rp. 1,9 triliun (2009), belanja modal pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara kembali menurun hingga Rp. 1,7 triliun (2011). Pada periode 2007-2011, belanja lainnya¹⁵ dan belanja pegawai mempunyai peningkatan tertinggi, yakni berturut-turut sebesar sebesar 80 persen dan 58 persen. Sebagian besar kenaikan belanja lainnya ini berasal dari peningkatan belanja bantuan keuangan ke kabupaten/kota/desa, yaitu dari Rp. 148 miliar tahun 2009 menjadi Rp. 379 miliar pada tahun 2011. Peningkatan belanja bantuan sebagian besar berasal dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota untuk pendidikan, kesehatan, serta bantuan keuangan langsung ke desa.

Pertumbuhan belanja pegawai dan belanja lainnya yang sangat tinggi mengakibatkan secara porsi kedua belanja tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Porsi belanja pegawai mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 hampir separuh (49 persen) dari total belanja pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara dialokasikan untuk belanja pegawai. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir, porsi belanja pegawai mencapai 43 persen. Kenaikan porsi belanja pegawai ini seiring dengan turunnya porsi belanja modal dan barang dan jasa. Porsi belanja terbesar kedua merupakan belanja modal, yang mengalami penurunan cukup signifikan mulai tahun 2010. Selama 2007-2009, porsi belanja modal masih lebih dari 30 persen sebelum turun mulai tahun 2010 menjadi 27 persen dan bahkan 25 persen pada tahun 2011. Belanja Barang dan Jasa serta belanja lainnya merupakan belanja dengan porsi terkecil yaitu 20 persen dan 7 persen secara rata-rata selama 5 tahun terakhir.

15 Belanja lainnya merupakan penjumlahan dari belanja bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah, bagi hasil, subsidi, belanja bunga, dan belanja tidak terduga. Karena jumlahnya yang relatif kecil dibanding jenis belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal, belanja tersebut dikategorikan sebagai belanja lainnya. Pada pembahasan berikutnya, belanja lainnya akan terbagi menjadi belanja transfer dan non-transfer. Belanja transfer adalah seluruh belanja lainnya diluar belanja bunga dan belanja tidak terduga.

Gambar 4.5. Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara berdasarkan Klasifikasi Ekonomi mengalami Peningkatan



Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

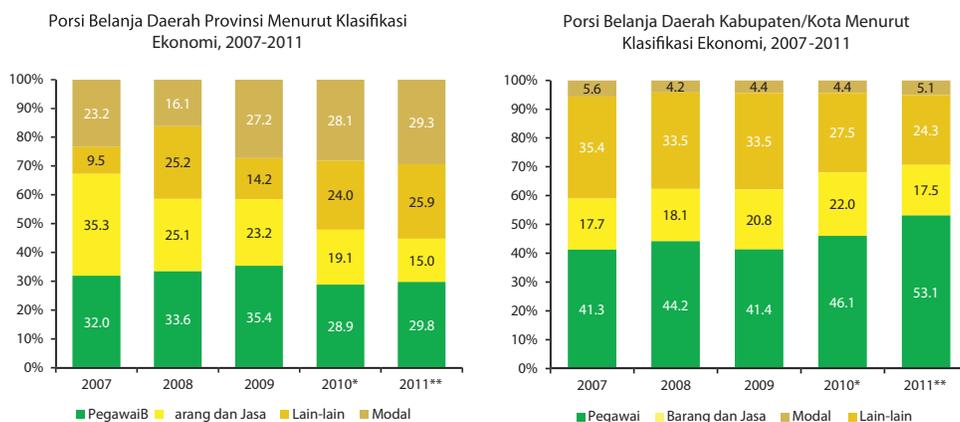
Komposisi belanja daerah pemerintah provinsi cenderung berubah-ubah selama lima tahun terakhir.

Secara umum, porsi belanja terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai, walaupun porsinya menurun pada tahun 2010 dari 35 persen menjadi 29 persen dari total belanja daerah. Selain itu, belanja barang dan jasa mengalami penurunan paling besar. Pada tahun 2007, porsi belanja barang dan jasa adalah sebesar 35 persen dan mengalami penurunan secara bertahap hingga menjadi 15 persen pada anggaran tahun 2011. Porsi belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2008. Pada tahun 2008 belanja modal naik dari 16 persen menjadi 29 persen pada anggaran 2011. Peningkatan belanja modal ini dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur cukup pesat, diantaranya pembangunan infrastruktur perluasan jalan menuju Bandara Haluoleo serta dimulainya pembangunan infrastruktur perluasan jalan menuju Bandara Haluoleo serta dimulainya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah. Porsi belanja lain-lain pemerintah provinsi cenderung berubah-ubah. Namun semenjak tahun 2009 porsi ini meningkat dari 14 persen menjadi 24 persen di tahun 2010, dan 26 persen pada tahun 2011. Peningkatan belanja lain-lain ini terutama didominasi oleh belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, yaitu dari Rp. 71 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp. 124 miliar tahun 2011, dan Rp. 252 miliar tahun 2011. Tingginya belanja bantuan ke daerah bawahan ini sejalan dengan realisasi visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara "Program Bahteramas" yaitu Bantuan dana "Block Grant" sebesar Rp.100 juta perdesa/kelurahan, dan Rp.50 juta perkecamatan diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada level pemerintahan Kabupaten/kota, porsi belanja pegawai merupakan porsi terbesar dengan kecenderungan meningkat selama dua tahun terakhir.

Belanja pegawai naik dari 41 persen di tahun 2009 menjadi 46 persen di tahun 2010, dan 53 persen di tahun 2011. Selain itu, peningkatan porsi belanja modal ini bersamaan dengan penurunan porsi belanja modal serta barang dan jasa. Porsi belanja modal turun dari 33 persen di tahun 2009 menjadi 24 persen di anggaran 2011 sedangkan porsi belanja barang dan jasa turun dari 22 persen di tahun 2010 menjadi 18 persen di tahun 2011. Porsi Belanja lain-lain pemerintah kabupaten/kota tidak berubah dan tetap dengan porsi 4 persen.

Gambar 4.6. Porsi Belanja Daerah Provinsi didominasi oleh Belanja Lain-Lain sementara Porsi Belanja Daerah Kabupaten/Kota didominasi oleh belanja Pegawai



Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

4.3. Belanja Menurut Sektor

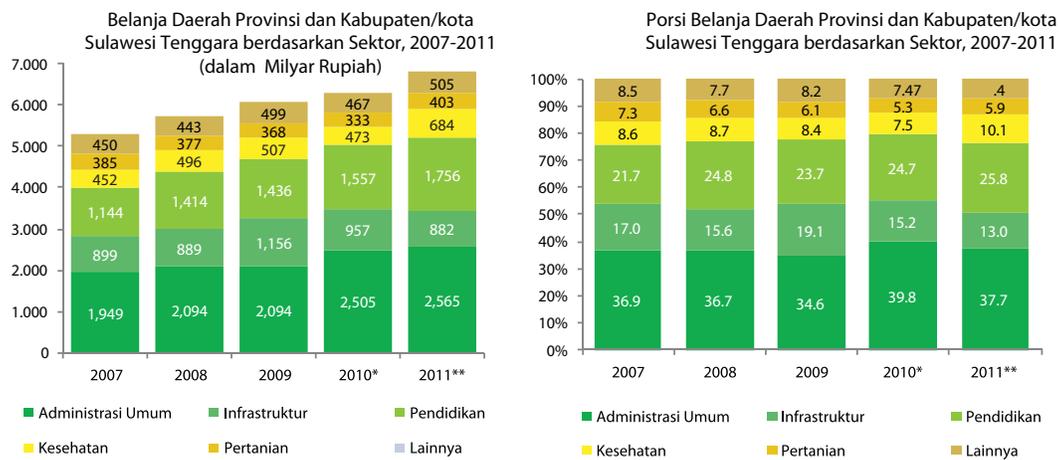
Sektor pemerintahan umum¹⁶ masih merupakan sektor dengan belanja terbesar di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2007, secara riil belanja pemerintahan umum mengalami peningkatan dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 2,5 triliun pada tahun 2011, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2009. Belanja Pemerintahan umum ini didominasi oleh belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai; gaji dan tunjangan. Belanja sektor terbesar ini diikuti oleh belanja pendidikan serta infrastruktur. Belanja pendidikan mengalami peningkatan semenjak 2009, namun belanja infrastruktur mengalami penurunan semenjak tiga tahun terakhir. Sektor infrastruktur pada laporan ini mencakup Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan serta Urusan Perumahan. Belanja ektor strategis lainnya yaitu Sektor Pertanian (mencakup Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan, Urusan Kelautan dan Perikanan serta Urusan Ketahanan Pangan) tidak mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp. 385 miliar di tahun 2007 menjadi Rp. 403 miliar di anggaran 2011. Belanja sektor kesehatan juga relatif tidak berubah kecuali pada anggaran 2011, dari Rp. 452 miliar tahun 2007 menjadi Rp. 684 miliar tahun 2011.

Secara porsi, belanja sektor juga masih didominasi oleh sektor Pemerintahan umum, diikuti oleh belanja pendidikan dan infrastruktur. Belanja sektor pendidikan mengalami peningkatan dari 22 persen tahun 2007 menjadi 26 persen pada tahun 2011. Hal itu berarti pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki komitmen mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang. Sebaliknya, porsi belanja infrastruktur mengalami penurunan dari 17 persen tahun 2007 menjadi 15 persen pada tahun 2010. Bahkan, turun lagi menjadi 13 persen pada tahun 2011. Sektor infrastruktur justru menjadi salah satu isu dalam hambatan ekonomi di Sultra. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, masalah jalan menjadi salah satu penghambat keterhubungan di Sulawesi Tenggara, khususnya jalan provinsi¹⁷. Pada tahun 2009, baru 15 persen jalan provinsi di Sulawesi Tenggara yang berada dalam keadaan baik (Sultra dalam angka, 2011). Masalah infrastruktur ini perlu mendapat prioritas dalam alokasi belanja sektoral di Sulawesi Tenggara.

¹⁶ Sektor Pemerintahan Umum pada laporan ini mencakup urusan Pemerintahan Umum, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan statistik.

¹⁷ Dilema Infrastruktur Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Indonesia. Diakses pada tanggal 1 Desember 2011 melalui <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/043F685D-B00E-4795-B5AD-EF11BB4E6132/17505/BOKS1.pdf>

Gambar 4.7. Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara sebagian besar digunakan untuk sektor Administrasi Umum



Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

Pada tingkat provinsi, sektor pemerintahan umum memiliki porsi tertinggi walaupun kecenderungannya menurun selama lima tahun terakhir. Porsi ini turun dari 57 persen menjadi 48 persen selama lima tahun terakhir. Ini terutama disebabkan oleh belanja transfer dan bagi hasil yang meliputi belanja hibah, subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan belanja tidak terduga (Permendagri 13/2006). Selama lima tahun terakhir, dari sektor Pemerintahan Umum, terlihat belanja transfer mengalami peningkatan dari 9 persen menjadi 25 persen sedangkan belanja pemerintahan umum bersih mengalami penurunan dari 47 persen menjadi 22 persen. Sektor infrastruktur merupakan sektor belanja terbesar kedua, namun porsinya bergerak fluktuatif. Porsi ini meningkat dari 17 persen tahun 2007 menjadi 25 persen tahun 2010, namun menurun dalam anggaran 2011 menjadi 15. Peningkatan belanja tahun 2010 ini dilakukan untuk merealisasikan berbagai program pembangunan infrastruktur; seperti penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, pembangunan tiang pancang Mesjid Al Alam, pembangunan/perluasan jalan ke Bandara Haluoleo, peningkatan jalan provinsi lainnya se Sulawesi Tenggara.

Porsi belanja riil provinsi sektor kesehatan meningkat signifikan sedangkan belanja pendidikan dan pertanian mengalami sedikit penurunan. Belanja kesehatan naik dari 7 persen tahun 2007 menjadi 8 persen tahun 2010. Peningkatan belanja kesehatan ini dilakukan untuk merealisasikan berbagai program dibidang kesehatan; seperti biaya pengobatan gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi pemegang "Kartu Bahteramas". Sebaliknya, belanja pendidikan turun dari 11 persen tahun 2009 menjadi 3 persen tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi dana untuk sektor pendidikan masih relatif kecil, dan terus mengalami penurunan. Meskipun demikian, berbagai kebijakan di sektor pendidikan telah banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi seperti bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah Taman Kanak Kanak, sekolah dasar, menengah, baik negeri maupun swasta, dan bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa, bahkan Program 1.000 Beasiswa untuk Restorasi Pendidikan di Sultra tahun 2011 di Unissula Semarang. Belanja pertanian pemerintah provinsi yang sebagian besar berasal dari urusan pertanian hanya mengalami penurunan kecil dari 7 persen menjadi 6 persen dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4.1. Belanja Pemerintah Provinsi Berdasarkan Sektor dan Proporsinya terhadap Total Belanja, 2007 – 2011

Provinsi	2007		2008		2009		2010		2011	
	Milliar Rp	%	Milliar Rp	%	Milliar Rp	%	Milliar Rp	%	Milliar Rp	%
Pemerintahan Umum	565	56.9	497	53.7	449	40.0	598	49.5	609	48.4
Pemerintahan Umum	471	47.4	263	28.4	290	25.8	309	25.6	284	22.5
Transfer	92	9.2	229	24.7	159	14.1	287	23.7	321	25.5
Lainnya	3	0.3	5	0.5	1	0.1	3	0.2	4	0.4
Pendidikan	58	5.8	75	8.2	134	11.3	53	3.5	51	3.0
Pendidikan	58	5.8	75	8.2	127	11.3	43	3.5	38	3.0
Olah Raga	0	0.0	0	0.0	2	0.2	5	0.4	5	0.4
Perpustakaan	0	0.0	0	0.0	5	0.5	5	0.5	7	0.6
Pertanian	69	6.9	75	8.1	95	8.5	71	5.9	81	6.4
Pertanian	40	4.0	46	5.0	62	5.5	42	3.5	45	3.6
Perikanan dan Kelautan	16	1.7	19	2.1	19	1.7	16	1.3	20	1.6
Kehutanan	12	1.2	10	1.0	12	1.1	11	0.9	13	1.1
Ketahanan Pangan	0	0.0	0	0.0	2	0.2	3	0.2	3	0.3
Infrastruktur	165	16.6	128	13.9	262	23.3	299	24.8	189	15.0
Pekerjaan Umum	120	12.1	96	10.4	247	22.0	286	23.6	177	14.1
Perhubungan	45	4.5	32	3.5	14	1.3	14	1.1	12	1.0
Perumahan	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Kesehatan	53	5.4	68	7.4	92	8.2	101	8.4	247	19.7
Sektor Lainnya	84	8.4	82	8.8	99	8.8	95	7.9	94	7.4
Total	994	100.0	926	100.0	1,124	100.0	1,208	100.0	1,259	100.0

Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

Pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian cukup besar pada sektor pendidikan.

Urusan pendidikan dan pemerintahan umum merupakan urusan dengan belanja terbesar. Porsi belanja pemerintahan umum mengalami peningkatan dari 32 persen tahun 2007 menjadi 35 persen pada tahun 2011 sedangkan alokasi belanja untuk sektor pendidikan meningkat dari 26 persen menjadi 32 persen pada periode yang sama. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yaitu mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen, bahkan mencapai 32 persen di tahun 2011. Sektor strategis lainnya seperti infrastruktur, kesehatan dan pertanian mendapat prioritas kedua setelah pendidikan. Belanja infrastruktur cenderung mengalami penurunan, khususnya pada urusan pekerjaan umum, sedangkan belanja kesehatan dan pertanian tidak mengalami perubahan yang signifikan. Belanja infrastruktur turun dari 17 persen menjadi 12 persen selama lima tahun terakhir. Porsi belanja kesehatan sedikit mengalami penurunan dari 9 persen menjadi 8 persen. Belanja sektor pertanian masih sangat kecil dan semakin menurun, berada dibawah 8 persen selama lima tahun terakhir.

Tabel 4.2 Belanja Kabupaten/Kota Berdasarkan Sektor dan Proporsi terhadap Total Belanja, 2007 – 2011

Kabupaten/ Kota	2007		2008		2009		2010		2011	
	Milliar Rp	%								
Pemerintahan Umum	1,384	32.3	1,597	33.4	1,645	33.3	1,907	37.5	1,956	35.3
Pemerintahan Umum	1,143	26.7	1,398	29.2	1,428	28.9	1,683	33.1	1,673	30.2
Transfer	224	5.2	185	3.9	210	4.3	218	4.3	264	4.8
Lainnya	17	0.4	14	0.3	7	0.1	6	0.1	19	0.3
Pendidikan	1,115	26.0	1,347	28.1	1,334	27.0	1,561	30.7	1,754	31.7
Pendidikan	1,086	25.4	1,339	28.0	1,309	26.5	1,514	29.8	1,719	31.0
Olah Raga	29	0.7	8	0.2	21	0.4	41	0.8	30	0.5
Perpustakaan	0	0.0	0	0.0	4	0.1	5	0.1	5	0.1
Pertanian	317	7.4	302	6.3	273	5.5	262	5.2	322	5.8
Pertanian	165	3.8	166	3.5	129	2.6	116	2.3	166	3.0
Perikanan dan Kelautan	88	2.1	82	1.7	76	1.5	85	1.7	71	1.3
Kehutanan	63	1.5	49	1.0	54	1.1	46	0.9	63	1.1
Ketahanan Pangan	0	0.0	6	0.1	14	0.3	15	0.3	22	0.4
Infrastruktur	734	17.1	761	15.9	895	18.1	658	12.9	693	12.5
Pekerjaan Umum	660	15.4	670	14.0	706	14.3	565	11.1	587	10.6
Perhubungan	52	1.2	69	1.4	162	3.3	87	1.7	91	1.6
Perumahan	22	0.5	23	0.5	27	0.6	6	0.1	15	0.3
Kesehatan	398	9.3	427	8.9	414	8.4	372	7.3	436	7.9
Sektor Lainnya	366	8.5	361	7.5	400	8.1	372	7.3	544	9.8
Total	4,284	100.0	4,787	100.0	4,936	100.0	5,085	100.0	5,536	100.0

Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

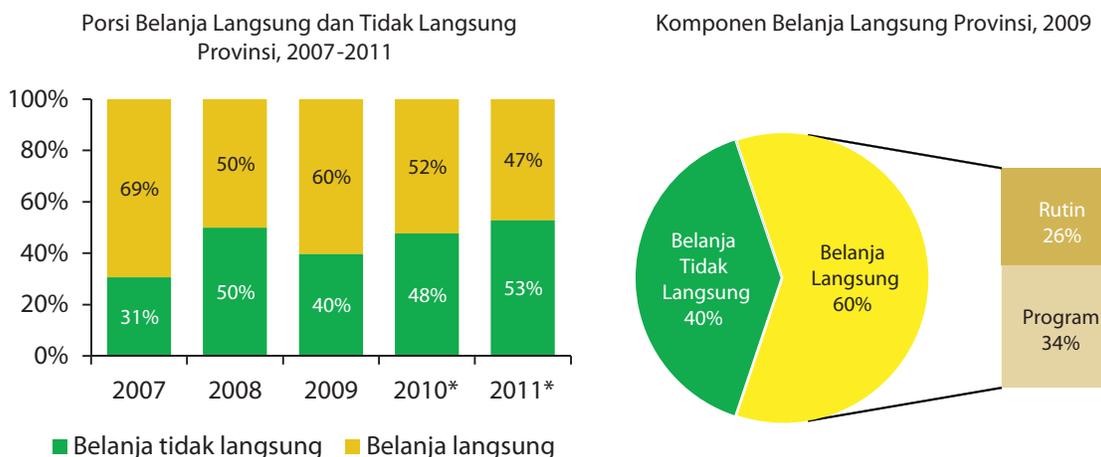
4.4. Belanja Program

Porsi belanja tidak langsung Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

Selama lima tahun terakhir, porsi belanja tidak langsung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Sulawesi Tenggara secara umum mengalami peningkatan kecuali tahun 2009. Pada tahun 2007, 38 persen belanja Sulawesi Tenggara dialokasikan pada belanja tidak langsung. Porsi ini kerap mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2009, menjadi 53 persen pada tahun 2011. Pada level provinsi, sebagian besar sumber belanja tidak langsung ini masih berasal dari belanja pegawai, walaupun kenaikan yang cukup tinggi khususnya pada 3 tahun terakhir berasal dari belanja bagi hasil dan bantuan ke daerah bawahan. Pada level kabupaten/kota belanja terbesar ini berasal dari belanja pegawai yang juga memiliki peningkatan tertinggi. Sementara itu, porsi belanja langsung Sulawesi Tenggara mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.

Pemerintah provinsi mengalokasikan lebih dari 50 persen belanja langsungnya untuk program-program pembangunan. Pada tahun 2009, dari 60 persen belanja langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, 34 persen digunakan untuk program pembangunan sedangkan 26 persen digunakan untuk belanja program/kegiatan administrasi umum perkantoran dan aparatur (rutin)¹⁸. Dari seluruh belanja program pembangunan tersebut, 39 persen atau sebesar Rp. 186 miliar digunakan untuk urusan pekerjaan umum pada program pembangunan jalan dan jembatan (Rp. 120 miliar). Urusan kedua terbesar untuk belanja rutin pemerintah provinsi adalah urusan pendidikan pada program manajemen pelayanan pendidikan. Program ini mencakup pelaksanaan evaluasi hasil kinerja pendidikan, kerjasama kelembagaan, sosialisasi peraturan pemerintah di bidang pendidikan, pembinaan dewan pendidikan maupun komite sekolah, serta monitoring dan evaluasi. Pada bab selanjutnya di sektor pendidikan, akan dibahas isu-isu di bidang pendidikan Sulawesi Tenggara, sehingga dapat diketahui apakah alokasi belanja pendidikan pemerintah provinsi sudah tepat sasaran dalam mengatasi isu-isu tersebut.

Gambar 4.8. Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh Belanja untuk Program Pembangunan

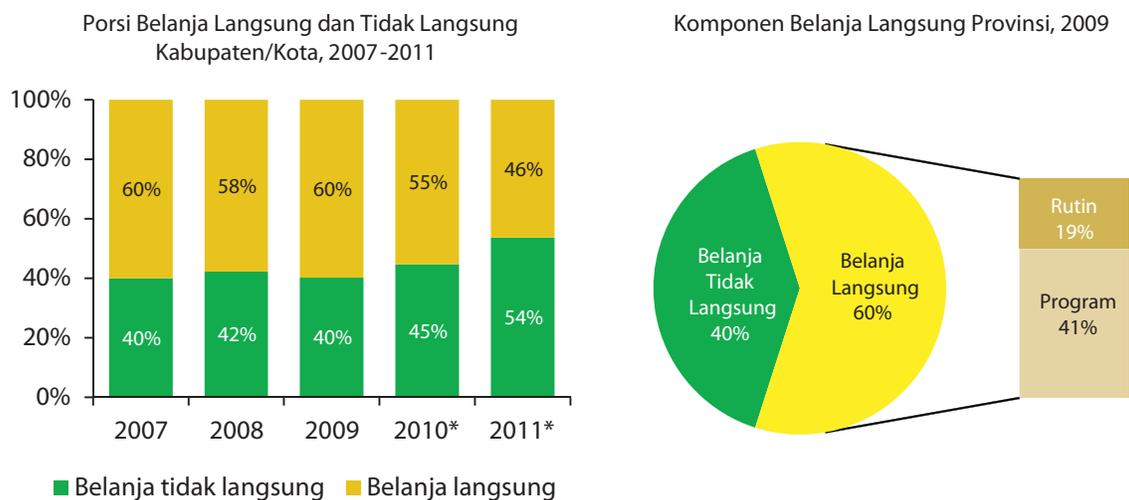


Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

Serupa dengan pemerintah provinsi, alokasi belanja untuk program-program pembangunan pemerintah kabupaten/kota mencapai hampir 70 persen dari belanja langsungnya. Pada tahun 2009, 60 persen dari belanja pemerintah kabupaten/kota Sulawesi Tenggara digunakan untuk belanja langsung. Dari 60 persen belanja langsung tersebut, 41 persen digunakan untuk belanja program pembangunan sedangkan 19 persen digunakan untuk belanja program rutin. Urusan infrastruktur merupakan urusan dengan alokasi belanja program terbesar, yaitu 34 persen dari total belanja langsung (Rp. 633 miliar) yang digunakan untuk program pembangunan jalan dan jembatan (Rp. 299 miliar). Urusan dengan alokasi terbesar kedua merupakan urusan pendidikan, sebesar 15 persen dari total belanja langsung kabupaten/kota (Rp. 285 miliar) yang digunakan untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Terdapat perbedaan strategi alokasi belanja pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dimana pemerintah provinsi lebih menitikberatkan pada perbaikan sistem pendidikan sedangkan pemerintah kabupaten/kota menitikberatkan pada perbaikan output pendidikan seperti menurunkan angka APM ataupun melek huruf.

18 Belanja program/kegiatan administrasi umum perkantoran dan aparatur (rutin) adalah belanja program dengan kode 1 sampai 14 dalam belanja langsung masing-masing SKPD, atau sering juga disebut belanja SKPD. Belanja ini pada umumnya dianggarkan oleh SKPD untuk belanja ATK perkantoran, pemeliharaan atau pembangunan gedung perkantoran pemerintah, pelatihan dan peningkatan disiplin pegawai, dan lain-lain.

Gambar 4.9. Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/kota Sulawesi Tenggara juga didominasi oleh Belanja untuk Program Pembangunan

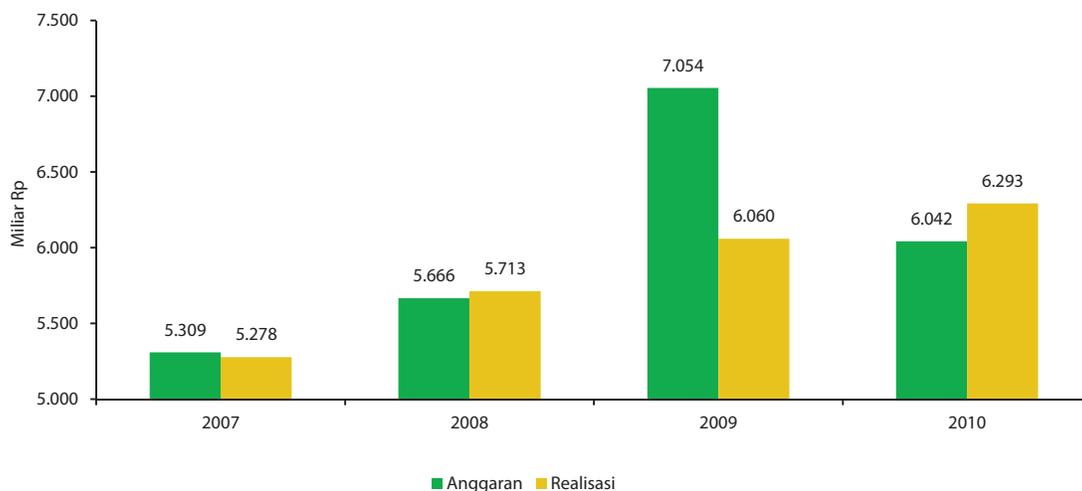


Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

4.5. Anggaran Versus Realisasi

Tingkat realisasi belanja daerah Sulawesi Tenggara selama 2007-2010 selalu berubah-ubah. Pada tahun 2007 belanja daerah Sulawesi Tenggara tidak dapat terealisasi sepenuhnya, sedangkan pada tahun 2008 realisasi belanja tersebut lebih tinggi dari anggarannya. Pada tahun 2009 Sulawesi Tenggara sepertinya mempunyai masalah dalam merealisasikan anggarannya karena tingkat realisasinya hanya sebesar 85 persen. Perlu dikaji lebih jauh bagaimana pemerintah membuat perencanaan anggaran belanja daerahnya sehingga bisa diketahui mengapa belanja tersebut tidak dapat terealisasikan dengan baik.

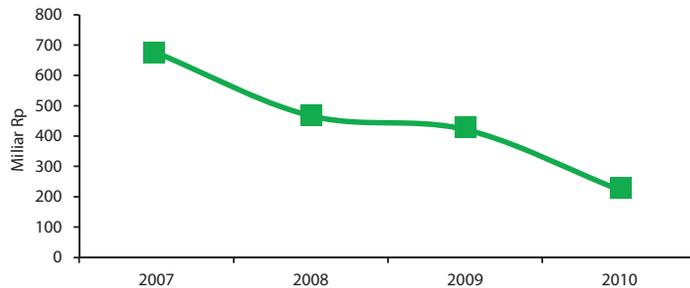
Gambar 4.10. Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara, 2007-2010



Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011.

4.6. Manajemen Belanja dan Pembiayaan

Gambar 4.11. Surplus dan Defisit Anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber: Database PEA Sulawesi Tenggara Universitas Haluoleo 2011.

Selama periode 2007-2010, Sulawesi Tenggara mengalami surplus penerimaan daerah. Surplus terbesar dicapai pada tahun 2007 sebesar Rp. 674 miliar. Jumlah ini terus mengalami penurunan hingga Rp. 224 miliar pada tahun 2010. Kemampuan pemerintah dalam pengelolaan dananya menunjukkan bahwa pengelolaan/penyerapan kemampuan pemerintah dalam berbagai program sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat kecenderungan surplus dari tahun ke tahun tidak begitu besar.

Salah satu kemungkinan penyebab terjadinya surplus anggaran ini adalah hambatan dalam proses penyerapan anggarannya. Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar anggaran pemerintah Sulawesi Tenggara yang ada dalam cadangan Bank Indonesia diserap pada bulan Desember. Fenomena penumpukan anggaran pada cadangan Bank Indonesia ini dimulai semenjak tahun 2006. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti lambatnya proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, lambatnya proses tender, kelemahan pada mekanisme perencanaan di awal, sampai kekhawatiran pegawai pemerintah dalam menyerap anggaran tersebut¹⁹. Hal ini dapat diatasi dengan membahas isu manajemen belanja pada saat proses perencanaan anggaran di awal sehingga pada saat anggaran diserap, solusi terhadap masalah penyerapan anggaran telah tersedia.

Gambar 4.12. Sebagian Besar Anggaran Pemerintah Dihabiskan Pada Bulan November dan Desember



Sumber: Diolah dari Database Bank Indonesia.

19 Problematika Penyerapan Anggaran di Daerah, Swa Mandiri 12 Februari 2011, diakses melalui <http://swamandiri.wordpress.com/2011/02/12/problematika-penyerapan-anggaran-di-daerah/> pada 30 Desember 2011

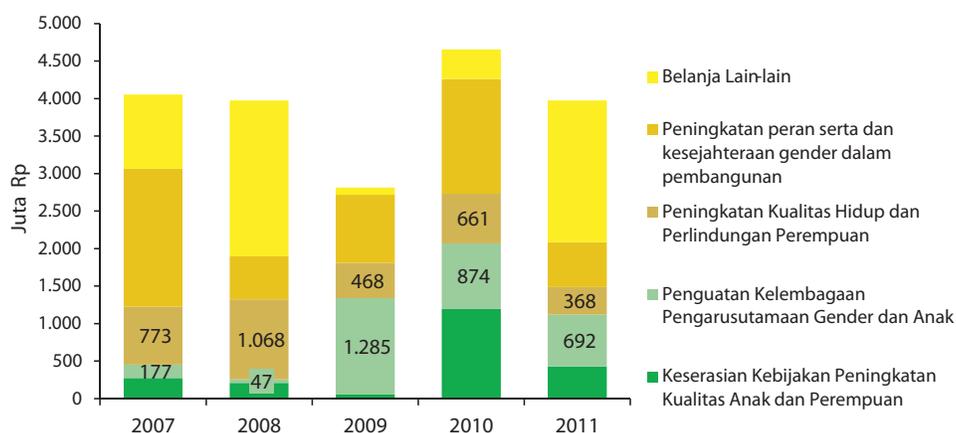
4.7. Hubungan Belanja dan Gender

Implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional masih berbeda-beda di setiap daerah. Pengarusutamaan gender yang merupakan lintas bidang pembangunan, sudah terintegrasi di beberapa sektor seperti pendidikan dan kesehatan. Namun di sektor-sektor lain seperti infrastruktur dan pertanian, hal ini belum bisa dilihat penerjemahan dan pelaksanaannya. Meski demikian, belanja pengarusutamaan gender yang paling jelas terlihat di setiap daerah adalah belanja urusan dan badan yang langsung berhubungan dengannya; yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana serta Setda (Pemerintahan Umum).

Fokus belanja program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA) kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tenggara antara tahun 2007 hingga 2011 sangat bervariasi, begitu pula besaran belanjanya. Belanja Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak misalnya, berfluktuasi, dengan nilai belanja terendah pada tahun 2008 sebesar Rp.47 juta dan tertinggi pada tahun 2009 sebesar Rp.1.285 juta. Hal yang sama terjadi pada belanja Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yang juga menunjukkan fluktuasi cukup besar, dengan nilai belanja terendah pada tahun 2011 sebesar Rp.368 juta dan tertinggi pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.068 juta. Fakta di atas menunjukkan masih lemahnya komitmen dan konsistensi penganggaran dan belanja program Urusan PP&PA di tingkat kabupaten/kota. Pemahaman akan pentingnya program PUG, dalam setiap urusan, khususnya PP&PA, juga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 bisa maksimal.

Kurangnya konsistensi pelaksanaan dan belanja program PP&PA juga terlihat dari jumlah program yang dilaksanakan setiap tahun di tingkat kabupaten/kota. Dari total 12 program yang ada dalam urusan PP&PA, hanya 4 program yang dilaksanakan setiap tahun; yaitu (1) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, (2) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, (3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta (4) Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan. Sementara program seperti Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dan Pembangunan Organisasi Perempuan dan Pemerhati Perempuan tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Gambar 4.13. Belanja Program Urusan PP&PA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2007 – 2011



Sumber: Diolah dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara 2007-2011.

Sementara itu, di tingkat provinsi, belanja urusan PP&PA lebih terlihat sporadis dalam lima tahun terakhir. Tidak ada belanja program yang sama selama lima tahun berturut-turut. Program yang paling lama berjalan, yaitu selama tiga tahun, adalah (1) Program peningkatan peran serta dan kesejahteraan

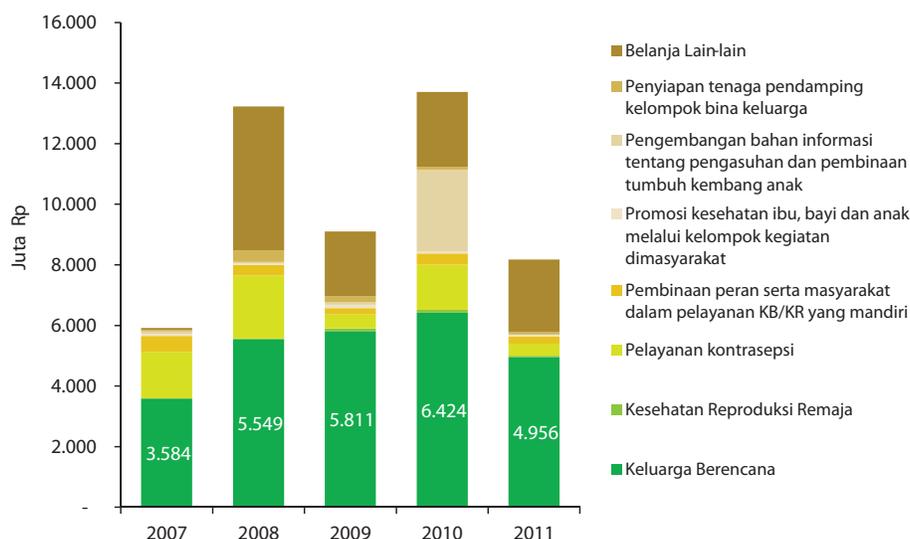
gender dalam pembangunan dan (2) Program Pembinaan Pelayanan KB Masyarakat Miskin (data terlampir). Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan terkait dengan PUG.

Dalam belanja program urusan Keluarga Berencana di tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, belanja Keluarga Berencana menduduki peringkat teratas, sesuai dengan peruntukannya. Setelah mengalami peningkatan selama 4 tahun dari 2007 – 2010, belanja program keluarga berencana mengalami penurunan di 2011, meski jumlah totalnya masih lebih tinggi dari belanja untuk program lain. Belanja program Pelayanan Kontrasepsi dan Pembinaan peranserta masyarakat dan pelayanan KB/KR yang mandiri, menduduki peringkat kedua dan ketiga, walau jumlahnya jauh berada dibawah belanja program KB. Selain itu besaran nilai belanja untuk program-program ini pun berfluktuasi cukup tajam. Sama halnya dengan belanja PP&PA, konsistensi dan komitmen pemerintah dalam menjalankan program urusan Keluarga berencana juga masih perlu ditingkatkan, sehingga hasilnya bisa maksimal.

Di tingkat provinsi, belanja pemprov Sulawesi Tenggara untuk urusan Keluarga Berencana baru dimulai pada tahun 2009 dengan fokus belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk program peningkatan dan perlindungan anak dan remaja sebesar Rp. 80juta. Program ini berulang di tahun 2010 dengan jumlah yang lebih kecil (Rp. 64juta), namun tidak terlihat lagi di tahun 2011. Pemerintah provinsi juga terkesan tidak konsisten dalam menjalankan komitmen yang terkait dengan pengembangan perempuan dan anak, baik dari sisi reproduksi, penanggulangan narkoba, maupun pembinaan keluarga.

Sementara itu pada urusan Pemerintahan Umum, belanja terkait dengan pemberdayaan perempuan hanya terlihat pada anggaran tahun 2011, untuk belanja barang dan jasa program Pengembangan Kelembagaan Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Remaja, sebesar Rp. 113juta. Hal ini menunjukkan belum adanya perhatian menyeluruh dari Pemprov Sultra terkait pemberdayaan perempuan dan anak.

Gambar 4.14. Belanja Program Urusan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2007 - 2011

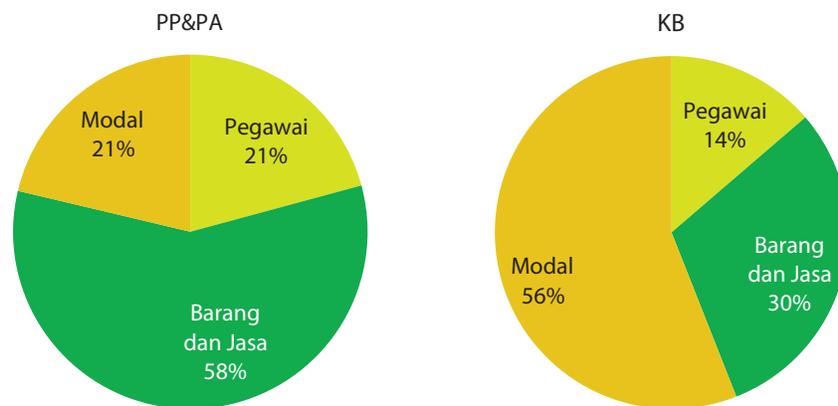


Sumber: Diolah dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara 2007-2011.

Klasifikasi belanja program urusan PP&PA tingkat provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan besaran tertinggi untuk belanja barang dan jasa (58 persen atau Rp. 15,2miliar). Sementara belanja pegawai dan belanja modal, masing-masing sebesar 21 persen Komponen belanja barang dan jasa menunjukkan tingginya kegiatan penyuluhan yang memerlukan perjalanan dinas dan konsultan.

Sementara klasifikasi belanja program urusan Keluarga Berencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota paling besar di belanja modal, sebesar 56 persen (Rp.28,2miliar), diikuti dengan belanja barang dan jasa sebesar 30 persen (Rp. 15,3miliar) dan belanja pegawai 14 persen. Sesuai dengan program-programnya, kegiatan urusan KB didominasi dengan penyuluhan (barang dan jasa) yang dilengkapi dengan alat peraga (modal).

Gambar 4.15. Klasifikasi Belanja Program Urusan PP&PA dan Keluarga Berencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara 2007 – 2011



Sumber: Diolah dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara 2007-2011.

4.8. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perlu kajian mengenai pertumbuhan jumlah dan belanja pegawai. Seiring dengan meningkatnya belanja dari tahun ke tahun, porsi belanja pegawai pada tingkat kabupaten/kota mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir hingga mencapai lebih dari 50 persen tahun 2011. Dampaknya, porsi belanja langsung untuk pembangunan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jika belanja pegawai ini sebagian besar dialokasikan untuk pegawai fungsional (dokter, guru, bidan, dsb), maka pertumbuhan belanja pegawai dapat menunjang pada perbaikan pelayanan publik Sulawesi Tenggara. Namun jika sebagian besar belanja ini digunakan untuk belanja pegawai struktural, maka pertumbuhan belanja pegawai dapat berdampak pada inefisiensi belanja. Pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan : (i) kajian lebih mendalam mengenai pola pertumbuhan jumlah pegawai terhadap tingkat kebutuhan riil pegawai serta merumuskan strategi rasionalisasi pegawai dalam jangka panjang; (ii) mengurangi pertumbuhan jumlah pegawai non-fungsional dan mendorong peningkatan jumlah pegawai fungsional terutama yang berdampak langsung pada pelayanan seperti dokter, guru, penyuluh, dll.

Seiring dengan peningkatan belanja dari tahun ke tahun, porsi belanja untuk sektor pemerintahan umum (diluar transfer) secara bertahap perlu dikurangi. Pada tingkat provinsi, belanja pemerintahan umum diluar transfer diperkirakan mencapai 22 persen dari total belanja tahun 2011, sementara pada tingkat kabupaten/kota sebesar 30 persen. Porsi tersebut jauh lebih tinggi dibanding porsi untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian. Seiring dengan peningkatan belanja dari tahun ke tahun, porsi belanja pemerintahan umum perlu secara bertahap dikurangi untuk memberi peluang peningkatan porsi yang lebih besar pada sektor-sektor strategis.

Seiring dengan semakin meningkatnya peran belanja transfer (bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, dll) pada belanja pemerintah provinsi, transparansi serta kualitas perencanaan, penatausahaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap jenis belanja tersebut harus ditingkatkan. Porsi belanja transfer mengalami peningkatan terutama dalam dua tahun terakhir hingga mencapai 25,5 persen pada tahun 2011. Porsi ini lebih tinggi dibanding porsi untuk sektor-sektor strategis. Sebagian

alokasi belanja transfer sebenarnya terkait dengan program unggulan provinsi seperti bantuan di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dll. Namun demikian, data mengenai hal tersebut masih sulit diperoleh. Pemerintah provinsi perlu meningkatkan kualitas informasi keuangan dari belanja transfer tersebut sehingga publik bisa mengetahui berapa dari belanja transfer tersebut yang betul-betul terkait dengan sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, dll. Hal ini penting agar publik bisa mengetahui komitmen pemerintah provinsi terhadap alokasi dana pada bidang-bidang tersebut. Selain itu, kualitas perencanaan, penatausahaan, serta monitoring dan evaluasi dari alokasi belanja transfer harus ditingkatkan agar mampu memberikan dampak maksimal pada pencapaian indikator-indikator pembangunan.

Pada tingkat kabupaten/kota, porsi belanja infrastruktur terhadap total belanja mengalami penurunan. Porsi belanja infrastruktur kabupaten/kota mengalami penurunan dari 15,4 persen tahun 2007, menjadi hanya 10,4 persen tahun 2011. Infrastruktur merupakan sektor yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga porsinya perlu ditingkatkan. Porsi belanja pemerintahan umum kabupaten/kota yang masih cukup tinggi perlu secara perlahan dikurangi sehingga member peluang yang besar pada peningkatan belanja infrastruktur.

Porsi anggaran pertanian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Porsi belanja sektor pertanian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih dibawah 8 persen. Sebagai provinsi yang menargetkan pertumbuhan ekonomi dengan bertumpu pada sektor pertanian, alokasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, salah satu kendala dalam produksi kakao untuk ekspor ini adalah revitalisasi kakao yang masih menghadapi berbagai hambatan yang disebabkan oleh kurangnya dukungan pembiayaan bagi para petani dari pemerintah khususnya untuk biaya sosialisasi dan pembinaan²⁰. Peningkatan belanja pertanian bisa ditujukan untuk program pembiayaan bagi para petani kakao yang diarahkan pada revitalisasi kakao untuk produksi ekspor.

Mengurangi secara bertahap porsi belanja langsung untuk administrasi dan aparatur. Baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sekitar 60 persen belanja sudah dialokasikan untuk belanja langsung. Namun demikian, porsi belanja untuk program/kegiatan terkait administrasi perkantoran dan aparatur (rutin) dalam belanja langsung pemerintah provinsi masih cukup tinggi (sekitar 26 persen dari total belanja, atau sekitar 43 persen dari total belanja langsung). Angka ini lebih tinggi dibanding pada tingkat kabupaten kota (19 persen dari total belanja, atau sekitar 32 persen dari total belanja langsung). Porsi belanja administrasi dan aparatur dalam belanja langsung provinsi secara bertahap perlu dirasionalisasi untuk memberi porsi yang lebih besar pada program/kegiatan pembangunan.

Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota perlu meningkatkan komitmen mereka untuk belanja program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Bila dilihat dari urusan PP&PA dan KB sepanjang tahun 2007 hingga 2011, konsistensi belanja program masih sangat kurang. Dari total 12 program yang ada dalam urusan PP&PA, hanya 4 yang dilaksanakan setiap tahun di tingkat kabupaten/kota. Sementara di propinsi, belanja program PP&PA terlihat lebih sporadis. Hal serupa terjadi pada urusan Keluarga Berencana, dimana hanya ada 7 dari 20 program yang dilaksanakan secara rutin. Karenanya penguatan kelembagaan sangat penting untuk segera dilakukan, agar implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional bisa segera terlaksana di propinsi Sulawesi Tenggara.

20 Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV-2009, diakses melalui http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Ekonomi_Regional/KER/Sultenggara/ker_sultra0409.htm pada tanggal 6 Desember 2011.



Bab 5

Analisis Sektor Strategis

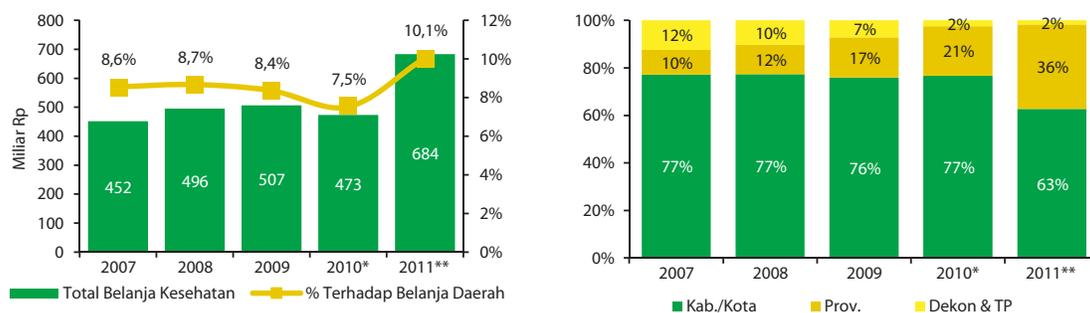
5.1. Sektor Kesehatan

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan pencapaian indikator tingkat kesehatan masyarakat maupun pelayanan. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat akan dicapai melalui peningkatan angka harapan hidup; penurunan angka kesakitan penduduk (*morbidity rate*), penurunan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB); penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang; peningkatan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan; serta peningkatan cakupan bayi yang diberi ASI eksklusif. Dari sisi pelayanan, pemerintah provinsi juga menargetkan peningkatan jumlah, kualitas, dan aksesibilitas pusat-pusat pelayanan kesehatan; serta pembangunan RS Provinsi yang baru.

5.1.1. Belanja Kesehatan

Ketergantungan belanja kesehatan di Sulawesi Tenggara terhadap dana dekonsentrasi/TP menurun. Secara riil, belanja kesehatan di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, yakni dari Rp. 452 miliar (2007) menjadi Rp. 684 (2011), dengan kontribusi terbesar berasal dari belanja kesehatan kabupaten/kota yang sampai tahun 2010 secara rata-rata menyumbang diatas 76 persen. Pada tahun 2011, kontribusi belanja kesehatan kabupaten/kota mengalami penurunan menjadi 63 persen karena adanya peningkatan signifikan belanja kesehatan pemerintah provinsi yang pada tahun tersebut kontribusinya meningkat hingga 36 persen. Kontribusi belanja kesehatan dari dana dekonsentrasi/TP mengalami penurunan, yakni dari 12 persen (2007), menjadi hanya 2 persen (2011).

Gambar 5.1. Ketergantungan Belanja Kesehatan di Sulawesi Tenggara terhadap Dana Dekon/TP Menurun



Sumber: Diolah dari database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Catatan: Dari sini dan selanjutnya, data tahun 2007 – 2009 adalah realisasi; *) 2010 APBD Perubahan; **) 2011 adalah APBD Murni; Seluruh data fiskal yang digunakan adalah angka riil (2009=100).

Proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja di tingkat provinsi lebih tinggi dibanding hal yang sama pada tingkat kabupaten/kota dan dekonsentrasi/TP. Proporsi belanja kesehatan provinsi meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 19,7 persen. Pada tingkat kabupaten, proporsi belanja kesehatan cenderung berfluktuasi, sementara proporsi belanja kesehatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi menurun dari 12,2 persen dari total belanja dekonsentras/TP menjadi hanya 1,2 persen (2011).

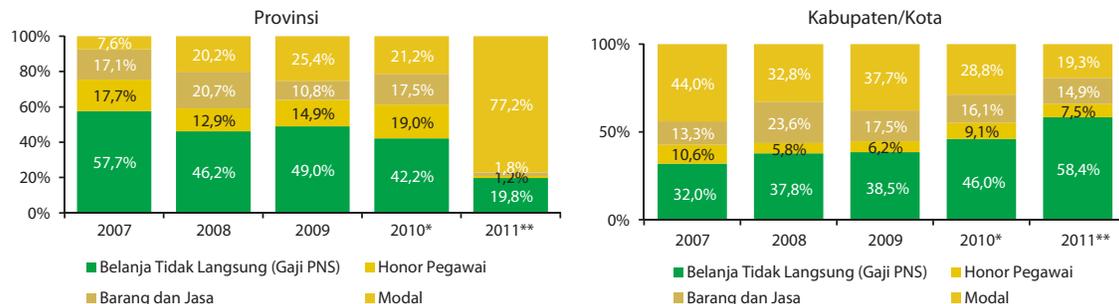
Tabel 5.1. Provinsi Mengalokasikan Lebih Besar dari Belanjanya untuk Kesehatan Dibanding Kabupaten/Kota

	2007	2008	2009	2010*	2011**
Provinsi					
Belanja Kesehatan (Miliar Rp)	53.5	68.1	92.4	101.1	247.4
Proporsi terhadap Belanja Provinsi	5.4%	7.4%	8.2%	8.4%	19.7%
Kabupaten/Kota					
Belanja Kesehatan (Miliar Rp)	398.1	427.5	414.3	372.3	436.4
Proporsi terhadap Belanja Kabupaten/Kota	9.3%	8.9%	8.4%	7.3%	7.9%
Dekonsentrasi/TP					
Belanja Kesehatan (Miliar Rp)	53.7	55.0	38.7	13.1	13.0
Proporsi terhadap Belanja Dekonsentrasi/TP	12.2%	8.9%	3.9%	1.8%	1.2%

Sumber: Diolah dari database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Belanja modal di Sektor Kesehatan provinsi mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2011.

Seiring dengan peningkatan belanja kesehatan, pemerintah provinsi telah berhasil menekan proporsi belanja gaji pegawai dari 57,7 persen tahun 2007 menjadi hanya 19,8 persen (2011). Penurunan signifikan proporsi belanja gaji pegawai pada tahun 2011 disebabkan oleh peningkatan signifikan pada belanja modal. Besarnya alokasi belanja modal kesehatan disebabkan karena adanya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang baru. Sementara itu, proporsi belanja gaji pegawai sektor kesehatan tingkat kabupaten/kota terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya alokasi belanja pegawai kesehatan kabupaten/kota karena pegawai merupakan ujung tombak pelayanan jasa kesehatan di daerah.

Gambar 5.2. Pada Tingkat Provinsi, Peningkatan Signifikan Terjadi Pada Komponen Modal, Sementara di Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Terjadi pada Komponen Belanja Gaji Pegawai.

Sumber: Diolah dari database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Sampai tahun 2010, belanja langsung sektor kesehatan pemerintah provinsi masih didominasi oleh belanja rutin, namun pada tahun 2011, terjadi perubahan struktur belanja langsung yang signifikan.

Sampai tahun 2010, secara rata-rata lebih dari 40 persen belanja langsung kesehatan tingkat provinsi habis untuk belanja administrasi dan aparatur disusul oleh belanja untuk program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit baik umum maupun khusus (RS Jiwa, paru-paru, dll), serta pemeliharannya. Pada tahun 2011, hampir seluruh belanja langsung (98 persen), dialokasikan untuk program pengadaan rumah sakit. belanja rumah sakit tahun 2011 telah meningkatkan belanja kesehatan provinsi menjadi lebih dari 2 kali lipat.

Provinsi juga telah membuat program asuransi jaminan kesehatan masyarakat namun belum konsisten.

Belanja program jaminan kesehatan tertinggi terjadi tahun 2009, dengan belanja sebesar Rp. 6,3 miliar atau 4,6 persen dari belanja langsung. Tahun 2010, program jaminan masih dianggarkan, tapi dengan nilai hanya setengah belanja tahun 2009. Pada tahun 2011, sama sekali tidak dianggarkan, karena belanja langsung kesehatan tersedot ke pengadaan rumah sakit.

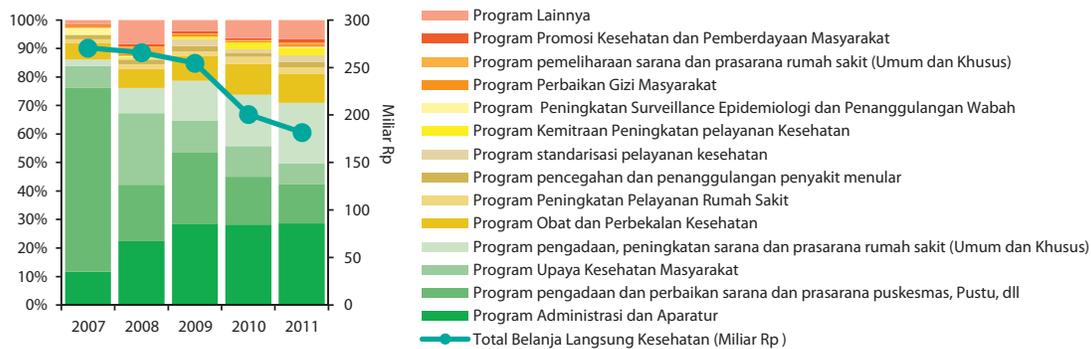
Gambar 5.3. Belanja Langsung Sektor Kesehatan Provinsi untuk Belanja Penyediaan Rumah Sakit Tahun 2011



Sumber: Diolah dari database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Belanja Langsung Kesehatan tingkat kabupaten/kota cenderung menurun dan sebagian besar masih dialokasikan untuk belanja program terkait administrasi/aparatur. Belanja program terkait administrasi dan aparatur tingkat kabupaten/kota secara proporsional cenderung meningkat hingga mencapai 30 persen tahun 2011. Penurunan belanja langsung berdampak buruk pada komposisi program sektor kesehatan, karena cenderung berdampak pada berkurangnya program-program yang bisa langsung berdampak pada masyarakat ketimbang program-program terkait administrasi dan aparatur. Sementara itu, alokasi kedua terbesar dalam belanja langsung kesehatan adalah untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasaran puskesmas disusul oleh program upaya kesehatan masyarakat. Beberapa program seperti perbaikan gizi masyarakat dan promosi kesehatan masyarakat sudah dialokasikan oleh tingkat kabupaten/kota, namun masih belum signifikan.

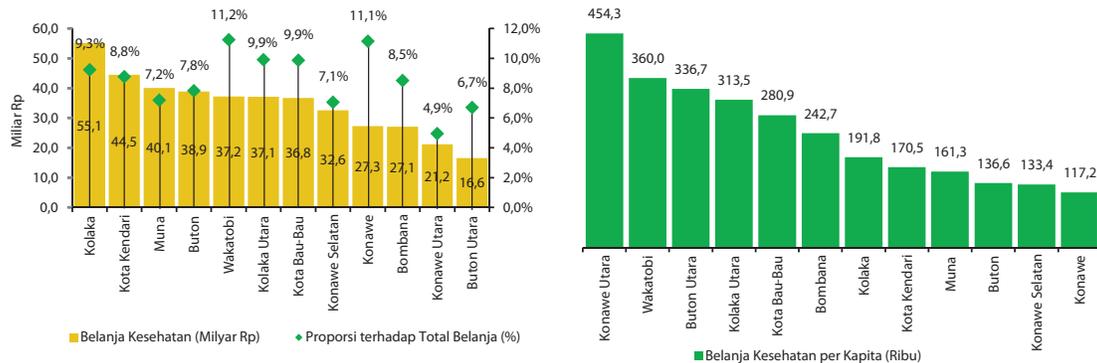
Gambar 5.4. Alokasi Kedua Terbesar Belanja Langsung Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Puskesmas



Sumber: Diolah dari database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Berdasarkan realisasi belanja tahun 2009, Wakatobi memiliki proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja tertinggi (11,2%), dan terendah Konawe Utara (4,9%). Secara nominal Kolaka memiliki belanja kesehatan terbesar namun secara persentase terhadap total belanja hanya menempati urutan kelima. Pada tahun 2009 baru dua kabupaten/kota yang memiliki persentase belanja kesehatan terhadap total APBD di atas 10 persen, yaitu Wakatobi dan Konawe. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk (sebagai proksi dari kebutuhan belanja kesehatan), Konawe Utara memiliki belanja kesehatan perkapita terbesar di Sulawesi Tenggara, yakni Rp.454 ribu diikuti oleh Kabupaten Wakatobi sebesar Rp.360 ribu. Besarnya belanja per kapita Konawe Utara lebih disebabkan karena sedikitnya jumlah penduduk, sementara untuk Wakatobi, besarnya belanja kesehatan perkapita karena didukung oleh belanja yang relatif tinggi.

Gambar 5.5. Kota Bau-Bau Memiliki Proporsi Belanja Kesehatan Tertinggi di Sulawesi Tenggara, 2009



Sumber: Diolah dari database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

5.1.2. Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Kesehatan

Jumlah dan keterjangkauan fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan kecuali (Pos Persalinan Desa) Polindes. Jumlah fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara terus meningkat yang ditunjukkan oleh peningkatan rasio rumah sakit dari 1 rumah sakit per 100 ribu penduduk (2006) menjadi 1,6 (2010); rasio tempat tidur dari 4,3 per 10.000 penduduk (2006) menjadi 7,8 (2010); rasio Puskesmas dari 8,4 per 100 ribu penduduk (2006) menjadi 10,8 (2010); dan rasio Puskesmas pembantu (Pustu) dari 27,1 per 100 ribu penduduk (2006) menjadi 29 (2010). Selain itu, keterjangkauan pelayanan kesehatan juga terlihat semakin baik. Rasio Puskesmas meningkat dari 4,4 per 1000 km² (2006) menjadi 6,3 (2010); dan jumlah desa yang harus dilayani oleh setiap satu Pustu menurun dari 4,1 desa (2006) menjadi hanya 3,4 desa (2010). Perbaikan berbagai rasio ini menunjukkan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan lebih tinggi dibanding peningkatan jumlah penduduk atau jumlah desa yang harus dilayani. Meskipun demikian, sampai tahun 2009, ketersediaan Polindes justru memburuk dari semula satu Polindes melayani 4 desa (2006) menjadi 11 desa (2009). Hal ini karena pertumbuhan jumlah Polindes lebih lambat dari pertumbuhan jumlah desa akibat pemekaran pada periode tersebut. Baru pada tahun 2010 Polindes tumbuh signifikan sehingga rasio desa per Polindes menurun meskipun belum seperti rasio tahun 2004.

Tabel 5.2. Ketersediaan dan Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan di Sultra Semakin Baik, Kecuali Polindes

Tahun	Ketersediaan			Aksesibilitas			
	Rasio RS per 100.000 Penduduk	Rasio TT per 10.000 Penduduk	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	Rasio Pustu per 100.000 penduduk	Rasio Puskesmas per 1.000 km ²	Rasio Desa per Pustu	Rasio Desa per Polindes
2006	1,0	4,3	8,4	27,1	4,4	4,1	4,1
2007	1,1	5,1	8,5	25,2	4,5	3,7	6,5
2008	1,3	5,6	10,0	26,7	5,4	3,5	8,2
2009	1,3	6,7	10,5	27,8	5,8	3,4	11,2
2010	1,6	7,8	10,8	29,0	6,3	3,4	8,1

Sumber : Diolah dari Sulawesi Tenggara dalam Angka, berbagai tahun, 2011.

Meskipun pada tingkat provinsi membaik, masih terjadi kesenjangan ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan antar kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2010, rasio rumah sakit per 100 ribu penduduk tertinggi terdapat di Kota Kendari, namun di sisi lain dua kabupaten hasil pemekaran

tahun 2007 (Buton Utara dan Konawe Utara) sama sekali belum memiliki rumah sakit. Meskipun beberapa daerah telah memiliki rumah sakit, namun tidak seluruhnya memiliki jumlah tempat tidur yang memadai. Di Kota kendari setiap 100 ribu penduduk tersedia lebih dari 16 tempat tidur, sementara di Bombana hanya 2 tempat tidur. Untuk rasio Puskesmas, Konawe Utara memiliki rasio tertinggi di Sulawesi Tenggara, namun dari sisi aksesibilitas masih sangat rendah. Jumlah Puskesmas per 1000 km² di Konawe Utara hanya 2 unit sementara di Wakatobi bisa 44 unit lebih. Hal yang sama terjadi dengan Pustu.

Tabel 5.3. Kabupaten Konawe Memiliki Rasio Fasilitas Kesehatan Tertinggi di Sulawesi Tenggara Tahun 2010

	Bombana	Buton	Buton Utara	Kolaka	Kolaka Utara	Konawe	Konawe Selatan	Konawe Utara	Kota Bau-Bau	Kota Kendari	Muna	Wakatobi
RS per 100.000 Penduduk	0,7	0,4	-	1,3	0,8	0,8	0,4	-	1,5	3,8	0,4	1,1
Tempat Tidur per 10.000 Penduduk	2,0	1,6		6,4	1,8	2,7	2,3		10,4	16,2	2,8	2,2
Puskesmas per 100.000 Penduduk	15,8	11,7	10,9	6,7	13,2	12,0	8,3	23,3	10,2	4,8	13,1	20,4
Puskesmas per 1.000 KM2	7,2	11,2	3,0	3,0	4,7	4,3	4,9	2,5	45,8	47,3	12,1	44,6
Pustu per 100.000 Penduduk	8,6	6,7	9,1	5,4	10,7	9,9	5,3	21,4	8,0	3,5	10,8	12,9
Pustu per 1.000 KM2	10,1	25,0	16,5	9,4	6,5	8,8	14,2	4,5	36,0	60,8	25,9	25,8

Sumber : Diolah dari Sulawesi Tenggara dalam Angka 2011.

Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan dan rasio tenaga kesehatan per jumlah penduduk mengalami peningkatan pada semua jenis kompetensi. Untuk mewujudkan kesehatan masyarakat Sulawesi Tenggara yang berkualitas, pemerintah terus mengupayakan tersedia dan tercukupinya secara memadai jumlah tenaga kesehatan pada berbagai kompetensi. Jumlah tenaga kesehatan di Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun rasio-nya terhadap 100 ribu penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dapat diimbangi dengan pertumbuhan jumlah tenaga kesehatan.

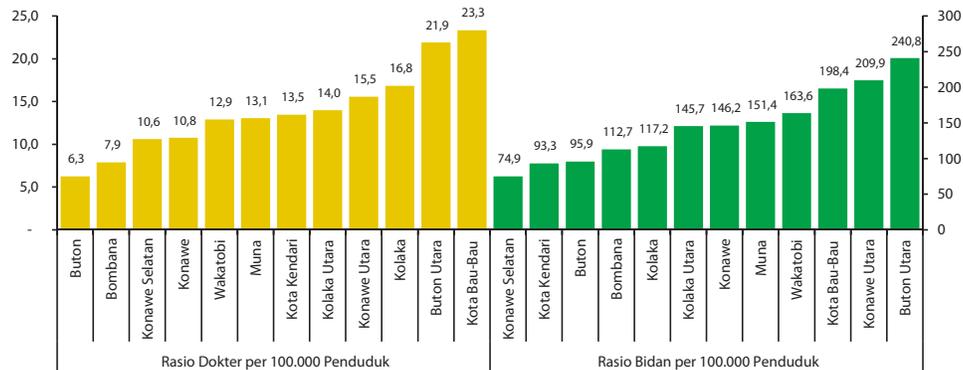
Tabel 5.4. Jumlah Tenaga Kesehatan Terus Meningkat.

Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan		Rasio T. Kesehatan per 100.000 Penduduk	
	2007	2010	2007	2010
Dokter Spesialis	47	60	2,3	2,7
Dokter Umum	202	352	9,9	15,8
Dokter Gigi	47	85	2,3	3,8
Perawat	2.131	3.153	104,9	141,4
Bidan	662	1.500	32,6	67,2
Apoteker	55	137	2,7	6,1
Asisten Apoteker	102	217	5,0	9,7
Ahli Kesehatan Masyarakat	410	994	20,2	44,6
Sanitarian	323	489	15,9	21,9
Ahli Gizi	385	576	19,0	25,8
Keterampilan Fisik	22	40	1,1	1,8
Keteknisian Medis	185	88	9,1	3,9
Jumlah Tenaga Kesehatan	4.971	7.541	244,7	338,1

Sumber : Diolah dari Sulawesi Tenggara dalam Angka, berbagai tahun, 2011.

Sama halnya dengan fasilitas kesehatan, kesenjangan antar kabupaten/kota juga masih cukup tinggi dalam hal ketersediaan tenaga kesehatan. Pada tahun 2010, rasio dokter per 100 ribu penduduk tertinggi terdapat di Kota Bau-bau sebesar lebih dari 23 orang per 100 ribu penduduk, sementara terendah di Buton yang hanya 6,3 orang per 100 ribu penduduk. Hal yang sama terjadi pada rasio bidan dimana Buton Utara bisa memiliki 240 lebih bidan per 100 ribu penduduk, sementara di Konawe Selatan hanya 74 orang. Selain itu, terdapat fenomena ketidakmerataan dokter spesialis dan gigi. Pada tahun 2010, Kota Bau-Bau dan Kolaka bisa memiliki 7 dokter spesialis, sementara terdapat 6 daerah sama sekali tidak memiliki. Kota Kendari bisa memiliki 19 dokter gigi, sementara tidak satupun dokter gigi di Wakatobi.

Gambar 5.6. Kota Bau-Bau Memiliki Rasio Dokter Per 100 Ribu Penduduk Tertinggi, Sementara Kabupaten Buton Utara Memiliki Rasio Bidan Per 100 Ribu Penduduk Tertinggi 2010

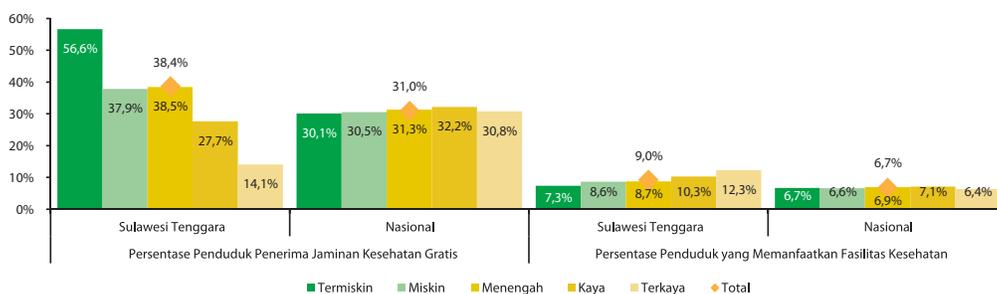


Sumber : Diolah dari Sulawesi Tenggara dalam Angka 2011.

5.1.3. Jaminan Kesehatan Gratis dan Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Jaminan kesehatan gratis di Sulawesi Tenggara sudah cukup baik, namun tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan masih rendah. Pada tahun 2010, Sulawesi Tenggara termasuk provinsi ke-5 tertinggi secara nasional, dan tertinggi diantara provinsi di Sulawesi dalam hal cakupan jaminan kesehatan gratis. Cakupan kesehatan gratis di Sulawesi Tenggara sudah mencapai 38,4 persen dari seluruh penduduk dan 57 persen penduduk termiskin, sementara angka nasional baru 37 persen penduduk termiskin. Namun demikian, meskipun ketersediaan dan aksesibilitas kesehatan yang meningkat, serta jaminan kesehatan gratis yang relatif baik, namun hanya 9 persen penduduk yang pernah memanfaatkan fasilitas kesehatan. Angka tersebut lebih tinggi dari angka nasional, namun masih terhitung rendah jika dibanding dengan tingkat kesakitan penduduk di Sulawesi Tenggara yang masih termasuk 10 tertinggi di Indonesia. Perempuan sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki dalam cakupan penerima jaminan kesehatan gratis (39 persen vs 38 persen), dan memanfaatkan sedikit lebih baik dibanding laki-laki (10 persen vs 8 persen)

Gambar 5.7. Cakupan Jaminan Kesehatan Gratis Cukup Tinggi, Namun Pemanfaatan Fasilitas Masih Rendah



Sumber : Diolah dari Susenas 2010, 2011

Kota Bau-Bau merupakan daerah terbaik dalam hal cakupan jaminan kesehatan gratis untuk kelompok termiskin. Pada tahun 2009, hampir 95 persen dari 20 persen penduduk termiskin di Kota Bau-Bau sudah memiliki jaminan kesehatan gratis, dengan angka kesakitan penduduk termiskin yang paling kecil. Sementara itu, untuk 20 persen penduduk miskin, Wakatobi merupakan daerah dengan cakupan jaminan kesehatan gratis tertinggi dengan angka kesakitan penduduk miskin ke-2 terendah. Jika dilihat dari tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan, sebagian besar dibawah 10 persen kecuali di daerah kota (Kendari dan Bau-Bau), Muna, serta Konawe Utara. Kota Kendari adalah daerah dengan angka kesakitan tertinggi baik untuk kelompok termiskin dan miskin.

Tabel 5.5. Kota Bau-Bau Memiliki Cakupan Jaminan Kesehatan Gratis untuk Kelompok Termiskin Tertinggi

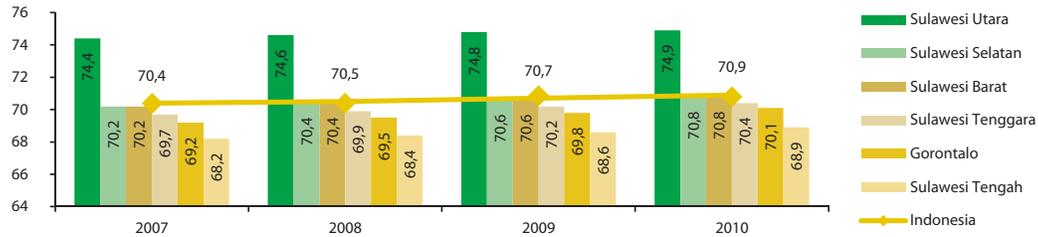
	Termiskin			Miskin		
	Angka Kesakitan Penduduk Termiskin	Penerima Jaminan Kesehatan Gratis	Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	Angka Kesakitan Penduduk Miskin	Penerima Jaminan Kesehatan Gratis	Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan
Buton	36.8%	67.7%	8.2%	37.7%	39.9%	13.1%
Muna	37.2%	35.9%	12.5%	28.9%	31.0%	8.2%
Konawe	41.7%	75.7%	7.6%	43.5%	54.3%	14.5%
Kolaka	32.5%	21.8%	5.9%	28.4%	29.5%	6.5%
Konawe Selatan	24.5%	54.7%	5.8%	33.4%	35.4%	4.6%
Bombana	37.5%	23.1%	1.3%	22.2%	16.4%	1.3%
Wakatobi	17.4%	80.4%	2.0%	24.8%	89.6%	4.2%
Kolaka Utara	31.3%	8.9%	3.7%	36.6%	15.8%	9.2%
Buton Utara	26.1%	75.7%	6.3%	24.5%	70.7%	5.8%
Konawe Utara	44.3%	56.2%	5.3%	55.5%	56.3%	14.8%
Kota Kendari	48.9%	80.7%	16.6%	56.3%	20.2%	11.7%
Kota Bau-Bau	24.3%	94.4%	10.0%	36.6%	55.0%	16.9%

Sumber : Diolah dari Susenas 2011.

5.1.4. Hasil Pembangunan Sektor Kesehatan

Indeks Angka harapan hidup (AHH) Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan namun masih jauh dibawah AHH Nasional dan terhitung terendah dibanding provinsi lama di Sulawesi. Indeks AHH merupakan salah satu indikator dalam IPM yang terkait dengan pembangunan kesehatan. Dalam 4 tahun terakhir, indeks AHH Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan, namun belum beranjak dari posisi ke-22 secara nasional. Secara umum peningkatan indeks AHH di Sulawesi Tenggara relatif tinggi, rata-rata 23 persen per tahun. Angka peningkatan ini sama dengan peningkatan rata-rata indeks AHH di Sulawesi Barat, lebih tinggi dibanding peningkatan indeks AHH di provinsi lama di Pulau Sulawesi yang rata-rata dibawah 17 sampai 20 persen per tahun, namun lebih rendah dibanding Gorontalo yang meningkat tiap tahun 30 persen. Secara umum, indeks AHH laki-laki di Sulawesi Tenggara lebih rendah dibanding perempuan: 65,5 tahun untuk laki-laki, dan 69,4 tahun untuk perempuan pada tahun 2010.

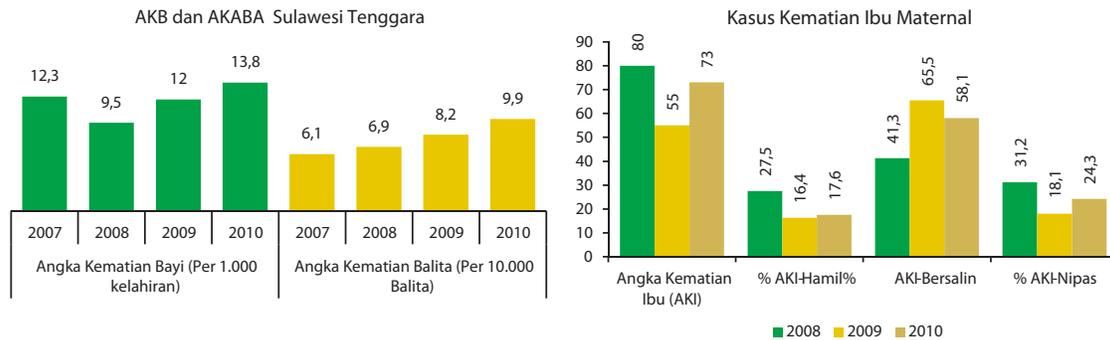
Gambar 5.8. Indeks AHH Sulawesi Tenggara Masih Dibawah Indeks Nasional dan Provinsi Lama di Sulawesi



Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA), dan kasus kematian Ibu meningkat pada tahun 2010. Angka kematian bayi di Sulawesi Tenggara pernah mengalami penurunan signifikan pada tahun 2008, namun kembali meningkat secara konsisten sampai 14 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Tidak berbeda dengan AKB, AKABA juga mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun hingga hampir 10 balita per 10.000 balita. Jumlah kasus kematian ibu maternal pernah menurun pada tahun 2009, namun kembali meningkat pada tahun 2010. Penyebab kematian ibu maternal tahun 2008-2010 tertinggi disebabkan oleh kematian persalinan, kemudian kematian nifas dan kematian pada saat hamil. Meskipun kasus kematian ibu meningkat, Angka kematian Ibu (AKI) pada tahun 2010 lebih kecil dibanding tahun 2007 (yakni 161 VS 191 per 100.000 kelahiran hidup)²¹.

Gambar 5.9. Kinerja Pembangunan Kesehatan Ibu dan Anak Belum Menggembirakan Pada Tahun 2010



Sumber : Diolah dari Profil Kesehatan Sulawesi Tenggara, 2007-2010, 2011.

Buton merupakan daerah dengan AKB tertinggi, sementara Kolaka merupakan daerah dengan AKABA tertinggi. Disamping terbesar, AKB di Buton juga terhitung meningkat dari 17,5 per 1.000 kelahiran hidup (2007) menjadi 27,7 (2010). Selain tingginya rasio AKB, dari segi jumlah kasus, Buton juga menempati urutan tertinggi dengan kontribusi tingkat kematian bayi sebesar 27,8 persen dari total kematian bayi di Sulawesi Tenggara. Sementara itu, AKABA tertinggi tahun 2007 terjadi di Muna, kemudian tahun 2010 terjadi di Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2007 Kolaka Utara tidak terjadi kasus kematian balita, namun pada tahun 2010 angka AKABA menjadi 19,2 per 10.000 balita. Data Konawe Utara dan Buton Utara tahun 2007 tidak tersedia karena dua kabupaten tersebut baru berdiri. Tidak terlihat hubungan yang konsisten antara kematian bayi dan balita dengan jumlah fasilitas kesehatan, dokter, bidan, dan besarnya belanja kesehatan perkapita.

²¹ Data AKB, AKABA, dan AKI yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada data kasus kematian yang dilaporkan oleh fasilitas kesehatan. Data ini diperkirakan lebih rendah dari sebenarnya karena hanya didasarkan pada data yang dilaporkan atau terjadi di fasilitas kesehatan.

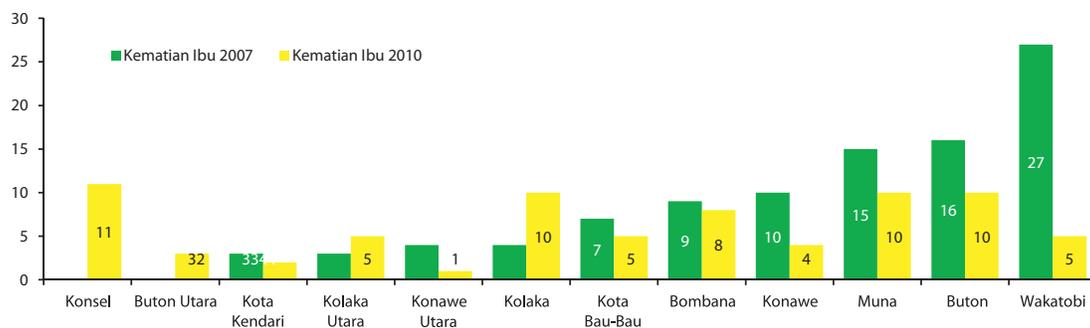
Tabel 5.6. Perkembangan AKI dan AKB Bervariasi antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara

	Kematian Bayi					Kematian BALITA				
	AKB per 1.000 Kelahiran Hidup		Status	Jumlah Kasus	Distribusi Kasus	AKABA per 10.000 BALITA		Status	Jumlah Kasus	Distribusi Kasus
	2007	2010		2010	2010	2007	2010		2010	2010
Buton	17,5	27,7	Naik	163	27,8%	15,1	14,2	Turun	44	17,6%
Muna	12,5	11,5	Turun	56	9,5%	98,0	6,8	Turun	18	7,2%
Konawe	4,6	66,7	Naik	29	4,9%	0,0	8,8	Naik	29	11,6%
Kolaka	9,9	6,3	Turun	43	7,3%	0,0	62,0	Naik	20	8,0%
Konawe Selatan	21,9	14,0	Turun	68	11,6%	45,4	24,5	Turun	78	31,2%
Bombana	12,4	29,8	Naik	75	12,8%	13,8	6,5	Turun	10	4,0%
Wakatobi	0,0	21,6	Naik	40	6,8%	9,7	9,9	Naik	10	4,0%
Kolaka Utara	11,4	1,3	Turun	3	0,5%	0,0	19,2	Naik	3	1,2%
Buton Utara	N/A	19,5	N/A	23	3,9%	N/A	36,3	N/A	23	9,2%
Konawe Utara	N/A	27,5	N/A	26	4,4%	N/A	3,3	N/A	2	0,8%
Kota Kendari	3,8	3,4	Turun	19	3,2%	0,0	0,7	Turun	2	0,8%
Kota Bau-Bau	3,8	14,0	Naik	42	7,2%	17,4	6,3	Turun	11	4,4%

Sumber : Diolah dari Profil Kesehatan Sulawesi Tenggara, 2007-2010, 2011.

Tahun 2010, seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan kasus kematian ibu dibanding tahun 2007, kecuali di Kabupaten Kolaka Utara dan Kolaka. Pada tahun 2007, jumlah kasus kematian ibu tertinggi terdapat di Wakatobi, dan terendah di Kota Kendari. Namun, pada tahun 2010, terjadi penurunan kasus kematian ibu yang cukup signifikan di Wakatobi dari 27 kasus menjadi hanya 5 kasus. Sementara itu, di Kolaka Utara dan Kolaka justru terjadi kenaikan. Dengan penurunan ini, maka daerah yang memiliki kasus kematian ibu tertinggi tahun 2010 menjadi Buton, Muna dan Kolaka Utara. Jumlah kasus kematian ibu memiliki kaitan erat dengan rasio dokter per 100.000 penduduk dan dengan angka kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan, namun tidak terlihat adanya hubungan yang konsisten antara jumlah kasus kematian ibu dengan ketersediaan fasilitas kesehatan.

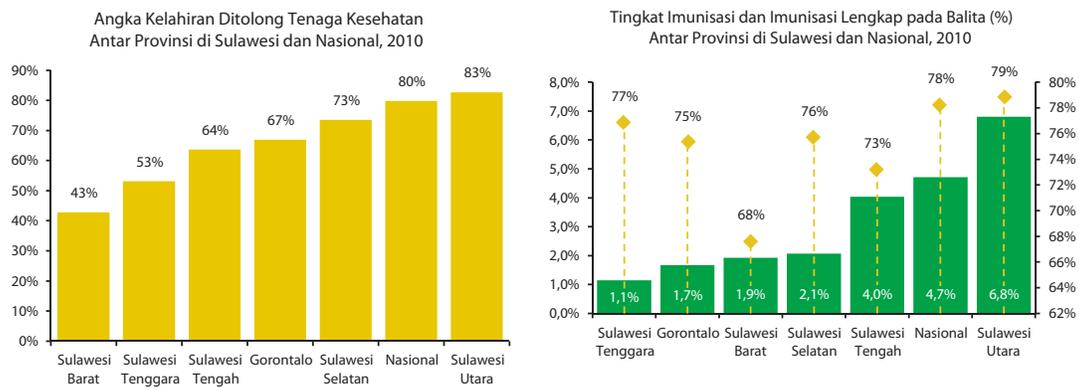
Gambar 5.10. Kasus Kematian Ibu Menurun di Semua Kabupaten/Kota kecuali Kolaka Utara dan Kolaka



Sumber : Diolah dari Profil Kesehatan Sulawesi Tenggara, 2007-2010, 2011.

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dengan angka terendah dalam hal cakupan kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan serta imunisasi lengkap. Kelahiran yang dibantu tenaga medis profesional di Sulawesi Tenggara merupakan yang kedua terendah di Indonesia setelah Sulawesi Barat. Secara nasional, cakupan kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan di Indonesia sudah mencapai 80 persen, namun Sulawesi Tenggara baru 53 persen. Selain itu, meskipun cakupan imunisasi sudah cukup tinggi (77%) dan mendekati angka nasional (78%), namun dalam hal cakupan imunisasi lengkap (*complete immunization*), Sulawesi Tenggara masih yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi. Dengan kondisi ini, tidak heran kalau tingkat kematian bayi dan kematian ibu di Sulawesi Tenggara masih terhitung tinggi.

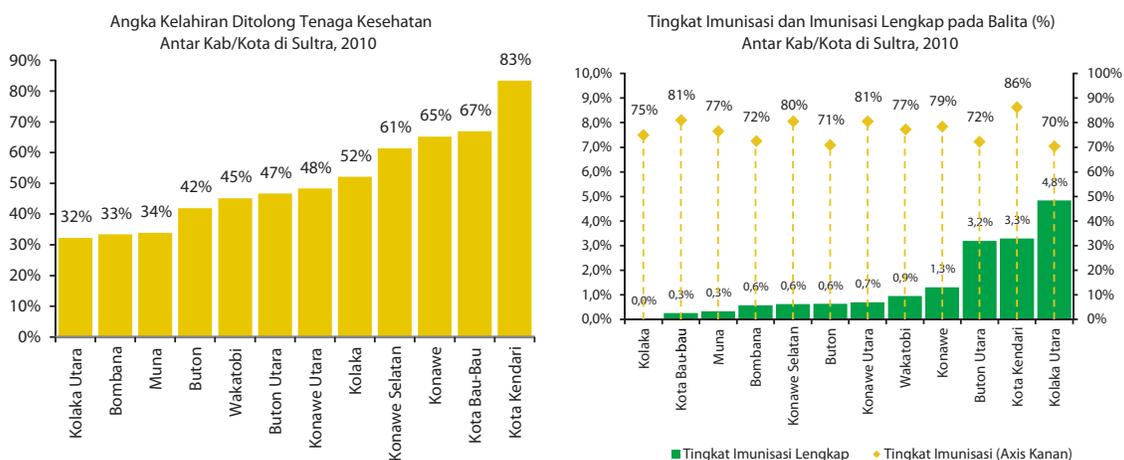
Gambar 5.11. Angka Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan di Sulawesi Tenggara masih Sangat Rendah, 2010



Sumber : Diolah dari Susenas 2009, 2011.

Cakupan imunisasi relatif merata antar kabupaten/kota, namun kesenjangan cakupan kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan professional masih sangat tinggi. Angka cakupan kelahiran pertama dan terakhir yang ditolong tenaga kesehatan tertinggi pada tahun 2009 terdapat di Kota Kendari sebesar 75 persen, namun di Buton dan Bombana baru 14 persen. Secara umum daerah perkotaan memiliki angka cakupan kelahiran ditolong tenaga kesehatan yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten. Sementara itu, cakupan imunisasi pada semua kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara sudah cukup baik, yaitu di atas 70 persen.

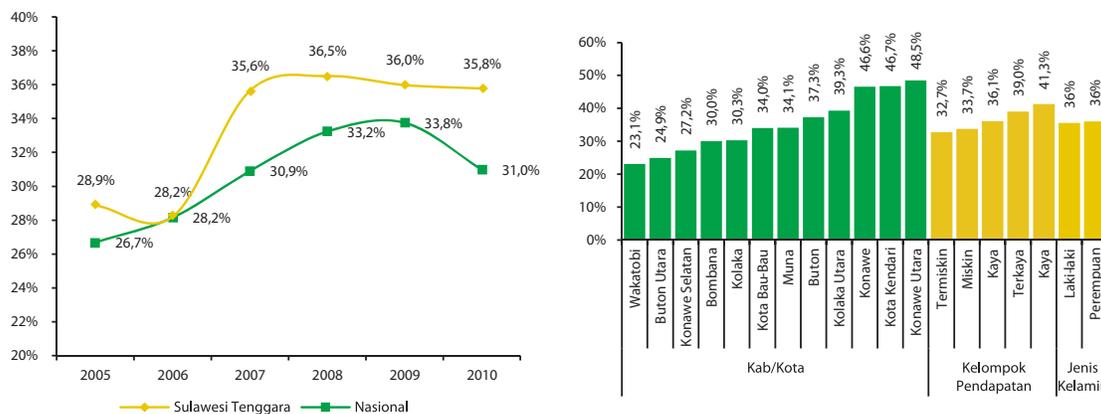
Gambar 5.12. Kesenjangan Angka Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan antar Daerah Masih Tinggi, 2010



Sumber : Diolah dari Susenas 2009, 2011.

Pada periode 2005-2008, angka kesakitan penduduk Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan tajam, dan sedikit menurun pada tahun 2009. Angka kesakitan penduduk merupakan salah satu indikator penting pembangunan kesehatan. Angka kesakitan penduduk di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan dari 28,9 persen dari jumlah penduduk (2005) menjadi 36 persen (2009). Jika dilihat keadaan tahun 2009, daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki angka kesakitan tertinggi adalah Konawe Utara, Kota Kendari, dan Konawe dengan angka kesakitan diatas 45 persen dari jumlah penduduk. Sementara jika dilihat dari sisi kelompok pendapatan, justru kelompok terkaya memiliki prevalensi tertinggi. Angka kesakitan penduduk laki-laki dan perempuan di Sulawesi Tenggara memiliki kesamaan, yakni sebanyak 36 persen. Meskipun angka kesakitan tinggi, kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan masih rendah (hanya 9 persen, lihat gambar 5.7). Selain itu, akses masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih yang layak juga masih rendah terutama rumah tangga pada kelompok termiskin dan miskin (lihat pembahasan bab sektor infrastruktur, bagian perumahan).

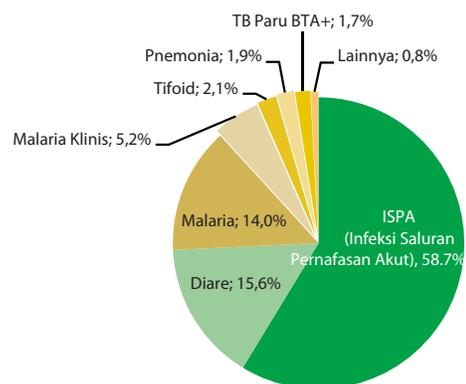
Gambar 5.13. Dibanding tahun 2005, Angka Kesakitan Penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2010 Memburuk



Sumber : Diolah dari BPS dan Susenas 2010, 2011.

ISPA, Diare dan Malaria, merupakan tiga jenis penyakit yang umum diderita oleh penduduk. Lebih dari setengah penduduk yang mengalami sakit dan melakukan pengobatan pada tahun 2010 mengidap penyakit ISPA disusul oleh Diare. Penyakit Malaria terhitung sedikit dibawah angka diare, namun jika digabungkan dengan Malaria Klinis, maka penyakit Malaria menempati urutan kedua setelah Diare. Komposisi ini tidak hanya terjadi pada tahun 2010, namun juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 5.14. ISPA, Diare dan Malaria Merupakan Tiga Jenis Penyakit yang Umum Diderita Penduduk, 2010



Sumber : Diolah dari Sulawesi Tenggara dalam Angka 2011, 2011.

5.1.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Peningkatan belanja serta efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Pada tingkat provinsi, belanja kesehatan meningkat dari rata-rata dibawah 10 persen (pada periode 2007-2010) menjadi hampir 20 persen tahun 2011 karena adanya peningkatan belanja modal untuk pembangunan RS provinsi yang baru. Sementara itu di tingkat kabupaten/kota, proporsi belanja kesehatan masih pada kisaran 7-8 persen. Kecuali pada tahun 2011, komposisi belanja langsung tingkat provinsi cenderung didominasi oleh belanja untuk administrasi dan aparatur (rutin). Sementara pada tingkat kabupaten/

kota, walaupun secara riil belanja langsung mengalami penurunan, namun proporsi belanja rutin tidak berkurang sehingga berdampak pada menurunnya proporsi belanja kesehatan untuk program/kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat. Untuk memperbaiki struktur belanja kesehatan, berikut beberapa langkah yang perlu dilakukan :

- (1) setelah alokasi untuk RS terealisasi tahun 2011, belanja sektor kesehatan provinsi diperkirakan akan kembali menurun karena kebutuhan belanja modal akan berkurang. Akan tetapi penurunan tersebut diharapkan tidak sampai kurang dari 10 persen setelah dikurangi belanja pegawai. Selain karena tuntutan undang-undang kesehatan (lihat UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat 2), juga karena ke depan pemerintah provinsi akan dibebani oleh kebutuhan belanja operasional rumah sakit baru;
- (2) beberapa pemerintah kabupaten/kota masih perlu meningkatkan belanja kesehatannya, terutama yang masih mengalokasikan dibawah 8 persen dan dengan belanja kesehatan per kapita dibawah rata-rata.
- (3) Meningkatkan efisiensi penggunaan belanja kesehatan dengan mengurangi secara bertahap proporsi belanja langsung terkait administrasi dan aparatur;
- (4) Mulai memberi prioritas belanja kesehatan pada upaya promosi kesesehatan untuk PHBS serta pembangunan KIBLA, terutama untuk daerah dengan rasio fasilitas kesehatan yang sudah cukup baik.

Pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara perlu lebih giat mempromosikan gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pembangunan kesehatan ibu dan anak (KIBLA). Perkembangan capaian kinerja kesehatan di Sulawesi Tenggara menunjukkan terjadinya paradox antara peningkatan *output* sektor kesehatan (berupa fasilitas pelayanan kesehatan) di satu sisi dan belum terjadinya perbaikan *outcomes* kesehatan (angka kesakitan, AKB, AKABA, kasus kematian ibu) di sisi lain. Keterputusan hubungan ini diperkirakan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat; kesadaran atau kemauan masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan; serta masih minimnya program-program yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Dalam rangka mengurangi angka kematian bayi (AKB), pemerintah perlu mendorong peningkatan cakupan imunisasi lengkap.

Pemerintah Provinsi perlu memfasilitasi pemerataan pelayanan kesehatan antar kabupaten/kota. Pada skala provinsi, berbagai rasio fasilitas maupun tenaga kesehatan sudah mengalami perbaikan, namun masih diwarnai kesenjangan yang tinggi antar kabupaten/kota. Langkah-langkah berikut diharapkan membantu proses pemerataan tersebut : (i) mendorong pembangunan rumah sakit di dua kabupaten yang baru mekar (Buton Utara dan Konawe Utara); (ii) meningkatkan cakupan pelayan rumah sakit di beberapa kabupaten seperti Buton, Muna, dan Wakatobi yang memiliki rasio tempat tidur RS per penduduk yang masih kecil; (iii) mendorong pembangunan Puskesmas di beberapa kabupaten seperti Kolaka dan Konawe Selatan yang masih memiliki rasio Puskesmas per 100.000 penduduk yang masih rendah, serta di Buton Utara, Konawe, Kolaka Utara yang masih menghadapi masalah aksesibilitas; (iv) meningkatkan ketersediaan dokter umum terutama di Kota Bau-Bau dan Buton Utara dan serta ketersediaan bidan terutama di Buton Utara, Konawe Utara, dan Bau-Bau; serta (iv) meingkatkan pemerataan dokter spesialis dan gigi yang masih belum tersedia di sebagian besar kabupaten/kota.

5.2. Sektor Pendidikan²²

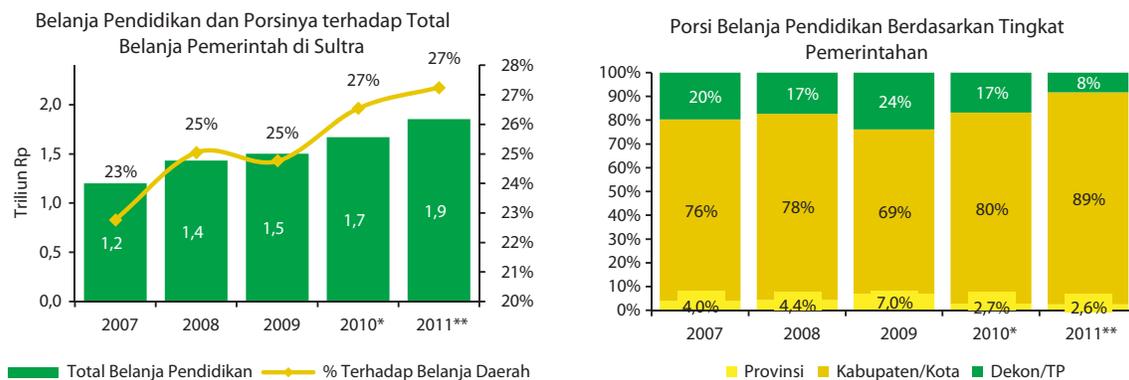
Pendidikan di Provinsi Sultra diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan yang bermutu dan relevan. Intinya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda latar belakangnya secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, tingkat kemampuan intelektual, kondisi fisik, khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

²² Sektor Pendidikan dalam penelitian ini mencakup urusan pendidikan, pemuda dan olahraga, dan perpustakaan.

5.2.1. Belanja Pendidikan

Belanja pendidikan di Sulawesi Tenggara meningkat dan sebagian besar bersumber dari belanja pendidikan kabupaten/kota. Belanja pendidikan di Sulawesi Tenggara meningkat baik secara riil (dari Rp. 1,2 triliun (2007) menjadi Rp. 1,9 triliun (2011)) maupun secara proporsional terhadap total belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara (dari 23 persen (2007) menjadi 27 persen (2011)). Pada tahun 2011, hampir 90 persen belanja pendidikan di Sulawesi Tenggara berasal dari belanja pendidikan kabupaten/kota. Porsi belanja pendidikan provinsi terlihat menurun, diperkirakan karena sebagian besar belanja pendidikan provinsi dialokasikan dalam bentuk bantuan pendidikan dan terserap dalam belanja pendidikan kabupaten/kota. Peran belanja dekonsentrasi/TP mengalami penurunan dari 20 persen (2007) menjadi hanya 8 persen (2011).

Gambar 5.15. Belanja Pendidikan di Sulawesi Tenggara Meningkat



Sumber: Diolah dari database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Catatan: Dari sini dan selanjutnya, data tahun 2007 – 2009 adalah realisasi; *) data tahun 2010 adalah data APBD Perubahan; **) data tahun 2011 adalah data APBD murni. Seluruh data fiskal yang digunakan adalah angka riil (2009=100).

Proporsi belanja pendidikan terhadap total belanja di tingkat provinsi dan dekonsentrasi/TP lebih kecil dibanding hal yang sama pada tingkat kabupaten/kota. Proporsi belanja pendidikan provinsi meningkat hingga 12 persen tahun 2009, namun kembali menurun hingga 4 persen dalam dua tahun terakhir. Penurunan belanja pendidikan dalam dua tahun terakhir diperkirakan karena sebagian besar belanja untuk pendidikan provinsi dialokasikan melalui belanja bantuan kependidikan (disalurkan melalui biro keuangan)²³. Sebagian besar dana bantuan kependidikan provinsi ini terserap menjadi belanja kabupaten/kota dan diperkirakan menjadi sumber kenaikan signifikan belanja pendidikan kabupaten/kota dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, porsi belanja pendidikan terhadap total belanja dekonsentrasi/TP diperkirakan mengalami penurunan dari 53 persen (2010) menjadi hanya 9 persen (2011).

23 Sampai penelitian ini selesai dilakukan, tidak diperoleh data resmi mengenai total belanja “bantuan kependidikan” yang disalurkan melalui sekretariat daerah (Biro Keuangan) pemerintah provinsi, kecuali tahun 2010. Karena keterbatasan data tersebut, analisis belanja pendidikan pada bab ini hanya didasarkan pada total belanja pendidikan yang tercatat sebagai belanja urusan pendidikan, perpustakaan, dan pemuda/olahraga pemerintah provinsi. Jika dihitung berdasarkan nilai belanja bantuan kependidikan tahun 2010 yang diperkirakan sebesar Rp. 68,3 miliar atau sebesar 5,2 persen dari total belanja, maka total belanja pendidikan pemerintah provinsi diperkirakan mencapai 9,2 persen pada tahun tersebut.

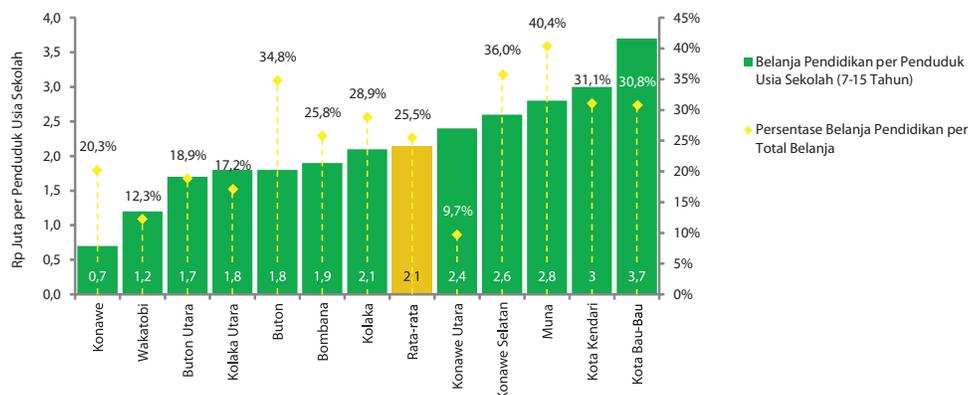
Tabel. 5.7. Porsi Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota Sudah Diatas 20 Persen Sejak 2007

	2007	2008	2009	2010*	2011**
Provinsi					
Belanja Pendidikan (Miliar Rp) ¹⁸	58	75	134	53	51
Proporsi terhadap Belanja Provinsi	5,8%	8,2%	11,9%	4,4%	4,0%
Kabupaten/Kota					
Belanja Pendidikan (Miliar Rp)	1.115	1.347	1.334	1.561	1.754
Proporsi terhadap Belanja Kabupaten/Kota	26,0%	28,1%	27,0%	30,7%	31,7%
Dekonsentrasi/TP					
Belanja Pendidikan (Miliar Rp)	53,7	55	38,7	13,1	13
Proporsi terhadap Belanja Dekonsentrasi/TP	47%	45%	46%	53%	19%

Sumber: Diolah dari database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Berdasarkan data realisasi belanja tahun 2009, dari 12 kabupaten/kota, 8 daerah sudah mengalokasikan belanja pendidikan 20 persen atau lebih, sementara 4 kabupaten masih dibawah 20 persen. Berdasarkan data realisasi tahun 2009, Muna merupakan kabupaten dengan belanja pendidikan tertinggi baik secara nominal maupun proporsional terhadap total belanja. Sementara itu, kabupaten dengan belanja pendidikan terendah adalah Wakatobi, dan kabupaten dengan proporsi belanja pendidikan terendah adalah Konawe Utara (10 persen).

Meskipun sebagian besar kabupaten/kota sudah mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan, belanja pendidikan per jumlah penduduk usia sekolah masih belum merata. Penduduk usia sekolah (7-15) merupakan salah satu penerima manfaat dari (*benefeciaries*) pembangunan pendidikan. Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk memastikan penduduk usia tersebut memperoleh baik akses maupun kualitas pendidikan yang memadai. Namun demikian, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, kesenjangan antar daerah masih sangat tinggi. Berdasarkan data tahun 2009, Konawe merupakan daerah dengan belanja pendidikan per penduduk usia sekolah terendah (Rp. 706 ribu per orang), sementara yang tertinggi adalah Kota Bau-Bau dengan belanja pendidikan per penduduk hampir 6 kali lipat lebih besar dibanding Konawe (Rp. 3,7 juta). Tujuh dari 12 Kabupaten/kota mengalokasikan belanja pendidikan per penduduk usia sekolah dibawah rata-rata.

Gambar 5.16. Belanja Pendidikan Masih Sangat Bervariasi Diantara Kabupaten/Kota di Sultra, 2009

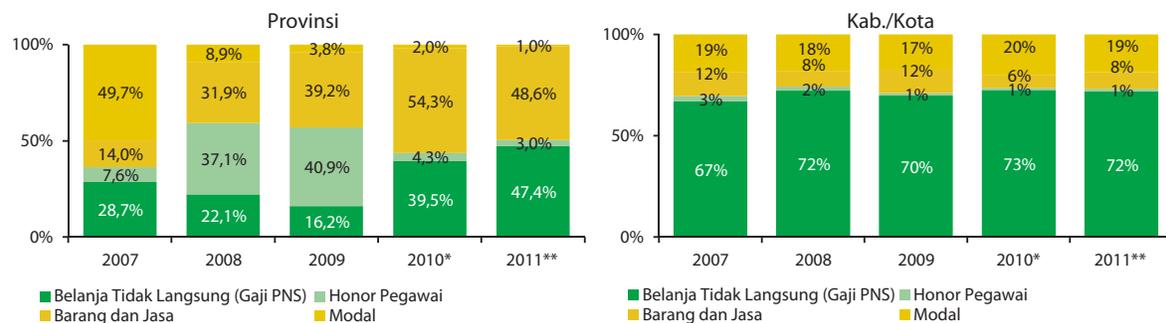
Sumber : Diolah dari Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, dan BPS, 2011.

24 Sampai penelitian ini selesai dilakukan, tidak diperoleh data resmi mengenai total belanja bantuan kependidikan provinsi yang disalurkan melalui sekretariat daerah (Biro Keuangan) sehingga analisis belanja pendidikan pada bab ini hanya didasarkan pada total belanja pendidikan yang tercatat sebagai belanja urusan pendidikan, perpustakaan, dan pemuda/olahraga pemerintah provinsi. Jika dihitung berdasarkan nilai belanja bantuan kependidikan tahun 2010 yang diperkirakan sebesar Rp. 68,3 miliar atau sebesar 5,2 persen dari total belanja, maka total belanja pendidikan pemerintah provinsi diperkirakan mencapai 9,2 persen pada tahun tersebut. Namun demikian hal ini belum dapat diverifikasi karena belum adanya data resmi mengenai besaran dana tersebut.

Proporsi belanja gaji pegawai di sektor pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat pada dua tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan sampai 16,2 persen pada tahun 2009, belanja gaji pegawai sektor pendidikan provinsi kembali mengalami kenaikan proporsi dalam dua tahun terakhir hingga mencapai 47,4 persen tahun 2011. Kenaikan proporsi ini disebabkan oleh menurunnya belanja pendidikan provinsi yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan di satu sisi, sementara gaji pegawai secara konsisten meningkat di sisi lain. Peningkatan porsi belanja gaji pegawai berdampak pada berkurangnya secara signifikan belanja langsung sektor pendidikan provinsi baik secara riil maupun proporsional. Dalam komponen belanja langsung sektor pendidikan provinsi, proporsi belanja honor pegawai sempat mengalami peningkatan pada tahun 2008 dan 2009, diperkirakan karena adanya belanja untuk guru honorer. Sebagai dampak dari penurunan belanja langsung, belanja modal sektor pendidikan menurun drastis menjadi hanya 1 persen, sementara belanja barang dan jasa relatif tetap meningkat.

Lebih dari 70 persen belanja pendidikan kabupaten/kota habis untuk belanja gaji pegawai. Belanja gaji pegawai di sektor pendidikan kabupaten/kota meningkat hingga mencapai 72 persen. Peningkatan gaji pegawai hampir seiring dengan peningkatan belanja pendidikan kabupaten/kota. Besarnya proporsi belanja gaji pegawai dalam sektor pendidikan kabupaten/kota karena adanya komponen gaji guru yang cukup besar. Meskipun sebagian besar belanja pendidikan habis untuk belanja pegawai, namun proporsi belanja modal tingkat kabupaten/kota relatif masih lebih tinggi dibanding provinsi, yakni sebesar 19 persen.

Gambar 5.17. Pada Tingkat Provinsi Belanja Modal Sektor Pendidikan Semakin Menurun Tajam



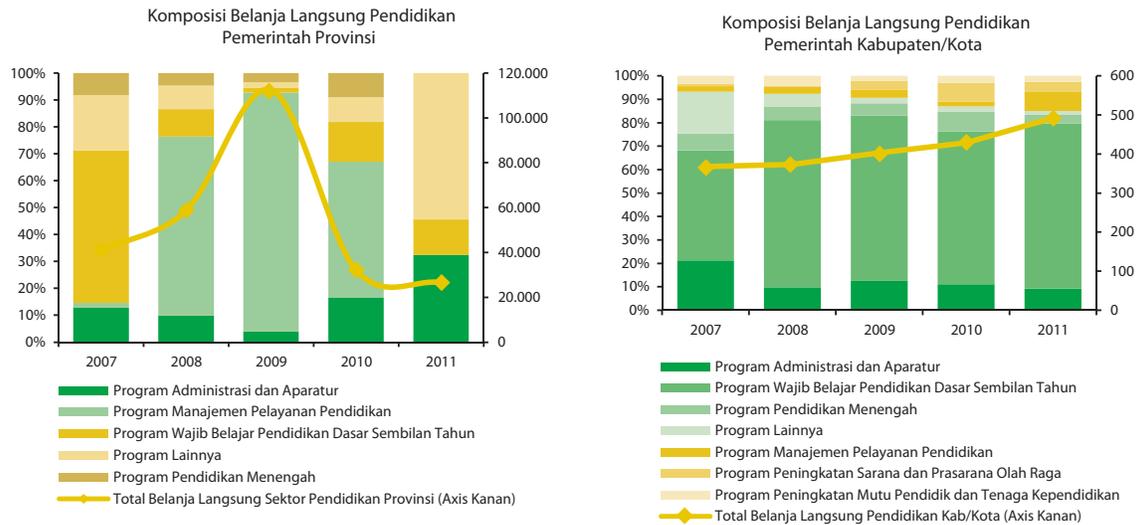
Sumber : Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo 2011.

Porsi belanja program yang terkait administrasi dan aparatur (rutin) dalam belanja langsung provinsi mengalami peningkatan pada 2 tahun terakhir, sementara pada tingkat kabupaten/kota justru menurun. Seiring dengan penurunan belanja pendidikan tingkat provinsi dalam 2 tahun terakhir (2010-2011), porsi belanja langsung pendidikan provinsi juga mengalami penurunan tajam, sehingga porsi belanja program terkait administrasi dan aparatur di sektor pendidikan provinsi meningkat hingga mencapai 32 persen dari belanja langsung tahun 2011. Kenaikan porsi belanja administrasi dan aparatur berdampak pada semakin kecilnya porsi belanja langsung pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan urusan wajib pendidikan. Berbeda dengan tingkat provinsi, pada tingkat kabupaten/kota, belanja program terkait administrasi dan aparatur di sektor pendidikan terus mengalami penurunan proporsi hingga hanya 9 persen dari belanja langsung tahun 2011.

Prioritas program di tingkat provinsi bervariasi dari tahun ke tahun, sementara pada tingkat kabupaten secara konsisten diarahkan pada program wajib belajar pendidikan 9 tahun. Tahun 2007, lebih dari 56 persen belanja langsung pendidikan provinsi dialokasikan untuk program wajib belajar pendidikan 9 tahun. Kemudian pada tahun 2008-2010, secara berturut-turut program manajemen pelayanan pendidikan mendapat prioritas dengan alokasi tertinggi tahun 2009 yang mencapai 90 persen belanja langsung. Pada tahun 2011, prioritas kembali diberikan kepada belanja program wajib belajar pendidikan 9 tahun dengan alokasi sebesar 15 persen dari belanja langsung. Sampai tahun 2010 perhatian terhadap pendidikan menengah dari pemerintah provinsi terhitung masih sangat kecil, bahkan tidak

terlihat pada tahun 2011. Sementara itu, belanja langsung pendidikan tingkat kabupaten/kota cenderung naik dan sebagian besar digunakan secara konsisten untuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang terus meningkat baik secara riil maupun proporsional (dari 47 persen (2007) menjadi 70 persen (2011)).

Gambar 5.18. Sebagian Besar Belanja Langsung Pendidikan Kabupaten/Kota untuk Wajib Belajar 9 Tahun



Sumber : Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas 2011.

5.2.2. Pelayanan Pendidikan

Rasio dan Kualitas Fasilitas Pendidikan

Jumlah sekolah dan kelas di Sulawesi Tenggara sudah memadai, namun masih kekurangan laboratorium dan perpustakaan. Rasio siswa per sekolah dan siswa per kelas di Sulawesi Tenggara relatif lebih rendah dibanding nasional, bahkan untuk tingkat SMK, rasio siswa per sekolah dan per kelas termasuk paling rendah di Sulawesi²⁵. Namun demikian, ketersediaan laboratorium dan perpustakaan tingkat pendidikan menengah (SMP dan SMA) masih minim. Pada tahun ajaran 2009/2010, baru 40 persen SMP di Sulawesi Tenggara yang memiliki laboratorium, sementara angka nasional sudah 60 persen. Satu SMA di Sulawesi Tenggara memiliki 1 laboratorium, sementara berdasarkan rasio nasional, satu SMA sudah memiliki 2 laboratorium. Perkecualian terdapat pada SMK, dimana rasio lab/sekolah di Sultra sudah lebih tinggi dari rasio nasional dan rasio provinsi lain di Sulawesi.

25 Rasio siswa/sekolah dan siswa/kelas, adalah indikator rasio dengan penilaian semakin kecil angka rasio semakin baik karena satu sekolah atau satu kelas menampung lebih sedikit siswa. Sementara untuk rasio lab/sekolah dan perpustakaan/sekolah berlaku sebaliknya, yakni semakin kecil angka rasio semakin buruk dimana rasio kurang dari 1 menunjukkan tidak semua sekolah memiliki fasilitas tersebut.

Tabel 5.8. Jumlah Sekolah dan Kelas Sudah di Sulawesi Tenggara Sudah Memadai, Namun Masih Kekurangan Laboratorium dan Perpustakaan, Tahun Ajaran 2009/2010

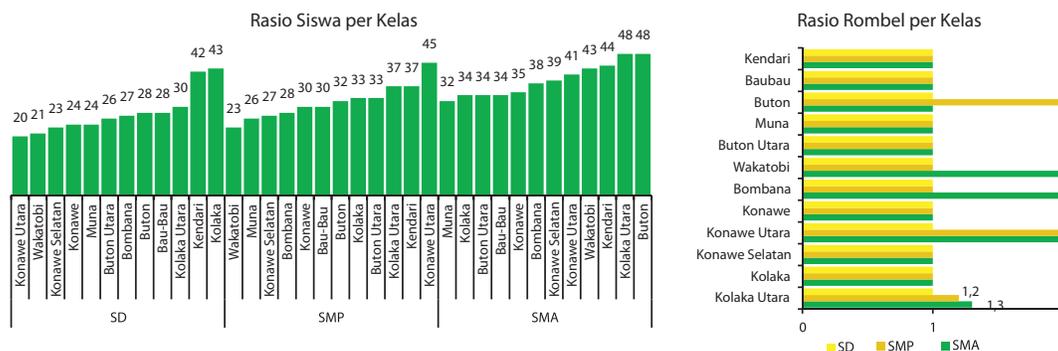
	Rasio Siswa/Sekolah				Rasio Siswa/Kelas				Rasio Laboratorium / Sekolah			Rasio Perpustakaan/ Sekolah		
	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK	SMP	SMA	SMK	SMP	SMA	SMK
Sulawesi Utara	117	187	251	327	19	31	29	39	0.4	1.4	1.4	0.4	0.6	0.7
Gorontalo	184	200	397	348	27	32	32	39	0.2	1.5	1.5	0.3	0.6	0.6
Sulawesi Tengah	135	200	319	271	22	32	34	39	0.2	0.9	1.1	0.1	0.4	0.4
Sulawesi Selatan	168	285	366	336	25	36	34	39	0.3	1.9	1.5	0.2	0.7	0.7
Sulawesi Barat	146	217	324	241	23	36	35	39	0.4	1.3	1.4	0.5	0.5	0.4
Sulawesi Tenggara	160	217	327	234	23	33	30	38	0.4	1.0	1.8	0.3	0.4	0.6
Nasional	191	310	357	395	27	36	35	38	0.6	2.1	1.4	0.5	0.7	0.8

Sumber : Diolah dari Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional TA 2009/2010, 2011.

Catatan : Rasio didasarkan pada angka gabungan (sekolah swasta dan negeri).

Kesenjangan rasio jumlah siswa per kelas antar kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara masih cukup tinggi. Berdasarkan data TA 2009/2010, untuk rasio siswa/kelas, kesejangan tertinggi terjadi pada tingkat SD dengan rasio terbaik terdapat di Konawe Utara (20 siswa/kelas) sementara rasio terburuk terdapat di Kolaka dan Kota Kendari (42 sampai 43 siswa/kelas). Selain itu, di beberapa kabupaten, masih terdapat rombongan belajar (rombel) tingkat SMP dan SMA yang belum memiliki kelas sendiri, seperti di Buton, Konawe Utara, dan Kolaka Utara untuk tingkat SMP; serta di Wakatobi, Bombana dan Konawe Utara untuk tingkat SMA²⁶.

Gambar 5.19. Ketimpangan Ketersediaan Kelas Masih Tinggi antar Kabupaten/Kota, TA 2009/2010



Sumber : Diolah dari Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011.

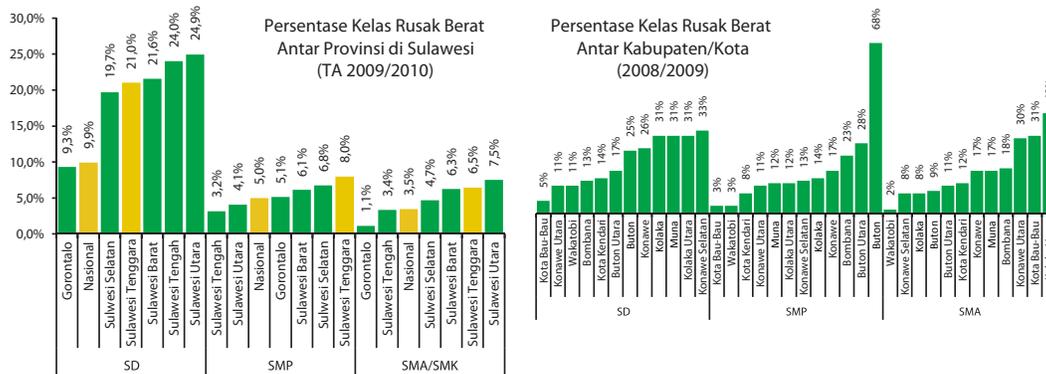
Catatan : Rasio didasarkan pada angka gabungan (sekolah swasta dan negeri).

Sulawesi Tenggara masih memiliki persentase kelas rusak berat yang cukup tinggi. Pada tingkat SD, meskipun bukan yang tertinggi di antara provinsi di Sulawesi, persentase kelas dengan kondisi rusak berat di Sulawesi Tenggara masih diatas 20 persen, jauh diatas angka nasional yang hanya 9,9 persen. Pada tingkat SMP, Meskipun tidak sampai 10 persen, namun persentase kelas dengan kondisi rusak berat di Sulawesi Tenggara tertinggi diantara provinsi di Sulawesi. Hal yang sama terjadi pada tingkat SMA/SMK, meskipun

26 Rasio rombel per kelas idealnya adalah 1. Angka rasio rombel per kelas lebih dari satu menunjukkan bahwa ruang kelas yang tersedia lebih sedikit dibanding jumlah rombel sehingga terdapat satu ruang kelas yang digunakan oleh lebih dari satu rombel (double shift).

sedikit lebih rendah dibanding Sulawesi Utara. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, persentase ruang kelas yang rusak berat tertinggi masing-masing terdapat di Konawe Selatan untuk SD (33 persen); di Buton (68 persen) untuk SMP; dan di Wakatobi (40 persen) untuk SMA/SMK.

Gambar 5.20. Sulawesi Tenggara Masih Memiliki Persentase Kelas Rusak Berat Yang Cukup Tinggi

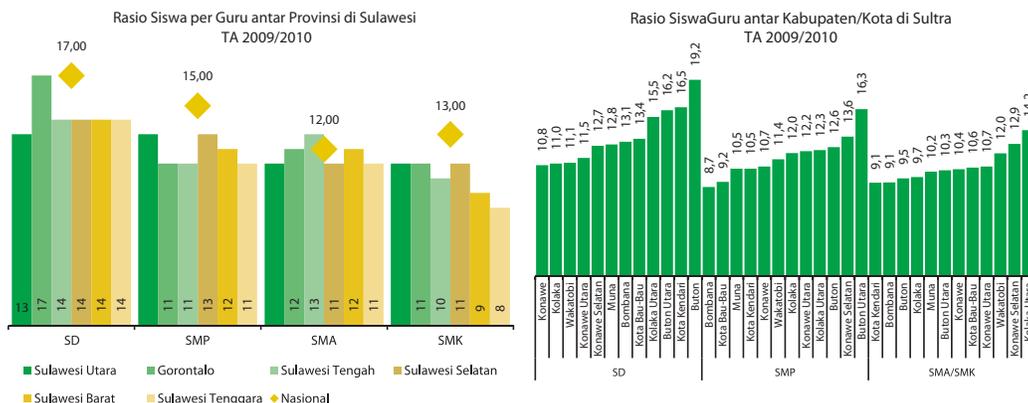


Sumber : Diolah dari Statistik Pendidikan Kemendiknas dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011.
 Catatan : Data didasarkan hanya pada angka sekolah negeri; data antar provinsi bersumber dari Kemendiknas; data antar kab/kota bersumber dari data Dinas Pendidikan Sulawesi Tenggara.

Rasio dan Kualitas Guru

Jumlah Guru sudah memadai namun persebaran belum merata. Pada tahun ajaran 2009/2010, berdasarkan data Kemendiknas, rasio siswa per guru di Sulawesi Tenggara sudah lebih kecil dibanding rasio nasional. Bahkan untuk tingkat SMP, SMA dan SMK, rasio siswa per guru di Sulawesi Tenggara termasuk paling kecil dibanding provinsi lain di Pulau Sulawesi. Kecilnya rasio menunjukkan ketersediaan guru yang sudah memadai karena satu guru mengajar lebih sedikit siswa. Namun demikian, jika dilihat pada tingkat kabupaten, kesenjangan masih sangat tinggi. Untuk tingkat SD, satu guru di Konawe bisa mengajar kurang dari 11 siswa, sementara di Buton hampir 20 siswa. Demikian pula untuk tingkat SMP dan SMA/SMK. Kesenjangan ini menunjukkan distribusi guru belum merata.

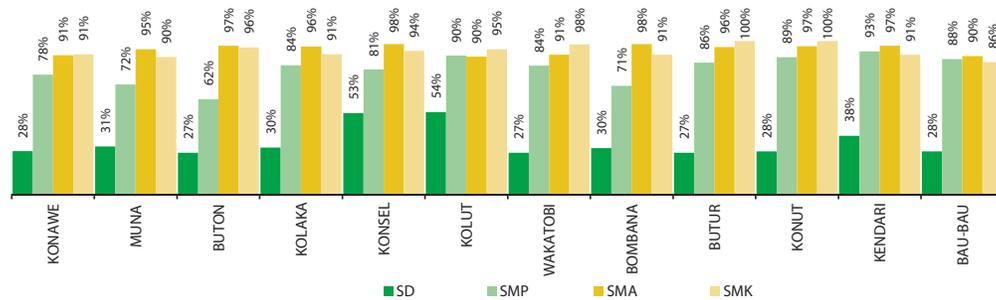
Gambar 5.21. Rasio Siswa per Guru di Sulawesi Tenggara Sudah Memadai, Tapi Belum Merata, TA 2009/2010



Sumber : Diolah dari Statistik Pendidikan Kemendiknas dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011.
 Catatan : Rasio didasarkan pada angka gabungan (sekolah swasta dan negeri); Perbandingan antar provinsi menggunakan data Kemendiknas TA 2009/2010; perbandingan rasio antar kabupaten/kota menggunakan data Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2009/2010.

Persentase guru dengan kualifikasi S1 atau lebih pada tingkat SD masih sangat rendah. Di Buton, Buton Utara dan Wakatobi hanya 27 persen guru SD yang sudah memiliki kualifikasi Ijazah S1 atau lebih, sedangkan persentase tertinggi di Kolaka Utara sebesar 54 persen. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) persentase kualifikasi guru (S1 dan S2) sebagian besar sudah cukup baik, berada pada kisaran 70-90 persen kecuali Kabupaten Buton masih rendah baru mencapai 62 persen. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah mencapai presentase yang lebih baik di atas 90 persen, bahkan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah mencapai angka 100 persen

Gambar.5.22. Persentase Guru Dengan Kualifikasi S1 atau Lebih pada Tingkat SD Masih Sangat Rendah, 2009

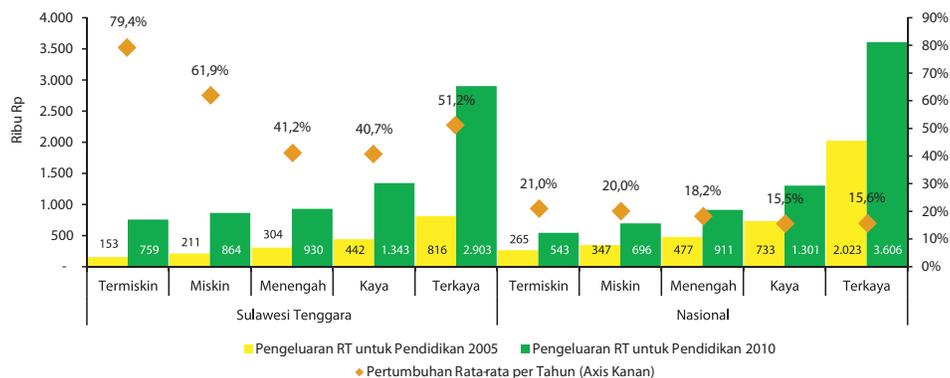


Sumber : Diolah dari Statistik Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011.

5.2.3 Pengeluaran Rumah Tangga untuk Pendidikan²⁷

Pada tahun 2010, rumah tangga (RT) termiskin di Sultra membayar lebih mahal untuk pendidikan dibanding rata-rata nasional. Pada tahun 2005, rumah tangga termiskin di Sulawesi Tenggara hanya mengeluarkan rata-rata sebesar Rp. 153 ribu per tahun untuk pendidikan, lebih rendah dari angka nasional sebesar Rp. 265 ribu per tahun. Namun demikian, pada tahun 2010, rumah tangga termiskin di Sulawesi Tenggara membayar lebih mahal untuk pendidikan dibanding pada rata-rata nasional (Rp 759 ribu vs Rp. 543 ribu). Hal ini terjadi karena pertumbuhan rata-rata per tahun pengeluaran RT untuk pendidikan pada kelompok termiskin di Sultra lebih tinggi (79,4 persen) dibanding hal yang sama pada tingkat nasional (21 persen).

Gambar 5.23. Kenaikan Pengeluaran Pendidikan Tertinggi Terjadi Pada Kelompok RT Termiskin di Sultra, 2010

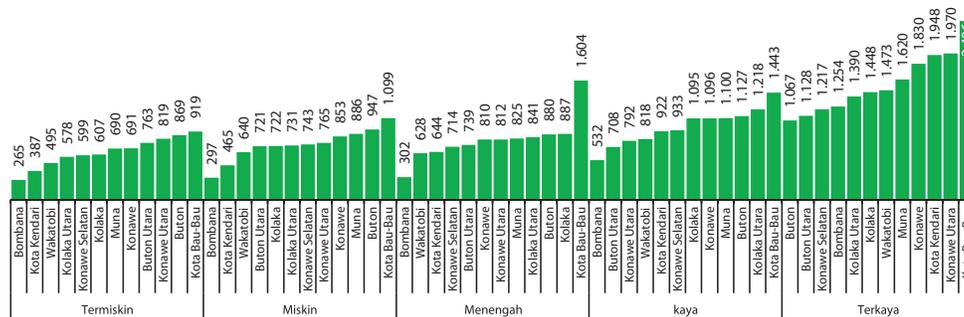


Sumber : Diolah dari Susenas 2010, 2011.

²⁷ Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan (out of pocket education expenditure) adalah pengeluaran rumah tangga terkait dengan kebutuhan pendidikan seperti sekolah, pilihan kegiatan intra dan ekstra kurikuler, pilihan lokasi, lembaga pendidikan, dan waktu penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak/tanggungan.

Bombana adalah daerah dengan rata-rata pengeluaran pendidikan terendah, sementara Kota Bau-Bau adalah daerah dengan rata-rata pengeluaran untuk pendidikan tertinggi. Untuk rumah tangga dari kelompok miskin, rata-rata pengeluaran pendidikan di Bombana hanya Rp. 265 per tahun, sementara di Kota Bau-Bau lebih dari 4 kali lipatnya. Kesenjangan pengeluaran pendidikan antar kabupaten/kota terjadi pada seluruh tingkat pendapatan dengan kesenjangan tertinggi terdapat pada kelompok rumah tangga menengah.

Gambar 5.24. Pengeluaran RT Untuk Pendidikan Kota Bau-Bau lebih dari 4 Kali Lipat Dibanding Bombana, 2010

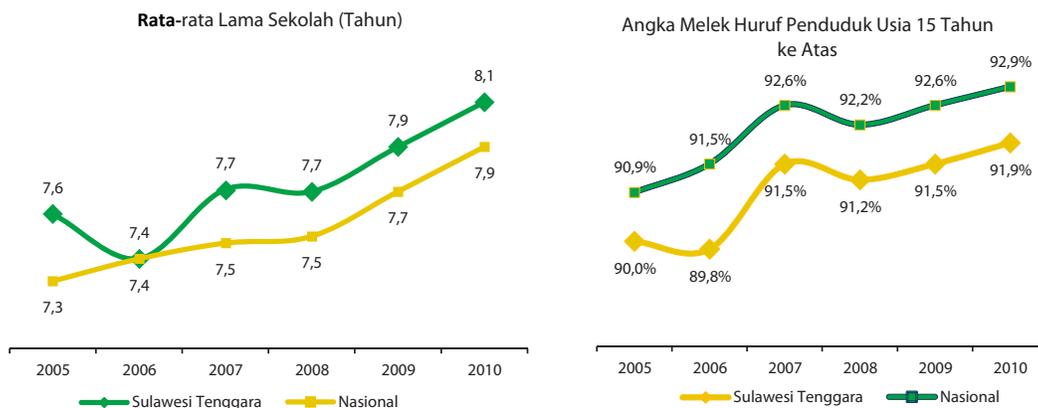


Sumber : Diolah dari Susenas 2010, 2011.

5.2.4. Kinerja Sektor Pendidikan

Angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tenggara relatif lebih baik dari angka nasional, sementara angka melek huruf masih dibawah rata-rata nasional. Selain diatas rata-rata nasional, angka rata-rata lama sekolah Sulawesi Tenggara perkembangannya seiring dengan perkembangan tingkat nasional. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tenggara adalah 8,1 tahun atau berada pada peringkat ke-16 tertinggi, atau ke-2 tertinggi di Pulau Sulawesi setelah Sulawesi Utara. Sementara itu, untuk angka melek huruf, provinsi Sulawesi Tenggara masih termasuk salah satu dari 10 provinsi dengan angka melek huruf terendah, dan berada pada urutan ke-3 terendah di Pulau Sulawesi setelah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Gambar 5.25. Sulawesi Tenggara Relatif Baik dalam hal Angka Rata-rata Lama Sekolah, Namun Masih Buruk dalam Hal Angka Melek Huruf.



Sumber : Diolah dari Susenas, berbagai tahun, 2011.

Angka Melek Huruf (AMH) di Sulawesi Tenggara sebagian besar ada di kelompok usia produktif dan penduduk laki-laki. Menurut data tahun 2009, angka melek huruf terendah ada di Buton, dan tertinggi di Kota Kendari. Selain AMH rendah, Buton juga merupakan daerah dengan tingkat kesenjangan AMH tertinggi antara kelompok perempuan dan laki-laki. Sementara itu, berdasarkan kelompok umur, persentase AMH terendah ada pada usia 60 tahun (usia non produktif).

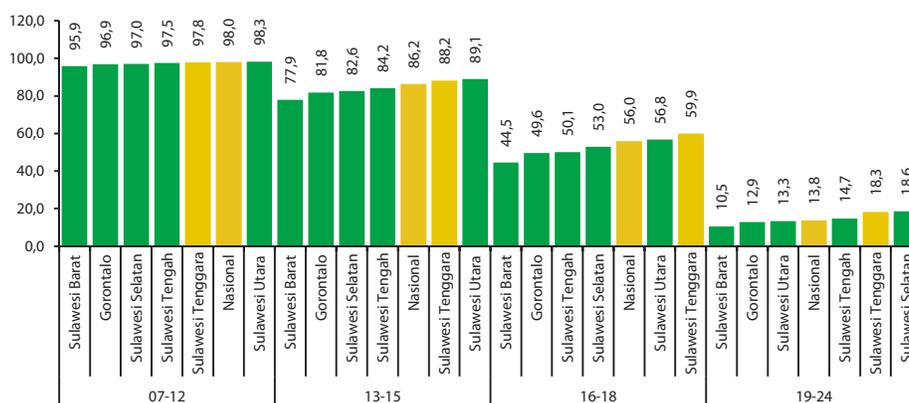
Tabel 5.9. Tingkat Melek Huruf di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Bervariasi, 2009

	Total	Berdasarkan Kelompok Umur				Berdasarkan Jenis Kelamin	
		15-29	30-44	45-60	60 ke atas	Laki-laki	Perempuan
Kota Kendari	98%	99,9%	99,4%	94,1%	91,4%	99%	97%
Kota Bau-Bau	96%	99,8%	97,5%	93,4%	71,2%	98%	94%
Konawe Utara	93%	99,1%	95,8%	85,7%	61,7%	96%	89%
Konawe	93%	99,7%	96,2%	85,2%	61,9%	96%	89%
Kolaka	92%	99,5%	95,3%	83,3%	63,7%	95%	90%
Konawe Selatan	92%	99,4%	95,5%	80,5%	67,5%	95%	88%
Kolaka Utara	92%	99,7%	95,6%	75,6%	71,3%	93%	90%
Bombana	91%	99,0%	95,1%	81,8%	56,3%	92%	90%
Buton Utara	91%	98,9%	96,9%	83,5%	50,1%	95%	87%
Wakatobi	89%	99,3%	96,7%	86,0%	57,7%	93%	85%
Muna	88%	99,1%	95,9%	78,3%	50,1%	94%	83%
Buton	84%	99,0%	93,4%	70,0%	44,4%	91%	78%
Provinsi	91%	99,4%	96,1%	82,5%	60,6%	95%	88%

Sumber : Diolah dari Susenas Tahun 2009, 2011.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tenggara tergolong tinggi pada hampir seluruh jenjang usia. Meskipun pada usia 7-12 tahun APS Sulawesi Tenggara masih dibawah angka nasional, namun tidak berpaut jauh. Sementara untuk usia 13-15, dan usia 19-24, provinsi Sulawesi Tenggara sudah lebih baik dibanding rata-rata nasional dan berada pada posisi ke-2 tertinggi dibanding provinsi lain di Sulawesi. Untuk usia 16-18, Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan APS tertinggi di Sulawesi. Meskipun angka APS tingkat provinsi sudah cukup baik, namun angka partisipasi sekolah antar kabupaten/kota di Sulawesi tenggara masih menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi (lihat analisis tentang APM).

Gambar 5.26. APS Usia Pendidikan Dasar di Sulawesi Tenggara Tergolong tinggi, 2010

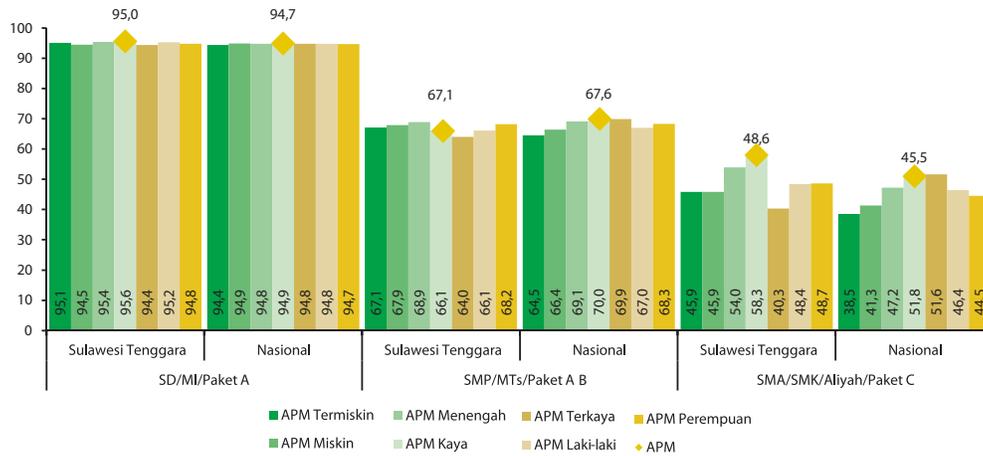


Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

APM Sulawesi Tenggara relatif lebih baik dibanding nasional pada tingkat SD dan SMA, dengan tingkat pemerataan dan kesetaraan gender dalam pendidikan yang juga baik. Pada tingkat SD dan SMA, APM Sulawesi Tenggara sudah lebih baik dari nasional, namun untuk tingkat SMP sedikit dibawah rata-rata nasional. Tingkat partisipasi sekolah antar kelompok pendapatan juga menunjukkan adanya pemerataan pendidikan. Bahkan, pada tingkat SMP dan SMA kelompok termiskin memiliki APM lebih tinggi

dibanding kelompok terkaya. Dari sisi kesetaraan gender, Sulawesi Tenggara juga lebih baik dari nasional. Untuk tingkat SMP dan SMA, APM perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Selain itu, dari sisi pencapaian target RPJMD, provinsi Sulawesi Tenggara sudah mencapai target APM SD yang telah ditetapkan antara 95-100, namun belum mencapai target untuk APM SMP dan SMA yang berturut-turut ditetapkan antara 95-100 untuk SMP, dan 65-75 untuk SMA. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sulawesi Tenggara, bahkan untuk APK-pun, target RPJMD provinsi untuk tingkat SMP dan SMA belum tercapai (lihat tabel . tentang APK/APM tahun 2009)

Gambar 5.27. APM Sulawesi Tenggara Sudah Lebih Tinggi dari Nasional, Kecuali untuk SMP, 2010



Sumber : Diolah dari Susenas 2010, 2011.

Meskipun APM di tingkat provinsi menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih menyisakan kesenjangan antar kabupaten/kota. Pada tahun 2009, APM tingkat SD terendah terdapat di Wakatobi (90,1), sementara tertinggi terdapat di Kota Bau-Bau (96,3). Untuk tingkat SMP, APM terendah terdapat di Konawe Selatan dan Bombana (59), sementara tertinggi terdapat di Konawe (77,9). Untuk tingkat SMA terendah terdapat di Konawe Utara (31) dan tertinggi di Kota Kendari (65,1). Dalam hal APK juga terjadi kesenjangan. Untuk tingkat SD terendah terdapat di Konawe Utara (95,8), sementara tertinggi terdapat di Kota Kendari (121); untuk tingkat SMP, APK terendah terdapat di Bombana (92,1), sementara tertinggi terdapat di Kota Bau-Bau (93,9); untuk tingkat SMA, APK terendah terdapat di Konawe Utara, dan tertinggi di Kota Kendari.

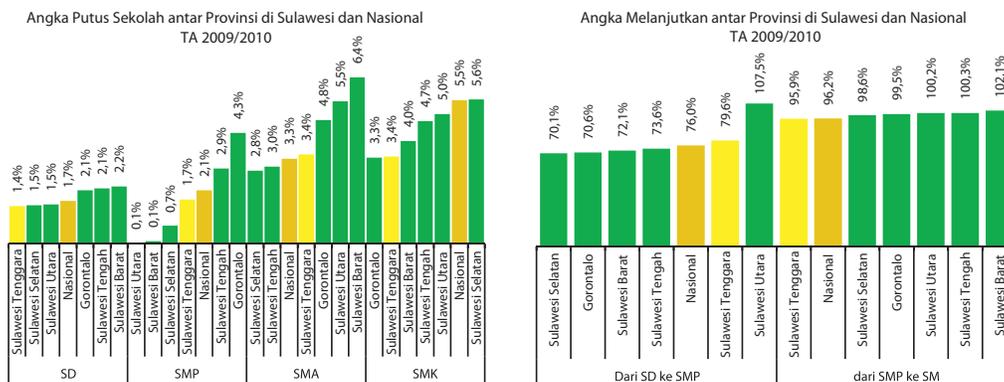
Tabel 5.10. Kesenjangan APM Antar Kabupaten/Kota Masih Tinggi Terutama Pada Jenjang SMP dan SMA, 2009

	APM			APK		
	SD	SMP	SMA/SMK	SD	SMP	SMA
Kota Kendari	95,9	71,7	65,1	121,2	92,9	74,8
Kota Bau-Bau	96,3	75,3	55,0	111,6	93,9	72,7
Bombana	94,4	59,5	38,9	96,9	92,1	47,8
Buton	92,4	70,8	47,8	99,0	92,8	59,0
Buton Utara	90,4	69,6	35,9	97,9	92,8	39,3
Konawe	96,0	77,9	59,2	98,1	93,1	62,5
Konawe Selatan	94,7	59,1	32,7	98,8	92,4	59,0
Konawe Utara	91,3	67,5	31,0	95,8	92,3	34,0
Kolaka	91,7	67,7	44,0	99,2	92,7	57,2
Muna	96,2	67,6	42,9	101,3	93,5	56,4
Kolaka Utara	91,0	70,8	34,7	98,1	92,1	43,8
Wakatobi	90,1	75,0	46,7	97,4	92,5	57,2
Propinsi	93,8	69,4	46,9	101,3	92,8	58,6

Sumber : Diolah dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011.

Angka putus sekolah (DO) di Sulawesi Tenggara masih tinggi pada tingkat SMA dan Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK Masih paling rendah diantara provinsi di Sulawesi. Angka putus sekolah pada tingkat SMA di Sulawesi Tenggara masih diatas rata-rata nasional. Sementara pada jenjang pendidikan SD dan SMP, angka putus sekolah sudah dibawah 2 persen, dan masih dibawah rata-rata nasional. Sementara itu, untuk angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsi dengan angka melanjutkan paling tinggi diantara provinsi di Sulawesi, namun angka melanjutkan sekolah dari SMP ke Sekolah Menengah (SMA/SMK) terhitung terendah di Sulawesi.

Gambar 5.28. Angka Putus Sekolah pada Tingkat SMA masih Tinggi, dan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP ke SMA/SMK Masih Terendah di Sulawesi



Sumber : Diolah dari Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional TA 2009/2010, 2011.

AMH pada usia produktif masih didominasi oleh laki-laki, Data tahun 2009 menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar pada usia 45 s,d, 60 tahun terjadi di Kabupaten Buton karena persentase AMH laki-laki mencapai 82,9 persen dan perempuan mencapai 58,8 persen, Persentase terendah AMH terdapat pada usia 45 sampai dengan, 60 dengan kesenjangan rendah antara laki-laki dan perempuan terdapat di Kabupaten Kolaka Utara. Hal ini menunjukkan ketimpangan kesempatan memperoleh pendidikan sekitar 30 tahun yang lalu atau pada saat warga usia 45-60 tahun ini berada dalam usia sekolah.

Tabel 5.11. Tingkat Melek Huruf Di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dari berbagai Kelompok Umur

Kabupaten/Kota	15-29		30-44		45-60		60 ke atas	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Buton	99,7%	98,5%	97,0%	90,5%	82,9%	58,8%	67,6%	29,8%
Muna	98,9%	99,2%	99,2%	93,4%	88,0%	70,4%	71,9%	35,2%
Konawe	99,8%	99,6%	97,7%	94,6%	91,4%	79,2%	82,3%	39,9%
Kolaka	99,4%	99,5%	95,5%	95,0%	87,9%	78,2%	79,8%	49,0%
Konawe Selatan	99,1%	99,7%	98,0%	92,9%	87,8%	73,4%	79,6%	53,7%
Bombana	99,6%	98,5%	94,2%	96,1%	85,3%	78,5%	69,9%	40,0%
Wakatobi	98,4%	100,0%	98,2%	95,4%	92,0%	80,2%	74,7%	45,3%
Kolaka Utara	99,6%	99,7%	95,4%	95,8%	77,9%	72,7%	84,6%	59,2%
Buton Utara	99,0%	98,8%	97,9%	95,7%	91,9%	74,9%	74,5%	25,0%
Konawe Utara	98,6%	99,6%	98,6%	92,8%	91,6%	79,4%	82,6%	34,3%
Kota Kendari	100,0%	99,8%	99,7%	99,1%	97,7%	90,8%	96,0%	86,5%
Kota Bau-Bau	99,8%	99,8%	98,3%	96,8%	97,3%	89,7%	84,0%	60,4%
Provinsi	99,5%	99,4%	97,5%	94,7%	89,1%	76,1%	78,2%	45,3%

Sumber : Estimasi Bank Dunia dari Susenas 2009.

5.2.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara perlu mempublikasikan secara periodik alokasi belanja pendidikan yang disalurkan melalui transfer (bantuan keuangan, dll). Setidaknya sejak tahun 2009, diperkirakan sebagian besar belanja pendidikan pemerintah provinsi dialokasikan melalui transfer (bantuan keuangan, dll) seperti bantuan operasional pendidikan (BoP), beasiswa, dll, yang dikelola melalui pos belanja Biro Keuangan, Sekretariat Daerah. Namun demikian, sampai penelitian ini berakhir, data tahunan mengenai hal tersebut tidak bisa diperoleh sehingga besaran investasi pendidikan pemerintah provinsi tidak bisa terkonsolidasi secara lengkap. Pada kajian ini, porsi belanja pendidikan pemerintah provinsi terlihat menurun dalam dua tahun terakhir karena perhitungan belum memasukkan komponen belanja transfer. Publikasi data terkait transfer perlu diperbaiki terutama untuk memberikan kesadaran publik tentang komitmen pemerintah provinsi terhadap pendidikan.

Belanja Pendidikan hendaknya tidak hanya didasarkan pada ketentuan undang-undang (diatas 20 persen), tapi juga didasarkan pada skala kebutuhan. Porsi belanja pendidikan di atas 20 persen tidak berbanding lurus dengan belanja pendidikan per penduduk usia sekolah (7-15 tahun) sebagai penerima manfaat utama/ *main beneficiaries* sektor pendidikan. Sebagai contoh, di daerah seperti Kolaka, Bombana, dan Buton, belanja pendidikan sudah jauh diatas 20 persen pada tahun 2009, namun belanja pendidikan per penduduk usia sekolah di ketiga daerah tersebut masih dibawah rata-rata.

Prioritas Belanja pendidikan beberapa kabupaten/kota perlu diarahkan pada peningkatan jumlah fasilitas, perbaikan fasilitas, serta peningkatan jumlah dan kualitas guru. Berdasarkan analisis terhadap kinerja pelayanan sektor pendidikan, peningkatan perlu diarahkan pada : (i) penambahan jumlah kelas di beberapa kabupaten/kota dengan rasio siswa per kelas yang tinggi seperti di Kolaka dan Kota Kendari untuk SD, Konawe Utara untuk SMP, serta Buton dan Kolaka Utara untuk SMA/SMK; (ii) memperbaiki bangunan kelas yang rusak terutama pada jenjang SD yang masih diatas 20; (iii) menambah jumlah guru terutama di beberapa kabupaten/kota dengan rasio siswa per guru yang masih tinggi seperti di Buton untuk SD, Buton Utara untuk SMP, dan Kolaka Utara untuk SMA; dan (iv) meningkatkan kualitas jenjang pendidikan guru terutama pada tingkat SD yang sebagian besar masih belum berijazah S1. Pemerintah provinsi perlu berperan lebih aktif dalam memfasilitasi terselenggaranya keempat prioritas diatas.

Paket beasiswa dan bantuan operasional pendidikan harus mampu menurunkan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, terutama untuk kelompok termiskin dan miskin. Berdasarkan data Susenas 2010, rumah tangga termiskin dan miskin di Sulawesi Tenggara memiliki pengeluaran untuk pendidikan lebih besar dibanding rata-rata nasional. Pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara perlu lebih proaktif dalam memastikan berjalannya program pembebasan biaya operasional pendidikan serta penyaluran beasiswa pendidikan secara lebih tepat sasaran.

Dalam rangka meningkatkan IPM, upaya peningkatan angka rata-rata lama perlu ditingkatkan. Indikator rata-rata lama sekolah di Sultra sudah lebih baik dibanding rata-rata nasional. Namun demikian, peningkatan indikator rata-rata lama sekolah masih perlu terus ditingkatkan terutama untuk mengkompensasi kesulitan pemberantasan buta aksara yang proporsi terbesar terdapat pada kelompok usia lanjut. Tiga langkah yang perlu dilakukan untuk terus meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah: (i) mengurangi angka putus sekolah terutama pada jenjang pendidikan SMA/SMK; (ii) meningkatkan angka melanjutkan sekolah terutama dari tingkat SMP ke SMA/SMK; dan (iii) meningkatkan APM terutama pada jenjang SMP dan SMA/SMK dan mengurangi ketimpangan APM antar kab/kota pada jenjang tersebut.

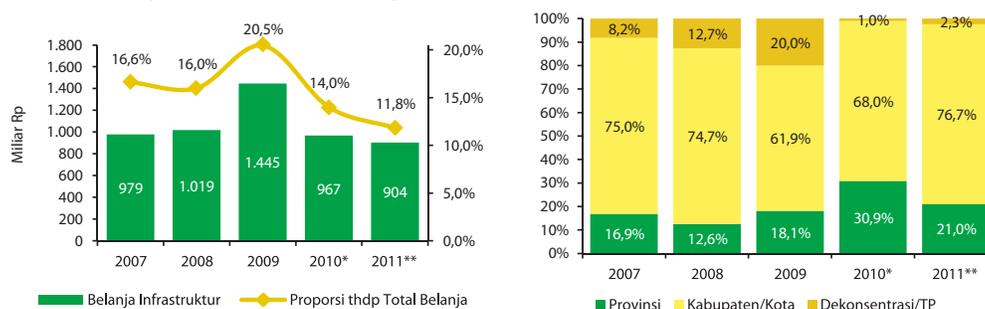
5.3. Sektor Infrastruktur²⁸

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013, sasaran pembangunan sektor infrastruktur di Sulawesi Tenggara adalah meningkatnya aksesibilitas, ketersediaan, serta kualitas sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut, dan udara. Infrastruktur berperan sebagai pendorong bagi peningkatan sektor ekonomi.

5.3.1. Belanja Infrastruktur

Belanja infrastruktur di Sulawesi Tenggara menurun dalam 2 tahun terakhir. Sampai tahun 2009, belanja infrastruktur di Sulawesi Tenggara secara riil meningkat hingga Rp. 1,4 triliun, namun kemudian menurun dalam dua tahun terakhir hingga kurang dari Rp. 1 triliun. Pada tahun 2010, penurunan disebabkan oleh penurunan signifikan belanja infrastruktur yang bersumber dari dekonsentrasi/TP dan kabupaten/kota, sementara pada tahun 2011, penurunan terjadi karena penurunan belanja infrastruktur pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Sampai tahun 2011, belanja infrastruktur di Sulawesi Tenggara didominasi belanja infrastruktur kabupaten/kota.

Gambar 5.29. Belanja Infrastruktur Mengalami Penurunan dalam 2 Tahun terakhir



Sumber : Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Secara rata-rata, proporsi belanja infrastruktur terhadap total belanja di tingkat provinsi lebih besar dibanding hal yang sama pada tingkat kabupaten/kota atau pada dana dekonsentrasi/TP. Dalam 5 tahun terakhir, secara rata-rata provinsi mengalokasikan 18,7 persen dari belanjanya untuk infrastruktur, kabupaten/kota 15,3 persen, sementara dana dekonsentrasi/TP hanya 13,1 persen. Setiap tahunnya, belanja infrastruktur berfluktuasi baik secara riil maupun proporsional pada semua tingkat pemerintahan. Proporsi belanja infrastruktur tertinggi pada tingkat provinsi terjadi tahun 2010 sebesar 24,8 persen, sementara pada tingkat kabupaten/kota dan dekonsentrasi/TP pada tahun 2009.

Tabel 5.12. Provinsi Mengalokasikan Belanja Infrastruktur Lebih Besar Dibanding Kabupaten/Kota

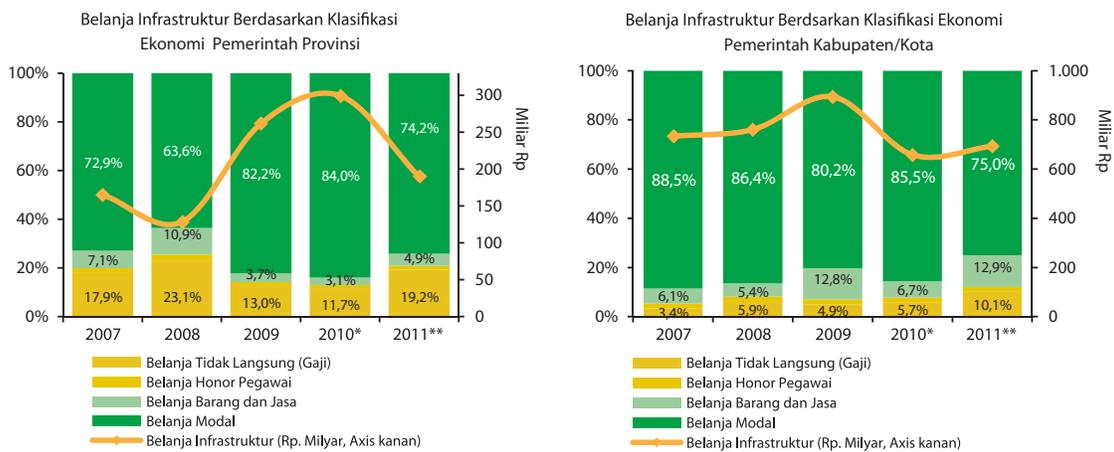
	2007	2008	2009	2010*	2011**	Rata-rata
Provinsi						
Belanja Infrastruktur (Miliar Rp)	165,1	128,4	261,7	299,3	189,3	208,8
Proporsi terhadap Total Belanja Provinsi (%)	16,6%	13,9%	23,3%	24,8%	15,0%	18,7%
Kabupaten/Kota						
Belanja Infrastruktur (Miliar Rp)	733,6	760,9	894,5	657,8	693,1	748,0
Proporsi terhadap Total Belanja Kab/Kota (%)	17,1%	15,9%	18,1%	12,9%	12,5%	15,3%
Dekonsentrasi/TP						
Belanja Infrastruktur (Miliar Rp)	80,0	129,8	288,6	10,1	21,2	106,0
Proporsi terhadap Total Belanja Provinsi (%)	12,9%	19,8%	28,8%	1,6%	2,5%	13,1%

Sumber : Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

28 Belanja Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi belanja pada urusan pekerjaan umum, urusan perhubungan, dan urusan perumahan/permukiman.

Dalam 5 tahun terakhir, secara rata-rata lebih dari 75 persen belanja infrastruktur telah dialokasikan untuk modal. Dibanding sektor lainnya, belanja infrastruktur termasuk belanja dengan proporsi belanja langsung yang cukup besar, yakni rata-rata diatas 75 persen dari total belanja sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, lebih dari 90 persen dari belanja langsung telah dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini terjadi karena sektor infrastruktur membutuhkan investasi fisik yang sangat besar (*capital intensive*). Sementara itu, belanja tidak langsung untuk gaji pegawai secara riil memang mengalami peningkatan, namun tidak begitu signifikan. Proporsi belanja tidak langsung terlihat fluktuatif karena proporsinya meningkat pada saat total belanja sektor menurun, dan sebaliknya, terlihat menurun jika total belanja infrastruktur meningkat.

Gambar 5.30. Lebih dari 75 Persen Belanja Infrastruktur untuk Belanja Modal



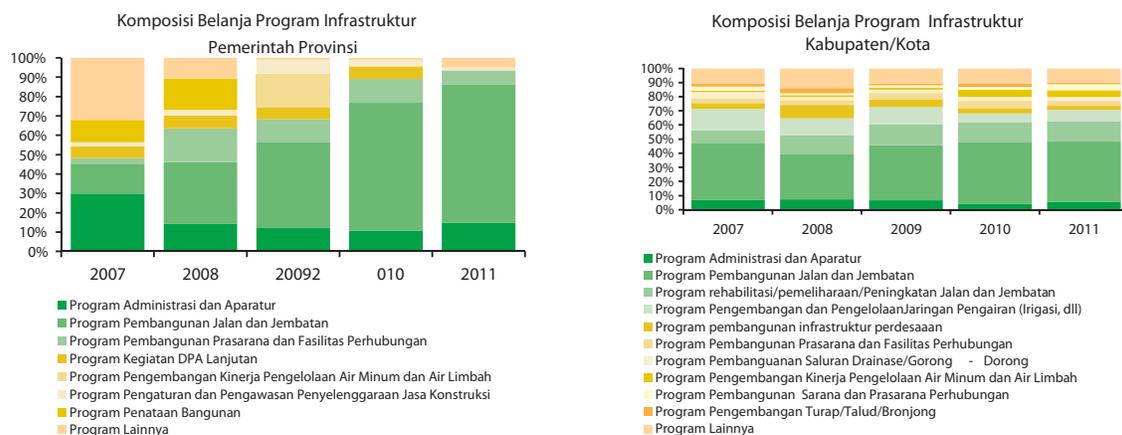
Sumber : Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Sebagian besar belanja langsung infrastruktur dialokasikan untuk belanja pembangunan jalan dan jembatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi, belanja pembangunan jalan dan jembatan memperoleh alokasi terbesar dan meningkat setiap tahunnya baik secara riil maupun proporsional. Pada tahun 2010, belanja program untuk pembangunan jalan dan jembatan menghabiskan lebih dari 70 persen belanja langsung infrastruktur provinsi. Pada tingkat kabupaten/kota, proporsi untuk belanja infrastruktur relatif lebih kecil dibanding provinsi, namun tetap merupakan alokasi terbesar dalam belanja langsung infrastruktur, serta relatif lebih konstan pada kisaran 38 sampai 42 persen.

Prioritas kedua dan ketiga program infrastruktur berbeda antara provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi, prioritas kedua belanja infrastruktur adalah pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan proporsi yang cenderung fluktuatif, sementara pada tingkat kabupaten adalah rehabilitasi/pemeliharaan/ peningkatan jalan dan jembatan dengan proporsi yang juga relatif konstan. Provinsi belum menjadikan rehabilitasi/pemeliharaan/peningkatan jalan sebagai prioritas sementara kabupaten relatif mengalokasikan proporsi yang cukup baik.

Proporsi belanja program administrasi dan aparatur di sektor infrastruktur relatif lebih terkendali. Pada tingkat provinsi belanja administrasi dan aparatur relatif berhasil ditekan, dari 29 persen (2007) menjadi 14,4 persen (2008). Peningkatan proporsi belanja administrasi dan aparatur tahun 2011 lebih dikarenakan adanya penurunan belanja langsung infrastruktur. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, belanja administrasi dan aparatur di sektor infrastruktur relatif lebih terkendali dibawah 8 persen dari belanja langsung.

Gambar 5.31. Jalan Merupakan Prioritas Belanja Infrastruktur di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota



Sumber : Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Belanja infrastruktur di masing-masing pemerintah kabupaten/kota cukup bervariasi baik secara riil maupun proporsional terhadap total belanja. Berdasarkan realisasi belanja tahun 2009, Muna adalah daerah dengan belanja infrastruktur terbesar. Jika diukur berdasarkan proporsi terhadap total belanja, Buton Utara memiliki proporsi belanja infrastruktur tertinggi. Sementara itu, jika dibandingkan dengan luas wilayah sebagai proksi dari kebutuhan pengembangan infrastruktur, Kota Kendari memiliki belanja infrastruktur per hektar paling tinggi. Kabupaten Konawe Utara merupakan kabupaten dengan belanja infrastruktur terkecil baik secara riil, secara proporsional terhadap total belanja, maupun per hektar luas wilayah.

Pekerjaan umum (Jalan, jembatan, irigasi) masih merupakan prioritas utama pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota kecuali Wakatobi. Dari 12 kabupaten/kota, Wakatobi merupakan satu-satunya daerah yang lebih memprioritaskan alokasi belanja infrastrukturnya untuk perhubungan (hampir 70 persen) dibanding pekerjaan umum (30 persen). Hal ini diperkirakan karena Wakatobi merupakan daerah kepulauan. Selain itu, dari 12 daerah kabupaten/kota, hanya 5 kabupaten/kota yang mengalokasikan secara khusus belanja untuk perumahan. Dari 5 daerah itupun, belanja perumahan merupakan alokasi terkecil setelah PU dan perhubungan. Sedikitnya daerah yang mengalokasikan belanja khusus untuk perumahan diperkirakan karena dua kemungkinan: (i) masih mengalokasikan belanja perumahan sebagai bagian dari belanja pekerjaan umum, atau (ii) sama sekali tidak mengalokasikan belanja untuk perumahan.

Tabel 5.13. Pada tahun 2009, Muna Merupakan Kabupaten dengan Belanja Infrastruktur Tertinggi

	Belanja Urusan terkait Infrastruktur			Belanja Infrastruktur	Total Belanja	Proporsi Belanja Infrastruktur	Luas Wilayah (Ha)	Belanja Infrastruktur per Luas Wilayah (Rp/Ha)
	Pekerjaan Umum	Perumahan	Perhubungan					
Muna	88,1	17,9	4,4	110,4	558,3	19,8%	289.041	382.026
Kolaka Utara	102,8	0,0	3,5	106,3	374,6	28,4%	339.162	313.451
Wakatobi	28,9	0,0	65,7	94,7	331,4	28,6%	42.597	2.222.267
Kolaka	77,5	0,7	12,6	90,9	593,7	15,3%	691.838	131.340
Buton Utara	72,9	0,0	9,4	82,3	247,1	33,3%	199.659	412.264
Kota Kendari	67,8	3,3	4,6	75,7	507,4	14,9%	29.589	2.559.096

	Belanja Urusan terkait Infrastruktur			Belanja Infrastruktur	Total Belanja	Proporsi Belanja Infrastruktur	Luas Wilayah (Ha)	Belanja Infrastruktur per Luas Wilayah (Rp/Ha)
	Pekerjaan Umum	Perumahan	Perhubungan					
Konawe	42,7	0,0	21,7	64,4	245,1	26,3%	679.245	94.829
Konawe Selatan	53,7	1,1	5,2	60,0	461,6	13,0%	451.420	132.852
Buton	50,9	0,0	7,7	58,6	497,4	11,8%	267.525	219.037
Kota Bau-Bau	41,3	4,3	12,8	58,4	372,5	15,7%	30.570	1.908.911
Bombana	45,1	0,0	10,1	55,2	317,8	17,4%	305.608	180.652
Konawe Utara	33,9	0,0	3,8	37,7	428,8	8,8%	487.746	77.308

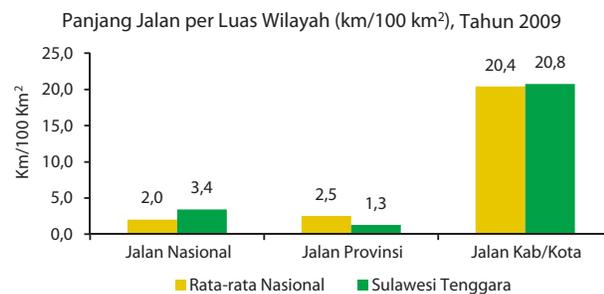
Sumber : Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011

5.3.2. Kinerja Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur Jalan

Panjang jalan provinsi per luas wilayah masih dibawah rata-rata nasional, sementara untuk jalan nasional dan kabupaten/kota sudah lebih baik. Pada tahun 2009, panjang jalan provinsi masih sekitar 488,8 km²⁹. Angka ini tidak berbeda dengan panjang jalan tahun 2006. Hal ini menunjukkan belum ada penambahan panjang jalan provinsi dalam 4 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan luas wilayah, panjang jalan provinsi di Sulawesi Tenggara masih sekitar 1,3 km per 100 km². Angka ini masih dibawah rata-rata jalan provinsi secara nasional yang sudah mencapai 2,5 km per 100 km². Sementara itu, panjang jalan nasional dan panjang jalan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara relatif sudah lebih tinggi dibanding dengan rata-rata nasional.

Gambar 5.32. Panjang Jalan Provinsi per 100 KM² Luas Wilayah Masih Dibawah Rata-rata Nasional

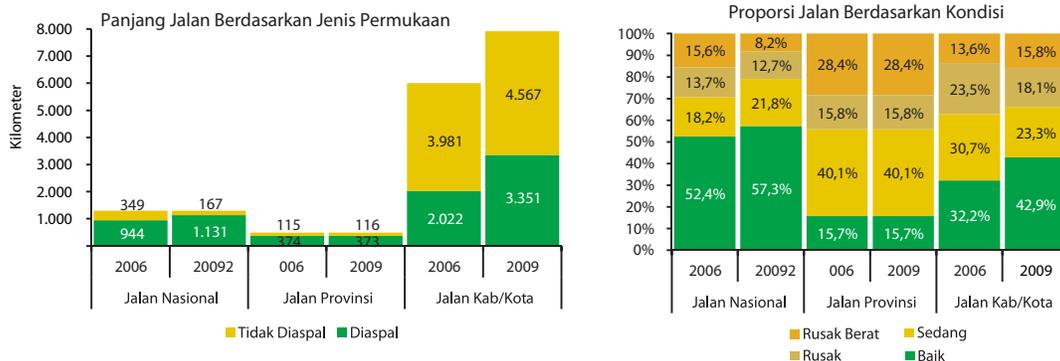


Sumber : Diolah dari Sulawesi Tenggara dalam Angka dan BPS, 2011.

Selain belum terlihat adanya peningkatan panjang jalan, kinerja jalan provinsi juga belum menunjukkan adanya peningkatan permukaan jalan beraspal serta peningkatan jalan dalam kondisi baik. Kualitas jalan yang baik akan memudahkan kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial. Namun demikian, panjang jalan provinsi yang diaspal belum mengalami peningkatan, sementara panjang jalan nasional dan kabupaten/kota telah mengalami peningkatan signifikan. Panjang jalan kabupaten/kota yang diaspal meningkat lebih dari 65 persen dalam kurun waktu 3 tahun, yakni dari 2.022 km tahun 2006 menjadi 3.351 km tahun 2009. Selain itu, jika dilihat berdasarkan kondisi, kondisi jalan provinsi tahun 2009 belum mengalami perubahan yang berarti dibanding tahun 2006, sementara jalan nasional dan jalan kabupaten/kota sudah mengalami perbaikan ditandai dengan peningkatan jalan dengan kondisi baik.

29 Dokumen Sulawesi Tenggara Dalam Angka tahun 2011 baru mencatat bahwa sampai dengan tahun 2009 dengan panjang, jenis permukaan, serta kondisi jalan provinsi yang belum mengalami perubahan. Berdasarkan informasi dari Bappeda Provinsi, pada tahun 2010 telah terjadi penambahan panjang jalan provinsi dari 488,86 km (tahun 2009) menjadi 906,09 km (2010). Namun demikian penambahan jalan tersebut sebagian berasal dari pengalihan jalan nasional menjadi jalan provinsi.

Gambar 5.33. Jalan Provinsi Belum Mengalami Peningkatan Jalan Beraspal dan Jalan Berkondisi Baik

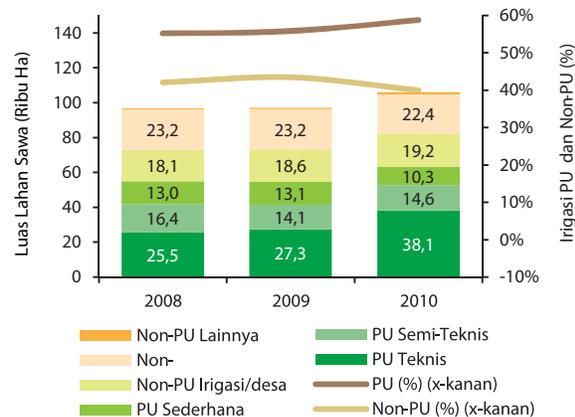


Sumber : Diolah dari Sulawesi Tenggara dalam Angka dan BPS, 2011.

Infrastruktur Irigasi

Cakupan irigasi teknis mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir, namun belum mampu mengurangi secara signifikan luas area sawah tadah hujan. Irigasi merupakan salah satu bidang ke-PU-an yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Sampai tahun 2010, cakupan irigasi teknis yang dikelola PU mengalami peningkatan dari 25,5 ribu hektar tahun 2008 menjadi 38,1 ribu hektar tahun 2010. Namun demikian, seiring dengan peningkatan luas area sawah pada tahun 2010, tantangan pemerintah daerah untuk membangun irigasi teknis semakin tinggi. Dalam mendorong peningkatan produktivitas padi, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan cakupan irigasi teknis terutama pada area sawah tadah hujan yang sampai tahun 2010 masih sekitar 22,4 ribu hektar.

Gambar 5.34. Cakupan Irigasi Teknis Meningkat, Namun Luas Area Sawah Tadah Hujan Belum Berkurang

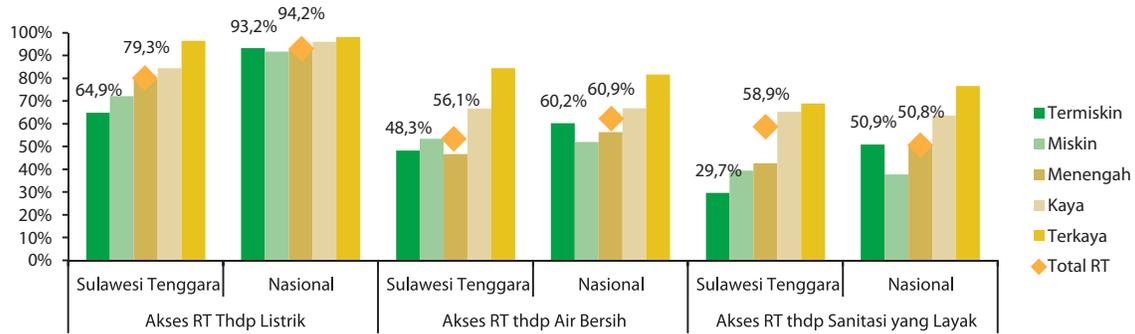


Sumber : Diolah dari Sulawesi Tenggara dalam Angka dan BPS, 2011.

Infrastruktur Dasar Perumahan

Selain masih dibawah rata-rata nasional, akses rumah tangga (RT) terhadap infrastruktur dasar di Sulawesi Tenggara masih diwarnai kesenjangan antar kelompok pendapatan. Tahun 2010, Sulawesi Tenggara masih termasuk 10 provinsi dengan akses rumah tangga terhadap listrik terendah di Indonesia. Kondisi tersebut juga diwarnai oleh tingkat kesenjangan akses yang cukup tinggi antara rumah tangga termiskin dan terkaya (yakni 64,9 persen vs. 96,5 persen), jauh lebih timpang dibanding nasional (93,2 persen vs. 98,1 persen). Akses terhadap air bersih juga menunjukkan fenomena yang sama, yakni akses yang masih dibawah rata-rata nasional diwarnai kesenjangan akses antar kelompok pendapatan yang tinggi (terkaya 81,6 persen termiskin baru 48,3 persen). Sementara itu, meskipun akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak di Sulawesi Tenggara lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, namun belum berhasil mempersempit kesenjangan. (29,7 persen rumah tangga termiskin dan 50,9 persen rumah tangga terkaya).

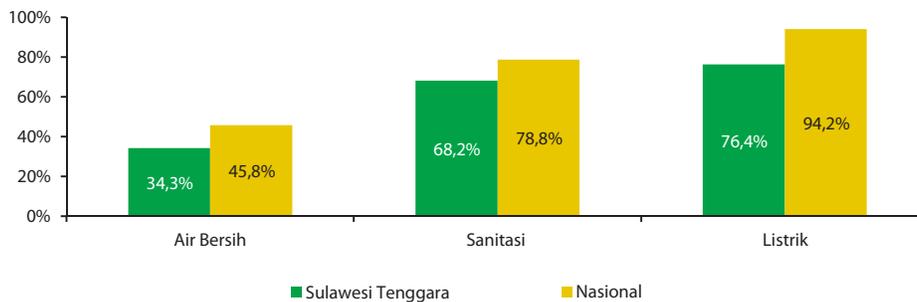
Gambar 5.35. Akses Rumah Tangga Terhadap Infrastruktur Dasar Perumahan Masih Diwarnai Kesenjangan



Sumber: Diolah oleh Staf Bank Dunia dari Susenas Tahun 2010, 2011.

Pada tahun 2010, sekitar 14 persen rumah tangga di Sulawesi Tenggara dikepalai perempuan, dan sebagian besar tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai. Akses rumah tangga yang dikepalai perempuan terhadap fasilitas air bersih hanya sebesar 34,3 persen atau terpaut 11,5 persen dari angka nasional. Sementara akses terhadap sanitasi yang layak mencapai 68,2 persen atau 10,6 persen lebih rendah dari angka nasional. Kesenjangan terbesar terjadi pada akses perempuan terhadap listrik yang mencapai 17,8 persen.

Gambar 5.36. Sebagian RT yang Dikepalai Perempuan Tidak Memiliki Akses terhadap Infrastruktur Dasar



Sumber: Diolah oleh Bank Dunia dari Susenas Tahun 2010, 2011.

Infrastruktur Perhubungan

Transportasi udara berkembang cukup pesat. Pada tahun 2010, frekuensi penerbangan dari dan ke Sulawesi Tenggara melalui bandara Haluoleo sudah meningkat lebih dari 100 persen dari frekuensi tahun 2005. Pemerintah daerah juga telah memfasilitasi pembukaan bandara baru, yakni di Bau-Bau (beroperasi sejak tahun 2008), Wakatobi (Beroperasi sejak tahun 2009), dan di Kolaka (beroperasi sejak tahun 2010). Upaya ini telah menghasilkan peningkatan jumlah arus penumpang yang signifikan. Meskipun baru beroperasi 2-3 tahun pertumbuhan jumlah arus penumpang di bandara Betoambari Bau-Bau meningkat lebih dari 6 kali lipat dan di bandara Matahora Wakatobi meningkat hampir 3 kali lipat tahun 2010. Hal ini mengindikasikan pembukaan bandara baru dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan pada akhirnya berdampak pada aktivitas ekonomi.

Tabel 5.14. Pembukaan Bandara Baru Berdampak pada Peningkatan Mobilitas Penduduk yang Signifikan

	Jumlah Penerbangan				Arus Penumpang			
	Haluoleo Kendari	Betoambari Bau-Bau	Matahora Wakatobi	Sangia Ni Kolaka	Haluoleo Kendari	Betoambari Bau-Bau	Matahora Wakatobi	Sangia Ni Kolaka
2005	1.205							
2006	1.439				158.261			
2007	1.729				203.260			
2008	1.696	243			210.661	4.710		
2009	2.517	282	438		279.645	5.250	3.493	
2010	2.616	1.224	527	226	303.420	34.583	9.653	12.486

Sumber : Data Bank Dunia dari Susenas, 2009.

Frekuensi pelayaran khusus dan luar negeri meningkat lebih dari 200 persen, sementara pelayaran nusantara (antar provinsi) menurun drastis dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2010, jenis pelayaran yang paling banyak digunakan adalah pelayaran umum (40%), angkutan penyeberangan (30%), dan pelayaran rakyat (23%). Sementara jenis pelayaran yang tumbuh paling pesat pada periode 2007-2010 adalah pelayaran khusus dan luar negeri³⁰. Sementara itu, frekuensi pelayaran nusantara justru menurun yang diperkirakan tersubstitusi oleh peningkatan frekuensi transportasi udara pada periode tersebut. Secara umum, pada tahun 2010, aktivitas pelayaran tertinggi terdapat di Bau-Bau (27%), Kendari (20%), Muna (14%), Kolaka (9%), dan Konawe (8%), dan lainnya (23%). Status pelabuhan di Sulawesi Tenggara terbaik terdapat di Kendari dan Bau-Bau (kategori kelas III), diikuti oleh pelabuhan Pomala, Kolaka, Raha, dan Langgara (kategori kelas IV dan V).

Tabel 5.15. Pelayaran Khusus dan Luar Negeri Tumbuh Paling Pesat

	2007	2010	Pertumbuhan
Pelayaran Domestik	24.480	29.546	21%
Umum	8.775	12.076	38%
Rakyat	5.393	6.880	28%
Perintis	286	567	98%
Khusus	255	794	211%
Penyeberangan	8.817	8.756	-1%
Nusantara (Ferry)	768	457	-40%
Lainnya	186	16	-91%
Pelayaran Luar Negeri	86	324	277%

Sumber : Diolah dari Sulawesi Tenggara dalam Angka dan BPS, 2011.

5.3.3 Kesimpulan dan Rekomendasi

Meningkatkan belanja infrastruktur dan mempertahankan struktur belanja yang sudah memprioritaskan modal. Struktur belanja infrastruktur di Sulawesi Tenggara sudah cukup baik, yakni dengan memberikan alokasi rata-rata diatas 75 persen untuk belanja langsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan sebagian besar dari belanja langsung tersebut dialokasikan untuk belanja modal. Namun demikian, secara total, belanja infrastruktur masih fluktuatif. Meskipun tidak perlu signifikan, pemerintah daerah perlu mendorong skema peningkatan belanja infrastruktur yang lebih konsisten baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kerangka pengeluaran jangka menengah yang berkualitas di bidang infrastruktur perlu disusun sehingga investasi publik di bidang infrastruktur lebih terarah sesuai dengan arah pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

30 Pelayaran khusus adalah pelayaran untuk pengangkutan komoditi yang bersifat khusus seperti pertambangan, dll, sementara pelayaran luar negeri adalah pelayaran pelabuhan negara tetangga dengan jarak tidak lebih dari 3000 mil dari pelabuhan terluar di Indonesia.

Meningkatkan belanja rehabilitasi dan pemeliharaan jalan untuk pemerintah provinsi. Jika dilihat perkembangan tahun 2006 dan tahun 2009, kondisi jalan rusak dan jalan dengan permukaan beraspal belum mengalami perbaikan berarti. Kondisi ini mungkin saja berbeda pada tahun 2010 dan 2011. Namun dari komposisi belanja langsung sampai tahun 2011 terlihat bahwa prioritas masih diberikan pada pembangunan jalan dan jembatan ketimbang rehabilitasi dan pemeliharaan. Dengan bertambahnya panjang jalan provinsi hampir dua kali lipat pada tahun 2010, pemerintah provinsi sudah harus memberi perhatian pada rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.

Di samping ke-PU-an, belanja infrastruktur perlu memberikan perhatian pada perumahan. Tantangan infrastruktur dasar perumahan di Sulawesi Tenggara adalah masih tingginya kesenjangan akses terhadap listrik, air bersih, maupun sanitasi yang layak antara rumah tangga termiskin dan terkaya. Untuk mengejar ketertinggalan dari rata-rata nasional, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara perlu memberikan prioritas pada peningkatan akses rumah tangga termiskin dan miskin pada listrik, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, belanja pemerintah daerah untuk perumahan masih sangat rendah sehingga perlu untuk ditingkatkan.

Melanjutkan peningkatan cakupan irigasi teknis. Seiring dengan peningkatan luas area sawah pada tahun 2010, tantangan pemerintah daerah untuk membangun irigasi teknis semakin tinggi. Dalam mendorong peningkatan produktivitas padi, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan cakupan irigasi teknis terutama pada area sawah tadah hujan yang sampai tahun 2010 masih sekitar 22,4 ribu hektar. Koordinasi antar berbagai tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan irigasi sesuai kewenangannya (primer, sekunder, tersier).

Melanjutkan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan laut dan udara. Upaya pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana angkutan laut dan udara memiliki dampak terhadap peningkatan mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi yang sangat berguna untuk mendukung pertumbuhan. Upaya tersebut perlu terus dilanjutkan terutama melalui pembangunan infrastruktur pendukung baik untuk transportasi udara maupun laut disertai dengan peningkatan kualitas.

5.4. Sektor Pertanian³¹

Sektor Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan sektor strategis namun mengalami perlambatan pertumbuhan dalam dua tahun terakhir. Selain merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, sektor pertanian juga merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Sulawesi Tenggara. Dalam rangka meningkatkan kinerja sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 4 komoditi unggulan dalam RPJMD 2008-2013. Keempat komoditi tersebut adalah: tanaman kakao di sub-sektor perkebunan, padi di sub-sektor tanaman pangan, sapi di sub-sektor peternakan, dan rumput laut di sub-sektor perikanan dan kelautan. Keempat komoditi tersebut merupakan kontributor terbesar di sub-sektor masing-masing. Dari keempat komoditi unggulan, tanaman kakao merupakan komoditi yang berhasil menjadi komoditi ekspor. Tantangan sektor pertanian di Sulawesi Tenggara dalam dua tahun terakhir adalah semakin melambatnya pertumbuhan di sektor pertanian, dan semakin berkurangnya belanja langsung sektor pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

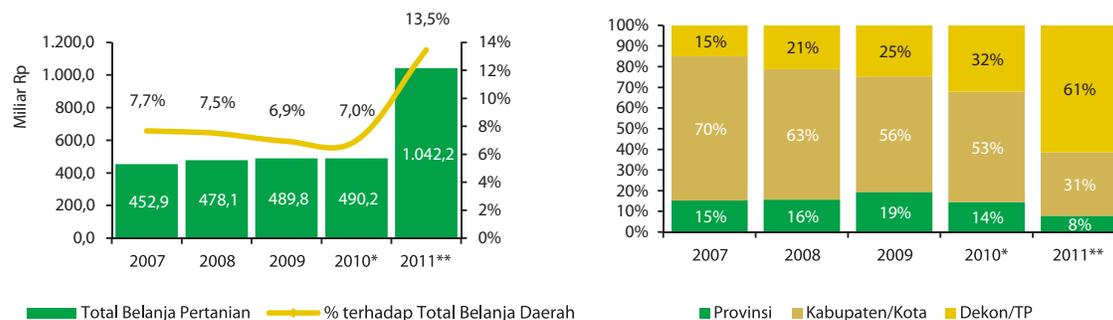
5.4.1. Belanja Pertanian

Disumbang oleh peningkatan belanja dekonsentrasi/TP, belanja sektor pertanian di Sulawesi Tenggara meningkat lebih dari dua kali lipat tahun 2011. Belanja sektor pertanian secara riil meningkat dari rata-rata dibawah Rp. 500 miliar pada periode tahun 2007-2010, menjadi 1,04 triliun tahun 2011. Namun demikian, peningkatan signifikan belanja pertanian tahun 2011 bukan berasal dari belanja pemerintah

³¹ Sektor Pertanian dalam penelitian ini merupakan sektor pertanian dalam arti luas, yakni meliputi urusan pertanian, urusan tanaman pangan, urusan perkebunan/kehutanan, serta urusan perikanan dan kelautan.

daerah, melainkan dari belanja dekonsentrasi/TP karena adanya program gerakan nasional kakao (Gernas) dalam bentuk bantuan dana peningkatan produksi untuk para petani kakao. Dengan peningkatan ini, belanja yang bersumber dari dekonsentrasi/TP mendominasi hingga 61 persen belanja pertanian di Sulawesi Tenggara.

Gambar 5.37. Peran Belanja Dekonsentrasi/TP Semakin Meningkat di Sektor Pertanian



Sumber : Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Berbeda dengan belanja pertanian yang bersumber dari dekonsentrasi/TP yang meningkat tiap tahunnya, belanja pertanian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota cenderung berfluktuasi. Pada periode 2007-2009, belanja pertanian pemerintah provinsi secara riil meningkat hingga Rp. 95 miliar, namun kembali menurun pada tahun 2010, dan diperkirakan meningkat kembali tahun 2011. Secara rata-rata provinsi mengalokasikan 7,2 persen dari belanjanya untuk sektor pertanian. Pada tingkat kabupaten/kota fluktuasi juga terjadi dengan rata-rata proporsi belanja pertanian yang lebih kecil dari provinsi, yakni hanya 6 persen. Belanja pertanian yang bersumber dari dana dekonsentrasi/TP cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan proporsi yang lebih besar. Pada tahun 2011, sebesar 68,1 persen belanja dekonsentrasi/TP di Sulawesi Tenggara dialokasikan hanya untuk sektor pertanian.

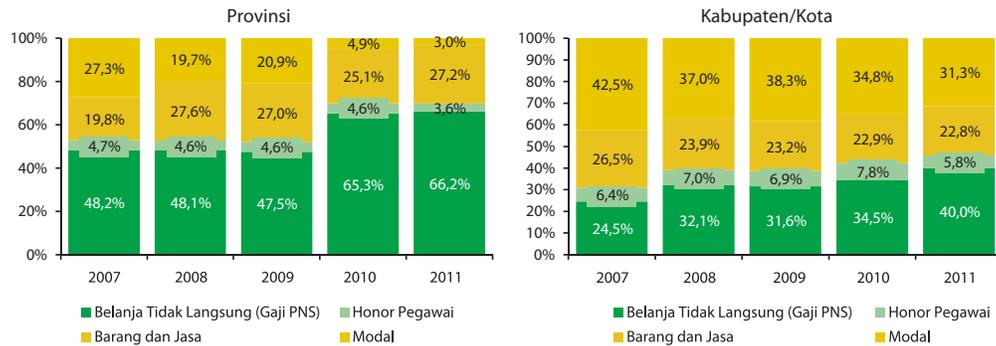
Tabel 5.16. Belanja Dekonsentrasi/TP untuk Pertanian Meningkat Lebih dari 3 Kali Lipat Tahun 2011

	2007	2008	2009	2010*	2011**
Provinsi					
Belanja Pertanian (Miliar Rp)	68,7	75,2	95,0	71,0	81,0
% terhadap Total Belanja Provinsi	6,9%	8,1%	8,5%	5,9%	6,4%
Kabupaten/Kota					
Belanja Pertanian (Miliar Rp)	316,5	301,9	273,4	262,0	321,6
% terhadap Total Belanja Kab/Kota	7,4%	6,3%	5,5%	5,2%	5,8%
Dekon/TP					
Belanja Pertanian (Miliar Rp)	67,6	101,0	121,4	157,2	639,6
% terhadap Total Belanja Dekon/TP	10,9%	15,4%	12,1%	21,5%	68,1%

Sumber : Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Selain berfluktuasi, belanja sektor pertanian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga cenderung habis untuk belanja gaji pegawai (BTL). Proporsi belanja untuk gaji pegawai sektor pertanian pemerintah provinsi meningkat dari 48,2 persen (2007) menjadi 66,2 persen (2011), sementara di tingkat kabupaten/kota meningkat dari 24,5 persen (2007), menjadi 40 persen (2011). Peningkatan belanja tidak langsung yang tidak disertai dengan peningkatan konsisten belanja sektor pertanian mengakibatkan semakin berkurangnya belanja langsung sektor tersebut baik secara nilai maupun proporsi. Penurunan belanja langsung berakibat pada semakin menurunnya belanja pertanian yang dialokasikan untuk belanja modal atau belanja pertanian yang bersifat investasi publik.

Gambar 5.38. Proporsi Belanja Gaji Pegawai Meningkat, Sementara Proporsi Belanja Modal Menurun

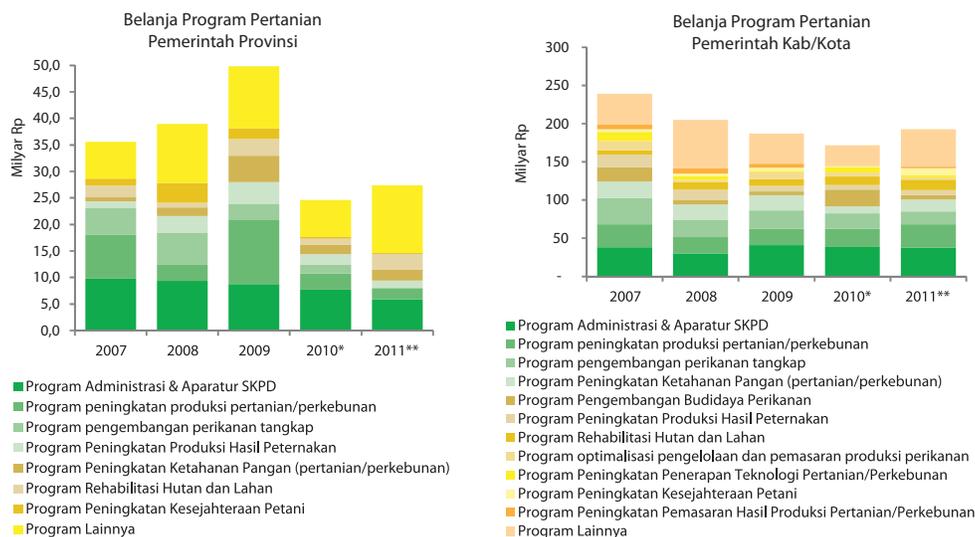


Sumber : Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Selain mengalami penurunan, belanja langsung sektor pertanian pemerintah provinsi juga masih dibebani belanja untuk program/kegiatan terkait administrasi dan aparatur. Secara rata-rata belanja program/kegiatan yang terkait dengan administrasi dan aparatur di sektor pertanian pemerintah provinsi masih sebesar 30 persen dari belanja langsung, sementara di tingkat kabupaten/kota relatif lebih terkendali pada kisaran 19 persen dari belanja langsung. Masih tingginya belanja program terkait administrasi dan aparatur di satu sisi, dan semakin menurunnya proporsi dan nilai belanja langsung sektor pertanian di sisi lain mengakibatkan belanja yang betul-betul dapat berdampak langsung bagi pembangunan sektor pertanian semakin berkurang dalam dua tahun terakhir.

Dari proporsi belanja langsung yang terkait dengan program-program sektor pertanian, sebagian besar diarahkan pada peningkatan produksi. Tiga prioritas program pertanian di tingkat provinsi terkait dengan peningkatan produksi pertanian, perkebunan, tanaman pangan, pengembangan produksi perikanan, dan peternakan. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat kabupaten/kota. Meskipun dianggarkan setiap tahunnya, perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan teknologi pertanian, serta peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian masih relatif kecil dibanding untuk peningkatan produksi.

Gambar 5.39. Dalam 5 Tahun terakhir Program Sektor Pertanian Lebih Fokus pada Peningkatan Produksi



Sumber : Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.

Berdasarkan realisasi belanja tahun 2009, Kolaka adalah kabupaten dengan belanja pertanian terbesar, namun dengan belanja pertanian per hektar lahan pertanian yang masih dibawah rata-rata. Kolaka merupakan kabupaten dengan total luas lahan pertanian terbesar di Sulawesi Tenggara. Belanja pertanian Kolaka menempati urutan tertinggi pada tahun tersebut, yakni sebesar Rp. 42 miliar dengan proporsi terhadap total belanja sebesar 7,1 persen. Namun demikian, jika dibandingkan dengan luas lahan pertanian, belanja pertanian Kolaka hanya sebesar Rp. 63.894 per hektar lahan pertanian. Angka ini sedikit lebih tinggi dari Konawe, namun masih jauh dibawah rata-rata kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, meskipun termasuk daerah dengan belanja pertanian terkecil, daerah perkotaan memiliki keleluasaan yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas per hektar lahan mengingat besaran belanja pertanian per hektar yang jauh diatas rata-rata.

Tabel 5.17. Belanja Pertanian Kolaka Tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2009

	Realisasi Belanja Pertanian 2009 (Miliar Rp)	Proporsi Belanja Pertanian	Belanja Pertanian per Luas Lahan Pertanian (Rp/Ha)	Lahan Pertanian		
				Luas Lahan (Ha)*	Diusahakan	Potensi**
Buton	29,2	5,9%	136.545.8	214.115.0	87,3%	12,7%
Muna	27,5	4,9%	109.682.6	251.149.0	76,8%	23,2%
Konawe	18,5	7,5%	30.214.0	611.668.0	92,6%	7,4%
Kolaka	42,0	7,1%	63.894.2	657.487.0	97,3%	2,7%
Konawe Selatan	32,7	7,1%	84.131.2	388.785.0	91,4%	8,6%
Bombana	21,8	6,9%	76.391.6	285.826.0	96,7%	3,3%
Wakatobi	16,5	5,0%	582.880.9	28.283.0	73,4%	26,6%
Kolaka Utara	24,2	6,5%	73.910.5	327.650.0	99,9%	0,1%
Buton Utara	17,4	7,0%	90.387.7	192.431.0	95,5%	4,5%
Konawe Utara	15,5	3,6%	34.338.3	451.715.0	96,4%	3,6%
Kota Kendari	14,7	2,9%	805.395.1	18.264.0	81,2%	18,8%
Kota Bau-Bau	13,3	3,6%	552.609.7	23.996.0	94,2%	5,8%
Rata-rata Kab/Kota Sultra	22,8	5,7%	220.031.8	287.614.1	90,2%	9,8%

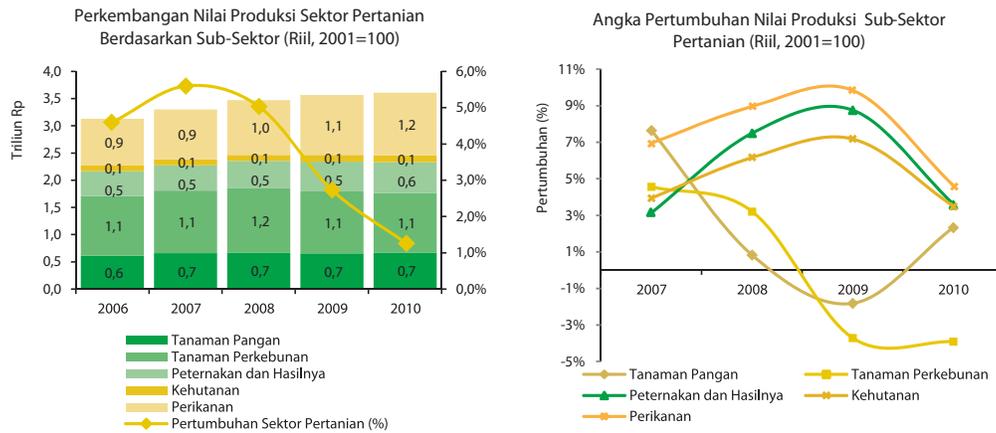
Sumber : Database PEA Universitas Haluleo dan Sulawesi Tenggara dalam Angka, 2011.

Catatan : *) Luas Lahan Pertanian meliputi lahan yang sudah dimanfaatkan untuk pertanian maupun yang bersifat potensial. *) potensi lahan pertanian adalah lahan yang sementara tidak diusahakan atau rawa-rawa yang tidak ditanami.

5.4.2. Kinerja Makro Sektor Pertanian

Pertumbuhan nilai produksi bruto sektor pertanian di Sulawesi Tenggara mengalami perlambatan dalam 3 tahun terakhir. Meskipun nilai produksi bruto riil sektor pertanian di Sulawesi Tenggara terus meningkat, namun pertumbuhannya terus mengalami perlambatan dalam 3 tahun terakhir. Perlambatan ini dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan negatif pada sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan pada tahun 2009, serta perlambatan angka pertumbuhan pada 3 sub-sektor lainnya pada tahun 2010. Meskipun sub-sektor tanaman pangan mengalami pemulihan angka pertumbuhan hingga mencapai 2,3 persen tahun 2010, namun tidak bisa memulihkan pertumbuhan sektor pertanian mengingat besarnya pengaruh sub-sektor perkebunan yang masih tumbuh negatif. Sebagai kontributor terbesar di sektor pertanian, pertumbuhan sub-sektor perkebunan sangat berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan pertanian secara keseluruhan.

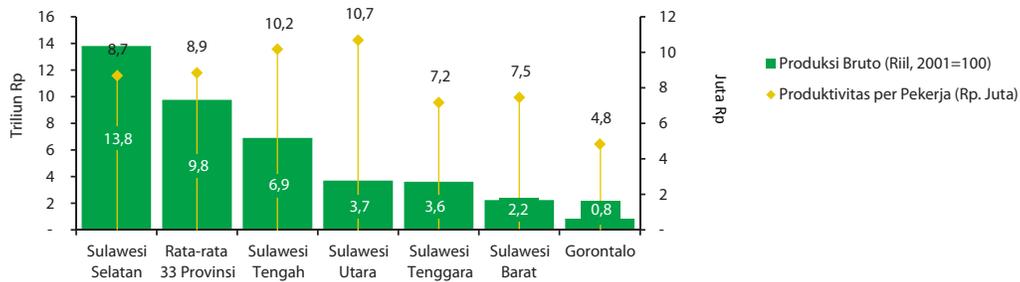
Gambar 5.40. Produksi Sektor Pertanian Meningkat Namun dengan Pertumbuhan yang Melamban



Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Pada tahun 2010, nilai produksi maupun produktivitas sektor pertanian di Sulawesi Tenggara masih dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2010, nilai produksi riil sektor pertanian di Sulawesi Tenggara masih seperempat dari nilai produksi pertanian Sulawesi Selatan, atau sepertiga dari nilai produksi rata-rata provinsi secara nasional. Selain masih rendahnya nilai produksi, nilai produktivitas per petani Sulawesi Tenggara juga masih rendah dibanding rata-rata nasional maupun dibanding beberapa provinsi di Pulau Sulawesi.

Gambar 5.41. Nilai Produksi Bruto dan Produktivitas Pertanian Sulawesi Tenggara Masih Perlu Ditingkatkan

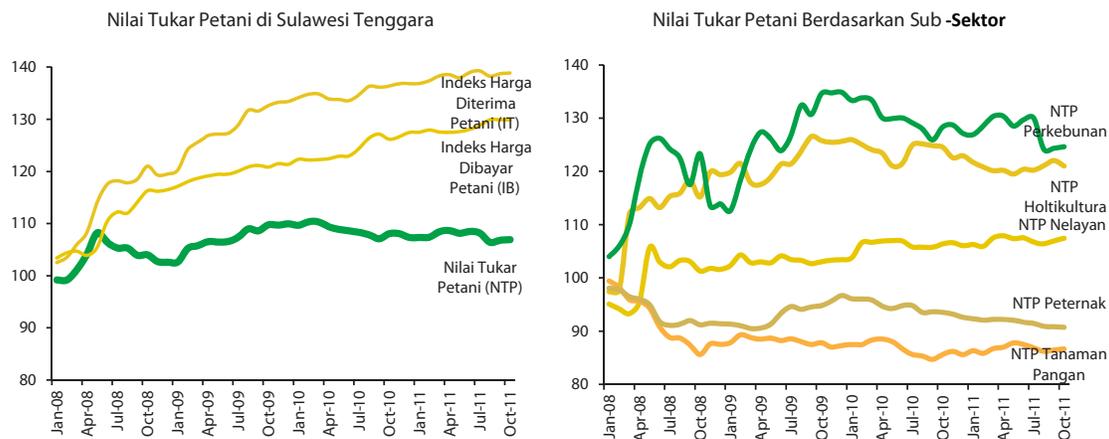


Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

Petani tanaman pangan dan peternak masih kurang beruntung. Secara umum, indeks nilai tukar petani (NTP) di Sulawesi Tenggara sudah diatas 100³² dan terus meningkat setiap bulannya pada periode 2008-2011. Dengan indeks diatas 100, secara umum petani di Sulawesi Tenggara mengalami surplus. Namun demikian, jika dilihat lebih mendalam, tingginya indeks NTP di Sulawesi Tenggara sebagian besar disumbang oleh tingginya indeks NTP perkebunan dan holtikultura yang rata-rata diatas 120, serta indeks NTP nelayan yang rata-rata diatas 100, sementara indeks NTP tanaman pangan dan peternakan masih dibawah 100. Tingginya indeks nilai tukar di sub-sektor perkebunan dan holtikultura mengindikasikan nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi dibanding dengan produk pertanian lainnya. Rendahnya NTP di sub-sektor tanaman pangan dan peternakan dapat berdampak pada berkurangnya insentif bagi petani untuk bertahan di sub-sektor tersebut.

32 Indeks NTP diatas 100 mengindikasikan bahwa indeks harga yang diterima petani (IT) dari hasil penjualan produk petani masih relatif lebih tinggi dibanding indeks harga yang dibeli oleh petani (IB) untuk memperoleh input pertanian (bibit, pupuk, pakan ternak, dll) dan barang-barang kebutuhan pokok konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, Indeks NTP dibawah 100 mengindikasikan bahwa IT lebih kecil dibanding IB.

Gambar 5.42. Indeks NTP di Sulawesi Tenggara Sudah di Atas 100 Kecuali untuk Tanaman Pangan dan Peternak



Sumber : Diolah dari BPS, 2011.

5.4.3. Kinerja Komoditi Unggulan Sektor Pertanian

Kakao

Setelah mengalami penurunan tajam tahun 2008 dan 2009, volume produksi kakao di Sulawesi Tenggara tumbuh 58 persen. Selain merupakan kontributor terbesar sub-sektor perkebunan, tanaman kakao juga merupakan salah satu komoditi ekspor penting Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2008 dan 2009, komoditi kakao sempat mengalami penurunan produksi yang cukup tajam. Hal ini disebabkan setidaknya karena 4 hal berikut³³ : (i) mewabahnya hama penggerek batang di beberapa perkebunan kakao; (ii) terlambatnya proses peremajaan tanaman kakao yang sudah melampaui umur produksi (15 tahun), terutama pada lahan kakao yang dikuasai oleh petani tradisional; (iii) sebagian besar tanaman kakao yang sudah diremajakan belum memasuki masa pembuahan; dan (iv) diperkirakan terjadi kebocoran regional, terutama di sentra kakao seperti Kolaka Utara³⁴ yang belum didukung infrastruktur yang baik sehingga petani lebih senang menjual produk kakao ke daerah Siwa (Sulawesi Selatan) melalui angkutan laut. Pada tahun 2010, beberapa kendala tersebut sebagian sudah berhasil diatasi sehingga volume produksi meningkat tajam hingga mencapai 58 persen.

Pada tahun 2010, baik volume produksi, produktivitas, maupun persentase luas lahan produktif Kakao telah mengalami peningkatan kembali namun belum mampu meningkatkan ekspor. Volume ekspor kakao mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, ekspor kakao mencapai 8,7 persen total produksi kakao dengan nilai ekspor sebesar USD 18,1 juta. Penurunan tajam volume ekspor terjadi sejak tahun 2008 dan belum berhasil ditingkatkan sampai tahun 2010. Faktor kenaikan harga produk kakao dan melemahnya permintaan pasar dunia akibat krisis global diperkirakan menjadi penyebab melemahnya ekspor Kakao.

33 Hasil wawancara dengan para penyuluh petani kakao, 2011.

34 Distribusi volume produksi kakao di Sulawesi Tenggara : Kolaka Utara (58%), disusul oleh Kolaka (21%), Konawe (7%), Konawe Selatan (6%), Bomabana (4%), dan Lainnya (4%).

Tabel 5.18. Tahun 2010, Produksi Kakao Kembali Meningkat, namun Belum Berhasil Meningkatkan Ekspor

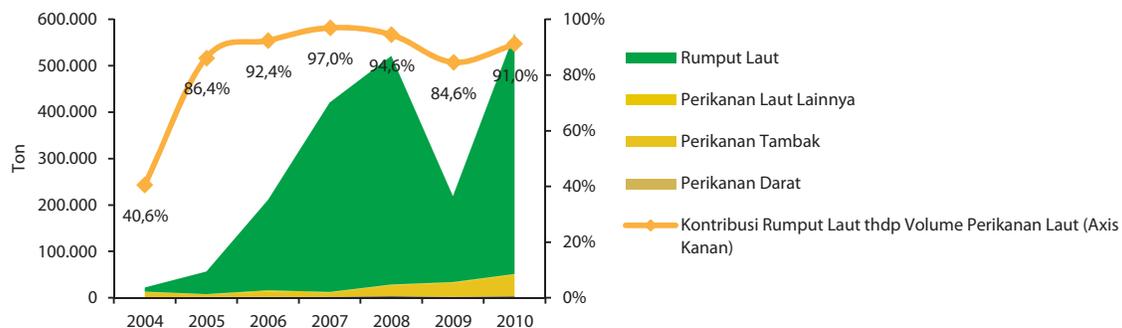
	2007	2008	2009	2010
Produksi Kakao				
Volume (Ton)	134.757	115.898	93.465	147.917
Pertumbuhan (%)	7,9	-14,0	-19,4	58,3
Kontribusi thdp Total Volume Produksi Perkebunan (%)	57,5	52,6	42,1	68,0
Produktivitas Kakao (Ku/Ha)	9,1	7,5	5,9	8,4
Luas Lahan Kakao (Ha)				
Luas lahan Produktif kakao (Ha)	148.177	154.326	157.527	175.820
Pertumbuhan Luas Lahan Produktif Kakao (%)	12,0	4,1	2,1	11,6
Persentase Lahan Produktif thdp Total Lahan Kakao (%)	74,1	70,5	68,4	73,9
Ekspor Kakao				
Volume Ekspor Kakao (Ton)	11.700	2.000	1.200	1.000
Persentase Ekspor thdp Total Produksi Kakao (%)	8,7	1,7	1,3	0,7
Nilai Ekspor Kakao (Ribu USD)	18.117	3.886	3.102	2.798
Harga Ekspor Kakao (USD per Ton)	1.548	1.943	2.585	2.798
Kontribusi Kakao terhadap Total Ekspor Sultra (%)	4,6	0,8	1,6	0,7

Sumber : Diolah dari Sulawesi Tenggara dalam Angka, berbagai tahun, 2011.

Rumput Laut

Rumput Laut merupakan komoditi unggulan di sub-sektor perikanan dan kelautan. Kinerja produksi perikanan dan kelautan sangat dipengaruhi oleh kinerja produksi rumput laut yang pada periode tahun 2005-2010 memberikan kontribusi rata-rata diatas 91 persen. Pada periode tahun 2004 dan 2008, produksi rumput laut mengalami peningkatan yang cukup pesat dengan rata-rata pertumbuhan per tahun lebih dari 165 persen. Pertumbuhan produksi rumput laut tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan angka pertumbuhan mencapai 300 persen. Pada tahun 2009, volume produksi rumput laut sempat mengalami penurunan produksi namun kembali pulih hingga mencapai produksi tertinggi dalam 6 tahun terakhir pada tahun 2010, dengan total produksi sebesar 518,6 ribu ton. Sentra produksi rumput laut tersebar di 8 kabupaten yakni Buton, Muna, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara, dan Buton Utara. Pada tahun 2010, peningkatan produksi rumput laut yang signifikan terjadi di Konawe Selatan.

Gambar 5.43. Perkembangan Produksi Sub-Sektor Perikanan Sangat Tergantung Pada Produksi Rumput Laut

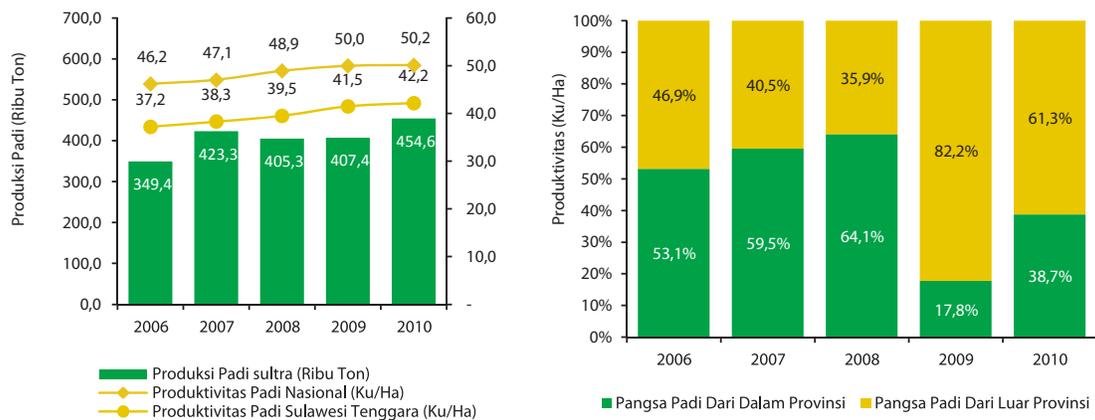


Sumber : Diolah dari Data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011.

Padi

Lebih dari 50 persen produksi tanaman pangan bersumber dari Tanaman Padi, namun produktivitas padi Sulawesi Tenggara masih dibawah rata-rata nasional. Produksi padi di Sulawesi Tenggara mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2006-2010. Pada tahun 2007 produksi padi mengalami pertumbuhan tinggi (21 persen) yang kemudian disusul oleh kontraksi (pertumbuhan negatif) pada tahun 2008 (-4,3 persen) sebagai dampak dari cuaca ekstrem di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2010, produksi padi kembali mengalami pertumbuhan tinggi hingga mencapai 11,6 persen. Meskipun volume produksi padi berfluktuasi, produktivitas per hektar tanaman padi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni dari 37,2 kuintal per hektar menjadi 42,3 kuintal per hektar. Namun demikian, jika dibanding dengan produktivitas padi secara nasional, produktivitas padi Sulawesi Tenggara masih sangat rendah³⁵.

Gambar 5.44. Produktivitas Padi Meningkat Namun Masih Dibawah Produktivitas Padi Nasional



Sumber : Diolah dari Sulawesi Tenggara dalam Angka, berbagai tahun, 2011.

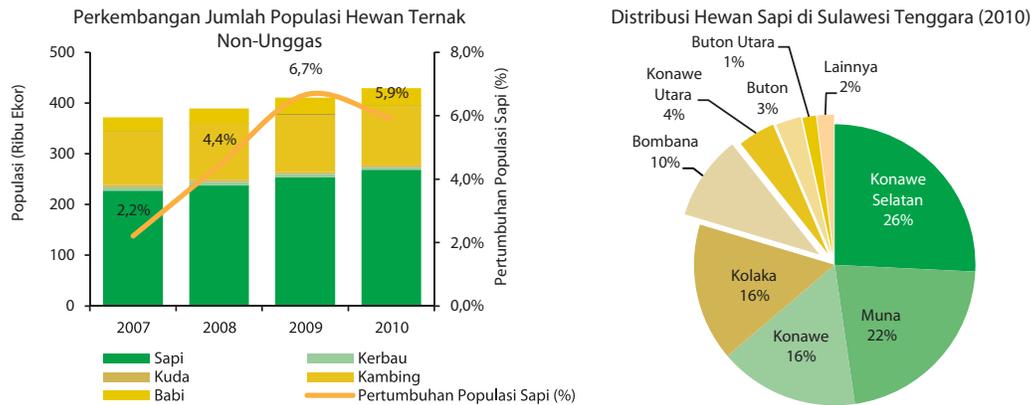
Sulawesi Tenggara masih perlu mendorong swasembada pangan. Pada periode tahun 2006-2008, pangsa produksi padi dari dalam provinsi mendominasi pasokan beras Perum Bulog hingga 64,1 persen. Namun, pada tahun 2009 pangsa padi dari dalam provinsi mengalami penurunan tajam menjadi hanya 17,8 persen sehingga pangsa padi dari luar provinsi meningkat tajam hingga 82,2 persen. Pada tahun 2010, pangsa padi dari dalam provinsi sedikit mengalami peningkatan namun belum kembali pada pangsa tahun 2006-2008. Semakin tingginya pangsa beras masuk dari luar provinsi menunjukkan semakin tingginya kesenjangan antara kebutuhan konsumsi padi dengan produksi padi di dalam provinsi.

Sapi

Populasi hewan ternak sapi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun terjadi perlambatan pertumbuhan pada tahun 2010. Sapi merupakan produk unggulan di Sulawesi Tenggara karena merupakan produk yang cukup berkembang serta menguasai lebih dari 60 persen pangsa produk peternakan non-unggas di Sulawesi Tenggara. Sentra populasi hewan sapi tersebar di 5 kabupaten di Sulawesi Tenggara yakni secara berturut-turut di Konawe Selatan, Muna, Konawe, Kolaka dan Bombana. Tahun 2009, populasi sapi mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yakni dari 2,2 persen tahun 2007 menjadi 6,7 persen. Pada tahun 2010, pertumbuhan populasi mengalami sedikit perlambatan hingga menjadi 5,9 persen.

35 Dalam rangka meningkatkan produktivitas padi, dinas pertanian dan dinas pekerjaan umum perlu melakukan kerjasama lebih intensif dalam pembenahan irigasi. Berdasarkan data dari BPS, luas area sawah yang dialiri irigasi teknis meningkat dari 25,5 ribu hektar tahun 2008 menjadi 38,1 hektar tahun 2010. Namun demikian, perluasan area sawah dengan irigasi teknis belum mampu mengurangi secara signifikan luas area sawah tadah hujan. Sampai tahun 2010, masih terdapat sebesar 22,4 ribu hektar sawah tadah hujan yang pengairannya sangat tergantung pada ada tidaknya hujan. (Lihat Bab Infrastruktur pada sub-bab Infrastruktur Irigasi).

Gambar 5.45. Sapi Merupakan Komoditi Unggulan di Sub-sektor Peternakan di Sulawesi Tenggara.



Sumber : Diolah dari Sulawesi Tenggara dalam Angka, berbagai tahun, 2011.

Kotak 5.1. Pencapaian Target Sektor Pertanian RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013

Dari 21 indikator capaian sektor pertanian yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, 9 indikator belum terukur, 6 indikator tercapai, dan 9 belum tercapai. Dalam RPJMD 2008-2013, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencanangkan 21 indikator capaian yang terkait dengan sektor pertanian. Dari 21 indikator tersebut, sekitar 9 indikator belum memiliki target yang terukur. Beberapa indikator yang tidak terukur tersebut misalnya jumlah produksi sayur-sayuran, buah-buahan, produksi hasil hutan, kelapa sawit, dll. Target indikator tersebut belum disertai dengan data dasar (baseline) serta target capaian yang terukur. Sementara itu, dari 15 target indikator yang terukur, 6 target sudah tercapai pada tahun 2010, sementara 9 target lainnya masih belum tercapai. Dari 4 produk unggulan yang dicanangkan pemerintah provinsi, hanya padi dan hasil perikanan laut yang telah dicapai sejak tahun 2008, sementara untuk tanaman kakao dan sapi belum tercapai. Target capaian pertanian dalam RPJMD dinyatakan dalam rata-rata pertahun, sehingga pencapaian target didasarkan pada pencapaian rata-rata tahunan.

Tabel 5.19. Sembilan dari 15 indikator Sektor Pertanian dalam RPJMD Sultra belum tercapai pada tahun 2010

Jenis Komoditi Pertanian	Satuan	Target per Tahun (RPJMD 2008-2013)	Capaian 2008-2010				Kinerja
			2008	2009	2010	Rata-rata Per Tahun	
Padi	Ton	400.000	423.316	407.367	454.644	428.442	Tercapai
Jagung	Ton	100.000	93.064	71.655	74.840	79.853	Belum Tercapai
Kacang Kedelai	Ton	6.000	3.812	5.615	3.203	4.210	Belum Tercapai
Kakao	Ton	150.000	115.898	93.465	147.917	119.093	Belum Tercapai
Jambu Mete	Ton	75.000	37.981	52.436	13.191	34.536	Belum Tercapai
Cengkeh	Ton	4.000	2.174	6.094	5.872	4.713	Tercapai
Vanili	Ton	150	194	192	87	158	Tercapai
Lada	Ton	5.000	3.663	6.648	4.546	4.952	Belum Tercapai
Kemiri	Ton	3.000	1.723	1.786	927	1.479	Belum Tercapai
Sapi	Ekor	300.000	237.360	253.171	268.138	252.890	Belum Tercapai
Kambing	Ekor	200.000	110.629	114.177	117.819	114.208	Belum Tercapai
Ayam	Ekor	10.000.000	10.953.070	13.651.634	16.075.436	13.560.047	Tercapai
Telur Unggas	Kg	7.500.000	7.659.219	7.064.613	8.170.987	7.631.606	Tercapai
Perikanan Laut*)	Ton	275.000	493.834	186.616	519.875	400.109	Tercapai
Perikanan Darat*)	Ton	5.000	2.973	1.936	2.844	2.584	Belum Tercapai

Sumber : Diolah dari RPJMD Sulawesi Tenggara 2008-2013, dan Dinas Perikanan dan Kelautan, 2011.

Catatan : *) Data Perikanan Laut dan Darat dalam tabel diatas diambil dari data dinas perikanan dan kelautan. Data tersebut berbeda dengan data yang terdapat dalam Sulawesi Tenggara Dalam Angka yang dipublikasikan BPS Sulawesi Tenggara.

5.4.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Mengurangi ketergantungan terhadap belanja dekonsentrasi dan TP. Peningkatan signifikan belanja sektor pertanian yang bersumber dari dekonsentrasi/TP tahun 2011 hanya bersifat sementara dan diperkirakan akan berkurang seiring dengan perubahan prioritas dan program dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) perlu merencanakan skema peningkatan belanja sektor pertanian yang lebih konsisten sehingga total investasi publik di sektor pertanian di Sulawesi Tenggara lebih stabil.

Meningkatkan efisiensi dan memperbaiki struktur belanja pertanian pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Peningkatan efisiensi diarahkan pada langkah-langkah berikut: (i) seiring dengan upaya peningkatan belanja pertanian secara lebih konsisten, pertumbuhan belanja gaji pegawai (BTL) perlu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak berdampak pada penurunan belanja langsung; (ii) mengurangi secara bertahap proporsi belanja program terkait administrasi perkantoran dan aparatur sehingga belanja langsung sektor pertanian dapat dioptimalkan untuk program/kegiatan investasi yang langsung berdampak pada kinerja pertanian; (iii) secara bertahap program-program yang berorientasi pada penerapan teknologi pertanian dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perlu lebih diprioritaskan, hal ini berguna untuk mendorong agar terjadi peningkatan produktivitas (intensifikasi), peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta pengembangan agribisnis; (iv) memberikan perhatian lebih pada peningkatan kesejahteraan petani terutama di sub-sektor tanaman pangan dan peternakan yang cenderung memiliki nilai tukar rendah (dibawah 100); dan (iv) mengarahkan intervensi pertanian untuk peningkatan produksi pada komoditi yang belum mencapai target atau cenderung mengalami penurunan produksi pada tahun 2010.

Merevitalisasi pertumbuhan sektor pertanian. Perlambatan pertumbuhan sektor pertanian yang dipengaruhi oleh penurunan angka pertumbuhan riil di hampir semua sub-sektor pertanian perlu segera diantisipasi melalui : (i) peningkatan pemasaran ekspor komoditi kakao yang terus mengalami penurunan volume dan nilai ekspor dari tahun ke tahun. Peningkatan pemasaran ekspor sangat diperlukan untuk menyambut momentum pertumbuhan tinggi produksi kakao yang mulai terlihat sejak tahun 2010; (ii) peningkatan produktivitas padi melalui perluasan irigasi teknis sehingga dapat mengurangi area sawah tadah hujan; peningkatan penerapan teknologi produksi, serta penyuluhan pertanian yang lebih intensif; (iii) menjaga dan meningkatkan stabilitas pertumbuhan populasi sapi serta volume produksi rumput laut sebagai komoditi unggulan sub-sektor peternakan dan perikanan kelautan.



Bab 6

Block Grant Desa

6.1. Pendahuluan

Block grant ke desa merupakan salah satu dari tiga pilar utama program Bahteramas (Bangun Kesejahteraan Masyarakat). Pada tahun 2008, Gubernur Sulawesi Tenggara mencanangkan program Bahteramas (Bangun Kesejahteraan Masyarakat). Program ini mencakup pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP), pelayanan kesehatan gratis, serta dana *block grant* kepada pemerintah desa sebesar Rp. 100 juta per tahun. Untuk merealisasikan program Bahteramas yang terkait dengan *block grant*, pemerintah provinsi telah mengalokasikan sejumlah dana yang sebagian besar berada pada pos belanja transfer, yakni dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Pada bab ini, pembahasan terutama akan menyangkut realisasi program *block grant* ke desa dan persepsi masyarakat tentang penyusunan rencana, pelaksanaan, pelaporan serta manfaat dari program tersebut.

6.2. Gambaran Umum Belanja Transfer³⁶ Pemerintah Provinsi

Sebagaimana terjadi pada umumnya di seluruh pemerintah provinsi di Indonesia, penggunaan instrumen bantuan keuangan oleh Pemerintah Provinsi di Sulawesi Tenggara cenderung meningkat. Pada periode tahun 2007-2011, total belanja transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat hampir 4 kali lipat, yakni dari Rp. 77,4 miliar (2007) menjadi Rp 358,7 miliar (2011), atau meningkat secara proporsional terhadap total belanja provinsi sebesar 3 kali lipat, yakni dari 9,2 persen (2007) menjadi 25,5 persen (2011). Peningkatan belanja transfer menunjukkan semakin pentingnya peran jenis belanja tersebut sebagai instrumen intervensi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Tenggara, tapi hampir di seluruh pemerintah provinsi di Indonesia³⁷. Tantangan utama dari penggunaan instrumen belanja transfer adalah transparansi dan akuntabilitas³⁸.

Gambar 6.1. Belanja Transfer Meningkat Baik Secara Nominal Maupun Proporsional dalam 2 Tahun Terakhir



Sumber : Biro Keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Catatan : Data tahun 2007-2010 menggunakan data realisasi, data tahun 2011 menggunakan data dari APBD Murni. Data Tahun 2010 pada gambar ini berbeda dengan data pada tabel 4.1. karena pada gambar ini telah menggunakan data realisasi (bukan APBD-P).

36 Berdasarkan Permendagri 13/2006, terdapat jenis belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/desa, bagi hasil, bantuan sosial, hibah, dan subsidi. Kelima jenis belanja inilah yang dalam penelitian ini dikategorikan sebagai belanja transfer. Permendagri 13/2006 mengklasifikasi kelima jenis belanja ini ke dalam Belanja Tidak Langsung (BTL) bersama dengan belanja gaji pegawai, bunga, dan belanja tidak terduga.

37 Hal ini terjadi karena di satu sisi pemerintah provinsi memiliki sumber daya anggaran yang cukup besar, sementara di sisi lain kewenangan pelayanan publik (public service delivery) sebagian besar ada di tingkat kabupaten/kota. Melalui instrumen transfer bantuan keuangan, pemerintah provinsi dapat menciptakan keseimbangan fiskal (bantuan keuangan umum) atau mendorong pemerintah dibawahnya untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan (bantuan keuangan khusus) (lihat Permendagri 13/2006 pasal 47)

38 Dari sisi transparansi, informasi belanja transfer dalam dokumen anggaran seringkali kurang mendetil. Sebagai contoh kasus, polemik sering terjadi ketika menentukan belanja pendidikan suatu pemerintah provinsi. Di satu sisi provinsi sering menggunakan belanja transfer untuk bantuan pendidikan, namun di sisi lain bantuan tersebut seringkali tidak tercatat sebagai belanja pendidikan, melainkan belanja bantuan keuangan. Permendagri 13/2006 mengatur bahwa belanja bantuan keuangan, hibah, dll. Hanya boleh dianggarkan dalam RKA-SKPKD (RKA khusus di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Biro Keuangan, Sekretariat Daerah, baca Pasal 97 Ayat (2) Permendagri 13/2006). Konsekuensinya, secara agregat belanja bantuan pendidikan seringkali terklasifikasi menjadi belanja pemerintahan umum. Sementara itu dari sisi akuntabilitas, belanja transfer, terutama belanja hibah dan bantuan sosial, akhir-akhir ini menjadi isu nasional terutama terkait siapa yang berhak menerima, bagaimana penatausahaan keuangan, maupun pertanggungjawabannya.

Sebagian besar belanja transfer dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah bawahan (kabupaten/kota/desa) disusul oleh belanja bagi hasil. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa secara rata-rata menghabiskan hampir 50 persen dari total belanja transfer dengan kecenderungan meningkat dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2011, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa diperkirakan meningkat menjadi 78,4 persen dari total belanja transfer. Realisasi belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota/desa merupakan jenis belanja terbesar pada tahun 2007, namun pada tahun berikutnya (2008-2011), belanja terbesar didominasi oleh bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan desa. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran instrumen transfer provinsi ke daerah kabupaten/kota/desa, dari yang semula berbentuk bagi hasil menjadi bantuan keuangan.

Tabel 6.1. Sebagian Besar Belanja Transfer Dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan (Angka Nominal)

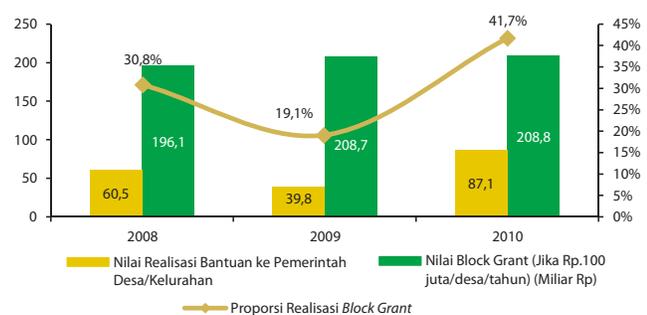
	2007	2008	2009	2010	2011*	Rata-rata
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa						
Belanja (Miliar Rp)	18.0	108.1	70.7	120.7	281.1	119.7
Proporsi Terhadap Belanja Transfer (%)	23.2	48.7	44.6	42.5	78.4	47.5
Belanja Bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa						
Belanja (Miliar Rp)	35.2	71.6	60.2	79.7	49.2	59.2
Proporsi Terhadap Belanja Transfer (%)	45.4	32.3	37.9	28.1	13.7	31.5
Belanja Bantuan Sosial						
Belanja (Rp. Miliar)	11.2	19.4	10.0	75.5	19.7	27.1
Proporsi Terhadap Belanja Transfer (%)	16.9	8.7	6.3	26.6	5.5	12.8
Belanja Hibah						
Belanja (Miliar Rp)	13.1	23.0	17.7	7.9	8.7	14.1
Proporsi Terhadap Belanja Transfer (%)	14.5	10.4	11.2	2.8	2.4	8.2

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Database PEA Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo, 2011.
Catatan : Data 2007-2010 didasarkan pada angka realisasi; data tahun 2011*) didasarkan pada APBD Murni.

6.3. Rencana dan Realisasi Belanja *Block Grant* ke Desa

Block grant diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada desa/kelurahan yang direncanakan sebesar Rp.100 juta pertahun. Jika rencana Rp. 100 juta per desa/kelurahan direalisasikan, maka pemerintah provinsi setidaknya perlu mengalokasikan lebih dari Rp 196 miliar setiap tahunnya. Dalam kenyataannya, berdasarkan patokan Rp. 100 juta dikali jumlah desa/kelurahan pada periode 2008-2010, dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk desa/kelurahan pada periode yang sama, maka tingkat realisasi program *block grant* baru sebesar 30,8 persen tahun

Gambar 6.2. Sampai Tahun 2010, Realiasi Program *Block Grant* ke Desa Belum Mencapai 50 persen



Sumber : Diolah dari data Bagian Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPS.

2008; 19,1 persen tahun 2009; dan 41,7 persen tahun 2010. Dengan kata lain, pelaksanaan program *block grant* ke desa belum pernah mencapai 50 persen dari yang direncanakan. Ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab rendahnya tingkat realisasi pelaksanaan *block grant*, beberapa diantaranya bisa terkait tingginya kebutuhan belanja *block grant* (bisa mencapai 19 persen belanja provinsi) dibanding sumberdaya anggaran yang tersedia, atau karena belum lancarnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan untuk pencairan tahap berikutnya; dll.

Berdasarkan hasil survei terhadap 26 desa, sampai tahun 2010 belum ada desa yang pernah menerima Rp. 100 juta per tahun. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, belum satu pun desa/kelurahan yang disurvei yang pernah mendapat dana bantuan Rp.100 juta. Realisasi dana bantuan yang diperoleh desa pun cukup bervariasi yakni berkisar antara Rp. 20 juta sampai Rp. 45 juta pada tahun 2008; Rp. 25 juta sampai Rp. 50 juta pada tahun 2009; dan Rp. 40 juta sampai Rp. 50 juta pada tahun 2010. Terdapat dua pandangan yang berbeda tentang penyebab rendahnya realisasi dana *block grant* di tingkat desa. Pihak pemerintah provinsi berpandangan masih rendahnya kualitas proposal serta kemampuan desa/kelurahan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu. Sementara dari pihak pemerintah desa/kelurahan berpandangan rumitnya prosedur dan terlambatnya realisasi adalah penyebab utamanya.

Tabel 6.4. Dari 26 Desa Sampel yang Disurvei, Belum Satupun Menerima Dana Rp. 100 Juta per Tahun

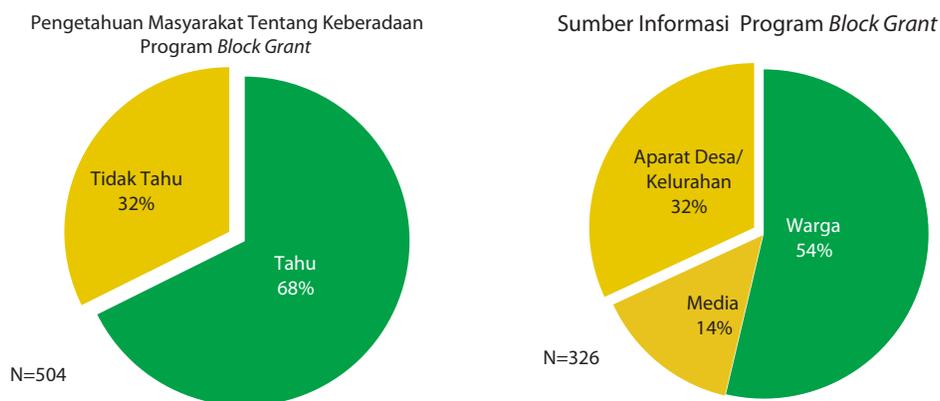
Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tahun 2008 (Rp. Juta)	Tahun 2009 (Rp. Juta)	Tahun 2010 (Rp. Juta)	
Bau-Bau	Betoambari	Wabarobo	40	25		
		Katobengke	40	25	50	
		Sulaa	40	25		
	Bungi	Karingkari	40	25		
		Kalialia	40	25		
		Palabusa	40	25		
	Kokalukuna	Kadolomoko	40			
		Liwutu/Kadolo	40	25		
	Muna	Katobu	Raha III	40		50
			Wamponiki	40	45	40
Laende			40		50	
Lawa		Latugo	40	25	50	
		Lalembaa	45	25	50	
		Wamelai	40			
Napabalano		Tampo	20			
		Pentiro	40		50	
		Napalakuru	40		40	
Kolaka		Kolaka	Watuliandu	40	25	50
	Sabilambo		40		50	
	Laloeha		40	25	50	
	Mowewe	Horodopi	40	25	50	
		Puosu	45	25	50	
		Lapangisi	40	25	50	
	Lambandia	Pomburea	40	25	50	
		Aere	25	25	40	
		Penangoosi	40	50	50	

Sumber: Diolah dari Hasil Survei *Block Grant*, Universitas Haluoleo, 2011.

6.4. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang Program *Block Grant*

Program *Block Grant* sudah diketahui sebagian besar masyarakat melalui informasi dari mulut ke mulut. Dari 650 responden yang tersebar di 26 desa/kelurahan di 3 kabupaten, sebanyak 504 responden menjawab pertanyaan survei. Dari 504 responden tersebut, 68 persen (atau sebanyak 342 responden) mengetahui keberadaan program dana *block grant* di desa/kelurahan tempat mereka tinggal. Dari responden yang mengetahui, 326 responden menyebutkan sumber informasinya, sementara sisanya tidak. Dari 326 responden yang menyebutkan sumber informasinya, lebih dari setengahnya menyatakan mengetahui dana *block grant* dari sesama warga (informasi dari mulut ke mulut), sementara 32 persen responden memperoleh informasi langsung dari pemerintah desa/kelurahan melalui undangan/sosialisasi, dan hanya 14 persen yang memperoleh informasi dari media. Pemerintah desa/kelurahan terlihat cukup proaktif dalam mensosialisasikan program *block grant* yang ditunjukkan dengan 32 persen responden yang mengaku memperoleh informasi langsung dari desa/kelurahan. Tingginya pengetahuan masyarakat tentang program *block grant* merupakan tantangan bagi pemerintah provinsi untuk merealisasikan program tersebut sesuai dengan yang direncanakan (Lihat Gambar 6.3).

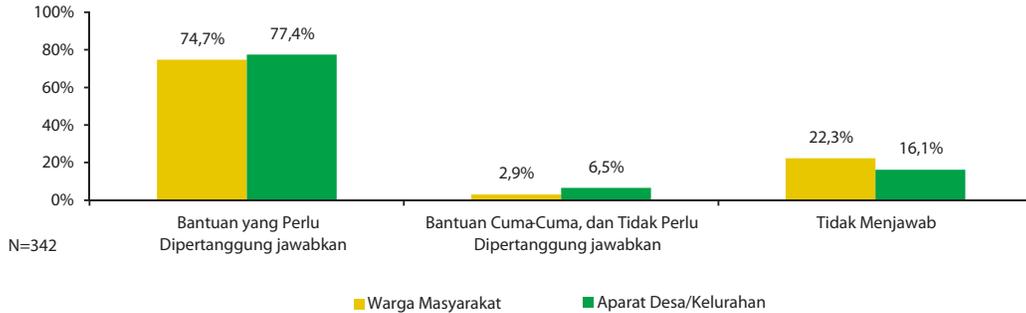
Gambar 6.3. Sebagian Besar Responden Mengetahui Program *Block Grant*



Sumber: Diolah dari Hasil Survei *Block Grant*, Universitas Haluoleo, 2011.

Adanya informasi yang cukup membawa dampak positif terhadap pemahaman masyarakat yang baik tentang *block grant*. Sebanyak 74,7 persen responden masyarakat memahami bahwa dana *block grant* adalah bantuan yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan dan perlu dipertanggungjawabkan kepada pemerintah provinsi sebagai pemberi bantuan. Hanya 3 persen responden masyarakat yang mengatakan dana *block grant* adalah bantuan cuma-cuma dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Tingginya kesadaran masyarakat menunjukkan adanya informasi yang benar yang diterima masyarakat. Dari sisi aparat desa/kelurahan, persentase responden yang memiliki persepsi *block grant* sebagai bantuan yang perlu dipertanggungjawabkan juga cukup tinggi (77,4 persen). Namun demikian, masih terdapat 6,5 persen aparat desa/kelurahan yang menganggap program *block grant* tidak perlu dipertanggungjawabkan. Untuk ukuran aparat, angka 6,5 persen merupakan angka yang cukup tinggi, mengingat pengelolaan dan pertanggungjawaban dana *block grant* sebagian besar ada di tangan aparat desa/kelurahan.

Gambar 6.4. Responden yang Memahami Dengan Benar Program Block Grant Cukup Tinggi



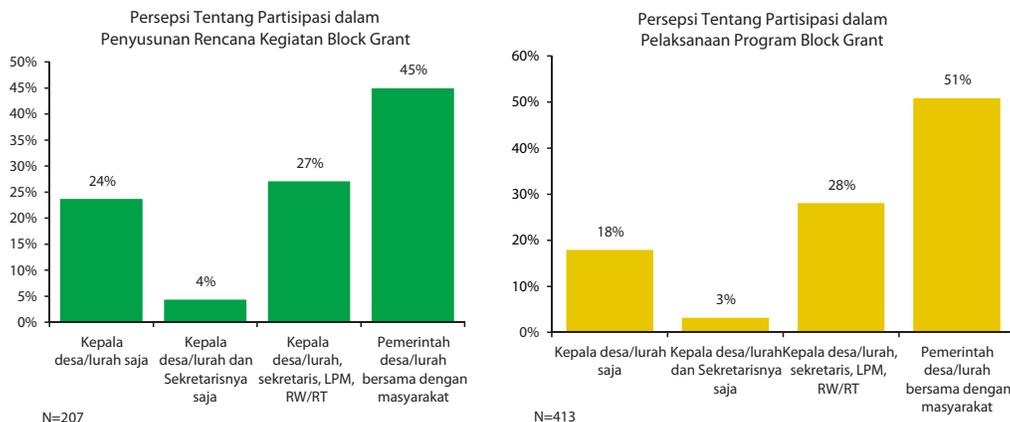
Sumber: Diolah dari Hasil Survei *Block Grant*, Universitas Haluoleo, 2011.

6.5. Keterlibatan Masyarakat dalam Program *Block Grant*.

Persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan *block grant* cukup baik. Dari 342 responden yang mengetahui keberadaan program *block grant*, hanya 207 responden yang memberi jawaban tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan kegiatan *block grant*. Dari 207 responden yang menjawab, sebanyak 45 persen memastikan bahwa rencana kegiatan *block grant* disusun oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan masyarakat; 27 persen menjawab rencana kegiatan *block grant* hanya disusun oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan LPM, sementara 24 persen menjawab disusun oleh aparat desa/kelurahan saja, atau bersama sekretaris-nya saja. Persepsi responden yang berbeda-beda secara tidak langsung menunjukkan adanya variasi antar desa/kelurahan dalam proses penyusunan rencana kegiatan *block grant*.

Berbeda dengan pada tahap penyusunan rencana, pada tahap pelaksanaan kegiatan *block grant* relatif lebih banyak responden yang mengetahui proses dan memastikan adanya keterlibatan masyarakat. Dari 342 responden yang memberi jawaban tentang bagaimana proses pelaksanaan *block grant* dilaksanakan, 51 persen memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan *block grant* dilakukan oleh aparat pemerintah desa/kelurahan bersama masyarakat; 28 persen menyatakan hanya melibatkan aparat desa dan LPM; sementara 18 persen menyatakan hanya kepala desa/kelurahan saja atau bersama sekretarisnya. Hasil survei ini setidaknya menunjukkan bahwa : (i) dalam proses pelaksanaan, pengetahuan responden relatif lebih baik dibanding dalam proses penyusunan rencana kegiatan; dan (ii) dalam proses pelaksanaan, lebih dari setengah responden dapat memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

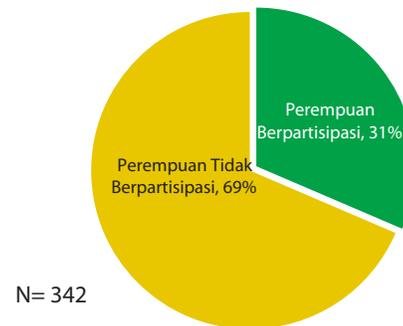
Gambar 6.5. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Lebih Baik Dibanding dalam Penyusunan Rencana



Sumber: Diolah dari Hasil Survei *Block Grant*, Universitas Haluoleo, 2011.

Meskipun tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan relatif baik, namun sebagian besar masih didominasi oleh laki-laki. Dari 342 orang responden yang memberi jawaban tentang kesetaraan gender dalam pelaksanaan *block grant*, 69 persen diantaranya memastikan bahwa perempuan tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan *block grant*, sementara 31 persen memastikan bahwa perempuan berpartisipasi. Variasi ini menunjukkan lebih banyak kegiatan *block grant* yang tidak melibatkan perempuan dibanding yang melibatkan.

Gambar 6.6. Sebagian Besar Pelaksanaan Kegiatan Block Grant Tidak Melibatkan Perempuan

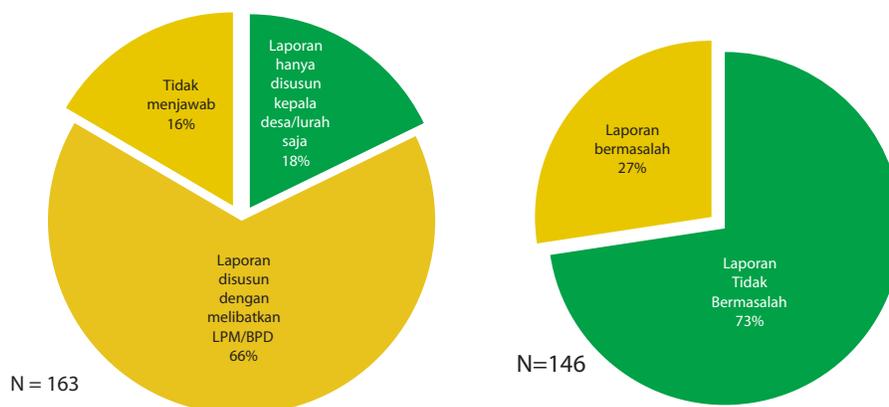


Sumber: Diolah dari Hasil Survei *Block Grant*, Universitas Haluoleo, 2011.

Sebagian besar responden dapat memastikan bahwa penyusunan laporan kegiatan dilakukan bersama LPM/BPD, namun sebagian besar responden tidak tahu bagaimana status dari laporan tersebut. Dari 342 responden yang mengetahui keberadaan dana *block grant*, 66 persen memastikan bahwa laporan kegiatan *block grant* dilakukan dengan melibatkan LPM/BPD. Bentuk keterlibatan LPM/BPD diperkirakan bervariasi mulai dari hanya terlibat dalam proses konsultasi laporan sampai terlibat langsung dalam penyusunan laporan. Sementara itu 18 responden menjawab bahwa laporan hanya disusun oleh kepala desa/lurah, dan sebanyak 16 persen tidak menjawab.

Dari 342 responden yang mengetahui keberadaan dana *block grant*, hanya 146 responden (kurang dari setengahnya) yang mengetahui secara pasti apakah laporan tersebut bermasalah atau tidak. Artinya sebagian besar responden tidak tahu tentang status dari laporan kegiatan *block grant*. Meskipun demikian, dari 146 responden yang menjawab, sebanyak 73 persen mengatakan bahwa laporan *block grant* tidak bermasalah, dan hanya 27 persen yang menyatakan bermasalah. Beberapa hal yang menjadi penyebab adanya masalah adalah laporan tidak melibatkan LPM/BPD, laporan hanya disusun oleh kepala desa/lurah, format laporan berubah-ubah, dan laporan tidak dapat dimengerti.

Gambar 6.7. Sebagian Besar Responden Memastikan Penyusunan Laporan Kegiatan Melibatkan LPM/BPD

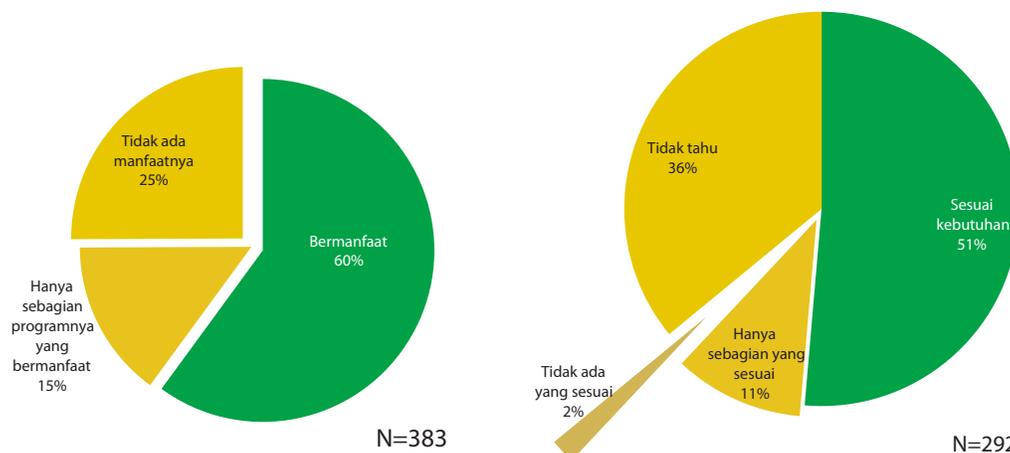


Sumber: Diolah dari Hasil Survei *Block Grant*, Universitas Haluoleo, 2011.

6.6. Manfaat dan Kesesuaian Program *Block Grant* dengan Kebutuhan Masyarakat

Secara umum, persepsi responden terhadap manfaat dan kesesuaian program *block grant* dengan kebutuhan masyarakat cukup baik. Dari 342 responden (sebagian responden tidak dapat memberikan penilaian tentang manfaat dan kesesuaian program dan kebutuhan mereka), sebanyak 60 persen responden berpendapat bahwa seluruh kegiatan *block grant* cukup bermanfaat, dan hanya 25 persen yang mengatakan tidak bermanfaat, sementara 15 persen sisanya menjawab hanya sebagian yang bermanfaat. Selain itu, ketika ditanya apakah kegiatan-kegiatan *block grant* sesuai kebutuhan masyarakat, hanya 292 responden yang bersedia menjawab, dan sebanyak 36 persen diantaranya menjawab tidak tahu; lebih dari setengahnya menjawab sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 11 persen menjawab hanya sebagian yang sesuai; dan hanya 2 persen yang menyatakan sama sekali tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Banyaknya responden yang menyatakan bermanfaat di satu sisi, tapi sedikitnya responden yang mampu menjawab kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dapat disebabkan karena sebagian besar responden dapat dengan mudah mengidentifikasi manfaat program bagi dirinya, namun masih kesulitan untuk memastikan manfaat program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam arti luas.

Gambar 6.8. Sebagian Besar Responden Manjawab Program Bermanfaat, tapi Hanya Sebagian Kecil yang Dapat Memastikan Program Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dalam Arti Luas.



Sumber: Diolah dari Hasil Survei *Block Grant*, Universitas Haluoleo, 2011.

Kotak 6.1. Metode Survei

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2011 pada tiga kabupaten yang ditentukan didasarkan pada pertimbangan keterwakilan daerah baik dari aspek administrasi maupun kemajuan pembangunan secara umum. Kota Bau-Bau merupakan perwakilan daerah perkotaan. Sementara Kabupaten Kolaka perwakilan daerah Kabupaten yang relatif lebih maju, sementara Kabupaten Muna sebagai perwakilan wilayah kabupaten yang relatif kurang berkembang secara ekonomi (Lihat Gambar 1.7, Bab I).

Di setiap kabupaten dipilih secara acak (random sampling) tiga kecamatan, dan di setiap kecamatan dipilih tiga desa/kelurahan yang ditentukan berdasarkan jarak jauh, menengah, dan terdekat dengan ibukota kecamatan. Asumsinya, semakin jauh-dekat dari pusat pemerintahan menentukan kualitas informasi yang diterima responden. Responden penelitian terdiri dari: Kepala Desa/Lurah, sekretaris Desa/Lurah, Ketua LPM/BPD, Sekretaris/LPM, Bendahara LPM, Kepala RT/RW dan masyarakat. Berdasarkan metode penentuan sampel ini, maka total desa/kelurahan yang disurvei sebanyak 27 desa/kelurahan sampel. Karena salah satu desa tidak memberikan jawaban yang lengkap pada kuesioner, maka dalam analisis hanya menggunakan 26 desa/kelurahan saja. Tiap desa/kelurahan dipilih 25 responden sehingga jumlah responden seluruhnya sebanyak 650 orang.

6.7. Kesimpulan dan Rekomendasi

Belanja transfer bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/desa meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir. Peran belanja transfer dalam kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara semakin penting. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan signifikan proporsi belanja bantuan keuangan terhadap total belanja pemerintah provinsi dalam dua tahun terakhir. Informasi belanja transfer perlu disempurnakan dan disosialisasikan, terutama karena belanja transfer erat kaitannya dengan program-program unggulan pemerintah provinsi seperti *block grant* ke desa, pembebasan biaya operasional sekolah, beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis. Informasi belanja transfer diperbaiki tidak hanya berdasarkan jenis belanja (bantuan keuangan, bagi hasil, subsidi, hibah, bantuan sosial) melainkan juga berdasarkan keterkaitannya dengan sektor (pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, dll.).

Plafon alokasi bantuan keuangan ke pemerintah desa/kelurahan perlu diperbesar, prosedur lebih disederhanakan, serta pembinaan, monitoring dan evaluasi dana *block grant* perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil survei, tingkat pengetahuan masyarakat tentang program *block grant* cukup tinggi; tingkat pemahaman masyarakat juga sudah baik; partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari *block grant* sudah mulai terjadi di beberapa desa; serta persepsi masyarakat tentang manfaat *block grant* sudah positif. Kondisi ini merupakan prasyarat penting bagi suksesnya sebuah program. Namun demikian, komitmen pemerintah provinsi untuk merealisasikan program *block grant* secara penuh perlu ditingkatkan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah : (i) menambah plafon untuk dana bantuan keuangan pemerintah desa sehingga dapat konsisten dengan yang direncanakan (Rp. 100 juta per desa per tahun); (ii) meningkatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan yang akan didanai *block grant*; (iii) terus mendorong keterlibatan masyarakat terutama dalam proses penyusunan dan monitoring pelaksanaan kegiatan *block grant*; (iv) meningkatkan pembinaan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan *block grant* sehingga dapat memperlancar proses pencairan dana dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pendampingan realisasi *block grant* di tingkat desa perlu dilakukan misalnya melalui penyediaan fasilitator pendamping *block grant* untuk desa/kelurahan.



Bab 7

Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

7.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesenjangan gender masih merupakan persoalan bagi Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh sebab itu pemerintah daerah telah menetapkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu prioritas utama pembangunan, melalui penyelarasan program pusat dengan daerah. Kesenjangan gender ini bisa dilihat dengan membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang memiliki indikator sama. IPM Sulawesi Tenggara tahun 2009 meningkat menjadi 69,52 dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 69. Namun IPG pada tahun 2009 yang sebesar 62,89 (lebih rendah dibanding dengan IPM), menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian pembangunan yang dirasa oleh laki-laki dan perempuan di Sulawesi Tenggara.

Tabel 7.1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2009

Kode	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka		Angka		Rata-Rata		Pengeluaran		IPM	
		Harapan		Huruf		Lama		Perkapita			
		Hidup (Tahun)		Melek (Persen)		Sekolah (Tahun)		Disesuaikan			
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	Sulawesi Tenggara	67,40	67,6	91,42	91,51	7,74	7,9	611,72	615,29	69,00	69,52
1	Buton	67,89	68,23	85,72	85,75	6,27	6,52	623,50	624,09	67,82	68,24
2	Muna	65,79	65,88	87,59	87,59	7,30	7,35	606,14	611,30	66,49	67,03
3	Konawe/Kab.Kendari	66,74	67,01	94,6	94,60	7,98	8,01	601,40	606,24	68,72	69,27
4	Kolaka	66,61	66,87	93,14	93,14	7,70	7,71	626,63	629,26	70,06	70,41
5	Konawe Selatan	67,31	67,47	94,10	94,10	7,60	7,62	604,15	607,83	68,86	69,24
6	Bombana	67,30	67,51	88,2	88,20	6,23	6,59	598,00	599,84	66,05	66,63
7	Wakatobi	67,83	67,95	88,8	88,80	6,52	6,85	589,39	593,12	66,03	66,70
8	Kolaka Utara	65,27	65,41	93,02	93,02	7,4	7,51	611,61	607,2	67,91	68,50
9	Konawe Utara	67,64	66,96	86,50	86,50	7,59	7,87	601,82	602,44	67,16	67,62
10	Buton Utara	66,47	66,76	93,80	93,80	7,00	7,05	598,33	602,70	67,49	67,97
11	Kota Kendari	68,95	69,02	98,37	98,37	11,01	11,13	628,14	629,21	75,09	75,31
12	Kota Bau-Bau	69,79	70,09	95,16	95,16	9,55	9,75	607,11	612,11	72,14	72,87

Sumber: Ketimpangan Gender Dalam Pencapaian Kualitas Hidup Manusia, 2010.

Tiga dari empat indikator penentu Indeks Pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian pembangunan yang diterima perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Indikator-indikator itu adalah indikator Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah serta Upah Buruh, (Tabel 7.2).

Tabel 7.2. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2009

Kode	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)		IPG	
		L	P	L	P	L	P	L	P	2009	2008
	Sulawesi Tenggara	65,68	69,64	95,45	88,28	8,35	7,49	66,23	33,77	62,89	62,48
1	Buton	66,30	70,28	92,69	81,95	7,39	5,85	62,73	37,27	58,94	58,63
2	Muna	64,00	67,88	96,58	82,87	8,24	6,87	63,25	36,75	60,69	60,01
3	Konawe/Kab.Kendari	65,10	69,03	97,52	91,52	8,95	7,81	59,33	40,67	65,14	65,11
4	Kolaka	64,96	68,89	94,94	92,34	8,49	7,11	73,42	26,58	56,15	55,82
5	konawe Selatan	65,55	69,50	96,93	91,61	7,97	7,5	73,41	26,59	60,63	60,37
6	Bombana	65,59	69,54	92,73	86,49	7,11	6,54	65,57	34,43	55,84	55,56
7	Wakatobi	66,02	69,99	94,33	86,49	7,50	6,22	66,12	33,88	61,90	60,31
8	Kolaka Utara	63,54	67,40	95,82	86,43	7,90	7,55	72,44	27,56	57,89	57,27
9	Konawe Utara	64,86	68,78	88,10	85,98	7,97	6,47	62,08	37,92	63,40	62,75
10	Buton Utara	66,03	70,00	96,07	85,26	8,18	7,00	67,38	32,62	65,50	65,30
11	Kota Kendari	67,1	71,06	99,42	97,89	11,3	10,98	67,02	32,98	70,38	70,28
12	Kota Bau-Bau	68,17	72,12	97,94	93,03	10,27	9,29	72,03	27,97	62,90	62,30

Sumber: Ketimpangan Gender Dalam Pencapaian Kualitas Hidup Manusia, 2010.

Kesenjangan terbesar pada indikator Angka Melek Huruf di tahun 2009 terjadi di Muna, dengan perbedaan hingga 13,71 persen. Berada di urutan kedua, ketiga dan keempat adalah Buton Utara, Buton dan Kolaka Utara, masing-masing sebesar 10,81 persen, 10,74 persen dan 9,39 persen. Sementara kesenjangan paling kecil, terjadi di Kota Kendari, sebesar 1,53 persen. Hal ini menunjukkan warga kota mendapat kesempatan lebih besar untuk bersekolah, baik dari segi akses maupun fasilitas. Sementara itu data Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan kesenjangan angka melek huruf sebesar 7,17 persen antara laki-laki dan perempuan, di tahun yang sama; yang berarti angka rata-rata provinsi masih berada diatas angka kesenjangan nasional sebesar 6,28 persen. Sehingga pemerataan pendidikan dan pembenahan alokasi belanja program pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan.

Ketimpangan angka rata-rata lama sekolah antara murid laki-laki dengan perempuan paling besar terjadi di Buton, sebesar 1,54 tahun, diikuti Konawe Utara 1,5. Sementara Kolaka, Muna dan Wakatobi berada di urutan tiga, empat dan lima, dengan angka masing-masing sebesar 1,38, 1,37 dan 1,28. Sementara itu kesenjangan terendah ada pada Kota Kendari dengan nilai 0,32. Hal ini menunjukkan anak-anak perempuan di kabupaten pemekaran dan kabupaten terpencil mendapat lebih sedikit kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Sementara itu angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara berada sedikit lebih rendah dibanding dengan angka nasional, yaitu 0,86 dan 0,89.

Dari segi ekonomi, upah buruh dibawah mandor non pertanian untuk perempuan juga lebih rendah dibandingkan dengan upah yang diterima buruh laki-laki, dengan perbedaan terbesar terjadi di Kolaka sebanyak 46,84. Sementara Konawe Selatan, Kolaka Utara, dan Kota Bau-Bau berada di urutan berikutnya dengan perbedaan sebesar 46,82, 44,88, dan 44,06. Secara umum, kondisi perbedaan upah yang diterima buruh laki-laki dengan perempuan terlihat merata di seluruh Indonesia. Hal ini patut mendapat perhatian khusus pemerintah dalam pengambilan kebijakan upah buruh dan penentuan UMR daerah, sehingga buruh laki-laki dan perempuan bisa mendapat hak yang sama atas pekerjaan yang dilakukannya.

Kotak 7. 1. Capaian Indikator-Indikator MGDs

Peningkatan derajat kesehatan perempuan di Sulawesi Tenggara menunjukkan perbaikan, namun tantangan pada sektor kesehatan masih besar. Angka kematian bayi dan kematian anak sebelum usia lima tahun masih tetap besar yaitu 97 per 1.000 kelahiran. Oleh sebab itu untuk mencapai target 23 anak/bayi mati per 1.000 kelahiran pada tahun 2015 masih merupakan tantangan berat bagi pemerintah provinsi. Secara khusus, perbaikan kinerja kesehatan baru mencapai sedikit kemajuan dalam mengurangi angka kematian ibu hamil. Demikian juga prevalensi balita kekurangan gizi masih berkisar 42 persen sehingga target 15,5 persen tahun 2015 masih merupakan pekerjaan yang berat. Disamping itu perbaikan gizi anak pada anak dan balita masih pada tingkat disparitas kesehatan secara geografis, sedangkan jika dilihat secara demografi berdasarkan beberapa studi yang dilakukan disparitas masih terjadi antara balita perempuan dan laki-laki. Hal ini tentunya masih terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan perempuan terutama di pedesaan dibandingkan dengan diperkotaan, disisi lain kecenderungan tingkat pernikahan pada usia muda semakin meningkat di daerah pedesaan. Beberapa studi menginformasikan faktor ekonomi bagi perempuan mendominasi terjadinya pernikahan usia dini bagi perempuan di pedesaan. Tantangan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pemberdayaan perempuan pada sektor kesehatan masih memerlukan perbaikan kinerja pada sejumlah bidang penting. Jika hal ini tidak serius dilakukan sebagai akibatnya, kemungkinan tidak dapat mencapai beberapa tujuan pembangunan milenium (MDG) yang berkaitan dengan kesehatan. Upaya menurunkan angka kematian ibu setengah dari data saat ini yaitu sebanyak 204 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2010 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup sebagaimana yang ditargetkan tahun 2015 menuntut kerja keras yang sistematis pada pemberdayaan perempuan di sektor kesehatan.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan penurunan, dari 56,34 pada tahun 2008 menjadi 55,56 pada tahun 2009. Hal ini bertolak belakang dengan IDG di tingkat kabupaten/kota yang justru mengalami kenaikan. Dalam hal keterlibatan perempuan di parlemen, Kota Kendari mencapai angka tertinggi sebesar 30 persen, atau lebih tinggi 10 persen dari angka capaian provinsi. Sementara Buton Utara memiliki angka keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional tertinggi, sebesar 49,81 persen, juga lebih tinggi dari capaian provinsi sebesar 34,79 persen. Selain itu, Konawe menduduki tempat teratas dalam hal kontribusi perempuan dalam pendapatan, yaitu sebesar 40,67 persen, lebih tinggi dari capaian provinsi sebesar 33,77 persen.

Meski keterlibatan perempuan di parlemen dan tenaga profesional terus meningkat, namun keterlibatannya dilingkup pemerintahan Sulawesi Tenggara berdasarkan golongan dan kepengkatan masih rendah. Persentase perempuan pada golongan IV sebesar 44 persen, sementara pada golongan III dan golongan II masing-masing 30 persen. Dalam hal jabatan yang tersedia, lebih dari 65 persen didominasi oleh PNS laki-laki. Namun demikian kondisi seperti ini sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan beberapa kebijakan, sehingga posisi perempuan secara bertahap akan lebih baik.

Tabel 7.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara 2008-2009

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan perempuan di parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja	Indeks Pemberdayaan Gender	
		(Persen)	(Persen)	(Persen)	2009	2008
	Sulawesi Tenggara	20.0	34.79	33.77	55.56	56.34
1	Buton	20.0	28.99	37.27	49.67	48.49
2	Muna	10.0	41.16	36.75	62.92	62.19
3	Konawe/Kab.Kendari	13.3	31.85	40.67	59.36	58.61
4	Kolaka	16.7	30.92	26.58	51.53	50.86
5	Konawe Selatan	13.3	42.33	26.59	58.78	57.83
6	Bombana	12.0	34.42	34.43	51.88	51.70

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan perempuan di parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja	Indeks Pemberdayaan Gender	
		(Persen)	(Persen)	(Persen)	2009	2008
7	Wakatobi	08.0	29.03	33.88	45.54	45.37
8	Kolaka Utara	10.0	41.12	27.56	54.25	50.29
9	Konawe Utara	00.0	46.62	37.92	48.72	47.95
10	Buton Utara	13.0	49.81	32.62	49.18	48.05
11	Kota Kendari	30.0	30.66	32.98	65.52	64.94
12	Kota Bau-Bau	12.0	25.35	27.97	47.26	46.58

Sumber: Ketimpangan Gender Dalam Pencapaian Kualitas Hidup Manusia, 2010.

Kotak 7. 2 Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi

Pemberdayaan gender dalam pengambilan keputusan pada jenjang pendidikan tinggi di Sulawesi Tenggara masih merupakan suatu persoalan, walaupun perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dan strategis terutama dalam menyiapkan landasan dasar gender itu sendiri, yaitu sebagai lembaga pencetak tenaga kependidikan juga merupakan lembaga pelaksana riset (sebagai *Body of Knowledge*) bagi gender. Untuk jabatan fungsional laki-laki mendominasi hampir pada semua jenjang jabatan fungsional pada seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah ini. Rektor/Direktur/Ketua L(92%) P (8%), PR/ASDIR I L(93%) P(7%), PR/ASDIR II L(97%), P(3%) PR/ASDIR III L(99%) P(1%) PR/ASDIR IV L(97%) P (3%) PR V L(89%) P (11%). Jika dibandingkan dengan propinsi lain di Kawasan Timur Indonesia maka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada indikator tersebut termasuk terendah (4%). Beberapa hasil studi menunjukkan pengelolaan birokrasi pada pendidikan yang lebih tinggi faktor psikologi dan sosial budayanya yaitu kompleksitas dari persoalan *interest*, egoisme, superioritas, kepentingan budaya baik pada individu, maupun kelompok manusia, yang mewarnai persaingan karier dan profesi, merupakan faktor penentu kesenjangan. Faktor struktural dan kultural tersebut telah mengakibatkan *bias against female*

7.2. Isu Kelembagaan Gender

Meskipun pengarusutamaan gender telah secara tegas dinyatakan sebagai prioritas pembangunan Sulawesi Tenggara, namun informasi tentang pengarusutamaan gender belum sepenuhnya dipahami oleh semua pengelola pembangunan; dengan kata lain pengarusutamaan gender belum melembaga. Padahal kelembagaan gender merupakan komponen kunci untuk mewujudkan komitmen politik pemerintah tentang kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan dalam pencapaian *Good Governance* di Sulawesi Tenggara, dengan sasaran terciptanya *gender equality, equity, efficacy* dan *women's empowerment* di segala bidang.

Kelembagaan gender diperlukan pada dua level, yaitu level individual aparat pemerintah dan level organisasi atau institusi. Pada level individual, kelembagaan gender memastikan kemampuan aparat pemerintah pada pengetahuan, keterampilan pelaksanaan fungsi, kapasitas, kompetensi dan etika kerja yang responsif gender. Sedangkan pada level organisasi dan institusi adalah memastikan berbagai produk hukum dan produk kebijakan dapat memperkuat akses perempuan di masa depan yang berkelanjutan dan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki. Kelembagaan gender memastikan seluruh sistem yang diusulkan menggunakan data/lensa gender dan memperkuat agenda pengarusutamaan gender, memastikan seluruh pedoman teknis tanggap terhadap isu gender dengan azas efisiensi dan kompetensi, melalui advokasi terhadap penyusunan, Perda, SK, Juknis, maupun Juklak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Gender di Daerah, penguatan kapasitas kelembagaan gender dilakukan melalui

Pokja Gender. Pokja gender memiliki fungsi inisiasi, dinamisasi dan penjamin mutu bagi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan berwawasan gender serta berbagai program pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan. Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, serta tersedianya aturan, kelembagaan dan mekanisme yang mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender tercermin dalam *Position Paper* dan Rencana Aksi Daerah (RAD) pembangunan yang responsif gender. Berikut adalah fungsi-fungsi Pokja Gender:

1. Fungsi inisiasi, Pokja Gender menyusun dan mengajukan gagasan-gagasan, rencana belanja kegiatan/program yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan dan implementasi program pembangunan yang berwawasan kesetaraan dan keadilan gender (*Gender Budgeting*) yang berorientasi pada produktivitas pemerataan, pemberdayaan, berkelanjutan.
2. Fungsi dinamisasi Pokja Gender melakukan diskusi, audiensi, analisis data dan pembahasan kebijakan dan program bersama pihak yang terkait dengan pengambilan keputusan serta pengelola program pembangunan.
3. Sebagai penjamin mutu Pokja Gender melakukan monitoring, supervisi, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pengarusutamaan gender.

Kotak 7.3. Anggaran Responsif Gender

Anggaran yang responsif gender dalam penguatan kelembagaan meliputi: 1. belanja publik untuk program pengembangan mekanisme aturan/aspek legal dll. termasuk sistem pendukung pemantauan pelaksanaan kegiatan gender (kegiatan penyusunan pedoman, sistem informasi/software) 2. belanja publik untuk program pengembangan sumber daya (penyiapan database gender melalui penelitian), serta 3. belanja publik untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang melahirkan kegiatan pelatihan, kursus, atau diklat dan non diklat.

Pokja Gender di Sulawesi Tenggara sudah terbentuk pada hampir seluruh kabupaten/kota pada tahun 2010. Namun demikian kedudukan Pokja sebagai organisasi non struktural baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota belum berjalan secara optimal. Salah satu indikasi belum optimalnya kelembagaan gender di Sulawesi Tenggara adalah terbatasnya data terpilah gender dan statistik gender secara regular baik propinsi maupun daerah. Hal tersebut tercermin dari kurangnya alokasi belanja pemerintah untuk kegiatan Pokja yaitu :

1. Penyusunan data statistik/profil/ lensa gender,
2. Sosialisasi pengarusutamaan gender
3. Pelatihan PUG untuk *stakeholder*
4. Pelatihan PUG bagi perencana kebijakan (*policy maker*) Eselon II
5. Pelatihan PUG bagi perencana program (*Technical planner*) Eselon III
6. Pelatihan PUG bagi pelaksana kegiatan (Eselon IV)
7. Penelitian tentang isu gender di daerah.
8. Pengembangan Aturan Kelembagaan (Perda, Pergub, Perwali dll.)

Salah satu penyebab belum optimalnya kelembagaan gender di Sulawesi Tenggara adalah pergeseran/mutasi jabatan yang mengakibatkan sumber daya yang memiliki ketrampilan tersebut tidak dapat menerapkan ilmunya. Kasus ini hampir terjadi pada seluruh kabupaten kota termasuk di tingkat provinsi. Akibatnya, keberhasilan pengarusutamaan gender di daerah berjalan lambat sehingga berimplikasi pada rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) daerah.

Bila menelusuri anggaran dan pengeluaran pemerintah provinsi (pada bab-bab sebelumnya), maka terlihat bahwa anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum responsif gender. *Gender budgeting* sebagai sebuah pendekatan penyusunan anggaran yang dapat melihat jarak antara kebijakan dan sumberdaya serta pendekatan yang dapat memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender belum maksimal dijalani oleh pemerintah. *Gender budgeting*

masih dipahami sebagai upaya mengeluarkan jumlah uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan laki-laki atau perempuan, dan belum dipahami sebagai upaya apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan laki-laki dan perempuan.

7.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perencanaan anggaran yang responsif gender (gender budgeting) belum terlihat disemua lini, padahal pemerintah provinsi sudah berkomitmen terhadap pengarusutamaan gender, seperti tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi tahun 2008-2013. Untuk itu kelembagaan gender perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, sehingga kebijakan dan program yang dilahirkan di kemudian hari sudah berpedoman pada tercukupinya kebutuhan laki-laki dan perempuan di wilayah ini.

Meski seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara telah mengalokasikan belanja pada upaya pemerataan gender (seperti terlihat pada grafik di bab 4), namun masih diperlukan program-program yang spesifik mengarah pada penguatan kelembagaan gender. Diantara program yang diperlukan adalah: penguatan kerangka strategis seperti pengembangan aturan, kelembagaan dan mekanisme (pengembangan aturan/aspek legal dll.), termasuk sistim pendukung pemantauan pelaksanaan kegiatan gender (seperti sistem informasi/*software* yang dibutuhkan/pedoman/standar/panduan pelaksanaan kegiatan gender/model-model yang diperlukan) bekerjasama dengan LSM setempat.

Rendahnya ketersediaan *data base gender* atau data terpilah menurut jenis kelamin turut andil pada lambannya upaya pembuatan anggaran yang responsif gender yang dibutuhkan untuk memastikan kebutuhan laki-laki dan perempuan di wilayah ini terpenuhi. Padahal melalui pengumpulan, penyusunan serta penyebarluasan data dan informasi yang terpilah diharapkan tersusunnya data base gender yang bisa diakses banyak pihak sekaligus dijadikan landasan dalam rangka mendorong lahirnya kebijakan, program, kegiatan dan proyek yang responsif gender. Untuk mendukung hal ini, diperlukan penguatan *database gender*, penelitian, serta komunikasi, informasi dan edukasi dalam bentuk *gender kit* atau website yang juga dapat diakses masyarakat.

Selain membutuhkan *data base gender*, pengembangan sumber daya terkait dengan anggaran responsif gender juga dibutuhkan. Pelatihan atau *capacity building* seperti pengembangan ekonomi perempuan, program diklat serta pelatihan-pelatihan eksekutif dan teknis untuk penentu kebijakan (Eselon II), penanggung jawab program (Eselon III) dan pelaksana program (Eselon IV), akan sangat berguna. Namun proses ini perlu disinkronkan dengan jadwal mutasi jabatan, sehingga hasilnya optimal.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (2006). "Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2006". BPS, Kendari, diakses melalui <http://sultra.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (2007). "Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2007". BPS, Kendari, diakses melalui <http://sultra.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (2008). "Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2008". BPS, Kendari, diakses melalui <http://sultra.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (2009). "Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2009". BPS, Kendari, diakses melalui <http://sultra.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (2010). "Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2010". BPS, Kendari, diakses melalui <http://sultra.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (2011). "Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2010". BPS, Kendari, diakses melalui <http://sultra.bps.go.id/>
- Badan Pemeriksa Keuangan (2010). "Ikhtisal Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011". BPK, Jakarta.
- Jurnal Nasional (2011). "Penerimaan Pajak Sultra Rp. 256 Miliar" diakses melalui <http://nasional.jurnas.com/halaman/15/2011-07-14/176227> pada 17 November 2011. Kendari
- Berita Kendari (2011). "PAD Sultra dari Sektor Pertambangan Capai Rp. 63 M" diakses melalui <http://beritakendari.com/pad-sultra-dari-sektor-pertambangan-capai-rp-63-m.html> pada 17 november 2011. Kendari
- Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (2010). "Dilema Infrastruktur Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara". BI, Kendari.
- Swa Mandiri (2011). "Problematika Penyerapan Anggaran di Daerah" diakses melalui <http://swamandiri.wordpress.com/2011/02/12/problematika-penyerapan-anggaran-di-daerah/> pada 30 Desember 2011. Jakarta
- Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (2009). "Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV-2009". BI, Kendari
- Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (2011). "Statistik Pendidikan Kemendiknas dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara". Kendari
- Badan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (2008). "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2008 – 2013.". Kendari

Lampiran

Lampiran A. Apakah yang Dimaksud Dengan Analisis Belanja Pemerintah Sulawesi Tenggara?

Melihat pengalaman dari pelaksanaan Analisis Belanja Pemerintah dan Penyelarasan Kemampuan (PEACH) di berbagai daerah di kawasan timur Indonesia, Pemerintah Sulawesi Tenggara (Sultra) berinisiatif untuk melakukan program serupa.

Pengalaman PEACH di provinsi lain menunjukkan bahwa analisis partisipatif atas belanja pemerintah merupakan titik awal yang baik untuk memperbaiki kualitas pengelolaan belanja pemerintah agar dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawab yang baru diperoleh pemerintah daerah di Indonesia yang mulai terdesentralisasi.

Untuk menanggapi kebutuhan tersebut, Bank Dunia bekerja sama dengan tim peneliti yang diorganisir oleh Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo melakukan analisis menyeluruh atas pengelolaan belanja pemerintah, yang dihubungkan dengan suatu program kegiatan untuk memperkuat kapasitas pemerintah-pemerintah daerah. Tujuan yang diharapkan dari PEACH Sultra adalah perbaikan alokasi sumber daya anggaran yang mengarah pada penyediaan barang umum yang lebih baik di tingkat daerah yang disesuaikan dengan preferensi dan pertimbangan di tingkat daerah. Hal tersebut dapat dicapai dengan keterlibatan para pengambil keputusan di tingkat daerah serta para pemangku kepentingan lainnya dalam pengidentifikasian prioritas belanja pemerintah dan pengelolaan keuangan. Tujuan utama dari komponen PEA adalah:

- (i) memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan belanja pemerintah di suatu provinsi khususnya sehubungan dengan proses perencanaan dan penganggaran partisipatif dan penyediaan layanan dasar.
- (ii) memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang reformasi kepegawaian negeri sipil yang saat ini sedang dijalankan, khususnya sehubungan dengan pelaksanaan tunjangan kesejahteraan Daerah;
- (iii) mengembangkan strategi-strategi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Sulawesi Tenggara untuk mencapai layanan umum dan penanaman modal umum yang lebih baik agar dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
- (iv) membentuk sistem yang lebih baik untuk menganalisis dan mengawasi anggaran daerah. Sistem tersebut dapat berupa:
 - membentuk jaringan rekan imbalan dari universitas-universitas lokal di Sulawesi Tenggara dan instansi pemerintah daerah yang akan memimpin pelaksanaan PEACH Sulawesi Tenggara dan dengan demikian akan membangun kapasitas untuk dapat melaksanakan analisis belanja pemerintah secara mandiri di masa mendatang;
 - memberikan bantuan teknis/peningkatan kapasitas pada jaringan ini agar dapat melakukan analisis serupa di masa mendatang.

Lampiran B. Catatan Metodologi

B.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah anggaran tahunan yang dialokasikan dan/atau dibelanjakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran tersebut terdiri dari dua kategori: rencana (untuk disetujui oleh DPR) dan realisasi (pengeluaran yang sebenarnya atau laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah).

Rentang data dari tahun 2005 hingga 2009, diperoleh dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Kementerian keuangan memberikan data sebagai perbandingan skala nasional.

B.2. Kerangka kerja Pengelolaan Keuangan Publik (PFM): Bidang Strategis, Hasil, dan Indikator

Bank Dunia dan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Indonesia akan menilai kapasitas pengelolaan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan kerangka kerja PFM. Kerangka kerja tersebut terbagi dalam sembilan bidang yang menjadi kunci pengelolaan keuangan pemerintah oleh pemerintah kabupaten/kota:

- (1) Kerangka Peraturan Perundangan Daerah,
- (2) Perencanaan dan Penganggaran,
- (3) Pengelolaan Kas,
- (4) Pengadaan,
- (5) Akuntansi dan Pelaporan,
- (6) Pengawasan Internal,
- (7) Hutang dan Investasi Publik,
- (8) Pengelolaan Aset, dan
- (9) Audit dan Pengawasan Eksternal.

Setiap bidang strategis dibagi menjadi antara 1 sampai 5 hasil, dan daftar indikator dicantumkan untuk setiap hasil. Adapun hasil mewakili pencapaian yang dikehendaki dalam setiap bidang strategis, dan indikator digunakan untuk menilai bagaimana kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam bidang tersebut. Perlu dicatat bahwa praktik-praktik internasional yang terbaik belum diterapkan untuk menetapkan dasar-dasar bagi hasil-hasil tersebut karena pada kenyataannya, jarak antara hasil-hasil tersebut dan kenyataan yang ada saat ini terlalu besar untuk dapat membuahkan hasil yang nyata.

Para responden diminta untuk menjawab “ya” atau “tidak” untuk setiap pertanyaan yang diwakili oleh masing-masing indikator.

Jawaban setuju ditambahkan untuk setiap hasil, dan skor dihitung berdasarkan persentase jawaban “ya”.

Beberapa bidang strategis memiliki indikator lebih banyak daripada bidang-bidang lainnya, sehingga bidang-bidang tersebut memiliki bobot lebih dalam hasil keseluruhan. **Misalnya, perencanaan dan penganggaran mencakup 49 indikator, tetapi hutang dan investasi publik meliputi hanya 8 indikator. Indikator strategis lainnya yang berbobot lebih termasuk pengadaan (41 indikator) dan pengelolaan kas (31 indikator).**

Lokasi survei kerangka kerja PFM diterapkan di Sulawesi Tenggara, dan meliputi pemerintah provinsi dan 12 kabupaten/kota. Universitas Haluoleo dilibatkan dalam penelitian untuk survei tersebut. *Pada akhir tahun 2011, survei PFM telah diadakan di sekitar 75 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.*

Metodologi

Hasil diperoleh melalui wawancara dan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan perwakilan pemerintah daerah dari lembaga terkait. Diskusi-diskusi ini melibatkan Bappeda, Biro Keuangan; DPRD, Dinas Pendapatan Daerah; kantor bendahara daerah; Dinas Pekerjaan Umum; dan Badan Pengawas Pemerintah Daerah. UNTUK menjamin akurasi data, maka setiap jawaban “ya” harus didukung dengan dokumen terkait dan/ atau diperiksa silang dengan responden tambahan.

Interpretasi hasil

Skor diberikan untuk setiap bidang strategis dan lokasi survei, dan skor menyeluruh diberikan untuk setiap lokasi survei. Untuk perbandingan dan evaluasi, skor bidang strategis dapat dinilai sesuai dengan kategori berikut ini. Akan tetapi, interpretasi hasil berisiko menimbulkan subyektivitas, karena hasilnya sangat bergantung pada interpretasi pihak yang mengadakan survei. Saat ini, bank Dunia dan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama untuk memperbaiki survei tersebut, khususnya mencoba memperkecil risiko subyektivitas.

Skor menyeluruh (%)

80–100 sempurna/dapat diterima sepenuhnya
60–79 sangat baik/sangat dapat diterima
40–59 baik/dapat diterima
20–39 sedang/cukup dapat diterima
0–19 kurang/tidak dapat diterima

Lampiran C. Rekapitulasi Isu Utama, Rekomendasi, dan Agenda

Isu Utama	Rekomendasi	Agenda
<p>Ekonomi dan Sosial</p> <p>Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara cukup pesat, namun skala perekonomian Sulawesi Tenggara masih relatif kecil, dan PDRB per kapita Sulawesi Tenggara masih jauh dibawah rata-rata nasional.</p> <p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara relatif rendah dibanding TPT nasional, namun 49 persen penganggur terkonsentrasi di daerah perkotaan</p>	<p>Mempertahankan dan meingkatkan laju pertumbuhan ekonomi riil yang pada tahun 2010 telah mencapai 8,2 persen, melalui :</p> <p>(i) Revitalisasi sektor pertanian yang mengalami perlambatan pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir, terutama pada sub-sektor perkebunan yang sampai tahun 2010 secara riil masih tumbuh negatif.</p> <p>(ii) Revitalisasi pertanian perlu disertai dengan pengembangan ekonomi pedesaan untuk mengurangi migrasi penduduk dan konsentrasi pengurangan perkotaan.</p> <p>(iii) Meningkatkan stabilitas pertumbuhan produksi riil sektor pertanian yang berfluktuasi tajam dalam 5 tahun terakhir melalui penguatan regulasi dan pengelolaan investasi di sektor tersebut</p> <p>(iv) Meningkatkan konektivitas dan sistem logistik dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur sehingga dapat mendukung tumbuhnya investasi di sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran dan jasa perusahaan) yang telah tumbuh pesat dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.</p>	<p>Pemerintah Provinsi : mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi bersama kab/kota dengan prioritas : (i) revitalisasi pertumbuhan sektor pertanian; (ii) stabilisasi pertumbuhan sektor pertanian; dan (iii) peningkatan konektivitas dan sistem logistik untuk mendukung pertumbuhan sektor tersier terutama perdagangan</p> <p>Pemerintah provinsi : mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan, terutama untuk daerah-daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar : Kolaka, Muna, Buton, dan Konawe</p>
<p>Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara turun signifikan, namun sampai tahun 2011 masih diatas angka kemiskinan nasional.</p> <p>IPM Sulawesi Tenggara belum beranjak dari peringkat ke-25 secara nasional dalam 5 tahun terakhir. Masalah IPM terbesar terdapat pada angka melek huruf dan angka harapan hidup yang masih dibawah rata-rata nasional.</p>	<p>Keberhasilan penurunan angka kemiskinan sebesar 2,5 basis poin persen pada periode 2010-2011 perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk mencapai target tahun 2013 sebesar 10 persen, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara setidaknya harus dapat diturunkan sebesar 2,3 basis poin persen dalam dua tahun ke depan (2012 dan 2013).</p> <p>Dengan terkendala-nya proses peningkatan angka melek huruf pada kelompok usia lanjut, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara perlu mendorong peningkatan signifikan pada angka rata-rata lama. Peningkatan signifikan pada angka rata-rata lama sekolah diharapkan dapat mengkompensasi kendala peningkatan angka melek huruf sehingga tetap bisa memperbaiki IPM bidang pendidikan secara keseluruhan.</p> <p>Peningkatan angka harapan hidup dapat dilakukan melalui upaya mengurangi angka kesakitan penduduk, angka kematian bayi, angka kematian balita, dan kasus kematian ibu melahirkan.</p>	<p>Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota : (i) mengupayakan peningkatan signifikan pada angka rata-rata lama sekolah melalui peningkatan partisipasi sekolah pada jenjang SMP dan SMA/ sederajat; (ii) mendorong peningkatan program terkait KIBLA (Kesehatan Ibu dan anak baru lahir), peningkatan cakupan imunisasi lengkap, serta promosi kesehatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</p>

Isu Utama	Rekomendasi	Agenda
<p data-bbox="289 226 316 514">Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p data-bbox="289 514 316 1165">Matriks telah dituangkan dalam tabel kesimpulan dan rekomendasi pada Bab 2.</p> <p data-bbox="289 1165 316 1875">Pendapatan</p>	<p data-bbox="329 226 397 703">Kontribusi PAD terhadap pendapatan kabupaten/kota masih rendah (rata-rata dibawah 7 persen)</p> <p data-bbox="329 703 544 1165">Dalam jangka pendek, peningkatan kapasitas mobilisasi PAD dapat dilakukan melalui : (i) peningkatan identifikasi sumber-sumber pendapatan; (ii) perbaikan regulasi terkait pajak dan retribusi; (iii) perbaikan sistem dan sumberdaya manusia pengelola pajak ; serta (iv) penambahan jumlah kantor pajak</p> <p data-bbox="329 1165 544 1875">Dalam jangka panjang, upaya peningkatan PAD perlu diarahkan pada pembangunan sektor ekonomi yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah (seperti pariwisata, dll). Tanpa disertai pembangunan ekonomi di sektor-sektor tersebut, intensifikasi PAD dapat berdampak buruk (menjadi disinsentif) pada perekonomian.</p> <p data-bbox="329 1875 544 1984">Pemerintah daerah juga perlu mendorong peningkatan formalisasi sektor-sektor informal melalui kemudahan prosedur serta peningkatan insentif perijinan (dalam kasus Sulawesi Tenggara, formalisasi usaha perlu dilakukan pada lapangan usaha penggalan/pertambangan yang banyak bergerak secara informal/<i>underground economy</i>).</p> <p data-bbox="329 1984 544 2089">Meningkatnya aktivitas dan produksi pertambangan di Sulawesi Tenggara perlu didukung oleh sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat. Transparansi di sektor tersebut juga dapat memudahkan proses negosiasi bagi hasil non-pajak SDA bagi Sulawesi Tenggara kepada Pemerintah Pusat.</p>	<p data-bbox="548 226 657 703">Pemerintah provinsi : memfasilitasi peningkatan kapasitas dalam mobilisasi PAD kab/kota baik yang bersifat jangka panjang (pengembangan potensi pendapatan dan formalisasi usaha), maupun yang bersifat jangka pendek (perbaikan regulasi dan peningkatan SDM pengelola pajak)</p> <p data-bbox="548 703 657 1264">Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sentra produksi pertambangan : Meningkatkan monitoring terhadap perkembangan produksi pertambangan dan memfasilitasi proses negosiasi dengan pemerintah pusat untuk peningkatan bagi hasil non-pajak SDA.</p>

Isu Utama		Rekomendasi	Agenda
Belanja	Seiring dengan meningkatnya belanja dari tahun ke tahun, porsi belanja pegawai pada tingkat kabupaten/kota mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir hingga mencapai lebih dari 50 persen tahun 2011. Dampaknya, porsi belanja langsung untuk pembangunan mengalami penurunan dari tahun ke tahun	(i) Perlu kajian lebih mendalam mengenai pola pertumbuhan jumlah pegawai terhadap tingkat kebutuhan riil pegawai serta merumuskan strategi rasionalisasi pegawai dalam jangka panjang; (ii) Mengurangi pertumbuhan jumlah pegawai non-fungsional dan mendorong peningkatan jumlah pegawai fungsional terutama yang berdampak langsung pada pelayanan seperti dokter, guru, penyuluh, dll.	Pemerintah Provinsi : (i) Peningkatan kualitas informasi keuangan belanja transfer (bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, dll) sehingga keterkaitan dengan belanja sektor strategis (pendidikan, kesehatan, dll) bisa lebih diketahui publik ; (ii) pengurangan porsi belanja langsung untuk administrasi dan aparatut melalui pengendalian pada tahap perencanaan/penganggaran
	Pada tingkat provinsi, belanja pemerintahan umum diluar transfer diperkirakan mencapai 22 persen dari total belanja tahun 2011, sementara pada tingkat kabupaten/kota sebesar 30 persen. Porsi tersebut jauh lebih tinggi dibanding porsi untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian.	Seiring dengan peningkatan belanja dari tahun ke tahun, porsi (bukan nilai) belanja pemerintahan umum perlu secara bertahap dikurangi untuk memberi peluang peningkatan porsi yang lebih besar pada sektor-sektor strategis	Pemerintah kabupaten/kota : (i) mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai non-fungsional, dan mengarahkan peningkatan belanja pegawai untuk pegawai fungsional (dokter, bidang, guru, penyuluh, dll);
	Porsi belanja transfer mengalami peningkatan terutama dalam dua tahun terakhir hingga mencapai 25,5 persen pada tahun 2011. Porsi ini lebih tinggi dibanding porsi untuk sektor-sektor strategis. Sebagian alokasi belanja transfer sebenarnya terkait dengan program unggulan provinsi seperti bantuan di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dll. Namun demikian, data mengenai hal tersebut masih sulit diperoleh oleh masyarakat umum	Pemerintah provinsi perlu meningkatkan kualitas informasi keuangan dari belanja transfer tersebut sehingga publik bisa mengetahui berapa dari belanja transfer tersebut yang betul-betul terkait dengan sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, dll. Hal ini penting agar publik bisa mengetahui komitmen pemerintah provinsi terhadap alokasi dana pada bidang-bidang tersebut. Selain itu, kualitas perencanaan, penatausahaan, serta monitoring dan evaluasi dari alokasi belanja transfer harus ditingkatkan agar mampu memberikan dampak maksimal pada pencapaian indikator-indikator pembangunan	Pemerintah Provinsi dan kab/kota : (i) rasionalisasi porsi (bukan nilai) belanja pemerintahan umum untuk memberi peluang lebih besar pada peningkatan belanja sektor strategis; (ii) penguatan kelembagaan untuk implementasi UU Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional bisa segera terlaksana di provinsi Sulawesi Tenggara.

Isu Utama	Rekomendasi	Agenda
<p>porsi belanja untuk program/ kegiatan terkait administrasi perkantoran dan aparatur (rutin) dalam belanja langsung pemerintah provinsi masih cukup tinggi (sekitar 26 persen dari total belanja, atau sekitar 43 persen dari total belanja langsung).</p>	<p>Porsi belanja administrasi dan aparatur dalam belanja langsung provinsi secara bertahap perlu dirasionalisasi untuk memberi porsi yang lebih besar pada program/kegiatan pembangunan.</p>	
<p>Bila dilihat dari urusan PP&PA dan KB sepanjang tahun 2007 hingga 2011, konsistensi belanja program masih sangat kurang. Dari total 12 program yang ada dalam urusan PP&PA, hanya 4 yang dilaksanakan setiap tahun di tingkat kabupaten/kota. Sementara di provinsi, belanja program PP&PA terlihat lebih sporadic. Hal serupa terjadi pada urusan Keluarga Berencana, dimana hanya ada 7 dari 20 program yang dilaksanakan secara rutin.</p>	<p>penguatan kelembagaan sangat penting untuk segera dilakukan, agar implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional bisa segera terlaksana di provinsi Sulawesi Tenggara.</p>	

Isu Utama		Rekomendasi		Agenda	
Sektor Strategis		Rekomendasi		Agenda	
Kesehatan		Rekomendasi		Agenda	
<p>Pada tingkat provinsi, belanja kesehatan meningkat dari rata-rata dibawah 10 persen (pada periode 2007-2010) menjadi hampir 20 persen tahun 2011. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja modal untuk pembangunan RS provinsi yang baru</p>	<p>Meskipun kebutuhan belanja modal setelah pembangunan rumah sakit diperkirakan menurun, belanja sektor kesehatan provinsi diharapkan dapat dipertahankan diatas 10 persen. Selain karena ke depan belanja kesehatan akan dibebani oleh belanja operasional dari rumah sakit yang baru, porsi belanja kesehatan di atas 10 persen (diluar belanja pegawai) merupakan tuntutan dari UU Kesehatan (lihat UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat 2)</p>	<p>Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kab/Kota : (i) Proyeksi peningkatan porsi belanja kesehatan yang lebih konsisten di atas 10 persen disertai perencanaan jangka menengah yang lebih terukur; (ii) mendorong prioritas promosi kesehatan dan pembangunan KIBLA untuk pencapaian outcomes kesehatan yang lebih baik; dan (ii) mengevaluasi berbagai rasio ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan antar kabupaten/kota, serta mendorong penambahan fasilitas di daerah-daerah yang masih minim fasilitas dan tenaga kesehatan.</p>	<p>Di tingkat kabupaten/kota, proporsi belanja kesehatan masih pada kisaran 7-8 persen. Jika dibanding dengan jumlah penduduk, besaran belanja kesehatan per kapita antar kab/kota sangat bervariasi (Tahun 2009, Terendah Rp. 117 ribu per kapita dan tertinggi Rp. 454 ribu per kapita)</p>	<p>(1) beberapa pemerintah kabupaten/kota masih perlu meningkatkan belanja kesehatannya, terutama yang masih mengalokasikan dibawah 8 persen dan dengan belanja kesehatan per kapita yang masih rendah. (2) Meningkatkan efisiensi penggunaan belanja kesehatan dengan mengurangi secara bertahap proporsi belanja langsung terkait administrasi dan aparatur; (3) Mulai memberi prioritas belanja kesehatan pada upaya promosi kesehatan untuk PHBS serta pembangunan KIBLA, terutama untuk daerah dengan rasio fasilitas kesehatan yang sudah cukup baik.</p>	<p>(i) Proyeksi peningkatan porsi belanja kesehatan yang lebih konsisten di atas 10 persen disertai perencanaan jangka menengah yang lebih terukur; (ii) mendorong prioritas promosi kesehatan dan pembangunan KIBLA untuk pencapaian outcomes kesehatan yang lebih baik; dan (ii) mengevaluasi berbagai rasio ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan antar kabupaten/kota, serta mendorong penambahan fasilitas di daerah-daerah yang masih minim fasilitas dan tenaga kesehatan.</p>
<p>Output sektor kesehatan (berupa fasilitas pelayanan kesehatan) menunjukkan adanya peningkatan, namun <i>outcomes</i> kesehatan (angka kesakitan, AKB, AKABA, kasus kematian ibu) belum menunjukkan perbaikan berarti</p>	<p>Disamping peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga perlu mulai memperhatikan aspek kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk mengurangi angka kesakitan penduduk; serta promosi kesehatan ibu dan anak dan cakupan imunisasi lengkap untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita serta mengurangi kasus kematian ibu melahirkan.</p>		<p>Meskipun pada skala provinsi, ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan sudah menunjukkan perbaikan, namun masih terjadi kesenjangan antar kabupaten/kota</p>	<p>(1) Pembangunan rumah sakit di Buton Utara dan Konawe Utara; (2) Meningkatkan ketersediaan tempat tidur (rawat inap), terutama di daerah Buton, Muna, dan Wakatobi (3) Mendorong pembangunan puskesmas di beberapa kabupaten seperti Kolaka dan Konawe Selatan serta di Buton Utara, Konawe, Kolaka Utara yang masih menghadapi masalah aksesibilitas (jarak puskesmas) (4) Meningkatkan ketersediaan dokter umum terutama di Kota Bau-Bau dan Buton Utara dan serta ketersediaan bidan terutama di Buton Utara, Konawe Utara, dan Bau-bau; (5) Meningkatkan pemerataan dokter spesialis dan gigi yang masih belum tersedia di sebagian besar kabupaten/kota.</p>	

Isu Utama	Rekomendasi	Agenda
<p>Pendidikan</p> <p>Setidaknya sejak tahun 2009, diperkirakan sebagian besar belanja pendidikan pemerintah provinsi dialokasikan melalui transfer (bantuan keuangan, dll) seperti bantuan operasional pendidikan (BoP), beasiswa, dll, yang dikelola melalui pos belanja Biro Keuangan, Sekretariat Daerah. Namun informasi keuangan mengenai hal tersebut belum memadai.</p>	<p>Publikasi data terkait belanja transfer (bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, dll) yang memiliki kaitan dengan sektor (khususnya pendidikan) perlu diperbaiki terutama untuk memberikan kesadaran publik tentang komitmen pemerintah provinsi terhadap sektor-sektor strategis. Dengan informasi keuangan seperti ini, maka informasi mengenai besaran belanja sektor strategis bisa lebih utuh.</p>	<p>Pemerintah provinsi : (i) mempublikasi belanja transfer (bantuan keuangan, hibah, bansos, subsidi) berdasarkan keterkaitannya dengan sektor strategis (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll) ; (ii) penguatan monitoring, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi untuk mengatasi kesenjangan rasio fasilitas dan tenaga pendididkan antar kab/kota terutama dalam rangka pencapaian SPM (standar pelayanan minimal) di sektor pendidikan</p>
<p>Meskipun sebagian besar kabupaten/kota sudah membelanjakan lebih dari 20 persen untuk pendidikan, namun belanja pendidikan per penduduk usia sekolah masih bervariasi</p>	<p>Belanja pendidikan kabupaten/kota sebaiknya tidak hanya didasarkan pada pemenuhan tuntutan undang-undang (20 persen), namun perlu juga memperhitungkan besaran penerima manfaat utama sektor pendidikan</p>	<p>Pemerintah kabupaten/kota : terutama kab/kota dengan rasio fasilitas atau tenaga pendididkan yang masih dibawah rasio provinsi perlu menambah fasilitas dan tenaga pendididkan.</p>

Isu Utama	Rekomendasi	Agenda
<p>Ketersediaan fasilitas pendidikan masih cukup senjang antar kabupaten/kota</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan pemerataan ketersediaan fasilitas pendidikan antar kab/kota, pemerintah provinsi perlu mendorong beberapa hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) penambahan jumlah kelas di beberapa kabupaten/kota dengan rasio siswa per kelas yang tinggi seperti di Kolaka dan Kota Kendari untuk SD, Konawe Utara untuk SMP, serta Buton dan Kolaka Utara untuk SMA/SMK; dan juga di daerah-daerah dengan jumlah rombel per kelas yang lebih dari satu. (ii) memperbaiki bangunan kelas yang rusak terutama pada jenjang SD yang masih diatas 20; (iii) menambah jumlah guru terutama di bebrapa kabupaten/kota dengan rasio siswa per guru yang masih tinggi seperti di Buton untuk SD, Buton Utara untuk SMP, dan Kolaka Utara untuk SMA; (iv) meningkatkan kualitas jenjang pendidikan guru terutama pada tingkat SD yang sebagian besar masih belum berijazah S1 	
<p>Meskipun sudah lebih baik dibanding rata-rata nasional, angka rata-rata sekolah masih perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mengkompensasi kendala dalam peningkatan angka melek huruf pada kelompok usia lanjut</p>	<p>Tiga langkah yang perlu dilakukan untuk terus meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah: (i) mengurangi angka putus sekolah terutama pada jenjang pendidikan SMA/SMK; (ii) meningkatkan angka melanjutkan sekolah terutama dari tingkat SMP ke SMA/SMK; dan (iii) meningkatkan APM terutama pada jenjang SMP dan SMA/SMK dan mengurangi ketimpangan APM antar kab/kota pada jenjang tersebut.</p>	
<p>Infrastruktur</p> <p>Struktur belanja infrastruktur sudah cukup baik, yakni dengan memberikan alokasi rata-rata diatas 75 persen untuk belanja langsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan sebagian besar dari belanja langsung tersebut dialokasikan untuk belanja modal. Namun demikian, secara total, belanja infrastruktur masih fluktuatif</p>	<p>Meskipun tidak perlu signifikan, Pemerintah Daerah perlu mendorong skema peningkatan belanja infrastruktur yang lebih konsisten baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kerangka pengeluaran jangka menengah yang berkualitas di bidang infrastruktur perlu disusun sehingga investasi publik di bidang infrastruktur lebih terarah sesuai dengan arah pengembangan provinsi Sulawesi Tenggara</p>	<p>Pemerintah Provinsi : menyusun master plan pengembangan infrastruktur Sulawesi Tenggara dengan skema pembiayaan jangka menengah (<i>multi-year</i>) yang terintegrasi meliputi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perumahan, serta perhubungan.</p>

Isu Utama	Rekomendasi	Agenda
<p>Jika dilihat perkembangan tahun 2006 dan tahun 2009, kondisi jalan provinsi dengan kondisi baik dan jalan dengan permukaan beraspal belum mengalami perbaikan berarti. Pada tahun 2010, terjadi peningkatan panjang jalan sebesar dua kali lipat dari jalan tahun 2009 sebagai limpahan dari pemerintah pusat.</p>	<p>Peningkatan panjang jalan pemerintah provinsi tahun 2010 berimplikasi pada perlunya peningkatan belanja langsung sektor infrastruktur untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan.</p>	
<p>Tantangan infrastruktur dasar perumahan di Sulawesi Tenggara adalah masih tingginya kesenjangan akses terhadap listrik, air bersih, maupun sanitasi yang layak antara rumah tangga termiskin dan terkaya.</p>	<p>belanja pemerintah daerah untuk perumahan masih sangat rendah sehingga perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, prioritas perlu diberikan pada peningkatan akses rumah tangga termiskin dan miskin pada listrik, air bersih, dan sanitasi.</p>	
<p>Seiring dengan peningkatan luas area sawah pada tahun 2010, tantangan pemerintah daerah untuk membangun irigasi teknis semakin tinggi. Selain itu masih terdapat sekitar 22,4 ribu hektar sawah tadah hujan</p>	<p>Dalam mendorong peningkatan produktivitas padi, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan cakupan irigasi teknis terutama pada area sawah tadah hujan. Koordinasi antar berbagai tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan irigasi sesuai kewenangannya (primer, sekunder, tersier).</p>	
<p>Upaya pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana angkutan laut dan udara memiliki dampak terhadap peningkatan mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi yang sangat berguna untuk mendukung pertumbuhan.</p>	<p>Upaya mendorong pembangunan infrastruktur perhubungan perlu terus dilanjutkan baik untuk transportasi udara maupun laut disertai dengan peningkatan kualitas.</p>	

Pertanian

<p>Pada tahun 2011, belanja pertanian mengalami peningkatan tajam dibanding tahun 2010, namun peningkatan tersebut bersumber dari peningkatan belanja pemerintah pusat melalui dekonsentrasi /TP. Peningkatan signifikan tersebut tidak akan selamanya terjadi, karena sangat dipengaruhi oleh kebijakan prioritas dan program dari pemerintah pusat.</p>	<p>Sebagai provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan bertumpu pada sektor pertanian, pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) perlu merencanakan skema peningkatan belanja sektor pertanian yang lebih konsisten sehingga total investasi publik di sektor pertanian di Sulawesi Tenggara lebih stabil dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Saat ini belanja pertanian secara rata-rata masih dibawah 8 persen dari total belanja baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.</p>	<p>Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota : (i) berkoordinasi dalam rangka penyusunan skema peningkatan belanja daerah untuk pertanian dalam jangka menengah disertai penetapan indikator dan target yang terukur; (ii) peningkatan efisiensi belanja sektor pertanian dengan mengutamakan pertumbuhan belanja langsung dibanding pegawai; mendorong re-komposisi belanja program yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, melainkan juga penerapan teknologi, pemasaran, agribisnis, dan peningkatan kesejahteraan petani</p>
<p>Belanja gaji pegawai sektor pertanian mengalami peningkatan baik di tingkat provinsi (menjadi 66,2 persen tahun 2011) maupun kabupaten/kota (menjadi 40 persen tahun 2011)</p>	<p>Perlu kajian lebih lanjut mengenai pertumbuhan belanja pegawai di sektor pertanian, apakah dipengaruhi oleh pertumbuhan belanja pegawai penyuluh atau pegawai non-fungsional. Peningkatan belanja pegawai di sektor pertanian dapat berdampak baik jika diarahkan pada peningkatan belanja untuk para penyuluh pertanian.</p>	
<p>Belanja langsung sektor pertanian masih memprioritaskan peningkatan produksi</p>	<p>Selain untuk peningkatan produksi, belanja pertanian perlu diarahkan pada penerapan teknologi pertanian peningkatan pemasaran, hal ini berguna untuk mendorong agar terjadi peningkatan produktivitas (intensifikasi), peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta pengembangan agribisnis. Selain itu, belanja program peningkatan kesejahteraan petani terutama di sub-sektor peternakan dan tanaman pangan yang masih memiliki NTP dibawah 100.</p>	
<p>Perlambatan pertumbuhan sektor pertanian yang dipengaruhi oleh penurunan angka pertumbuhan riil di hampir semua sub-sektor pertanian perlu segera diantisipasi</p>	<p>(i) peningkatan pemasaran ekspor komoditi kakao yang terus mengalami penurunan volume dan nilai ekspor dari tahun ke tahun, terutama dalam rangka menyerap pertumbuhan komoditi kakao yang sudah cukup tinggi sejak tahun 2010; (ii) peningkatan produktivitas padi melalui perluasan irigasi teknis sehingga dapat mengurangi area sawah tadah hujan; peningkatan penerapan teknologi produksi, serta penyuluhan pertanian yang lebih intensif; (iii) Menjaga dan meningkatkan stabilitas pertumbuhan populasi sapi serta volume produksi rumput laut sebagai komoditi unggulan sub-sektor peternakan dan perikanan kelautan.</p>	

Isu Utama	Rekomendasi	Agenda
<p>Block Grant ke Desa</p> <p>Berdasarkan hasil survei, tingkat pengetahuan masyarakat tentang program <i>Block Grant</i> cukup tinggi; tingkat pemahaman masyarakat juga sudah baik; partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari <i>Block Grant</i> sudah mulai terjadi di beberapa desa; serta persepsi masyarakat tentang manfaat <i>Block Grant</i> sudah positif. Kondisi ini merupakan prasyarat penting bagi suksesnya sebuah program</p>	<p>komitmen pemerintah provinsi untuk merealisasikan program <i>Block Grant</i> secara penuh perlu ditingkatkan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) menambah plafon untuk dana bantuan keuangan pemerintah desa sehingga mendekati rencana (Rp. 100 juta per desa per tahun); (ii) meningkatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan yang akan didanai <i>Block Grant</i>; (iii) terus mendorong keterlibatan masyarakat terutama dalam proses penyusunan dan monitoring pelaksanaan kegiatan <i>Block Grant</i>; (iv) meningkatkan pembinaan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan <i>Block Grant</i> sehingga dapat memperlancar proses pencairan dana dari satu tahap ke tahap berikutnya. (v) Kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pendampingan realisasi <i>Block Grant</i> di tingkat desa perlu dilakukan misalnya melalui penyediaan fasilitator pendamping <i>Block Grant</i> untuk desa/kelurahan. 	<p>Pemerintah Provinsi</p>
<p>Kesenjangan gender masih terlihat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2009, dimana terjadi perbedaan IPM dengan IPG sebesar 6.63 poin.</p>	<p>Untuk meminimalisir kesenjangan gender perlu dilakukan penguatan kelembagaan gender di semua tingkat, sehingga dapat terbentuk anggaran yang responsif gender untuk semua urusan.</p> <p>Penguatan kelembagaan gender melalui POKJA Gender perlu dioptimalkan, salah satunya dengan cara mensinkronisasikan kegiatan ini dengan jadwal mutasi jabatan.</p> <p>Selain itu, pemerintah daerah perlu mulai membangun database gender atau data menurut jenis kelamin, untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan pembuatan anggaran yang responsif gender di semua urusan.</p>	<p>Pemerintah provinsi : (i) memastikan dan mengoptimalisasi fungsi dan kegiatan POKJA Gender dan menguatkan kapasitas kelembagaan gender, Dukungan kapasitas kebijakan, kelembagaan, anggaran dan program-program yang berkaitan pembangunan kesetaraan gender mampu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sehingga lebih responsif gender.</p> <p>(ii) Pemerintah provinsi juga perlu untuk mulai menerapkan sistem pencatatan dan pendataan secara terpilah (berdasarkan jenis kelamin) di semua urusan. Database ini akan menjadi data pendukung yang dapat digunakan pada saat penyusunan anggaran, sehingga kebutuhan laki-laki dan perempuan lebih seimbang terpenuhi</p>

Lampiran D. Budget Master Tabel Semua Angka Dalam Master Tabel Merupakan Angka Riil (2009=100)

Lampiran D.1. Konsolidasi Anggaran Pemerintah Sulawesi Tenggara

Tabel D.1.1. Pendapatan Berdasarkan Sumber (dalam Rupiah)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
PAD	166.651.528.651	305.471.899.899	223.128.480.722	552.310.637.003	377.415.842.219
Pajak Daerah	118.124.231.631	154.961.430.556	171.402.250.571	201.884.852.986	184.434.903.380
Retribusi Daerah	19.776.026.150	20.381.833.049	40.252.603.584	30.358.052.181	36.803.817.413
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.572.533.311	12.082.815.718	4.871.003.708	15.277.616.391	12.670.070.082
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18.178.737.559	118.045.820.577	6.602.622.859	304.790.115.444	143.507.051.342
DANA PERIMBANGAN	622.916.414.471	676.861.856.258	705.062.821.830	625.842.789.635	715.505.016.702
Dana Bagi Hasil Pajak	50.980.517.731	62.731.062.936	53.254.936.389	58.940.000.831	57.699.462.389
Bagi Hasil Bukan Pajak	23.606.523.827	0	5.645.751.441	0	0
Dana Alokasi Umum	548.329.372.914	583.371.799.922	589.844.134.000	544.921.264.978	627.536.553.687
Dana Alokasi Khusus	0	30.758.993.400	56.318.000.000	21.981.523.827	30.269.000.626
PENDAPATAN DAERAH LAINNYA YANG SAH	17.656.374.254	4.154.689.105	102.528.828.100	22.111.954.633	0
Pendapatan Hibah	5.783.687.054	0	0	22.111.954.633	0
Dana Darurat	0	0	43.026.050.100	0	0
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	11.872.687.200	4.154.689.105	59.502.778.000	0	0
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
Pendapatan lainnya	0	0	0	0	0
TOTAL PENDAPATAN	807.224.317.376	986.488.445.262	1.030.720.130.652	1.200.265.381.270	1.092.920.858.921

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
PAD	177.239.196.244	173.782.739.159	166.086.239.534	303.480.292.693	357.498.637.310
Pajak Daerah	29.439.140.484	26.124.754.306	32.960.950.057	34.057.944.937	66.393.054.977
Retribusi Daerah	53.003.846.630	62.314.286.161	60.156.917.400	97.248.889.243	127.550.050.908
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.664.040.938	19.994.322.844	13.582.635.818	33.661.342.245	25.816.902.192
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.132.168.192	65.349.375.847	59.385.736.259	138.512.116.267	137.738.629.233
DANA PERIMBANGAN	4.243.344.939.981	4.166.519.374.648	4.487.579.864.799	4.211.333.301.785	4.490.231.956.803
Dana Bagi Hasil Pajak	321.916.718.447	270.404.871.478	273.358.316.737	332.064.508.225	247.033.824.037
Bagi Hasil Bukan Pajak	35.192.620.824	27.815.203.160	16.320.377.062	4.528.491.722	10.706.860.482
Dana Alokasi Umum	3.305.036.017.432	3.233.138.026.886	3.542.402.171.000	3.434.069.673.466	3.752.330.775.288
Dana Alokasi Khusus	581.199.583.278	635.161.273.125	655.499.000.000	440.670.628.373	480.160.496.996
PENDAPATAN DAERAH LAINNYA YANG SAH	238.292.181.635	343.365.062.839	345.667.352.808	660.755.458.456	482.579.316.687
Pendapatan Hibah	37.168.637.543	16.784.278.240	8.655.891.701	48.774.971.243	40.734.694.152
Dana Darurat	2.374.537.440	17.405.310.000	4.517.977.954	2.743.986.097	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.507.234.121	79.393.086.659	54.155.427.398	92.657.912.109	85.285.286.063
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	100.324.206.840	156.651.876.293	243.877.381.500	304.671.182.091	271.675.231.942
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.466.116.409	52.461.861.703	20.117.179.500	55.172.983.628	38.234.997.763
Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.451.449.283	199.823.670	14.343.494.755	156.734.423.288	46.649.106.767
Pendapatan lainnya	-	20.468.826.275	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	4.658.876.317.860	4.683.667.176.646	4.999.333.457.141	5.175.569.052.934	5.330.309.910.800

Tabel D.1.2. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (dalam Rupiah)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
Pegawai	317.977.304.214	310.707.491.251	397.821.667.390	348.766.770.458	375.377.572.510
Tidak Langsung	209.400.543.540	228.572.724.811	286.532.406.394	286.011.710.543	339.093.200.324
Langsung	108.576.760.674	82.134.766.440	111.289.260.996	62.755.059.915	36.284.372.187
Barang dan Jasa	351.060.361.292	232.052.619.736	260.377.529.372	230.371.844.943	188.874.383.110
Modal	230.684.165.588	149.189.823.049	305.969.283.259	338.984.338.525	368.897.144.029
Lain-lain	94.546.645.685	233.617.864.279	159.739.118.211	289.758.769.919	325.646.108.888
Bunga	-	-	-	-	-
Hibah/subsidi	-	23.660.106.919	17.724.951.975	7.976.859.051	7.790.073.110
Bantuan Sosial	28.839.050.446	19.925.644.029	10.019.034.611	70.991.443.154	17.632.875.255
Bagi Hasil ke Daerah Bawah	41.778.054.474	73.718.745.273	60.160.658.250	83.557.463.049	44.033.432.128
Bantuan ke Daerah Bawah	21.335.218.898	111.276.827.726	70.729.016.875	124.214.619.958	251.712.674.883
Tidak Terduga	2.594.321.866	5.036.540.332	1.105.456.500	3.018.384.707	4.477.053.511
Bantuan kepada Lembaga Vertikal	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA	994.268.476.780	925.567.798.315	1.123.907.598.232	1.207.881.723.844	1.258.795.208.537
Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
Pegawai	1.767.384.997.024	2.117.433.660.874	2.041.652.739.336	2.342.281.485.617	2.939.953.527.514
Tidak Langsung	1.469.365.955.327	1.822.771.592.264	1.762.973.808.997	2.044.967.721.349	2.686.049.134.831
Langsung	298.019.041.697	294.662.068.610	278.678.930.339	297.313.764.269	253.904.392.683
Barang dan Jasa	759.229.837.425	865.185.400.349	1.024.241.267.663	1.119.538.569.156	969.673.571.995
Modal	1.516.654.270.266	1.605.777.324.797	1.652.656.107.433	1.398.886.970.259	1.344.165.089.493
Lain-lain	240.889.592.652	199.075.385.826	217.130.422.423	224.353.672.856	282.271.661.037
Bunga	2.739.320.239	4.991.824.348	2.067.668.614	136.471.292	186.556.638
Hibah/subsidi	12.061.591.053	20.346.331.774	56.337.223.679	74.814.130.350	108.527.022.980
Bantuan Sosial	112.680.239.385	48.697.977.828	71.509.290.606	35.943.950.663	28.225.232.862
Bagi Hasil ke Daerah Bawah	104.906.589	32.069.773.928	5.428.650.000	-	-
Bantuan ke Daerah Bawah	99.353.620.043	83.788.965.332	77.158.777.101	107.249.865.545	126.807.248.833
Tidak Terduga	13.949.915.342	9.180.512.616	4.628.812.423	6.209.255.006	18.525.599.725
Bantuan kepada Lembaga Vertikal	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA	4.284.158.697.368	4.787.471.771.846	4.935.680.536.856	5.085.060.697.887	5.536.063.850.039

Tabel D.1.3. Belanja Berdasarkan Urusan (dalam Rupiah)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
URUSAN WAJIB	900.302.147.281	826.552.985.755	1.004.599.789.753	1.116.607.762.141	1.162.193.638.856
Pendidikan	57.730.647.647	75.467.252.987	126.714.577.706	42.857.839.471	37.804.717.247
Kesehatan	53.476.034.662	68.134.907.619	92.357.904.752	101.117.790.206	247.437.210.009
Pekerjaan Umum	119.939.393.957	95.997.329.259	247.201.930.152	285.508.224.453	177.374.519.898
Perumahan	-	-	-	-	-
Penataan Ruang	-	-	-	3.441.395.317	1.142.230.662
Perencanaan Pembangunan	15.048.593.182	16.050.010.547	13.882.032.779	10.715.996.158	11.001.970.575
Perhubungan	45.193.833.164	32.432.070.835	14.467.078.486	13.814.429.708	11.973.015.455
Lingkungan Hidup	2.174.025.859	4.242.004.237	3.179.586.670	3.189.336.961	3.341.632.000
Pertanahan	-	-	-	-	-
Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-
Pemberdayaan Perempuan	-	-	1.651.263.221	2.945.281.442	3.249.176.726
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	-	-	-	-
Sosial	8.474.894.931	8.657.212.908	9.511.857.168	10.590.470.502	11.372.029.850
Tenaga Kerja	18.629.234.075	17.286.058.423	14.970.977.975	13.034.207.925	13.831.130.108
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.168.524.908	6.780.573.829	7.359.460.123	5.262.781.213	5.515.249.986
Penanaman Modal	-	-	1.154.147.403	2.177.806.549	3.271.096.201
Kebudayaan	-	-	12.811.967.737	9.118.811.305	7.878.382.543
Pemuda dan Olah Raga	-	-	2.251.248.434	4.801.488.704	5.498.224.289
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	19.371.363.863	21.033.361.058	17.461.254.416	13.539.303.668	12.860.691.421
Pemerintahan Umum	539.265.812.251	464.774.039.666	420.264.778.429	573.734.105.556	589.664.932.996
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.859.465.409	10.933.700.273	11.572.281.243	11.126.995.884	6.920.616.603
Statistik	-	-	-	-	-
Arsip	3.536.006.653	2.350.670.396	255.500.000	-	54.754.364
Komunikasi dan Informatika	2.434.316.719	2.413.793.717	633.489.412	1.170.085.247	1.412.191.169

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
URUSAN WAJIB	900.302.147.281	826.552.985.755	1.004.599.789.753	1.116.607.762.141	1.162.193.638.856
Perpustakaan	-	-	5.194.958.468	5.486.571.389	7.359.676.943
Ketahanan Pangan	-	-	1.703.495.179	2.974.840.483	3.230.189.811
URUSAN PILIHAN	93.966.329.499	99.014.812.560	119.307.808.479	91.273.961.703	96.601.569.682
Pertanian	39.965.172.633	46.038.044.292	61.659.142.067	41.880.564.346	44.700.939.496
Kehutanan	12.305.527.252	9.650.805.926	12.413.207.968	10.509.350.293	13.432.772.632
Energi dan Sumberdaya Mineral	10.194.007.905	8.412.896.375	13.883.503.593	11.787.359.188	7.590.178.312
Pariwisata	4.920.183.917	4.832.976.607	-	2.978.551.175	851.643.027
Kelautan dan Perikanan	16.473.718.776	19.494.207.574	19.223.437.537	15.617.920.562	19.685.379.183
Perdagangan	-	-	-	-	601.160.837
Industri	10.095.846.329	10.585.881.786	11.089.161.314	8.352.781.766	9.524.552.855
Ketransmigrasian	11.872.687	-	1.039.356.000	147.434.373	214.943.339
TOTAL BELANJA	994.268.476.780	925.567.798.315	1.123.907.598.232	1.207.881.723.844	1.258.795.208.537
Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
URUSAN WAJIB	3.899.797.274.003	4.418.849.366.514	4.584.142.683.554	4.769.870.045.629	5.158.089.177.374
Pendidikan	1.086.225.026.385	1.338.875.801.319	1.308.967.003.376	1.514.193.427.001	1.718.530.008.704
Kesehatan	398.069.376.053	427.499.394.676	414.297.951.997	372.253.142.901	436.406.398.555
Pekerjaan Umum	660.060.096.174	669.501.125.550	705.670.806.218	564.902.812.380	586.941.772.777
Perumahan	21.938.010.315	22.725.324.161	27.337.834.490	5.889.229.940	14.851.383.513
Penataan Ruang	16.615.116.773	9.759.965.479	14.421.538.183	11.470.501.805	18.181.674.702
Perencanaan Pembangunan	74.563.606.692	65.881.848.346	62.207.204.535	50.939.858.276	62.742.577.617
Perhubungan	51.623.943.532	68.710.356.395	161.537.555.763	87.055.935.228	91.303.460.319
Lingkungan Hidup	47.455.153.939	62.253.890.104	57.902.805.676	52.662.814.352	65.320.748.949
Pertanian	7.024.221.900	4.324.809.635	2.868.018.000	896.368.792	582.016.956
Kependudukan dan Catatan Sipil	23.070.639.695	30.327.594.663	22.654.988.439	20.293.879.887	23.841.684.498
Pemberdayaan Perempuan	837.358.908	6.884.544.208	10.649.508.819	13.410.760.226	13.590.675.559
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	12.220.139.478	13.411.840.549	19.257.218.170	22.071.050.850	23.869.185.680

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
URUSAN WAJIB	3.899.797.274.003	4.418.849.366.514	4.584.142.683.554	4.769.870.045.629	5.158.089.177.374
Sosial	21.900.867.885	22.437.107.633	35.751.056.238	29.213.845.167	28.345.956.496
Tenaga Kerja	22.836.267.186	20.907.215.682	18.100.624.938	19.310.361.026	20.630.195.185
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20.826.756.924	27.029.003.322	13.665.097.334	11.619.703.936	14.786.289.388
Penanaman Modal	6.535.615.612	1.643.202.331	1.094.193.600	1.063.846.520	2.603.160.379
Kebudayaan	1.442.733.448	5.160.701.530	11.215.771.210	14.692.916.693	13.621.253.054
Pemuda dan Olah Raga	28.883.100.601	8.360.350.101	20.915.260.038	41.061.887.389	29.973.290.850
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	46.590.724.558	52.935.193.787	59.358.409.304	255.669.794.042	72.189.882.397
Pemerintahan Umum	1.281.124.960.774	1.475.684.818.536	1.506.190.935.052	1.564.017.772.809	1.787.316.572.427
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	56.106.604.861	68.663.772.753	79.276.652.236	87.358.041.827	96.026.988.280
Statistik	513.166.035	461.395.200	604.890.000	257.020.031	496.952.940
Arsip	2.100.209.616	1.356.583.052	3.431.439.619	3.680.538.535	3.276.708.226
Komunikasi dan Informatika	11.233.576.658	8.294.634.143	8.632.812.308	5.128.218.234	5.863.859.393
Perpustakaan	-	-	3.881.620.223	5.407.251.168	5.140.581.987
Ketahanan Pangan	-	5.758.893.359	14.251.487.788	15.349.066.617	21.655.898.544
URUSAN PILIHAN	384.361.423.365	368.622.405.332	351.537.853.302	315.190.652.259	377.974.672.665
Pertanian	164.745.179.586	165.767.636.119	128.923.407.448	116.191.980.889	165.740.453.435
Kehutanan	63.368.923.197	48.501.200.593	54.006.675.604	45.944.244.589	63.167.551.688
Energi dan Sumberdaya Mineral	22.406.082.215	23.602.795.784	40.975.041.150	29.655.220.558	31.950.082.342
Pariwisata	14.600.011.054	16.846.258.629	11.253.000.176	7.349.394.486	5.911.511.283
Kelautan dan Perikanan	88.401.024.628	81.892.161.258	76.212.877.851	84.511.922.718	70.998.959.344
Perdagangan	13.666.317.192	14.938.842.916	8.385.751.506	9.432.888.537	15.374.891.548
Industri	14.367.085.713	14.248.647.185	28.550.162.067	20.386.041.093	23.833.126.625
Ketransmigrasian	2.806.799.779	2.824.862.847	3.230.937.500	1.718.959.389	998.096.402
TOTAL BELANJA	4,284,158,697,368	4,787,471,771,846	4,935,680,536,856	5,085,060,697,887	5,536,063,850,039

Lampiran D.2. Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel D.2.1. Belanja Pemerintah Pusat yang Terdekonstrasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara (dalam Rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011
Pendidikan	287.805.224.148	296.923.278.707	461.288.349.480	326.097.396.872	161.855.701.073
Kesehatan	75.728.623.866	58.378.780.183	38.737.676.777	10.941.239.367	10.390.795.285
Pertanian	95.325.955.042	107.095.555.610	121.382.755.926	131.500.332.937	512.821.565.823
Infrastruktur	79.997.259.149	129.811.694.356	288.612.387.456	10.147.291.686	21.229.826.005
Lainnya	79.937.672.081	64.198.933.385	91.290.771.319	136.650.141.590	135.161.798.699
Total	618.794.734.285	656.408.242.241	1.001.311.940.958	615.336.402.451	841.459.686.887

Lampiran D.3. Anggaran Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota

Tabel D.3.1 Pendapatan Riil Perkapita Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2009 (dalam Rupiah)

	Kab. Bombana	Kab. Buton	Kab. Buton Utara	Kab. Kolaka	Kab. Kolaka Utara	Kab. Kolaka Utara	Kab. Konawe Selatan	Kab. Konawe Utara	Kab. Muna	Kab. Wakatobi	Kota Bau-bau	Kota Kendari
PAD	68.608	49.127	81.818	123.087	69.138	54.809	26.432	82.164	62.620	82.273	121.624	129.755
Pajak Daerah	3.462	6.108	9.429	21.647	17.263	12.221	4.357	959	7.177	12.044	22.504	46.693
Retribusi Daerah	24.950	11.924	28.668	45.868	19.758	10.263	10.332	41.207	26.870	10.919	59.617	56.023
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.358	3.445	-	4.429	5.072	12.162	2.909	-	3.706	18.898	6.929	2.207
Lain-lain	14.839	27.649	43.720	51.141	27.046	20.163	8.834	39.998	24.867	40.412	32.573	24.832
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.746.215	1.471.806	5.361.018	1.632.881	2.519.029	2.075.931	1.723.334	6.836.211	1.969.848	2.652.046	2.502.359	1.599.113
DANA PERIMBANGAN												
Dana Bagi Hasil Pajak	225.944	77.632	278.480	153.433	187.824	50.301	104.508	396.823	84.528	163.552	173.214	114.038
Bagi Hasil Bukan Pajak	20.006	6.595	11.507	-	20.748	14.673	5.215	35.611	-	10.785	6.635	3.272
Dana Alokasi Umum	2.059.330	1.160.675	4.057.389	1.308.658	1.977.174	1.716.504	1.316.356	5.376.179	1.597.621	1.965.221	1.998.910	1.299.874
Dana Alokasi Khusus	440.936	226.904	1.013.642	170.791	333.283	294.453	297.255	1.027.597	287.699	512.488	323.600	181.928
PENDAPATAN DAERAH LAINNYA YANG SAH	83.368	72.224	89.377	152.181	357.838	89.612	79.773	182.906	280.182	588.105	99.101	126.702
Pendapatan Hibah	5.510	-	-	17.059	18.583	-	3.667	1.004	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	12.871	-	32.550	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.462	14.484	24.534	30.840	27.133	13.296	13.132	-	5.796	19.400	37.082	77.455

	Kab. Bombana	Kab. Buton	Kab. Buton Utara	Kab. Kolaka	Kab. Kolaka Utara	Kab. Konawe	Kab. Konawe Selatan	Kab. Konawe Utara	Kab. Muna	Kab. Wakatobi	Kota Bau-bau	Kota Kendari
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	34.203	47.586	44.513	104.283	304.646	6.345	48.170	91.455	269.757	547.090	47.865	41.940
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	10.154	20.331	-	7.476	15.424	9.322	57.896	4.628	21.224	14.154	6.038
Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.193	-	-	-	-	41.676	5.482	-	-	392	-	1.269
Pendapatan lainnya												
TOTAL PENDAPATAN	2.898.192	1.593.157	5.532.213	1.908.149	2.946.005	2.220.352	1.829.540	7.101.281	2.312.650	3.322.424	2.723.083	1.855.570

Tabel D.3.2. Belanja Rill Perkapita Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Klasifikasi Ekonomi tahun 2009 (dalam Rupiah)

	Kab. Bombana	Kab. Buton	Kab. Buton Utara	Kab. Kolaka	Kab. Kolaka Utara	Kab. Konawe	Kab. Konawe Selatan	Kab. Konawe Utara	Kab. Muna	Kab. Wakatobi	Kota Bau-bau	Kota Kendari
Pegawai	1.158.271	857.123	1.068.167	991.635	857.533	123.927	912.274	2.288.251	1.287.304	629.081	1.483.308	1.120.939
Tidak Langsung	922.332	780.697	897.889	863.371	667.637	22.271	827.602	1.395.692	1.242.901	420.500	1.299.646	1.043.112
Langsung	235.939	76.426	170.278	128.263	189.896	101.655	84.672	892.559	44.404	208.580	183.662	77.827
Barang dan Jasa	816.158	349.059	880.603	440.905	621.492	397.901	369.026	2.928.532	201.106	880.377	394.232	300.473
Modal	645.098	487.846	2.934.362	579.397	1.450.448	490.562	514.441	3.730.641	695.331	1.534.043	833.977	402.482
Lain-lain	230.946	53.591	139.694	54.992	234.834	39.229	95.641	246.566	63.357	160.610	135.335	121.201
Bunga	-	-	-	-	-	214	-	-	6.073	-	2.904	493
Hibah/subsidi	-	6.125	129.091	3.307	4.761	18.413	20.951	-	25.404	70.023	29.851	76.154
Bantuan Sosial	223.112	5.537	203	4.768	36.436	20.602	12.625	203.501	1.095	35.763	58.264	39.862
Bagi Hasil ke Daerah Bawah	-	-	-	-	-	-	-	1.673	-	51.736	-	-
Bantuan ke Daerah Bawah	-	41.885	10.067	46.916	184.297	-	62.065	24.600	29.599	-	44.316	-
Tidak Terduga	7.834	44	332	-	9.340	-	-	16.793	1.185	3.088	-	4.691
Bantuan kepada Lembaga Vertikal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA	2.850.474	1.747.620	5.022.826	2.066.929	3.164.307	1.051.619	1.891.382	9.193.990	2.247.098	3.204.111	2.846.851	1.945.094

Tabel D.3.3. Belanja Riil Perkapita Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Urusan tahun 2009 (dalam Rupiah)

	Kab. Bombana	Kab. Buton	Kab. Buton Utara	Kab. Kolaka	Kab. Kolaka Utara	Kab. Konawe	Kab. Konawe Selatan	Kab. Konawe Utara	Kab. Muna	Kab. Wakatobi	Kota Bau-bau	Kota Kendari
Urusan Pendidikan	735.279	608.287	917.028	582.966	542.990	211.442	621.998	879.890	899.910	376.662	874.969	605.134
Urusan Kesehatan	242.684	136.588	336.713	191.789	313.511	117.161	133.421	454.308	161.320	360.027	280.892	170.466
Urusan Pekerjaan Umum	404.455	178.926	1.483.053	269.802	868.412	183.151	219.873	726.502	354.684	279.833	315.345	260.057
Urusan Perumahan Rakyat	-	-	-	2.520	-	-	4.677	-	72.112	-	32.846	12.487
Urusan Penataan Ruang	-	5.567	26.006	2.064	-	-	1.224	-	745	41.051	16.415	15.668
Urusan Perencanaan Pembangunan	35.524	19.049	69.416	21.045	33.952	18.978	18.942	143.806	17.180	65.733	26.512	34.721
Urusan Perhubungan	90.775	26.949	190.436	44.013	29.587	93.202	21.191	82.044	17.625	635.456	97.740	17.724
Urusan Lingkungan Hidup	26.663	15.216	43.947	45.000	29.110	6.976	13.256	49.008	8.488	21.258	64.673	46.569
Urusan Pertanahan	-	-	-	5.904	-	-	-	-	4.717	-	-	-
Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil	12.505	3.912	28.142	10.003	25.001	1.281	7.702	30.327	9.407	19.785	11.443	13.252
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	22.060	692	-	-	17.758	26.049	14.977	77	672	-
Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	-	16.629	15.243	13.342	16.947	6.000	-	-	1.375	21.262	28.483	1.032
Urusan Sosial	-	46.816	24.803	14.763	17.447	763	9.554	80.473	6.189	49.719	14.961	-
Urusan Ketenagakerjaan	32.455	6.745	-	11.515	-	1.183	14.551	-	9.154	848	1.660	10.920
Urusan Koperasi Dan UKM	-	6.682	-	12.817	17.341	2.286	9.348	-	8.327	9.786	1.023	-
Urusan Penanaman Modal	-	-	1.128	2.044	-	-	358	-	1.466	-	-	-
Urusan Kebudayaan	-	5.859	5.793	5.368	16.630	-	902	20.870	5.383	26.777	3.457	-

	Kab. Bombana	Kab. Buton	Kab. Buton Utara	Kab. Kolaka	Kab. Kolaka Utara	Kab. Konawe	Kab. Konawe Selatan	Kab. Konawe Utara	Kab. Muna	Kab. Wakatobi	Kota Bau-bau	Kota Kendari
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	-	481	30.732	9.411	-	910	53.854	3.898	7.764	8.546	1.633	-
Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	26.707	19.081	42.666	25.634	42.599	3.497	31.472	71.433	26.931	44.749	45.557	28.127
Urusan Pemerintahan Umum	906.215	520.061	1.044.787	558.073	829.607	315.668	476.562	5.798.720	434.247	957.560	818.292	605.892
Urusan Kepegawaian	-	-	39.219	-	25.525	309	-	-	26.892	-	24.149	-
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	18.985	-	116.124	48.221	49.758	915	69.905	357.631	12.611	33.665	16.208	34.575
Urusan Statistik	-	-	3.517	609	-	-	-	-	1.034	-	-	-
Urusan Kearsipan	-	-	-	920	13.177	-	-	-	2.466	180	-	3.741
Urusan Komunikasi Dan Informatika	-	6.880	1.010	13.033	-	-	-	-	32	-	21.956	-
Urusan Perpustakaan	-	-	-	4.024	-	1.001	4.767	10.701	48	7.911	-	-
Urusan Ketahanan Pangan	-	16.983	2.772	-	-	1.900	35.291	-	-	-	-	866
Urusan Pertanian	114.021	27.579	75.436	93.355	137.133	34.426	43.455	171.196	46.392	67.389	51.951	37.162
Urusan Kehutanan	37.179	28.207	134.632	28.734	30.932	9.212	27.973	60.230	39.699	2.084	10.958	-
Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral	61.257	9.378	185.318	18.009	68.968	1.256	12.004	57.984	5.710	4.623	9.173	-
Urusan Pariwisata	-	-	13.973	4.548	-	-	235	-	5.888	23.906	11.914	14.213
Urusan Kelautan Dan Perikanan	44.661	29.950	140.784	24.160	36.492	33.753	27.309	101.181	24.778	89.927	38.422	18.360
Urusan Perdagangan	-	-	-	826	-	-	8.483	-	12.513	17.667	8.727	-
Urusan Industri	61,108	11,796	28,085	507	19,189	6,349	-	67,738	744	37,423	16,822	14,130
Urusan Ketransmigrasian	-	-	-	1,217	-	-	5,317	-	6,288	206	-	-

Lampiran E. Indikator-Indikator Gender

Tabel E.1. Angka Kesenjangan Angkatan kerja dengan Tenaga Kerja Perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara 2005-2009.

Provinsi Sulawesi Tenggara

	2005	2006	2007	2008	2009
Total Tenaga Kerja Wanita	301.511	285.779	327.738	374.727	356.890
Total Angkatan Kerja Wanita	365.578	336.590	365.726	406.989	389.702
Selisih (Pengangguran)	64.067	50.811	37.988	32.262	32.812

Sumber: Data olahan Staff Bank Dunia dari Susenas.

Tabel E.2. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dikepalai Perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara

	1	2	3	4	5	Total
	Lowest 20% Income group				Highest 20% Income group	
2005	2,7%	2,4%	3,2%	3,5%	2,6%	2,8%
2006	3,5%	3,5%	3,8%	3,2%	3,0%	3,4%
2007	3,3%	3,5%	3,0%	3,5%	3,8%	3,4%
2008	3,6%	3,6%	4,0%	3,1%	4,0%	3,7%
2009	3,9%	3,9%	3,5%	3,6%	4,2%	3,8%

Sumber: Diolah dari Susenas berbagai tahun.

Tabel E.3. Angka Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara

Angka harapan hidup menurut kabupaten/kota 2004 - 2007

Provinsi & Kabupaten/ Kota	2004		2005		2006		2007	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Sulawesi Tenggara	64,1	68	65	68,9	65,1	69	65,3	69,2
Buton	64,9	68,8	65,3	69,2	65,3	69,2	65,6	69,6
Muna	63,1	67	63,6	67,4	63,7	67,6	63,8	67,7
Konawe	63,9	67,8	64,2	68	64,3	68,2	64,6	68,5
Kolaka	63,5	67,4	63,8	67,6	64,2	68,1	64,5	68,3
Konawe Selatan	64,2	68,1	65,1	69	65,1	69	65,3	69,2
Bombana	64,7	68,6	64,9	68,8	65	68,9	65,2	69,1
Wakatobi	64,2	68,1	65,2	69,1	65,7	69,6	65,8	69,7
Kolaka Utara	63,3	67,2	63,6	67,4	63,6	67,4	63,3	67,1
Konawe Utara					64	67,9	64,3	68,2
Kota Kendari	66,3	70,2	66,5	70,5	65,1	69	65,4	69,3
Kota Bau-Bau	66,4	70,3	67,1	71,1	66,8	70,8	67	70,9

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 dan 2006, Kerjasama BPS dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

